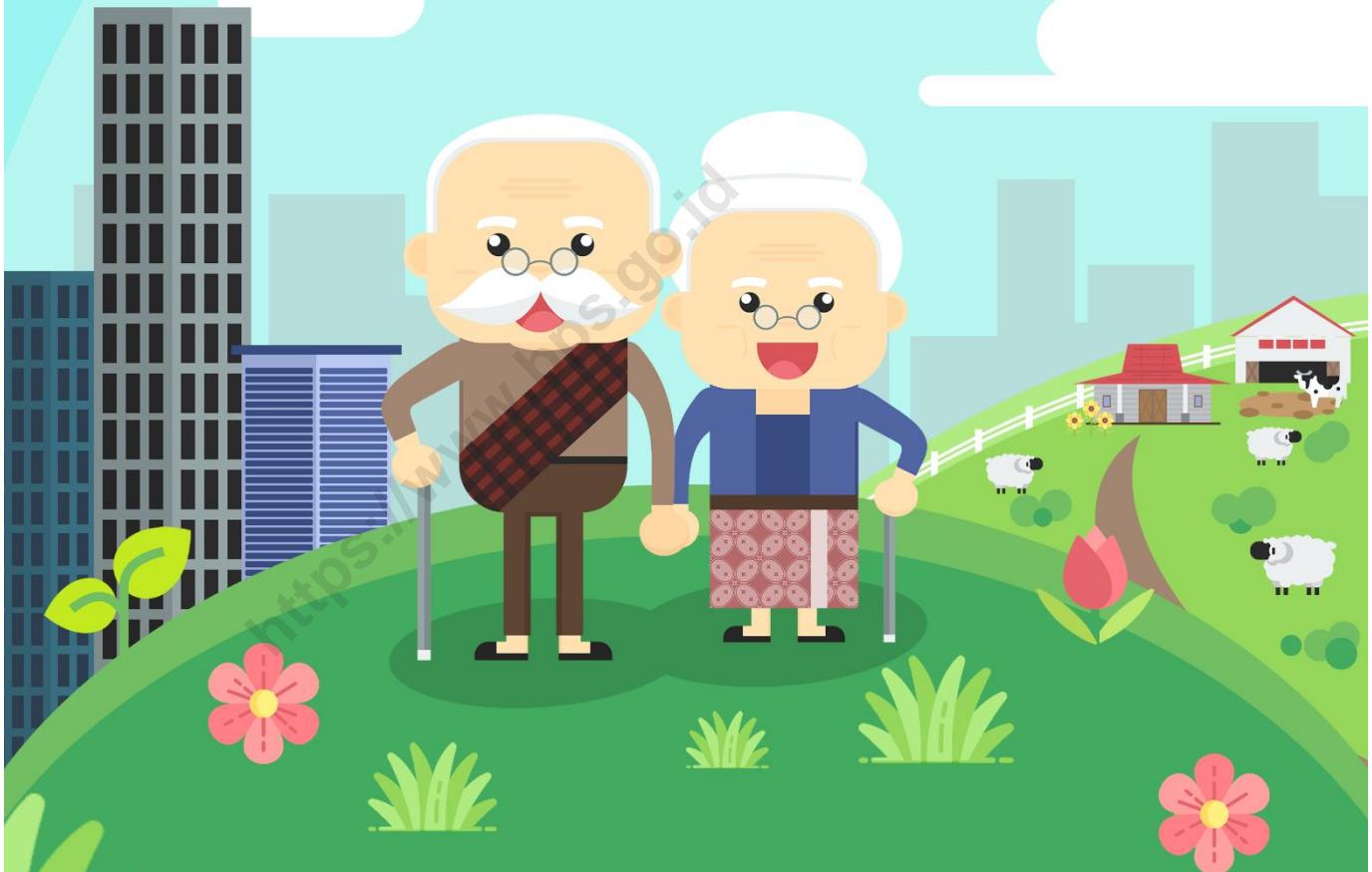




STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2017



BADAN PUSAT STATISTIK



STATISTIK PENDUDUK LANSIA 2017

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2017

ISSN : 2086-1036

Nomor Publikasi : 04220.1801

Katalog : 4104001

Ukuran Buku : 176 mm x 250 mm

Jumlah Halaman : xxvii + 258 halaman

Naskah :

Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Gambar Kulit :

Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Diterbitkan oleh :

©Badan Pusat Statistik

Dicetak Oleh:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

PENYUSUN NASKAH

Penanggung Jawab Umum : Gantjang Amannullah, M.A.

Penanggung Jawab Teknis : Wachyu Winarsih, M.Si.

Editor : Dwi Susilo, M.Si.

Ida Eridawaty Harahap, S.Si., M.Si.

Raden Sinang, S.ST., M.Si.

Penulis : Ika Maylasari, S.ST., M.Si.

Rini Sulistyowati, S.ST.

Karuniawati Dewi Ramadani, S.Si.

Linda Annisa, S.ST.

Pengolah Data : Linda Annisa, S.ST.

KATA PENGANTAR

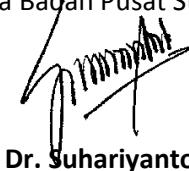
Peningkatan jumlah penduduk lansia di Indonesia merupakan salah satu “sinyal” bahwa pembangunan di negeri ini telah membawa hasil yang patut dibanggakan. Akan tetapi, di sisi lain hal ini membawa konsekuensi yang tidak sederhana. Berbagai macam tantangan akibat penuaan usia penduduk telah menyentuh berbagai aspek kehidupan. Sehingga, dibutuhkan suatu program pembangunan kelanjutusiaan yang mampu mengayomi kehidupan para lansia Indonesia. Berangkat dari fenomena ini, BPS berusaha untuk mengakomodir kebutuhan akan data kelanjutusiaan yang konkret dan komprehensif serta mewujudkannya dalam bentuk Publikasi Statistik Lanjut Usia 2017. Melalui buku ini dapat diketahui sejauh mana potensi dan sumber daya penduduk lansia di Indonesia. Publikasi ini merupakan publikasi tahunan yang memuat informasi makro mengenai kondisi demografi penduduk lansia, status pendidikan, kondisi kesehatan, potensi ekonomi, keadaan sosial, serta akses penduduk lansia terhadap berbagai fasilitas perlindungan dan pemberdayaan bagi peningkatan kualitas hidupnya. Data yang digunakan dalam publikasi ini sebagian besar berdasar pada data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2017, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2017 dan data sekunder dari Kementerian/Lembaga.

Publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik dari kalangan masyarakat, lansia dan para penggiat lansia serta pemangku kepentingan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan. Selain itu sebagai acuan untuk dapat mengoptimalkan potensi penduduk lansia sebagai bagian dari kekuatan pembangunan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya sehingga publikasi ini dapat diselesaikan. Semoga hasil karya ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya untuk dunia kelanjutusiaan Indonesia.

Jakarta, April 2018

Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suharyanto



RINGKASAN EKSEKUTIF

Transisi demografi yang terjadi secara dramatis di Indonesia telah menciptakan suatu tantangan tersendiri bagi negeri ini. Kalau pada kurun 1950-1970 kita dihadapkan pada era *baby boom*, kini peledakan penduduk lansia siap menyambut kita di depan mata. Bahkan berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010, persentase lansia Indonesia pada tahun 2035 akan mencapai 15 persen, hampir dua kali lipat jika dibandingkan kondisi tahun ini. Meningkatnya penduduk lansia membawa konsekuensi tersendiri terhadap pembangunan nasional. Di satu sisi, hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program-program terkait layanan kesehatan beserta segala turunannya. Bahkan, jika kondisi lansia sehat, tangguh dan produktif dan mampu bertahan dalam jangka waktu yang cukup panjang, Indonesia bersiap untuk menikmati bonus demografi kedua. Akan tetapi, di sisi lain menciptakan tantangan tersendiri yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, baik kesehatan, sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Dalam waktu hampir lima dekade, persentase lansia Indonesia meningkat sekitar dua kali lipat (1971-2017), yakni menjadi 8,97 persen (23,4 juta) di mana lansia perempuan sekitar satu persen lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki (9,47 persen banding 8,48 persen). Selain itu, lansia Indonesia didominasi oleh kelompok umur 60-69 tahun (lansia muda) yang persentasenya mencapai 5,65 persen dari penduduk Indonesia, sisanya diisi oleh kelompok umur 70-79 tahun (lansia madya) dan 80+ (lansia tua). Pada tahun ini sudah ada lima provinsi yang memiliki struktur penduduk tua di mana penduduk lansianya sudah mencapai 10 persen, yaitu : DI Yogyakarta (13,90 persen), Jawa Tengah (12,46 persen), Jawa Timur (12,16 persen), Bali (10,79 persen) dan Sulawesi Barat (10,37 persen).

Meningkatnya jumlah lansia pada setiap tahunnya secara otomatis memberikan pengaruh terhadap semakin banyaknya jumlah rumah tangga yang dihuni oleh lansia. Selama empat tahun terakhir, rumah tangga lansia bertambah hampir dua persen (dari 24,5 persen menjadi 26,35 persen), di mana 60 persen di antaranya menjadikan lansia sebagai kepala rumah tangga. Yang menarik dari keberadaan lansia Indonesia adalah ketersediaan dukungan potensial baik ekonomi maupun sosial yang idealnya disediakan oleh keluarga. Data Susenas 2017 menunjukkan bahwa hampir 10 persen lansia tinggal sendiri, di mana lansia perempuan 14,37 persen dan lansia laki-laki 4,75 persen. Dibutuhkan perhatian yang



cukup tinggi dari seluruh elemen masyarakat terkait hal ini, karena lansia yang tinggal sendiri membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar mereka mengingat hidup mereka lebih berisiko.

Dari aspek pendidikan, angka melek huruf (AMH) lansia terus mengalami peningkatan menjadi 78,19 persen pada tahun 2017. Kesenjangan AMH antara lansia laki-laki dan perempuan kian menyempit. Hal ini disebabkan oleh kenaikan AMH lansia perempuan yang jauh lebih besar dibandingkan lansia laki-laki. Secara umum, sebagian besar lansia berpendidikan rendah (SD/sederajat ke bawah). Hal ini dipertegas melalui rata-rata lama sekolah lansia yang nilainya sebesar 4,65 tahun atau setara dengan kelas 4 SD/sederajat. Sementara itu, akses teknologi informasi dan komunikasi sudah menjangkau lansia. Sekitar 4 dari 10 lansia menggunakan telepon seluler (HP) dalam tiga bulan terakhir. Meskipun persentase lansia yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir hanya 3 persen, angka tersebut terus mengalami kenaikan sejak tahun 2015.

Dari aspek kesehatan, hampir separuh lansia mengalami keluhan kesehatan sebulan terakhir. Angka kesakitan lansia cenderung menurun setiap tahun. Pada tahun 2017, satu dari empat lansia sakit dalam sebulan terakhir. Sebagian besar lansia sakit selama 1-7 hari. Namun persentase lansia yang sakit lebih dari 3 minggu cukup besar, yakni sekitar 14 persen. Kesadaran lansia dalam merespon keluhan kesehatan yang dideritanya cukup tinggi. Mayoritas lansia mengobati keluhan kesehatannya, baik dengan mengobati sendiri maupun berobat jalan. Mengingat kondisi kesehatan lansia yang rentan terserang penyakit, perilaku sehat seperti rajin berolahraga dan tidak merokok, perlu diterapkan. Sayangnya masih ada lansia yang punya kebiasaan merokok dan ini didominasi oleh lansia laki-laki. Hasil Susenas 2017 menunjukkan hampir seperempat lansia merokok, baik merokok elektrik maupun tembakau.

Hampir separuh lansia Indonesia (47,92 persen) masih aktif bekerja di usia senjanya. Melihat besarnya persentase tersebut, perlu ditelusuri motivasi apa yang melatarbelakangi keputusan lansia tersebut untuk bekerja. Keputusan untuk bekerja tersebut dapat merupakan bentuk aktualisasi diri lansia atau suatu keterpaksaan karena adanya desakan ekonomi. Persentase lansia bekerja lebih tinggi di perdesaan dibandingkan lansia di perkotaan (55,34 persen berbanding 40,93 persen) dan pada lansia laki-laki dibandingkan lansia perempuan (63,29 persen berbanding 33,79 persen). Sebagian besar lansia yang bekerja berpendidikan SD ke bawah (82,05 persen) dan sektor pertanian merupakan lapangan usaha yang banyak digeluti oleh lansia (55,18 persen) dengan tingkat pendapatan



paling rendah dibandingkan sektor lainnya. Melalui fakta ini, bisa dibayangkan bagaimana kualitas tenaga kerja lansia Indonesia dalam mempertahankan kualitas hidup mereka.

Sementara itu, dilihat dari stabilitas pekerjaan, sebesar 40,50 persen lansia tergolong sebagai *vulnerable employment*, yaitu mereka dengan status bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar dan berusaha sendiri. Lansia yang tergolong dalam jenis pekerjaan ini lebih rentan terhadap siklus ekonomi yang memburuk. Besarnya persentase lansia bekerja tidak didukung dengan upah yang memadai. Sebesar 51,14 persen lansia memperoleh pendapatan kurang dari 1.000.000 per bulan. Selain dari segi upah, jam kerja lansia pun memprihatinkan. Satu dari empat lansia bekerja melebihi jam kerja normal, yaitu 48 jam.

Memasuki usia senja, lansia memerlukan dukungan potensial, baik sosial maupun ekonomi. Beberapa diantaranya tergambar melalui kelayakan tempat tinggal dan status ekonomi. Dari aspek kelayakan rumah tempat tinggal, sebesar 88,56 persen lansia tinggal di rumah layak huni. Persentase ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun begitu, kondisi ini belum beriringan dengan status ekonomi mereka. Kenyataannya, lansia Indonesia masih didominasi oleh mereka yang tinggal pada rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah (43,18 persen). Bahkan, yang cukup memprihatinkan adalah lebih dari 50 persen lansia tua (80+) tinggal pada rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah.

Salah satu aktivitas lansia untuk mengisi waktu luang adalah dengan bepergian. Sebesar 17,67 persen lansia bepergian selama setahun terakhir, baik untuk tujuan silaturahmi, berlibur, berobat, dan lain-lain. Persentase bepergian ini lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di perdesaan (22,95 persen berbanding 12,47 persen) yang dapat disebabkan oleh mudahnya akses sarana transportasi di perkotaan.

Lansia pun masih mengalami tindak kejahatan. Sebesar 1,33 persen lansia mengalami tindak kejahatan selama setahun terakhir. Padahal, lansia cenderung mengalami dampak yang lebih besar dibandingkan kelompok umur lain ketika terjadi tindak kejahatan, baik dari psikis maupun fisik. Tindak kejahatan yang dialami lansia didominasi oleh tindak pencurian (88,24 persen).

Kualitas hidup lansia juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Hal ini terlihat melalui rumah tangga lansia yang membeli/menerima beras miskin (raskin)/beras sejahtera (rastra) dalam empat bulan terakhir di tahun 2017, yaitu sebesar 42,63 persen. Persentase



ini lebih sedikit/menurun dibandingkan dengan persentase tahun sebelumnya (52,38 persen). Hal ini dimungkinkan karena pada tahun 2017 program raskin/rastra bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan secara bertahap di 44 kota di Indonesia. Sedangkan rata-rata harga raskin/rastra di perdesaan sedikit lebih rendah daripada di perkotaan (2.013,67 rupiah berbanding 2.087,96 rupiah per kg).

Sebesar 12,63 persen rumah tangga lansia telah memiliki jaminan sosial. Persentase rumah tangga lansia yang memiliki jaminan sosial di perkotaan jauh lebih besar dibandingkan perdesaan (18,83 persen berbanding 6,47 persen). Hal ini dimungkinkan akses dan fasilitas yang lebih baik memudahkan lansia di perkotaan lebih mudah untuk mendapatkan jaminan sosial dibandingkan mereka yang tinggal di perdesaan.

Selama tahun 2017, rumah tangga lansia yang masih tercatat/menjadi penerima PKH yaitu sebesar 4,25 persen. Persentase rumah tangga lansia yang masih tercatat/menjadi penerima PKH di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan (5,50 persen berbanding 2,99 persen). Sementara itu, persentase rumah tangga lansia yang memiliki kartu PKH sebesar 4,46 persen, dengan persentase di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan (5,69 persen berbanding 3,22 persen).

Jaminan kesehatan belum menjangkau seluruh lansia. Sekitar tiga dari lima lansia telah memiliki jaminan kesehatan (63,24 persen). Jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh lansia adalah BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran), yaitu sebesar 33,47 persen. Sedangkan jaminan kesehatan yang paling sedikit dimiliki lansia adalah asuransi kantor (0,83 persen). Sedangkan lansia yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan sebesar 41,29 persen.

Pelayanan Kesejahteraan Lansia telah ditekankan dalam UU No. 13 Tahun 1998. Lansia memiliki hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial.

Di dalam Permensos RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lansia menyebutkan bahwa pelayanan sosial lansia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lansia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya. Pelayanan



sosial lansia ini meliputi kegiatan pelayanan dalam panti dan luar panti; perlindungan; dan pengembangan kelembagaan sosial lansia. Secara garis besar program-program pelayanan dan pemberdayaan lansia antara lain: pelayanan dalam panti, program pendampingan sosial lansia melalui perawatan di rumah (*home care*), program asistensi sosial lanjut usia telantar (ASLUT), pelayanan sosial kedaruratan bagi lansia, program *family support* lansia, *day care services*, pengembangan kawasan ramah lansia, dan program lansia tangguh.

https://www.bps.go.id



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vii
Daftar Isi	xiii
Daftar Gambar	xv
Daftar Tabel	xvii
Daftar Lampiran Tabel	xxi
Daftar Tabel <i>Sampling Error</i>	xxv
Daftar Singkatan	xxvii
BAB 1 Pendahuluan	
A. Penuaan Penduduk di Indonesia	3
B. Tantangan Utama Penuaan Penduduk	4
C. Lansia Indonesia dalam Bingkai Kebijakan	5
D. Pentingnya Data Lansia untuk Pembangunan	7
BAB 2 Demografi	
A. Struktur Umur Penduduk Lansia	11
B. Lansia dalam Rumah Tangga	15
C. Status Tinggal Bersama Lansia	17
BAB 3 Pendidikan	
A. Kemampuan Baca Tulis Lansia	23
B. Tingkat Pendidikan Lansia	26
C. Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	28
BAB 4 Kesehatan	
A. Kondisi Kesehatan Penduduk Lansia	33
B. Akses Menuju Fasilitas Kesehatan	37
C. Lansia Merokok	42



BAB 5	Ketenagakerjaan	
A.	Kesempatan Lansia untuk Bekerja	47
B.	Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan Lansia	52
C.	Jam Kerja Layak	55
D.	Pendapatan yang Mencukupi	56
BAB 6	Sosial Ekonomi	
A.	Rumah Layak bagi Lansia	63
B.	Status Ekonomi Lansia	66
C.	Lansia yang Bepergian	69
D.	Lansia Korban Kejahatan	71
BAB 7	Perlindungan Sosial	
A.	Raskin/Rastrra	75
B.	Kartu Perlindungan Sosial (KPS)	77
C.	Jaminan Sosial	78
D.	Program Keluarga Harapan (PKH)	80
E.	Kredit Pengembangan Usaha	82
F.	Jaminan Kesehatan	83
BAB 8	Program Pro Lansia	
A.	Kebijakan Umum Pelayanan Kesejahteraan Lansia	90
B.	Program-program Pelayanan Lansia	91
Daftar Pustaka		101
Catatan Teknis		107
Lampiran Tabel		117
Penghitungan <i>Sampling Error</i>		213



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.1	Persentase Penduduk Lansia dan Balita, 1971-2035	3
2.1	Piramida Penduduk Indonesia, Tahun 1971, 2000, 2017	11
2.2	Distribusi Penduduk Lansia Indonesia, 2017	12
2.3	Lima Provinsi dengan Struktur Penduduk Tua di Indonesia, 2017	14
2.4	Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia Indonesia, 2010-2017	15
2.5	Persentase Penduduk Lansia yang Menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT), 2017	16
3.1	Angka Melek Huruf Penduduk Lansia, 2008-2017	23
3.2	Angka Melek Huruf Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2017	24
3.3	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2017	27
3.4	Persentase Penduduk Lansia yang Mengakses Internet, 2015-2017	29
3.5	Persentase Penduduk Lansia yang Mengakses Internet Menurut Media Akses, 2017	30
4.1	Angka Kesakitan Penduduk Lansia, 2015-2017	34
4.2	Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2017	35
4.3	Rata-rata Lama Sakit Penduduk Lansia (hari) Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2017	35
4.4	Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Parah, 2017	37
4.5	Persentase Penduduk Lansia yang Tidak Berobat Jalan Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2017	40
4.6	Persentase Penduduk Lansia yang Merokok Sebulan Terakhir, 2017	42
4.7	Persentase Penduduk Lansia yang Pernah Merokok Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2017	44



Gambar	Judul	Halaman
5.1	Persentase Penduduk Lansia Menurut Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2017	48
5.2	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2017	50
5.3	Distribusi Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2017	51
5.4	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Status dalam Rumah Tangga, 2017	51
5.5	Rata-rata Jumlah Jam Kerja (dalam jam) Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2017	56
5.6	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja dengan Upah Rendah, 2017	58
5.7	Rata-rata Besarnya Upah/Gaji/Pendapatan (ribuan rupiah) Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2017	58
6.1	Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni, 2013-2017	64
6.2	Persentase Penduduk Lansia Menurut Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga, 2017	66
6.3	Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Sumber Pembiayaan Terbesar Rumah Tangga, 2017	68
6.4	Persentase Rumah Tangga Lansia dengan Lansia sebagai Penanggung Pembiayaan Terbesar, 2017	69
6.5	Persentase Penduduk Lansia yang Bepergian Setahun Terakhir, 2017	70
6.6	Persentase Penduduk Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahanatan Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahanatan, 2017	72
7.1	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Kartu Perlindungan Sosial atau Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/KKS), 2017	78
7.2	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Kartu PKH, 2017	81



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1	Persentase Penduduk Lansia Menurut Kelompok Umur, 2017	13
2.2	Persentase Lansia Menurut Status Perkawinan, 2017	18
2.3	Persentase Lansia Menurut Status Tinggal Bersama, 2017	19
3.1	Persentase Penduduk Lansia Menurut Kemampuan Baca Tulis, 2017	25
3.2	Persentase Penduduk Lansia Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Rata-rata Lama Sekolah (tahun), 2017	26
3.3	Persentase Penduduk Lansia Menurut Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2017	28
4.1	Persentase Penduduk Lansia Menurut Kondisi Kesehatan Sebulan Terakhir, 2017	34
4.2	Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Menurut Lamanya Sakit, 2017	36
4.3	Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Tindakan Pengobatan, 2017	38
4.4	Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, 2017	39
4.5	Persentase Penduduk Lansia yang Pernah Rawat Inap Setahun Terakhir Menurut Tempat Rawat Inap, 2017	41
4.6	Persentase Penduduk Lansia Menurut Kebiasaan Merokok Sebulan Terakhir, 2017	43
5.1	Persentase Penduduk Lansia Menurut Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2017	49
5.2	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2017	52



Tabel	Judul	Halaman
5.3	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2017	53
5.4	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Penggolongan Pekerjaan, 2017	54
5.5	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu, 2017	55
5.6	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Upah/Gaji/Pendapatan dalam Sebulan, 2017	57
6.1	Persentase Penduduk Lansia Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2017	64
6.2	Persentase Penduduk Lansia Menurut Status Kelayakan Rumah, 2017	65
6.3	Persentase Penduduk Lansia Menurut Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga, 2017	67
6.4	Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga dan Sumber Pembiayaan Terbesar Rumah Tangga, 2017	68
6.5	Persentase Penduduk Lansia yang Bepergian Setahun Terakhir, 2017	70
6.6	Persentase Penduduk Lansia yang Menjadi Korban Kejahatan Setahun Terakhir, 2017	71
7.1	Karakteristik Penyaluran Bantuan Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) kepada Rumah Tangga Lansia, 2017	76
7.2	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Tipe Daerah, 2017	79
7.3	Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Kelompok Pengeluaran dan Kepemilikan Jaminan Sosial, 2017	80
7.4	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat/Menjadi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 2017	81
7.5	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Kredit Pengembangan Usaha Menurut Tipe Daerah, 2017	82
7.6	Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan, 2017	83



Tabel	Judul	Halaman
7.7	Persentase Penduduk Lansia yang Menggunakan Jaminan Kesehatan, 2017	84
8.1	Jumlah Penduduk Lansia Penerima Program <i>Home Care</i> , 2017	92
8.2	Jumlah Penduduk Lansia Penerima Program <i>Family Support</i> , 2017	95

https://www.bps.go.id



DAFTAR LAMPIRAN TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1.1-2.1.5	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2017	117-121
2.2	Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017	122
2.3	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2017	123
2.4	Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2017	124
2.5.1-2.5.5	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2017	125-129
2.6.1-2.6.5	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2017	130-134
2.7.1-2.7.5	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2017	135-139
3.1	Angka Melek Huruf Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2017	140
3.2.1-3.2.5	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2017	141-145
3.3	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Lansia (tahun) Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2017	146
3.4	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Lansia (tahun) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2017	147
3.5	Persentase Penduduk Lansia yang Mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Provinsi, 2017	148
3.6	Persentase Penduduk Lansia yang Mengakses Internet Menurut Provinsi dan Media Akses, 2017	149



Tabel	Judul	Halaman
4.1	Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2017	150
4.2	Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2017	151
4.3	Rata-rata Lama Sakit Penduduk Lansia (hari) Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2017	152
4.4	Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, 2017	153
4.5	Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Parah Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2017	154
4.6	Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Mengobati Sendiri Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2017	155
4.7	Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Berobat Jalan Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2017	156
4.8	Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan Menurut Provinsi dan Tempat Berobat, 2017	157
4.9	Persentase Penduduk Lansia yang Tidak Berobat Jalan Menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2017	158
4.10	Persentase Penduduk Lansia yang Pernah Dirawat Inap Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2017	159
4.11	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Kebiasaan Merokok, 2017	160
5.1.1-5.1.5	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2017	161-165
5.2	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2017	166
5.3	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2017	167



Tabel	Judul	Halaman
5.4	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama, 2017	168
5.5	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, 2017	169
5.6	Rata-rata dan Persentase Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu dari Penduduk Lansia Bekerja Menurut Provinsi, 2017	170
5.7	Rata-rata dan Persentase Pendapatan/Upah/Gaji dari Penduduk Lansia Bekerja Menurut Provinsi, 2017	171
6.1.1-6.1.5	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2017	172-176
6.2.1-6.2.5	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal, 2017	177-181
6.3.1-6.3.5	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Ekonomi Rumah Tangga, 2017	182-186
6.4	Persentase Penduduk Lansia yang Pernah Bepergian dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2017	187
6.5	Persentase Penduduk Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017	188
7.1	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Membeli/Menerima Beras Miskin (Raskin)/Rastra Dalam Empat Bulan Terakhir, 2017	189
7.2	Rata-rata Banyaknya (kg) Beras Miskin yang Diterima/Dibeli Rumah Tangga Lansia perbulan Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017	190
7.3	Rata-rata Harga per kg (rupiah) Beras Miskin yang Dibeli/Diterima Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017	191
7.4.1-7.4.3	Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Kepemilikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 2017	192-194
7.5	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki/Menerima Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Sosial, 2017	195



Tabel	Judul	Halaman
7.6	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki/Menerima Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Sosial, 2017	196
7.7	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Pernah Menjadi Penerima PKH Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017	197
7.8.1-7.8.3	Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Kepemilikan Kartu PKH, 2017	198-200
7.9.1-7.9.3	Persentase Rumah Tangga Lansia Masih Tercatat/Menjadi Penerima PKH Menurut Provinsi, 2017	201-203
7.10	Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017	204
7.11	Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2017	205
7..12	Persentase Penduduk Lansia yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017	206
7.13	Persentase Penduduk Lansia yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2017	207
8.1	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Menurut Provinsi, 2017	208
8.2	Jumlah Penerima Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2017	209



DAFTAR TABEL *SAMPLING ERROR*

Tabel	Judul	Halaman
A.1-A.5	Sampling error Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017	215-219
B.1-B.3	Sampling error Persentase Rumah Tangga Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Tipe Dearah, 2017	220-222
C.1-C.5	Sampling error Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal Sendiri menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017	223-227
D.1-D.5	Sampling error Rata-rata Lama Sekolah dari Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017	228-232
E.1-E.5	Sampling error Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017	233-237
F.1-F.5	Sampling Error Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Bekerja Menurut Provinsi, 2017	238-242
G.1-G.5	Sampling error Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal di Rumah Tangga Ekonomi Bawah menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017	243-247
H.1-H.3	Sampling error Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Beras Sejahtera (Rastra) menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017	248-250
I.1-I.3	Sampling error Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017	251-253
J.1-J.5	Sampling error Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017	254-258



DAFTAR SINGKATAN

1. ART: Anggota Rumah Tangga
2. ASKESKIN: Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin
3. ASLUT: Asistensi Sosial Lanjut Usia
4. BPS: Badan Pusat Statistik
5. Jamkesda: Jaminan Kesehatan Daerah
6. Jamkesmas: Jaminan Kesehatan Masyarakat
7. JSLU: Program Jaminan Sosial Lanjut Usia
8. KRT: Kepala Rumah Tangga
9. KUR: Kredit Usaha Rakyat
10. Lansia: Lanjut usia
11. MA: Madrasah Aliyah
12. MI: Madrasah Ibtidaiyah
13. MTs: Madrasah Tsanawiyah
14. PT: Perguruan Tinggi
15. Pustu: Puskesmas Pembantu
16. Raskin: Beras untuk Masyarakat Miskin
17. RTS: Rumah Tangga Sasaran
18. Sakernas: Survei Angkatan Kerja Nasional
19. SD: Sekolah Dasar
20. SDM: Sumber Daya Manusia
21. SMA: Sekolah Menengah Atas
22. SMP: Sekolah Menengah Pertama
23. SMK: Sekolah Menengah Kejuruan
24. Susenas: Survei Sosial Ekonomi Nasional
25. TPAK: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
26. UEP: Usaha Ekonomi Produktif
27. UKBM: Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
28. UU: Undang-undang



BAB 01

PENDAHULUAN



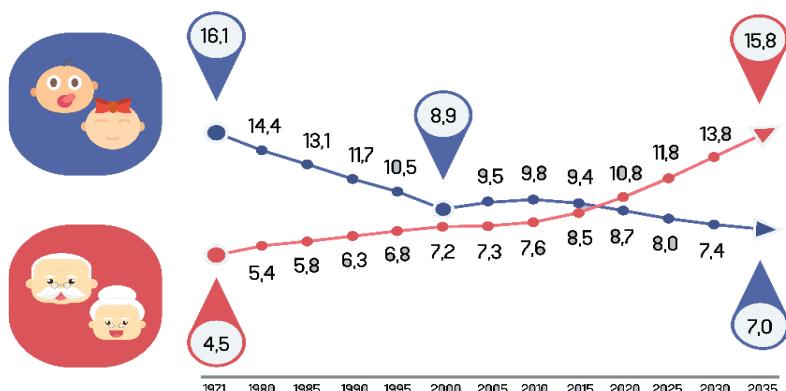
Lahir, mati, dan berpindahnya penduduk merupakan hal wajar yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi, pernahkah kita menyadari bahwa hal-hal yang sejatinya kita anggap sederhana karena biasa terjadi mampu menggerakkan struktur penduduk negeri ini? Inilah yang kita kenal dengan transisi demografi, suatu peristiwa yang memuat terjadinya perubahan kematian dan kelahiran yang berdampak pada pergeseran struktur umur penduduk dan mampu berpengaruh secara signifikan terhadap dinamika kependudukan.

**Percentase
balita semakin
menurun,
percentase
lansia semakin
meningkat**

A. Penuaan Penduduk di Indonesia

Disadari atau tidak, peran pemerintah bersama masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program Keluarga Berencana yang diawali pada tahun 1970-an telah memberikan kontribusi positif terhadap penurunan tingkat fertilitas. Hal ini juga diiringi dengan pelaksanaan program-program pelayanan kesehatan yang memberikan pengaruh terhadap membaiknya tingkat kesehatan masyarakat, ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup penduduk. Hasilnya, sebagaimana yang kita saksikan saat ini, di mana fase *baby boom* mulai mereda, ditandai dengan mulai menurunnya persentase balita dan diikuti dengan semakin meningkatnya persentase lansia (Gambar 1.1).

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Lansia dan Balita, 1971-2035



Sumber : BPS, SP 1971, 1980, 1990, 2000, 2010
BPS, SUPAS 1985, 1995, 2005
BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia (2015 – 2035)



Gambar 1.1 memperlihatkan persentase penduduk lansia yang terus mengalami peningkatan dan jika dibandingkan dengan kondisi saat ini besarnya akan mencapai hampir dua kali lipat pada tahun 2035. Bahkan, menurut Adioetomo dalam Howell dan Priebe (2013) persentase lansia Indonesia diperkirakan akan mencapai 23 persen pada tahun 2050. Selain itu, kurang dari lima tahun terhitung dari sekarang, Indonesia bersiap menghadapi penuaan penduduk yang ditandai dengan persentase penduduk lansia yang mencapai 10 persen, dimana menurut proyeksi UN (revisi 2017), persentase penduduk lansia Indonesia akan mencapai 10 persen pada tahun 2021. Di Indonesia, sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

B. Tantangan Utama Penuaan Penduduk

Meningkatnya penduduk lansia membawa konsekuensi tersendiri terhadap pembangunan nasional. Di satu sisi, hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program-program terkait layanan kesehatan beserta segala turunannya. Bahkan, jika kondisi lansia sehat, tangguh dan produktif serta mampu bertahan dalam jangka waktu yang cukup panjang, Indonesia bersiap untuk menikmati bonus demografi kedua. Akan tetapi, di sisi lain menciptakan tantangan tersendiri yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, baik kesehatan, sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Hal ini terkait dengan produktivitas lansia yang cenderung menurun seiring dengan bertambahnya umur sehingga berimplikasi terhadap meningkatnya beban penduduk usia produktif dalam menanggung kebutuhan hidup para penduduk usia non produktif (lansia dan anak). Kondisi ini semakin diperparah dengan masih rendahnya tingkat pendidikan lansia Indonesia. Di sinilah muncul para “*sandwich generation*”, yaitu mereka yang hidupnya terjepit di antara dua generasi dan masih menanggung beban untuk memikirkan kehidupan generasi lainnya, sehingga terkadang

Penuaan
penduduk
berdampak di
segala aspek,
baik kesehatan,
sosial, ekonomi,
maupun
lingkungan



kebutuhan untuk berinvestasi terhadap diri mereka sendiri pun kadang terabaikan.

Sementara itu, dari sisi kesehatan, lansia juga mengalami penurunan fungsi anatomi tubuh dan kekebalan tubuh dalam menangkal segala jenis penyakit. Bahkan, saat ini prevalensi penyakit tidak menular pada lansia makin meningkat juga akan berdampak terhadap menurunnya fungsi kognitif dan membutuhkan biaya pengobatan yang cukup tinggi. Kondisi kesehatan lansia yang tidak prima membutuhkan perhatian khusus dari negara. Di saat tidak ada tempat bagi mereka untuk “mengadu”, siapa lagi kalau bukan negara yang menanggung kondisi ini.

Selain kondisi di atas, tantangan kehidupan lansia juga menyentuh elemen masyarakat lainnya, seperti keluarga dan masyarakat, apalagi ketika bangsa ini mengalami pergeseran struktur keluarga, dari keluarga besar (*extended family*) menjadi keluarga inti/batih (*nuclear family*). Hal ini akan berdampak terhadap ketersediaan dukungan baik sosial maupun ekonomi terhadap penopang kebutuhan hidup lansia.

Permasalahan lansia sendiri, sesungguhnya bukan terjadi pada satu titik waktu tertentu, tetapi merupakan suatu siklus hidup manusia yang dapat disikapi sejak masa kandungan dan fase hidup selanjutnya karena bagaimana kondisi lansia di hari ini ditentukan oleh pola hidup mereka di masa lalu (Satariano, 2006).

C. Lansia Indonesia Dalam Bingkai Kebijakan

Perhatian pemerintah terhadap kehidupan para lansia Indonesia sudah dilakukan sejak masa Orde Lama melalui UU No 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo. Kemudian, seiring berjalannya waktu kebijakan tersebut dirasa kurang sesuai dengan kondisi lansia Indonesia pada periode 1990-an. Oleh karena itu, Undang-undang yang telah terbentuk sebelumnya dicabut dan diganti dengan UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Di masa Orde Baru tersebut juga (tahun 1996) mulai dicetuskannya Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang diperingati setiap tanggal 29



Mei sebagai bentuk penghargaan terhadap keberadaan kaum lansia Indonesia.

Kini, di masa pemerintahan Kabinet Kerja (2015-2019) juga turut memuat agenda yang memperhatikan masalah kelanjutusiaan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dengan memerhatikan dua hal pokok, yaitu: peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas, serta penguatan skema perlindungan sosial bagi lansia. Hal ini sejalan dengan sasaran dan target dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang secara langsung maupun tidak langsung telah menempatkan lansia menjadi subjek sekaligus objek dari pembangunan.

Selain itu, sejalan dengan apa yang tertera pada Nawacita butir ke lima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, pemerintah beserta Kementerian/Lembaga terkait kelanjutusiaan juga sedang menyiapkan rancangan Strategi Nasional (Stranas) Kelanjutusiaan 2018-2025. Dalam dokumen Stranas Kelanjutusiaan 2018-2025 tersebut memuat lima hal pokok yang perlu menjadi perhatian, yaitu: pembangunan masyarakat dan SDM kelanjutusiaan, penguatan institusi pelaksana kelanjutusiaan, perlindungan sosial, jaminan pendapatan dan kapasitas individu, peningkatan derajat kesehatan lansia, dan perlindungan pemenuhan dan penghormatan terhadap hak lansia.

Semakin banyaknya perhatian yang tercurah terkait kelanjutusiaan diharapkan menelurkan regulasi yang terarah, terstruktur dan komprehensif serta mampu memayungi para lansia agar mereka mampu menjadi lansia yang mandiri, bermartabat dan produktif. Sehingga dengan begitu kehadiran lansia tidak lagi dipandang sebelah mata, akan tetapi mampu memberikan rasa keadilan yang proporsional.

**Kelanjutusiaan
dalam RPJMN
2015-2019:
Peningkatan
Pemenuhan Hak
Dasar dan
Inklusivitas,
Serta Penguatan
Skema
Perlindungan
Sosial**



D. Pentingnya Data Lansia untuk Pembangunan

Data Lansia untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Mengingat keberadaan lansia Indonesia yang persentasenya kian meningkat dari waktu ke waktu dan telah menciptakan tantangan tersendiri, maka dibutuhkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lansia serta mempertimbangkan segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan data dan informasi terkait kelanjutusiaan, baik pada tingkat nasional maupun regional mutlak dibutuhkan untuk memetakan situasi dan kondisi terkini lansia Indonesia. Untuk menyikapi kondisi ini, BPS telah melakukan penyusunan informasi terkait lansia dan mengemasnya menjadi suatu bentuk buku publikasi "Statistik Lanjut Usia 2017". Publikasi tersebut memuat informasi lansia yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu : demografis, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial ekonomi, dan perlindungan sosial serta program-program pro lansia yang sudah dijalankan oleh pemerintah.

Secara keseluruhan, publikasi ini menyajikan data dan informasi tentang lansia yang sangat bermanfaat sebagai bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang kelanjutusiaan berdasarkan data yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, Survei Angkatan kerja Nasional (Sakernas) 2017, serta data sekunder dari Kementerian/Lembaga.

Selain itu, publikasi ini juga disusun secara sistematis menjadi delapan bagian dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang mampu menggambarkan kehidupan lansia Indonesia serta berbagai fenomena yang menyertainya. Ringkasan eksekutif di bagian awal publikasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas dari keseluruhan isi publikasi. Uraian yang rinci disajikan dalam bab-bab sesuai tema bahasan dari publikasi. Bagian pertama (Bab 1) menyajikan bagaimana perjalanan penuaan penduduk Indonesia dari waktu ke waktu beserta tantangan yang akan dihadapinya. Selanjutnya, bagaimana potret lansia Indonesia dari sudut pandang demografi dijabarkan secara komprehensif pada Bab 2. Lansia juga memiliki potensi yang dapat diberdayakan guna menunjang

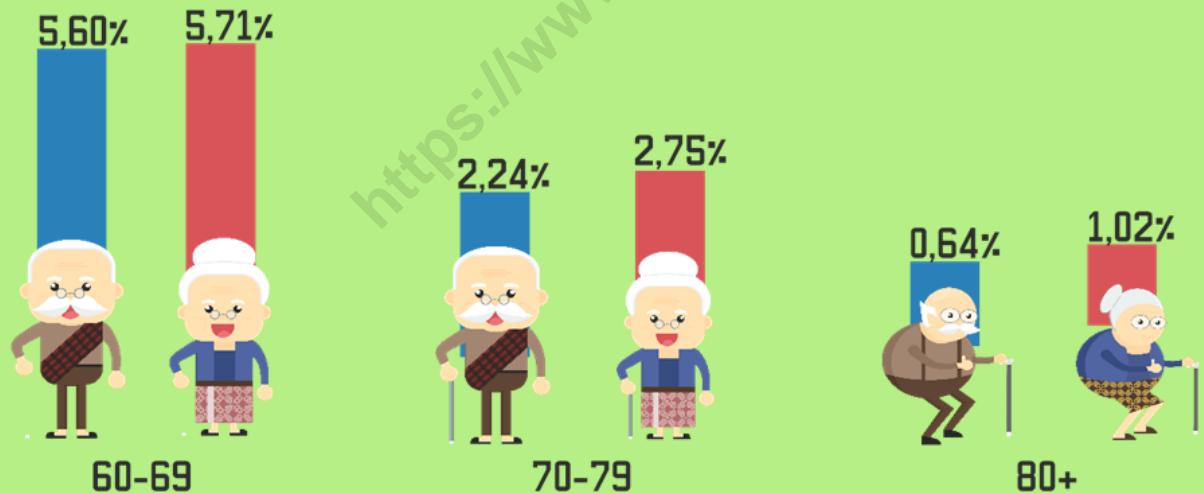


pembangunan nasional. hal ini dikupas tuntas pada Bab 3 dan Bab 4, masing-masing untuk melihat sejauh mana tingkat pendidikan dan kesehatan lansia. Sementara itu, untuk mengukur keterlibatan lansia secara nyata dalam menggerakkan perekonomian negeri ini dapat dilihat pada Bab 5. Kondisi sosial ekonomi rumah tangga lansia juga tidak luput dari perhatian penulisan publikasi ini, di mana fakta-fakta yang ada dijabarkan pada Bab 6. Selanjutnya, program-program yang sudah diterima oleh rumah tangga lansia digambarkan pada Bab 7 dan Bab 8 menjelaskan sudah sejauh mana para Kementerian/Lembaga sudah menjalankan program pro lansia. Sebagai penutup dari penulisan buku ini ditampilkan catatan teknis yang mampu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan buku ini serta *Relative Standard Error (RSE)* yang menggambarkan rentang kesalahan data hasil survei yang digunakan dalam publikasi ini.

Sebagai penutup, pada akhir publikasi tersedia catatan teknis untuk menjembatani dan menambah pemahaman mengenai istilah dan konsep definisi yang digunakan beserta daftar penghitungan *Relative Standard Error (RSE)* yang menggambarkan rentang kesalahan data hasil survei yang digunakan dalam publikasi ini.



Terdapat **8,97 % (23,4 juta)** Lansia di Indonesia



**Persentase Lansia Perempuan Lebih banyak
daripada Lansia laki-laki**

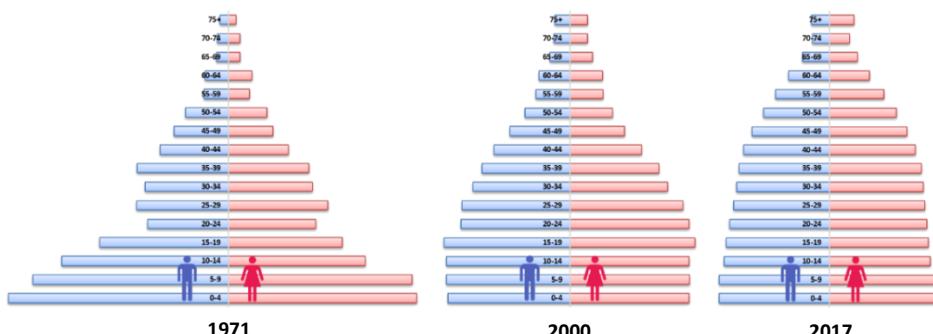
Sejatinya, menjadi tua pada sebagian orang merupakan suatu kebanggaan tersendiri ketika mereka bisa mencapai tahapan puncak dari siklus perjalanan hidup seorang manusia. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa lanjut usia merupakan usia emas mengingat tidak semua manusia dapat mencapainya dan menjalani proses penuaan tersebut. Secara fisik, proses menua adalah menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita (Nugroho, 2000). Proses ini merupakan bagian dari siklus kehidupan manusia yang antar fasanya saling berkaitan, karena bagaimana keadaan lansia dalam menikmati masa tuanya ditentukan oleh pola hidup mereka di masa lalu.

Transisi demografi telah mengubah wajah Indonesia

A. Struktur Umur Penduduk Lansia

Pesatnya peningkatan lansia Indonesia saat ini merupakan hasil dari suatu proses dinamika kependudukan yang tidak terjadi dalam sekejap mata saja. Akan tetapi melalui perjalanan panjang sebuah transisi demografi yang dimulai pada awal 1900-an dan masih berlangsung hingga saat ini menuju angka kematian dan kelahiran yang relatif stabil. Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 2.1, selama kurun waktu 1971-2017 terlihat bagaimana struktur umur penduduk negeri ini terus mengalami perubahan dan bergeser menuju usia lanjut. Mereka yang dulu terlahir pada era *baby boom*, mulai bergeser menjadi penduduk produktif, dan nantinya akan menjadi penduduk lansia.

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Indonesia, Tahun 1971, 2000, 2017



Sumber : SP 1971, SP 2000 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2017



Dalam waktu hampir lima dekade, persentase lansia Indonesia meningkat sekitar dua kali lipat (1971-2017), yakni menjadi 8,97 persen (23 juta-an) di mana lansia perempuan sekitar satu persen lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki (9,47 persen banding 8,48 persen). Selain itu, lansia Indonesia didominasi oleh kelompok umur 60-69 tahun (lansia muda) yang persentasenya mencapai 5,65 persen dari penduduk Indonesia, sisanya diisi oleh kelompok umur 70-79 tahun (lansia madya) dan 80+ (lansia tua), sebagaimana yang tercantum pada Tabel 2.1.

Pola serupa juga terjadi jika kita melihat distribusi penduduk lansia menurut karakteristik demografi yang mereka miliki, baik jenis kelamin, tipe daerah maupun kelompok umur sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 2.2, dimana lansia Indonesia didominasi oleh lansia perempuan, tinggal di perdesaan dan berada pada kelompok umur lansia muda (60-69 tahun).

Gambar 2.2 Distribusi Penduduk Lansia Indonesia, 2017



Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Menjadi lansia artinya menduduki puncak dari siklus hidup manusia dan setiap fase di dalamnya bagaikan rantai kehidupan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, keadaan lansia saat ini ditentukan bagaimana kehidupan mereka di masa lalu. Mempersiapkan pra



lansia untuk menyongsong masa tua dengan tangguh dan produktif perlu dilakukan sejak dini dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan agar 16 persen pra lansia Indonesia di tahun 2017 ini tetap memiliki kesehatan prima dan produktivitas tinggi yang dapat diandalkan sebagai bagian dari aset bangsa dalam menggerakkan geliat ekonomi negeri ini.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Kelompok Umur, 2017

Karakteristik Demografi	Kelompok Umur				
	Pra Lansia (45-59)	Lansia Muda (60-69)	Lansia Madya (70-79)	Lansia Tua (80+)	Lansia (60+)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tipe Daerah					
Perkotaan	16,60	5,37	2,30	0,73	8,41
Perdesaan	16,70	5,97	2,72	0,93	9,61
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	16,55	5,60	2,24	0,64	8,48
Perempuan	16,74	5,71	2,75	1,02	9,47
Total	16,65	5,65	2,49	0,83	8,97

Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Perlu mempersiapkan 16 persen pra lansia Indonesia menuju lansia sehat dan produktif

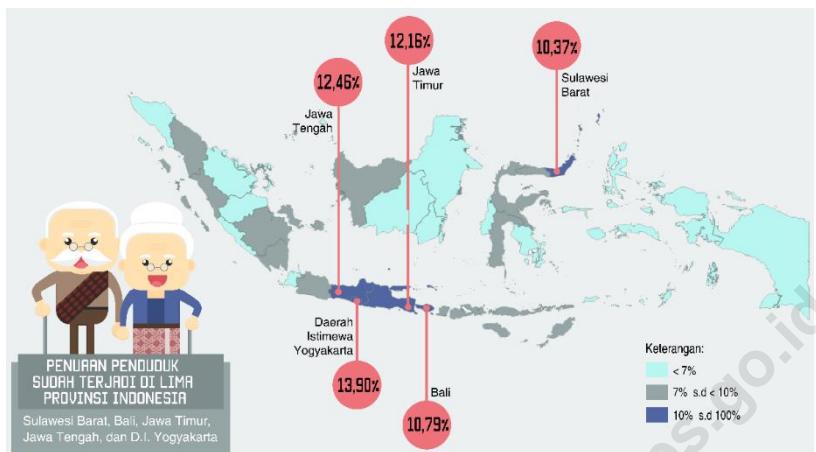
Berdasarkan fakta yang tersedia, bisa dibayangkan bagaimana struktur penduduk negeri ini dalam satu atau bahkan dua dekade ke depan. Sinyal mengenai penuaan penduduk di Indonesia sudah terdeteksi sejak tahun 2000, dimana hasil Sensus Penduduk pada tahun tersebut menunjukkan bahwa persentase lansia Indonesia sudah melebihi 7 persen. Suatu wilayah dikatakan memiliki struktur penduduk menua, jika persentase lansia lebih dari 7 persen dan akan menjadi struktur penduduk tua jika melebihi 10 persen.

Fenomena ini tergambar nyata dalam perjalanan transisi demografi negeri ini, dimana hanya dalam dua dekade saja (2000-2021), struktur umur penduduk akan bergeser dari struktur menua menjadi penduduk tua. Jika saat itu tiba, tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak ditemui penduduk lansia dibandingkan penduduk balita. Untuk tahun 2017 saja, fenomena ini sudah terlihat



berdasarkan komposisi penduduk Indonesia, di mana persentase lansia sedikit lebih tinggi dibandingkan balita (8,97 persen banding 8,95 persen).

Gambar 2.3 Lima Provinsi dengan Struktur Penduduk Tua di Indonesia, 2017



Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Berdasarkan proyeksi penduduk hasil SP 2010, Indonesia baru akan mencapai struktur penduduk tua setelah tahun 2020, akan tetapi beberapa provinsi di Indonesia ternyata sudah mencapai struktur tersebut. Hasil Susenas 2017 menunjukkan bahwa terdapat lima provinsi dengan persentase lansia lebih dari sepuluh persen, yaitu : DI Yogyakarta (13,90 persen), Jawa Tengah (12,46 persen), Jawa Timur (12,16 persen), Bali (10,79 persen) dan Sulawesi Barat (10,37 persen), sebagaimana yang tersaji pada Gambar 2.3.

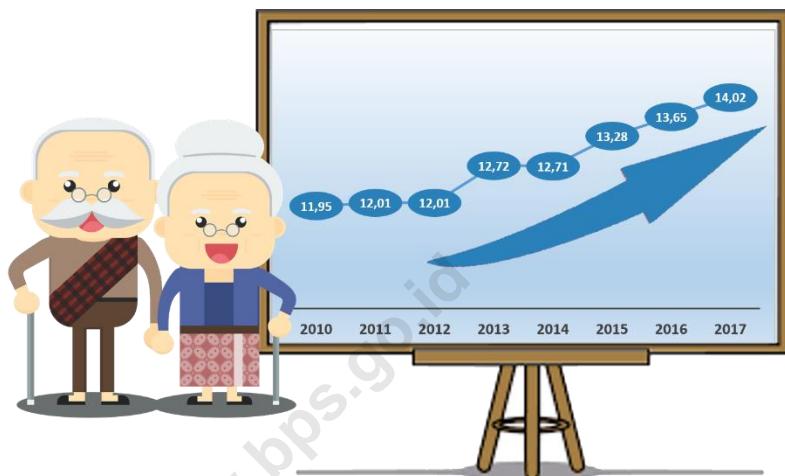
Persentase lansia yang kian meningkat setiap tahunnya berimplikasi tidak hanya pada kehidupan lansia semata, akan tetapi memberikan dampak terhadap kehidupan generasi lainnya. Mereka yang berada pada kelompok usia produktif (15-59 tahun) ikut menanggung kehidupan para lansia yang sudah tidak berkontribusi aktif secara ekonomi. Hal ini tergambar melalui rasio ketergantungan lansia yang persentasenya cenderung merangkak naik setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya persentase lansia. Pada tahun 2017, rasio ketergantungan lansia cenderung mengalami peningkatan

Lima provinsi di Indonesia sudah memasuki struktur penduduk tua, tiga di antaranya terdapat di Pulau Jawa



selama satu windu terakhir menjadi 14,02 yang artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 14 orang penduduk lansia (Gambar 2.4).

Gambar 2.4 Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia Indonesia, 2010-2017



Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Hal ini mengindikasikan bahwa penuaan penduduk bukanlah masalah remeh, perkara seseorang menjadi tua saja, akan tetapi membutuhkan adanya perhatian dari semua pihak agar pemberdayaan lansia benar-benar dapat diwujudkan. Ketika mereka berdaya, beban generasi lain akan sedikit berkurang dan mewujudkan Indonesia jaya bukan hanya sekedar jargon semata.

B. Lansia dalam Rumah Tangga

Satu dari empat rumah tangga di Indonesia merupakan rumah tangga lansia

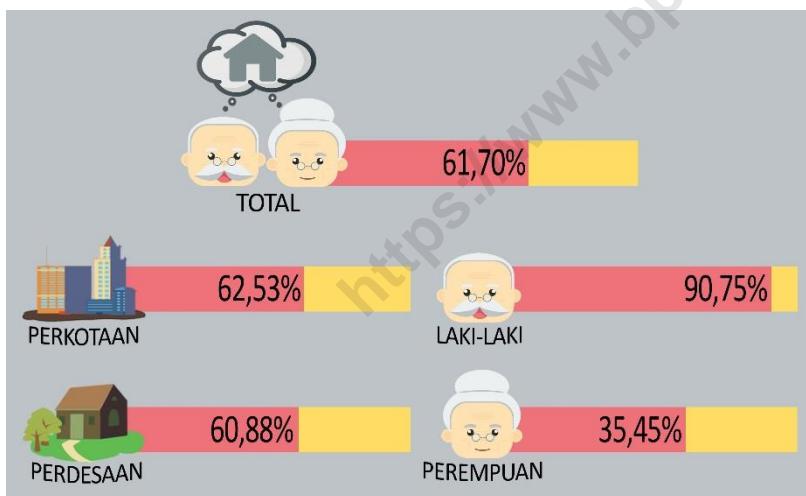
Meningkatnya jumlah lansia pada setiap tahunnya secara otomatis memberikan pengaruh terhadap semakin banyaknya jumlah rumah tangga yang dihuni oleh lansia. Selama empat tahun terakhir, rumah tangga lansia bertambah hampir dua persen (dari 24,5 persen menjadi 26,35 persen). Sehingga, dapat dikatakan bahwa diantara empat rumah tangga di Indonesia, satu di antaranya merupakan rumah tangga lansia. Jika melihat proyeksi penduduk lansia yang terus bertambah, tidak menutup kemungkinan jumlah ini akan terus meningkat dan kebutuhan akan dukungan yang berasal dari



lingkungan tempat tinggal, baik keluarga maupun masyarakat terhadap kehidupan lansia juga semakin tinggi.

Sebagai bagian dari penduduk Indonesia, terlepas apakah mereka produktif atau tidak, keberadaan lansia masih memegang andil penting, apalagi dalam kehidupan berumah tangga. Beberapa diantara mereka, ada yang masih dipercaya dan mengembangkan amanah sebagai kepala rumah tangga (KRT) untuk bertanggung jawab secara sosial maupun ekonomi terhadap kesejahteraan anggota rumah tangga yang tinggal bersama mereka. Kepala rumah tangga (KRT) merupakan pucuk pimpinan tertinggi dalam suatu struktur rumah tangga, dan 60 persen lebih rumah tangga lansia menjadikan lansia sebagai kepala rumah tangga (Gambar 2.5)

Gambar 2.5 Persentase Penduduk Lansia yang Menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT), 2017



Satu dari tiga
lansia
perempuan
menjadi kepala
rumah tangga

Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Keberadaan lansia sebagai kepala rumah tangga sebenarnya merupakan bagian dari pemberdayaan kehidupan mereka, di mana pada adat ketimuran yang selama ini dianut oleh bangsa Indonesia, menjadikan para lansia sebagai kepala rumah tangga merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan akan tingginya pengalaman hidup dan nilai-nilai kebijakan yang dimiliki lansia. Hal ini ditambah



dengan sistem budaya patrilineal yang masih melekat di mana sembilan dari sepuluh lansia laki-laki menjadi kepala rumah tangga.

Yang menarik dari fenomena ini yaitu keberadaan lansia perempuan yang mengemban tanggung jawab sebagai KRT, di mana persentasenya mencapai 35,45 persen. Jika dikaitkan dengan kehidupan lansia perempuan di masa lalu yang akrab dengan isu diskriminasi gender dan banyak berputar pada hal domestik serta minim akan bekal pendidikan maupun pengetahuan yang mumpuni, hal ini bukanlah perkara mudah. Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa rumah tangga yang dikepalai oleh lansia perempuan cenderung memiliki status ekonomi yang relatif rendah.

C. Status Tinggal Bersama Lansia

Status perkawinan lansia dan status tinggal bersama berkaitan dengan ketersediaan dukungan potensial pada lansia

Semakin bertambah umur lansia, maka fungsi anatomi tubuh akan mengalami penurunan yang akan diiringi dengan semakin lemahnya daya tahan tubuh dalam menangkal berbagai macam penyakit. Dalam kondisi ini, lansia membutuhkan adanya dukungan potensial yang berasal dari lingkungan terdekat. Selain pemerintah, keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat dirasa mampu menyediakan dukungan tersebut, baik ekonomi maupun sosial. Di sinilah kehadiran pasangan maupun anggota keluarga lainnya mampu memenuhi kebutuhan fisik maupun psikis lansia akan adanya pendampingan, apalagi bagi para lansia yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pada beberapa penelitian, ketersediaan dukungan tersebut dapat menekan tingkat keparahan penyakit yang berujung pada risiko terjadinya kematian lansia.

Data Susenas tahun 2017 menunjukkan bahwa hampir 60 persen lansia Indonesia memiliki pasangan, sedangkan sisanya tidak memiliki pasangan, baik karena belum kawin, cerai hidup maupun cerai mati, sebagaimana yang tersaji pada Tabel 2.2. Sementara itu, lansia perempuan yang tidak memiliki pasangan persentasenya tiga kali lipat dari lansia laki-laki. Lebih panjangnya usia harapan hidup



perempuan dan kecenderungan lansia laki-laki untuk menikah lagi ketika menduda diduga mampu menjelaskan fenomena ini.

Tabel 2.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Status Perkawinan, 2017

Karakteristik Demografi	Status Perkawinan					Total
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Tipe Daerah						
Perkotaan	1,20	59,01	2,42	37,37	100,00	
Perdesaan	0,86	60,61	2,19	36,34	100,00	
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	0,79	81,68	1,64	15,88	100,00	
Perempuan	1,23	40,06	2,90	55,81	100,00	
Total	1,02	59,82	2,30	36,85	100,00	

Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Selain berkaitan dengan status perkawinan, dukungan potensial yang tersedia berkaitan juga dengan status tinggal bersama (*living arrangement*) pada lansia. Status tinggal bersama yang dimaksud dalam hal ini adalah pengaturan tempat tinggal lansia yang melihat dengan siapa lansia tinggal, apakah tinggal sendiri atau tinggal bersama, baik dengan pasangan maupun anggota rumah tangga lainnya. Di Indonesia telah terjadi pergeseran perubahan keadaan dalam hidup orang tua. Sistem keluarga yang semula berupa keluarga besar (*extended family*) telah bergeser menjadi keluarga inti/batih (*nuclear family*). Keadaan ini dapat menimbulkan alternatif lain bagi para lanjut usia untuk memilih tinggal sendiri dan terpisah dari keluarganya. Mereka tidak ingin tergantung kepada anak-anak atau keluarganya bahkan ketika mereka sudah tidak memiliki pasangan hidup (Monks dalam Yulianti dan Kusumiati, 2009).

Hampir 60 persen lansia Indonesia memiliki pasangan, sisanya tidak memiliki karena belum kawin, cerai hidup dan cerai mati



Tabel 2.3 **Percentase Penduduk Lansia Menurut Status Tinggal Bersama, 2017**

Karakteristik Demografi	Status Tinggal Bersama					
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tipe Daerah						
Perkotaan	9,15	17,18	29,17	36,31	8,19	100,00
Perdesaan	10,44	20,57	24,69	35,16	9,14	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	4,75	24,09	32,07	31,90	7,19	100,00
Perempuan	14,37	14,18	22,25	39,19	10,01	100,00
Total	9,80	18,89	26,91	35,73	8,67	100,00

Keterangan: 1) Bersama keluarga artinya lansia tinggal bersama anak/menantu, atau bersama orang tua/mertua dalam satu rumah tangga.
 2) Tiga generasi artinya lansia tinggal bersama anak/menantu dan cucunya, atau bersama anak/menantu dan orangtua/mertuanya dalam satu rumah tangga.

Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Lansia perempuan lebih banyak yang tinggal sendiri dibandingkan lansia laki-laki dan selisihnya mencapai hampir 10 persen

Sebagaimana yang tersaji pada Tabel 2.3, status tinggal bersama lansia Indonesia masih didominasi oleh para lansia yang tinggal dalam bentuk keluarga besar, baik bersama keluarga maupun tiga generasi yang persentasenya mencapai 62,64 persen. Bentuk status tinggal bersama tersebut setidaknya dapat menggambarkan keadaan ideal rumah tangga lansia Indonesia, di mana perputaran transfer antar generasi berjalan positif pada rumah tangga lansia. Ketika sang anak mampu memberikan dukungan ekonomi terhadap kebutuhan hidup lansia, maka lansia juga dapat memberikan dukungan sosial terkait pengasuhan anak (cucu lansia tersebut). Akan tetapi, hal sebaliknya juga mungkin saja terjadi, sebagaimana penelitian jangka panjang yang pernah dilakukan Kreager (2011) dalam Adioetomo (2013) menunjukkan bahwa lansia juga diandalkan untuk menjadi tulang punggung rumah tangga demi mendukung kebutuhan hidup anak maupun cucu mereka.

Hal menarik lainnya yaitu keberadaan lansia yang tinggal sendiri, di mana persentasenya hampir mencapai 10 persen dan persentase lansia perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan lansia laki-laki



(14,37 persen banding 4,75 persen). Menurut WHO (1977) lansia yang tinggal sendiri digambarkan sebagai kelompok yang berisiko dan membutuhkan perhatian khusus (Iliffe dkk. 1992). Isu mengenai lansia yang tinggal sendiri akan menjadi semakin menarik jika kita mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi fenomena ini, apakah tinggal sendiri merupakan bagian dari pilihan hidup para lansia karena tidak memiliki anak, tidak memiliki pasangan, tidak memiliki keluarga, telantar atau disisihkan dari kehidupan keluarga besar mereka. Untuk menjawabnya memang dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait kehidupan lansia.

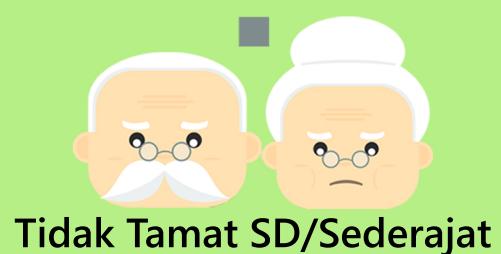
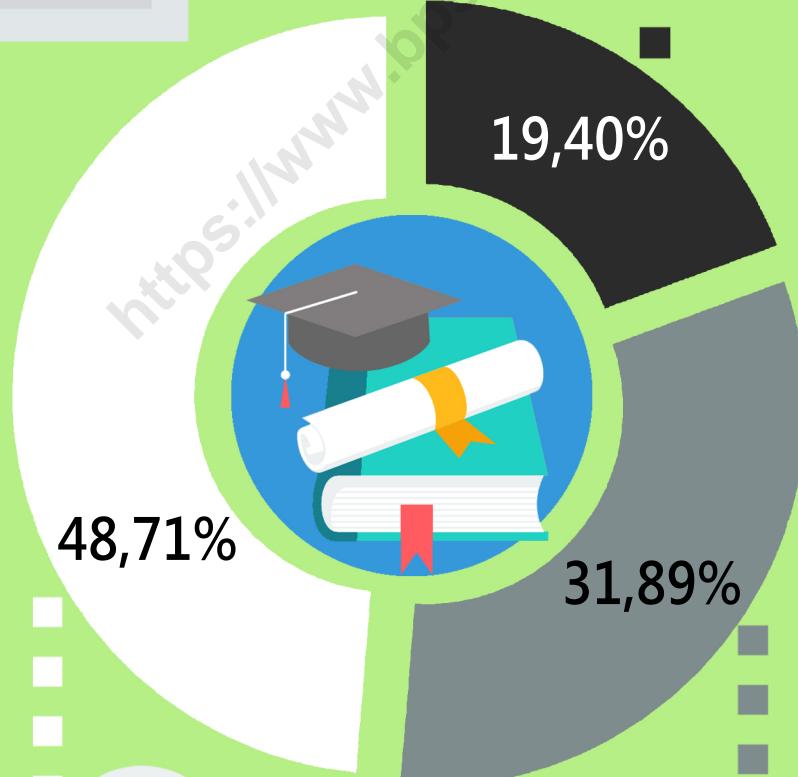
https://www.bps.go.id



BAB 03

PENDIDIKAN

PENDIDIKAN
TERTINGGI
YANG
DITAMATKAN
LANSIA



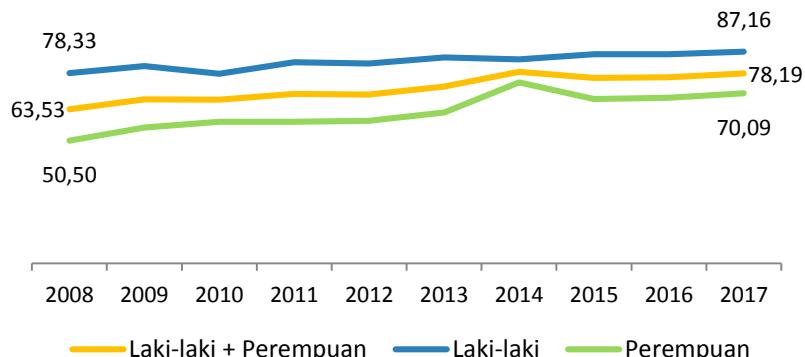
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia memuat hak lansia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, salah satunya meliputi hak memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan. Dengan bekal pendidikan dan pelatihan yang memadai diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berkaitan dengan UU tersebut diatas, pemerintah telah berupaya menyelenggarakan berbagai program yang ditujukan dalam meningkatkan pendidikan sekaligus kesejahteraan lansia, antara lain program Pemberantasan Buta Aksara (keaksaraan dasar) dan dilanjutkan dengan program keaksaraan (keaksaraan fungsional). Upaya pemerintah tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tujuan ke-4 yakni meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Belajar sepanjang hayat berasumsi bahwa proses belajar terjadi seumur hidup walaupun dengan cara dan proses yang berbeda.

A. Kemampuan Baca Tulis Lansia

Angka Melek Huruf lansia naik 15% dalam satu dasawarsa

Aktivitas membaca dan menulis memiliki efek yang baik untuk kesehatan lansia. Dengan membaca lansia tetap terlatih fungsi otaknya sehingga terhindar dari alzheimer atau penyakit pikun (republika.co.id). Disamping itu, kemampuan membaca dan menulis memudahkan lansia untuk mengirim pesan kepada kerabat melalui telepon seluler atau lazim disebut SMS (kompas.com).

Gambar 3.1 Angka Melek Huruf Penduduk Lansia, 2008-2017



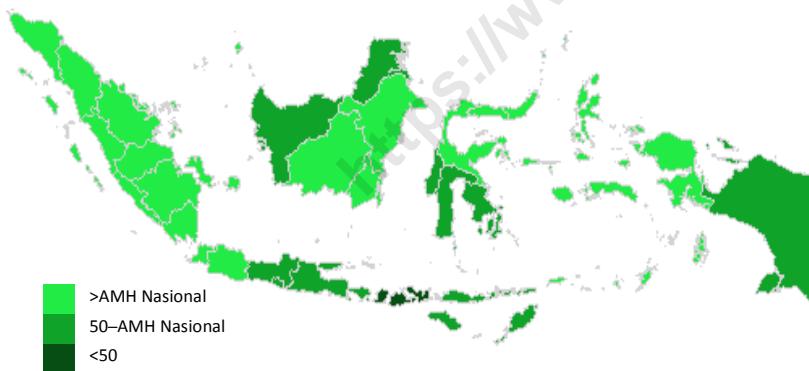
Sumber: BPS, Susenas Kor 2008-2018



Berdasarkan Susenas, Angka Melek Huruf (AMH) lansia meningkat sebesar 15 persen selama sepuluh tahun terakhir. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya regenerasi lansia dan program keaksaraan untuk penduduk usia lanjut yang diselenggarakan pemerintah. Pada tahun 2017, sebesar 78,19 persen lansia mampu membaca dan menulis.

Dilihat dari aspek gender, pada zaman dahulu dimana pendidikan masih terbatas untuk beberapa kalangan, laki-laki lebih diprioritaskan untuk mengenyam pendidikan dibandingkan perempuan. Hal tersebut berimbas terhadap AMH lansia perempuan yang lebih kecil daripada lansia laki-laki. Meskipun demikian, kesenjangan AMH laki-laki dan perempuan relatif menyempit dari tahun ke tahun. Terbukanya kesempatan perempuan mengenyam pendidikan menggiring peningkatan AMH lansia perempuan dari 50 persen menjadi 70 persen.

Gambar 3.2 Angka Melek Huruf Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2017



Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan AMH tertinggi, yakni 99,11 persen

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017

Gambar 3.2 memperlihatkan wilayah provinsi Indonesia yang diberi gradasi warna hijau. Semakin cerah semakin besar AMH lansia provinsi tersebut. Seluruh pulau Sumatera serta sebagian besar pulau Kalimantan dan Sulawesi memiliki AMH lansia di atas angka nasional. Provinsi dengan AMH lansia terendah adalah Nusa Tenggara Barat (NTB). NTB merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia dimana separuh penduduk lansia disana buta huruf.



Adapun dilihat dari jenis hurufnya, sebagian besar lansia mampu membaca huruf latin (76,55 persen). Akan tetapi, terdapat 1 persen lansia yang hanya dapat membaca huruf lainnya (Tabel 3.1). Lansia melewati beberapa zaman yang memengaruhi budaya dan bahasa. Boleh jadi pada zaman dahulu huruf latin hanya diajarkan di sekolah, sehingga lansia yang tidak memiliki kesempatan bersekolah tidak mengerti huruf latin.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Kemampuan Baca Tulis, 2017

Karakteristik	Kemampuan Baca Tulis				
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin dan Lainnya	Tidak Dapat Membaca	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tipe Daerah					
Perkotaan	46,34	1,49	37,59	14,58	100,00
Perdesaan	44,14	1,79	25,14	28,93	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-laki	48,86	0,98	37,31	12,84	100,00
Perempuan	41,95	2,23	25,91	29,91	100,00
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60-69)	49,24	1,34	34,50	14,92	100,00
Lansia Madya (70-79)	40,78	1,87	28,05	29,30	100,00
Lansia Tua (80+)	31,20	3,00	19,49	46,31	100,00
Kelompok Pengeluaran					
40% terbawah	42,67	1,99	23,71	31,63	100,00
40% menengah	47,35	1,64	32,45	18,56	100,00
20% teratas	46,85	0,91	45,53	6,71	100,00
Total	45,23	1,64	31,32	21,81	100,00

Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Di sisi lain, disparitas karakteristik membuat adanya perbedaan kemampuan baca tulis lansia. Angka buta huruf lansia yang tinggal di perdesaan lebih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Dilihat dari segi gender, angka buta huruf lansia perempuan dua kali lebih besar dibandingkan lansia laki-laki. Dari sisi umur, angka buta huruf lansia semakin besar pada kelompok umur yang semakin tua. Faktor ekonomi juga turut andil dalam kemampuan baca tulis lansia. Sekitar



31,63 persen lansia dengan status ekonomi 40 persen terbawah buta huruf. Lansia yang tinggal di rumah tangga dari kelompok pengeluaran 20 persen teratas memiliki angka buta huruf yang paling kecil. Status ekonomi disini merupakan status ekonomi rumah tangga yang diukur menggunakan pendekatan pengeluaran perkapita sebulan, dengan asumsi bahwa pengeluaran perkapita sebulan sama dengan pendapatannya.

B. Tingkat Pendidikan Lansia

Secara umum, sebagian besar lansia berpendidikan rendah. Persentase terbesar yaitu pada jenjang pendidikan SD ke bawah (tidak tamat SD dan tidak pernah sekolah). Hampir seperlima lansia tidak pernah sekolah. Angka tersebut masih lebih besar dibandingkan dengan persentase lansia yang memiliki ijazah SMP dan lebih tinggi.

Tabel 3.2 **Percentase Penduduk Lansia Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Rata-rata Lama Sekolah (tahun), 2017**

Karakteristik	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen)						Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
	Tidak pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ sede- rajab	SMP/ sede- rajab	SM/ sede- rajab	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tipe Daerah							
Perkotaan	13,71	27,79	31,89	9,04	11,63	5,94	5,80
Perdesaan	25,02	35,92	31,55	3,75	2,71	1,04	3,51
Jenis Kelamin							
Laki-laki	11,25	30,60	35,73	7,57	9,96	4,89	5,61
Perempuan	26,77	33,04	28,10	5,29	4,60	2,20	3,78
Kelompok Umur							
Lansia Muda (60-69)	13,47	31,02	34,83	7,22	9,19	4,26	5,31
Lansia Madya (70-79)	25,81	33,69	28,37	5,57	4,04	2,51	3,84
Lansia Tua (80+)	40,62	32,34	20,54	3,00	2,52	0,98	2,54
Kelompok Pengeluaran							
40% terbawah	27,81	34,63	31,86	3,48	1,89	0,33	3,25
40% menengah	16,55	32,96	34,89	7,19	6,46	1,95	4,61
20% teratas	6,61	24,08	25,68	11,08	19,59	12,96	7,69
Total	19,40	31,89	31,72	6,37	7,14	3,47	4,65

Sumber : BPS, Susenas Kor 2017



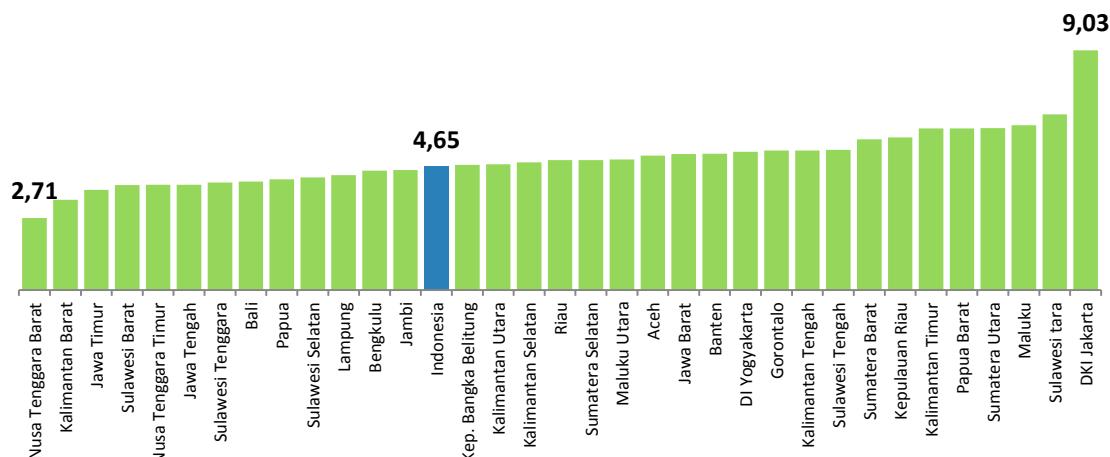
Pola keterkaitan karakteristik demografi dan ekonomi dengan tingkat pendidikan masih terlihat pada penduduk lanjut usia. Ketimpangan pendidikan antar tipe daerah, jenis kelamin, dan kelompok pengeluaran sesuai dengan pola klasik dimana pendidikan tinggi lebih banyak di perkotaan, lebih terbuka untuk laki-laki, dan dinyam oleh mereka yang tinggal di rumah tangga dengan status ekonomi tinggi.

Lansia rata-rata bersekolah sampai kelas 4 SD/sederajat

Sekitar 13 persen lansia yang tinggal di rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas, lulus dari perguruan tinggi. Sebaliknya, tidak sampai 6 persen lansia dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah menamatkan SMP atau pendidikan yang lebih tinggi. Terlepas dari apakah lansia tersebut sebagai kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga, lansia yang memiliki pendidikan yang memadai cenderung akan mengantarkan mereka kepada kehidupan yang layak dan berkecukupan.

Sama halnya dengan tingkat pendidikan, ketimpangan rata-rata lama sekolah lansia terlihat dari berbagai karakteristik, antara lain rata-rata lama sekolah lansia laki-laki lebih tinggi dibandingkan lansia perempuan. Lansia yang tinggal di rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas memiliki rata-rata lama sekolah lebih dari dua kali rata-rata lama sekolah lansia yang tinggal di rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah.

Gambar 3.3 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2017



Sumber : BPS, Susenas Kor 2017



Gambar 3.3 memperlihatkan rata-rata lama sekolah lansia tidak merata di wilayah Indonesia. DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara sekaligus pusat pemerintahan memiliki angka tertinggi yakni 9,03 tahun. Bertolak belakang dengan Jakarta, rata-rata lama sekolah provinsi lain tidak lebih besar dari 7 tahun. Bahkan di NTB rata-rata lama sekolah penduduk lansia hanya 2,71 tahun (tidak sampai selesai kelas 3 SD/sederajat).

C. Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi

Di era gadget seperti sekarang ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang pesat. Bahkan TIK tercakup dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tepatnya pada Target 9.C yaitu meningkatkan akses teknologi komunikasi dan berusaha untuk menyediakan akses internet yang terjangkau dan universal. Target tersebut berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali lansia.

Tabel 3.3 Persentase Penduduk Lansia Menurut Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2017

Karakteristik	Menggunakan HP	Menggunakan Komputer	Mengakses Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Tipe Daerah			
Perkotaan	46,85	3,35	5,63
Perdesaan	32,42	0,30	0,36
Jenis Kelamin			
Laki-laki	48,36	2,70	4,03
Perempuan	31,65	1,02	2,03
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60-69)	48,23	2,54	4,15
Lansia Madya (70-79)	28,46	0,75	1,23
Lansia Tua (80+)	13,96	0,1	0,27
Kelompok Pengeluaran			
40% terbawah	23,9	0,14	0,15
40% menengah	42,23	0,73	1,05
20% teratas	68,28	7,37	12,5
Total	39,58	1,82	2,98

Sumber : BPS, Susenas Kor 2017



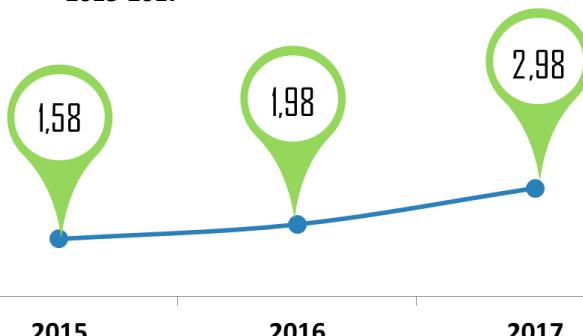
4 dari 10 lansia menggunakan HP dalam tiga bulan terakhir

Akses teknologi informasi dan komunikasi yang ditangkap dari Susenas 2017 antara lain menggunakan telepon seluler (HP), menggunakan komputer, dan mengakses internet dalam tiga bulan terakhir. Pada tahun 2017, sekitar 40 persen lansia menggunakan HP. Teknologi komunikasi berupa telepon seluler sudah menjangkau lansia khususnya lansia muda dimana hampir separuh lansia muda menggunakan HP.

Sedangkan untuk komputer, kurang dari 2 persen lansia menggunakan komputer dalam tiga bulan terakhir. Angka ini sangat kecil namun wajar untuk kalangan lansia, dimana pada umumnya mereka tidak membutuhkan komputer. Komputer biasanya digunakan untuk bekerja atau mengerjakan tugas. Adapun untuk internet, lansia yang mengakses internet lebih besar dibandingkan lansia yang menggunakan komputer.

Faktor ekonomi agaknya turut mendorong lansia dalam mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Semakin tinggi kelompok pengeluaran rumah tangga, semakin besar persentase lansia yang mengakses TIK. Dari 100 lansia dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas, 68 diantaranya menggunakan HP. Angka tersebut hampir tiga kali lebih besar dibandingkan golongan 40 persen terbawah. Sejalan dengan itu, persentase lansia dengan kelompok pengeluaran tertinggi yang menggunakan komputer (7,37 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Hal yang sama juga terjadi pada lansia yang mengakses internet.

Gambar 3.4 Persentase Penduduk Lansia yang Mengakses Internet, 2015-2017

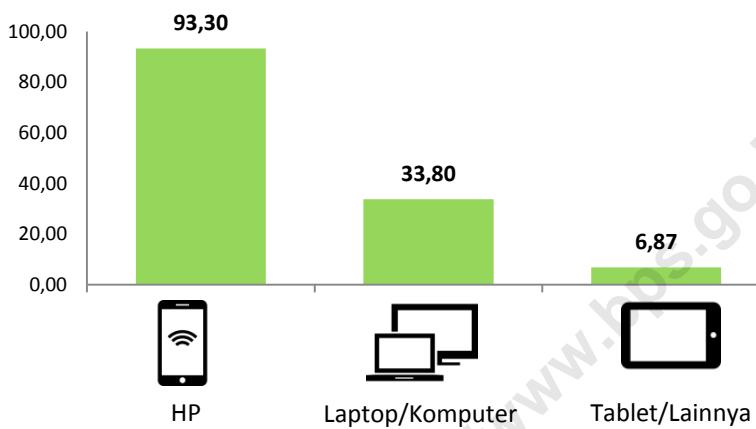


Sumber : BPS, Susenas Kor 2015-2017



Gambar 3.4 memperlihatkan perkembangan lansia yang mengakses internet. Meskipun persentase lansia yang mengakses internet boleh dibilang kecil (berkisar 3 persen), angka ini terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Kenaikan persentase lansia yang mengakses internet pada tahun 2017 lebih besar dibandingkan kenaikan pada tahun 2016.

Gambar 3.5 Persentase Penduduk Lansia yang Mengakses Internet Menurut Media Akses, 2017



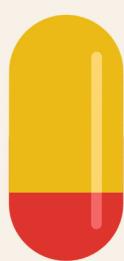
Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Gencarnya industri *smartphone* atau telepon pintar membuat banyak produk *smartphone* beredar di pasaran. Dengan munculnya *smartphone* murah dan terjangkau membuka peluang masyarakat, termasuk lansia, untuk mengakses internet. Di antara berbagai media elektronik yang digunakan untuk mengakses internet, telepon seluler (HP) menjadi primadona. Dapat dilihat pada gambar 3.5 mayoritas lansia mengakses internet menggunakan HP.



BAB 04

KESEHATAN



26,72%

Seperempat

lansia sakit dalam
sebulan terakhir



Seluruh isu kesehatan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) diintegrasikan dalam satu tujuan yakni tujuan nomor 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, tidak terkecuali lansia (sdgs.bappenas.go.id). Sejalan dengan SDGs, salah satu isu kesehatan yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019 adalah peningkatan pelayanan kesehatan untuk penduduk lanjut usia. Penduduk lansia secara biologis akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik sehingga rentan terhadap serangan penyakit. Tidak hanya itu, gangguan fungsional pada tubuh lansia juga makin meningkat seiring dengan bertambahnya usia yang berujung pada terjadinya disabilitas. Dengan semakin banyaknya jumlah lansia, pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi lansia perlu terus dikembangkan.

A. Kondisi Kesehatan Penduduk Lansia

Sedikitnya 1 dari 4 lansia sakit dalam sebulan terakhir

Kondisi fisik lansia yang lemah rentan mengalami keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas atau keluhan lainnya. Hasil Susenas 2017 menunjukkan hampir separuh lansia mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Keluhan kesehatan yang dialami lansia disinyalir dipengaruhi oleh latar belakang lansia, khususnya faktor umur. Terlihat pada Tabel 4.1 semakin bertambah umur semakin besar persentase lansia yang mengalami keluhan kesehatan.

Adapun yang dimaksud kondisi sakit adalah keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari sehingga tidak dapat melakukan kegiatan secara normal sebagaimana biasanya. Persentase lansia yang sakit disebut juga *morbidity rate*/angka kesakitan lansia. Angka kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan.

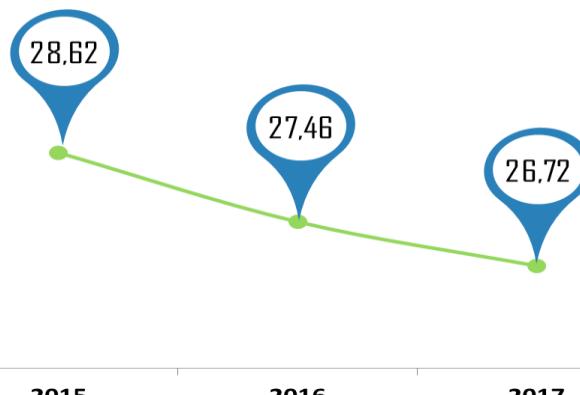


Tabel 4.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Kondisi Kesehatan Sebulan Terakhir, 2017

Karakteristik	Mengalami Keluhan Kesehatan	Sakit
	(1)	(2)
Tipe Daerah		
Perkotaan	47,70	24,74
Perdesaan	50,11	28,66
Jenis Kelamin		
Laki-laki	48,13	27,03
Perempuan	49,62	26,43
Kelompok Umur		
Lansia Muda (60-69)	46,17	24,61
Lansia Madya (70-79)	53,29	29,89
Lansia Tua (80+)	54,50	31,59
Kelompok Pengeluaran		
40% terbawah	47,57	26,70
40% menengah	50,81	27,78
20% teratas	48,37	24,83
Total	48,91	26,72

Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Angka kesakitan lansia tahun 2017 sebesar 26,72 persen. Artinya, dari 100 lansia terdapat sekitar 27 lansia yang sakit. Dalam tiga tahun terakhir, angka kesakitan lansia terus menurun. Akan tetapi, penurunannya relatif tidak terlalu besar. Dibandingkan tahun 2015, angka kesakitan lansia turun sekitar dua persen.

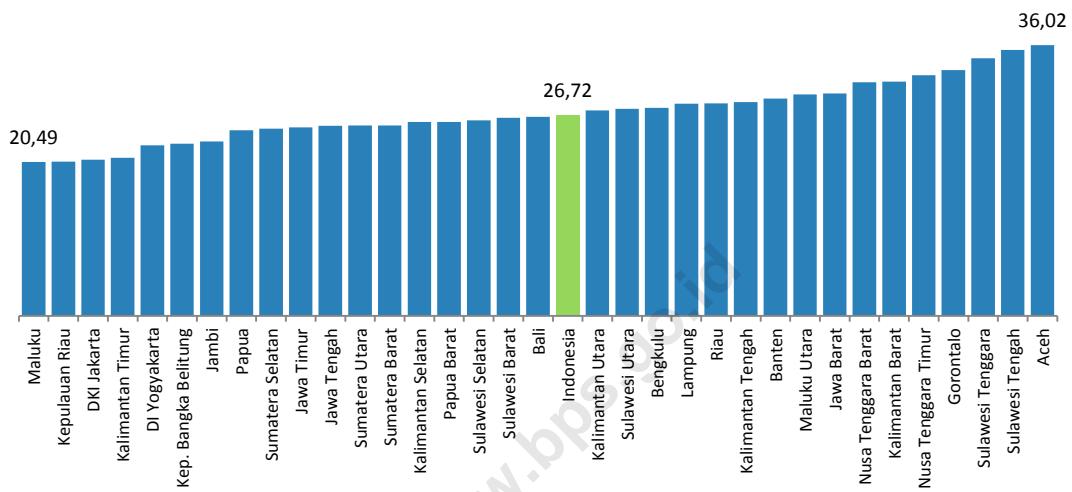
Gambar 4.1 Angka Kesakitan Penduduk Lansia, 2015-2017

Sumber : BPS, Susenas Kor 2015-2017



Secara geografis, angka kesakitan lansia bervariasi antar provinsi. Angka kesakitan tertinggi yaitu di Provinsi Aceh dimana lebih dari sepertiga lansia sakit dalam sebulan terakhir. Sedangkan provinsi dengan angka kesakitan terendah adalah Maluku (20,49 persen).

Gambar 4.2 Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2017



Sumber: BPS, Susenas Kor 2017

Rata-rata lansia sakit selama 8 hari

Waktu yang diperlukan seseorang untuk sembuh dari sakitnya bervariasi, tergantung tingkat keparahan penyakit dan daya tahan tubuh. Kemunduran fungsi organ dan menurunnya daya tahan tubuh pada lansia memakan waktu yang tidak sebentar untuk proses penyembuhan. Berdasarkan Susenas 2017, dalam sebulan terakhir rata-rata lansia sakit selama lebih dari seminggu (sekitar 8 hari).

Gambar 4.3 Rata-rata Lama Sakit Penduduk Lansia (hari) Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2017



Sumber : BPS, Susenas Kor 2017



Sebagian besar lansia mengalami sakit selama 1-7 hari. Pola tersebut relatif sama dilihat dari berbagai karakteristik. Adapun lansia yang mengalami sakit lebih dari tiga minggu cukup besar yakni 14 persen. Angka ini semakin besar seiring bertambahnya umur lansia.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Menurut Lamanya Sakit, 2017

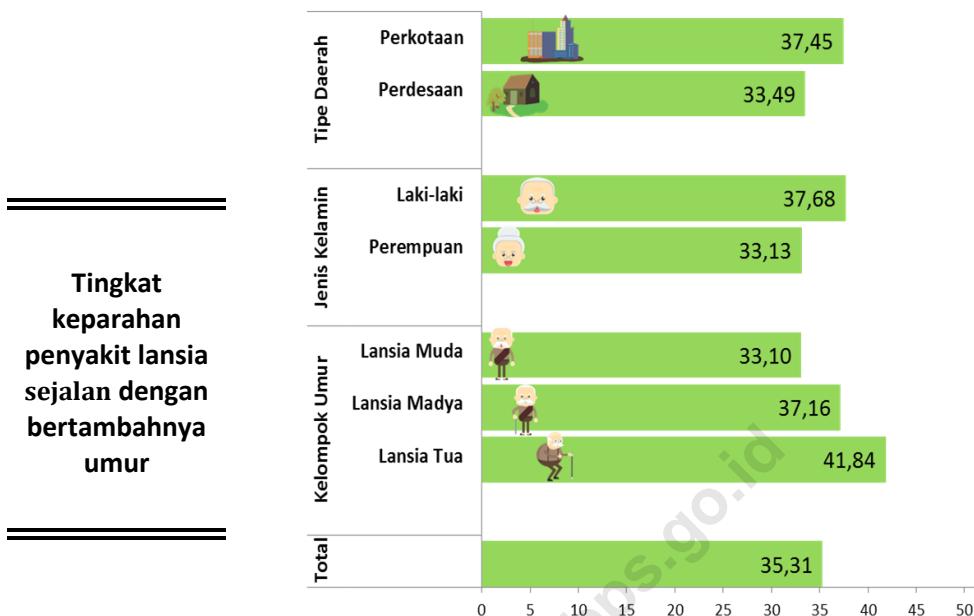
Karakteristik	Lamanya Sakit (hari)				
	1-7	8-14	15-21	22+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tipe Daerah					
Perkotaan	73,52	7,74	3,63	15,11	100,00
Perdesaan	74,18	8,56	4,40	12,87	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-laki	71,85	8,45	4,57	15,14	100,00
Perempuan	75,74	7,94	3,56	12,76	100,00
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60-69)	76,71	8,01	3,71	11,57	100,00
Lansia Madya (70-79)	71,63	8,25	4,24	15,88	100,00
Lansia Tua (80+)	65,15	8,91	5,31	20,63	100,00
Kelompok Pengeluaran					
40% terbawah	73,27	8,42	4,20	14,10	100,00
40% menengah	75,52	7,97	3,95	12,56	100,00
20% teratas	71,91	8,05	3,89	16,15	100,00
Total	73,87	8,18	4,05	13,90	100,00

Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Rata-rata lama sakit yang lebih dari seminggu mengindikasikan lansia mengidap sakit parah. Hal ini sejalan dengan Gambar 4.3 dimana diantara lansia yang sakit, sepertiganya sakit parah. Sakit parah yang dimaksud adalah apabila gangguan kesehatan yang dideritanya menyebabkan tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya atau harus istirahat di rumah atau terbaring di tempat tidur.



Gambar 4.4 Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Parah, 2017



Keterangan : Lansia Muda (60-69 tahun); Lansia Madya (70-79 tahun); Lansia Tua (80 tahun ke atas).

Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Berdasarkan tipe daerah tempat tinggal, persentase lansia yang sakit parah di perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan. Sedangkan dari sisi jenis kelamin, lansia laki-laki yang mengalami sakit parah empat persen lebih besar dibandingkan lansia perempuan. Sementara itu, tingkat keparahan penyakit lansia sejalan dengan bertambahnya umur. Semakin tua, persentase lansia yang sakit parah semakin besar.

B. Akses Menuju Fasilitas Kesehatan

Segala bentuk keluhan kesehatan, baik yang mengganggu maupun yang tidak, seyogyanya diobati sehingga tidak berlarut-larut. Pengobatan terhadap keluhan yang dialami dapat dilakukan secara mandiri (mengobati sendiri) atau dengan mengunjungi tempat pengobatan (berobat jalan). Mengobati sendiri adalah melakukan pengobatan dengan menentukan sendiri jenis obatnya tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/batra. Adapun berobat jalan



adalah memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Tindakan Pengobatan, 2017

Karakteristik	Tindakan Pengobatan					Total
	Mengobati Sendiri	Berobat Jalan	Mengobati Sendiri dan Berobat Jalan	Tidak Mengobati Sendiri / Berobat Jalan		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tipe Daerah						
Perkotaan	40,58	28,06	26,45	4,90	100,00	
Perdesaan	44,06	23,99	26,49	5,46	100,00	
Jenis Kelamin						
Laki-laki	42,97	25,28	26,65	5,09	100,00	
Perempuan	41,85	26,56	26,31	5,28	100,00	
Kelompok Umur						
Lansia Muda (60-69)	42,99	25,78	26,55	4,67	100,00	
Lansia Madya (70-79)	41,28	26,38	26,82	5,52	100,00	
Lansia Tua (80+)	42,04	25,78	24,96	7,22	100,00	
Kelompok Pengeluaran						
40% terbawah	46,09	23,20	24,36	6,35	100,00	
40% menengah	42,63	25,43	27,51	4,44	100,00	
20% teratas	34,10	32,79	28,93	4,19	100,00	
Total	42,38	25,96	26,47	5,19	100,00	

Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Respon lansia terhadap keluhan kesehatan relatif baik. Sebagian besar lansia melakukan tindakan pengobatan, baik mengobati sendiri maupun berobat jalan. Hanya 5 persen lansia yang tidak berupaya menanggulangi keluhan kesehatan yang dideritanya.

Ketika mengobati sendiri dirasa tidak cukup menghilangkan keluhan kesehatan, seseorang perlu berkonsultasi ke tenaga kesehatan untuk mengobati keluhannya. Separuh lansia yang mengalami



keluhan kesehatan berobat jalan. Mayoritas lansia berobat jalan ke fasilitas kesehatan. Hanya sebagian kecil yang melakukan pengobatan tradisional/alternatif.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, 2017

Karakteristik	Lansia Berobat Jalan	Tempat Berobat								Pengobatan tradisional	Lainnya
		RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik dokter / bidan	Klinik/ dokter bersama	Puskesmas / Pustu	UKBM	(8)	(9)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Tipe Daerah											
Perkotaan	54,52	14,68	13,26	34,99	13,71	25,80	2,29	3,03	0,78		
Perdesaan	50,48	8,19	4,28	48,66	8,48	29,91	5,33	2,92	1,30		
Jenis Kelamin											
Laki-laki	51,93	13,37	9,66	40,77	11,42	26,32	3,09	3,09	1,13		
Perempuan	52,87	9,80	8,06	42,65	10,85	29,15	4,42	2,88	0,96		
Kelompok Umur											
Lansia Muda	52,33	11,80	8,81	40,71	11,33	28,03	3,85	3,16	0,93		
Lansia Madya	53,20	11,07	9,14	42,30	10,97	28,46	3,56	2,72	1,22		
Lansia Tua	50,74	10,55	7,67	46,58	10,23	24,77	4,25	2,65	1,11		
Kelompok Pengeluaran											
40% terbawah	47,56	6,79	3,75	45,19	8,55	33,32	5,75	2,56	1,40		
40% menengah	52,93	11,05	6,96	44,25	10,74	29,17	3,31	3,10	0,97		
20% teratas	61,72	19,67	19,98	32,25	15,86	16,79	1,44	3,44	0,58		
Total	52,43	11,46	8,80	41,78	11,11	27,84	3,80	2,97	1,04		

Keterangan : Lansia Muda (60-69 tahun); Lansia Madya (70-79 tahun); Lansia Tua (80 tahun ke atas).

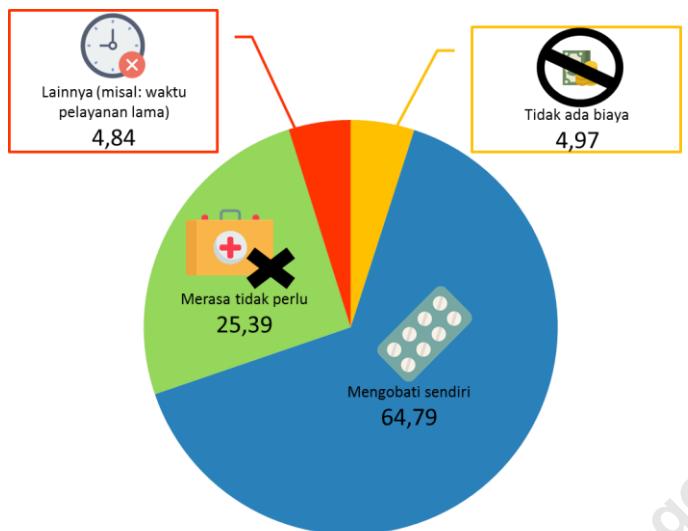
Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Praktik dokter/bidan menjadi tempat berobat jalan favorit lansia

Dilihat dari jenis fasilitas kesehatan, lansia yang mengakses fasilitas kesehatan pemerintah untuk berobat jalan cukup besar. Seperempat lansia berobat ke puskesmas/pustu. Sedangkan persentase lansia yang berobat jalan ke rumah sakit pemerintah lebih besar dibandingkan dengan rumah sakit swasta. Di sisi lain, praktik dokter/bidan menjadi tujuan favorit lansia yang berobat jalan dengan persentase tertinggi yakni 41,78 persen.



**Gambar 4.5 Persentase Penduduk Lansia yang Tidak Berobat Jalan
Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2017**



Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Lansia yang tidak berobat jalan sebagian besar karena merasa cukup dengan *self treatment* yang dilakukannya. Seperempat lansia merasa tidak perlu berobat jalan. Biasanya hal tersebut dikarenakan keluhan kesehatan yang dialami belum mengganggu aktivitas mereka. Di sisi lain masih ada sekitar lima persen lansia yang tidak berobat jalan karena tidak ada biaya, baik itu biaya untuk berobat maupun untuk transportasi ke tempat berobat. Lansia yang tidak berobat jalan karena alasan lainnya memiliki persentase yang tidak jauh berbeda. Alasan lainnya yang dimaksud antara lain tidak ada sarana transportasi, tidak ada yang mendampingi, dan waktu tunggu pelayanan lama.

Beberapa keluhan kesehatan juga perlu penanganan yang lebih serius, yang wajibkan penderita dirawat inap. Informasi mengenai penduduk yang pernah rawat inap dapat diperoleh melalui Susenas dengan referensi waktu setahun terakhir.



Tabel 4.5 **Percentase Penduduk Lansia yang Pernah Rawat Inap Setahun Terakhir Menurut Tempat Rawat Inap, 2017**

Karakteristik	Lansia pernah rawat inap	Tempat Berobat							Lainnya
		RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik dokter / bidan	Klinik/ dokter bersama	Puskes -mas / Pustu	Pengobatan tradisional		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	
Tipe Daerah									
Perkotaan	8,16	48,62	42,75	1,24	3,29	6,97	0,38	0,16	
Perdesaan	7,20	45,02	28,93	2,84	5,32	21,86	0,63	0,08	
Jenis Kelamin									
Laki-laki	8,61	48,75	36,43	1,68	3,97	13,08	0,36	0,07	
Perempuan	6,83	44,83	36,00	2,35	4,57	15,06	0,66	0,19	
Kelompok Umur									
Lansia Muda	7,04	47,04	36,78	1,94	4,19	13,44	0,51	0,16	
Lansia Madya	8,93	48,47	35,26	2,38	4,35	13,20	0,27	0,07	
Lansia Tua	8,28	41,10	36,14	1,05	4,29	19,88	1,16	0,10	
Kelompok Pengeluaran									
40% terbawah	5,41	44,86	24,13	2,79	5,05	25,21	0,34	0,27	
40% menengah	7,80	48,83	34,88	2,08	4,19	13,48	0,65	0,08	
20% teratas	12,29	46,65	49,12	1,14	3,58	4,08	0,47	0,03	
Total	7,68	46,92	36,22	1,99	4,25	14,00	0,50	0,12	

Keterangan : Lansia Muda (60-69 tahun); Lansia Madya (70-79 tahun); Lansia Tua (80 tahun ke atas).

Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

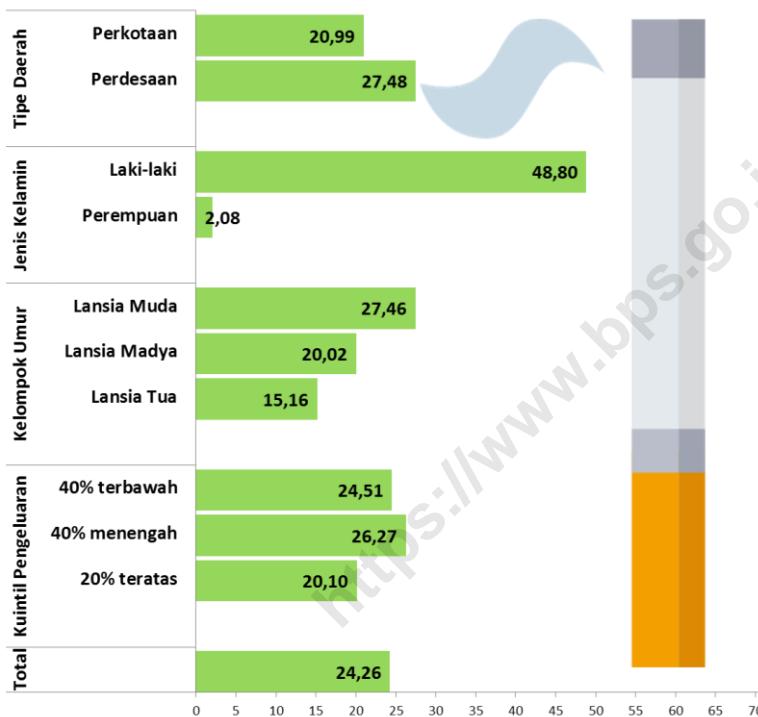
Sebesar 7,68 persen lansia pernah rawat inap dalam setahun terakhir. Berbeda dengan berobat jalan, sebagian besar lansia rawat inap di rumah sakit. Persentase lansia yang rawat inap di rumah sakit pemerintah lebih besar dibandingkan dengan rumah sakit swasta. Apabila dilihat dari kelompok pengeluaran rumah tangga, lansia pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas lebih banyak yang rawat inap di rumah sakit swasta. Hal ini disebabkan oleh biaya pengobatan di rumah sakit swasta yang umumnya lebih mahal. Selain itu, jaminan kesehatan yang meng-cover biaya pengobatan untuk lansia dengan golongan pengeluaran terbawah lebih banyak tersedia di rumah sakit pemerintah.



C. Lansia Merokok

Kebiasaan merokok memiliki pengaruh negatif terhadap kesehatan, apalagi jika ini dilakukan oleh para lansia, tentunya akan memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap penyakit-penyakit tertentu, kanker paru salah satunya. Sayangnya masih ada lansia yang punya kebiasaan merokok.

Gambar 4.6 Persentase Penduduk Lansia yang Merokok Sebulan Terakhir, 2017



Hampir
seperempat
lansia merokok
selama sebulan
terakhir

Keterangan : Lansia Muda (60-69 tahun); Lansia Madya (70-79 tahun); Lansia Tua (80 tahun ke atas).
Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Hasil Susenas 2017 menunjukkan hampir seperempat lansia merokok, baik merokok elektrik maupun tembakau. Lansia perokok didominasi oleh laki-laki. Terlihat dari Gambar 4.5 hampir separuh lansia laki-laki adalah perokok. Di perkotaan lansia yang merokok lebih sedikit dibandingkan perdesaan. Dilihat dari kelompok umur, persentase lansia yang merokok semakin menurun seiring bertambahnya umur. Kondisi fisik lansia yang melemah pada lansia tua agaknya menuntut lansia untuk berhenti merokok dan mulai menghidupkan perilaku sehat.



Intensitas merokok mencerminkan seberapa ‘akut’ kebiasaan merokok lansia. Lansia yang merokok setiap hari tentu jauh lebih berisiko terkena penyakit daripada yang kadang-kadang (tidak setiap hari). Sayangnya, persentase lansia yang merokok setiap hari jauh lebih besar dibandingkan yang tidak setiap hari.

Tabel 4.6 Persentase Penduduk Lansia Menurut Kebiasaan Merokok Sebulan Terakhir, 2017

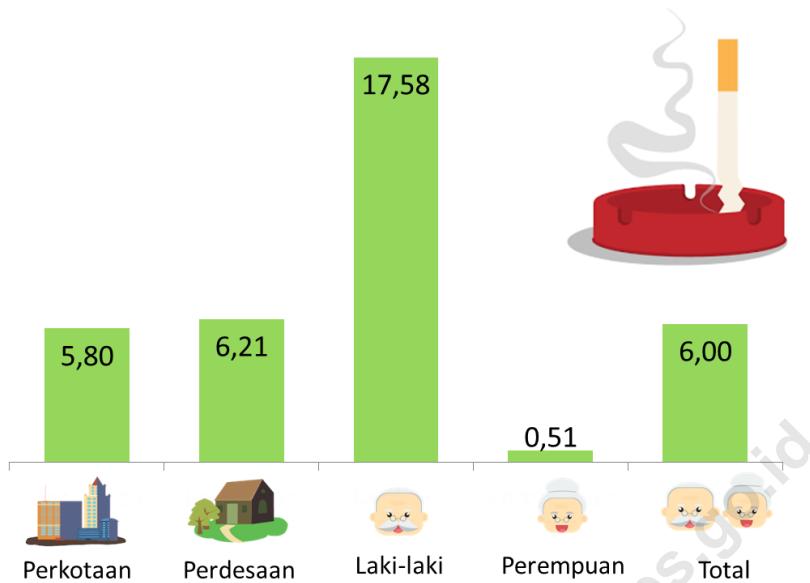
Karakteristik	Merokok Setiap Hari	Merokok Tidak Setiap Hari
(1)	(2)	(3)
Tipe Daerah		
Perkotaan	18,75	2,25
Perdesaan	24,67	2,81
Jenis Kelamin		
Laki-laki	43,83	4,97
Perempuan	1,75	0,33
Kelompok Umur		
Lansia Muda (60-69)	24,80	2,66
Lansia Madya (70-79)	17,63	2,39
Lansia Tua (80+)	13,08	2,09
Kelompok Pengeluaran		
40% terbawah	21,58	2,93
40% menengah	23,84	2,42
20% teratas	18,22	1,88
Total	21,73	2,53

Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebelum terkena penyakit yang ditimbulkan oleh rokok, tidak diragukan lagi bahwa satu-satunya jalan terbaik adalah berhenti merokok. Mungkin perokok yang sudah tua menganggap mereka terlalu tua untuk berhenti merokok atau terlalu tua untuk mendapat manfaat dari berhenti merokok. Padahal dengan tetap merokok dapat memperparah kondisi kesehatan lansia yang memang sudah rentan terkena penyakit.



Gambar 4.7 Persentase Penduduk Lansia yang Pernah Merokok
Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2017



6 dari 100 lansia
yang tidak
merokok
sebulan terakhir
adalah mantan
perokok

Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Susenas 2017 memuat informasi mengenai riwayat kebiasaan merokok lansia sebelum sebulan terakhir. Lansia yang tidak pernah merokok ditanya mengenai kebiasaan merokok sebelumnya. Hasilnya, 6 persen lansia yang tidak merokok selama sebulan terakhir sebelumnya pernah merokok. Lansia laki-laki yang sebelumnya pernah merokok cukup besar yakni sekitar 17 persen.



Hampir separuh lansia
masih aktif **bekerja**



Satu dari empat di antaranya
bekerja berlebihan (lebih dari 48 jam seminggu)

Seringkali, kita melihat fenomena dimana seseorang berusia lanjut namun masih aktif bekerja. Lansia bekerja dapat menjadi hal positif maupun negatif tergantung motivasi yang mendorong lansia tersebut bekerja. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1993), lansia menganggap bahwa bekerja merupakan suatu hal yang positif. Dengan bekerja, lansia merasa harga diri mereka meningkat, menjadi mandiri, dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Sementara itu, jika dilihat dari perspektif yang lebih objektif, motivasi lansia bekerja dapat disebabkan oleh desakan ekonomi apalagi lansia memerlukan biaya lebih untuk perawatan kesehatannya. Di sisi lain, lansia bekerja dapat dianggap sebagai bentuk aktualisasi diri dan kemampuan lansia tersebut untuk bekerja (Wirakartakusumah, 1996). Idealnya pekerjaan yang dilakukan lansia merupakan pekerjaan yang layak mengingat kondisi fisik lansia yang mulai menurun. Pekerjaan layak telah digaungkan oleh International Labour Organization (ILO) sebagai kunci dari pengurangan kemiskinan. Pekerjaan layak mencakup 10 dimensi di antaranya:

1. Kesempatan kerja,
2. Pendapatan yang mencukupi dan pekerjaan yang produktif,
3. Jam kerja layak,
4. Menggabungkan pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi,
5. Pekerjaan yang harus dihapuskan,
6. Stabilitas dan jaminan pekerjaan,
7. Kesempatan dan perlakuan yang setara dalam pekerjaan,
8. Lingkungan kerja yang aman,
9. Jaminan sosial, dan
10. Dialog sosial, representasi pekerja, dan pengusaha.

A. Kesempatan Lansia untuk Bekerja

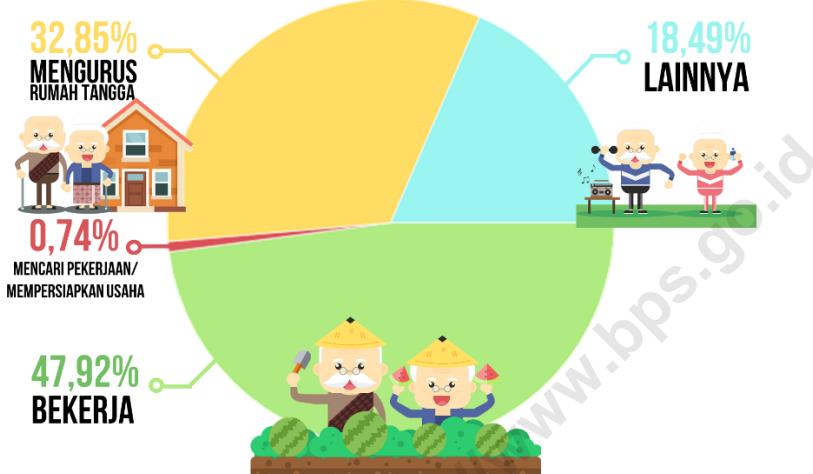
Sekitar 5 dari 10 lansia masih aktif bekerja

Lansia sepantasnya memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja. Hal ini diatur dalam UU No. 13 Tahun 1998 Pasal 5 yang menyatakan bahwa sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dimana salah satunya adalah pelayanan kesempatan kerja.



Di tahun 2017, persentase lansia bekerja mencapai 47,92 persen. Hal ini berarti hampir separuh dari lansia masih aktif bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sebagai bentuk aktualisasi diri. Tingginya persentase lansia bekerja ini dapat menunjukkan bahwa lansia masih memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dan tetap aktif di hari tuanya meskipun kondisi fisiknya telah menurun.

Gambar 5.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2017



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2017

Apabila dilihat berdasarkan tipe daerah, persentase lansia di perdesaan yang bekerja lebih tinggi dibandingkan lansia di perkotaan (55,34 persen berbanding 40,93 persen). Tingginya persentase lansia perdesaan yang bekerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Di perdesaan, lebih banyak tersedia lapangan kerja informal, terutama sektor pertanian yang tidak memerlukan keterampilan khusus. Sehingga, lebih banyak lansia di perdesaan yang terserap dalam lapangan kerja. Selain itu, lansia di perdesaan cenderung untuk tetap bekerja di masa tua karena akumulasi kekayaan yang lebih rendah dibandingkan lansia di perkotaan dan jenis pekerjaan yang tidak menetapkan batas usia tertentu untuk pensiun (Glies et al., 2011). Sementara itu, apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase lansia laki-laki yang bekerja hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan lansia perempuan (63,29 persen berbanding 33,79 persen). Sebagian lansia perempuan



lebih memilih untuk mengurus rumah tangga di usia senjanya (50,06 persen). Apabila dikaitkan dengan kelompok umur, semakin tua umur lansia, maka semakin kecil persentase lansia yang bekerja. Persentase lansia muda yang bekerja jauh lebih tinggi dibandingkan lansia tua (58,63 persen berbanding 15,95 persen). Hal ini dapat dijelaskan oleh kondisi fisik lansia yang semakin melemah seiring dengan penuaan sehingga semakin sedikit lansia yang mampu bekerja.

Tabel 5.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2017

Karakteristik	Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir				Total
	Bekerja	Mencari pekerjaan/Mempersiapkan usaha	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tipe Daerah					
Perkotaan	40,93	0,91	38,32	19,84	100,00
Perdesaan	55,34	0,55	27,05	17,06	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	63,29	1,00	14,14	21,58	100,00
Perempuan	33,79	0,50	50,06	15,65	100,00
Kelompok umur					
Lansia Muda (60-69)	58,63	0,83	30,29	10,24	100,00
Lansia Madya (70-79)	33,85	0,58	38,87	26,70	100,00
Lansia Tua (80+)	15,95	0,56	32,64	50,85	100,00
Total	47,92	0,74	32,85	18,49	100,00

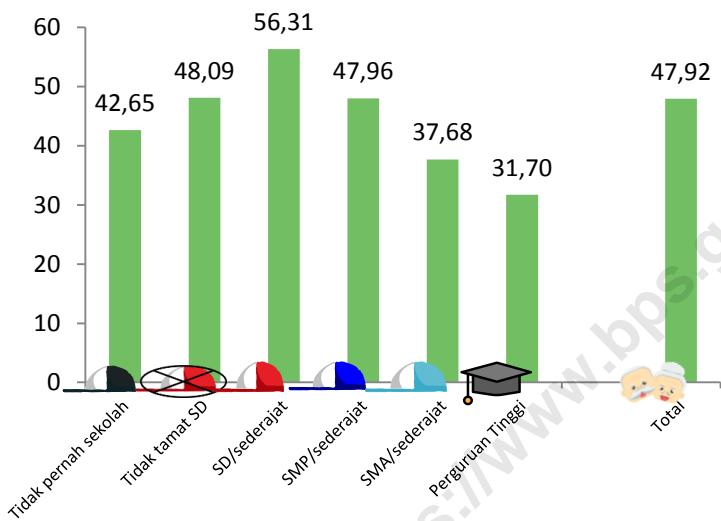
Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2017

Jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan, terdapat pola dimana persentase lansia bekerja meningkat seiring peningkatan tingkat pendidikan hingga SD/sederajat. Namun, pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, persentase lansia bekerja menurun. Persentase lansia dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi/sederajat yang masih bekerja hanya 31,70 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan persentase lansia berpendidikan SD/sederajat yang bekerja (56,31 persen). Hal ini dapat disebabkan karena lansia yang



berpendidikan tinggi memiliki pekerjaan yang baik sehingga telah meraih akumulasi kekayaan yang cukup untuk menghidupi hari tuanya dibandingkan lansia yang berpendidikan rendah. Lansia berpendidikan rendah cenderung untuk tetap bekerja di hari tuanya disebabkan tidak memiliki tabungan dari pekerjaan di masa mudanya.

Gambar 5.2 Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2017

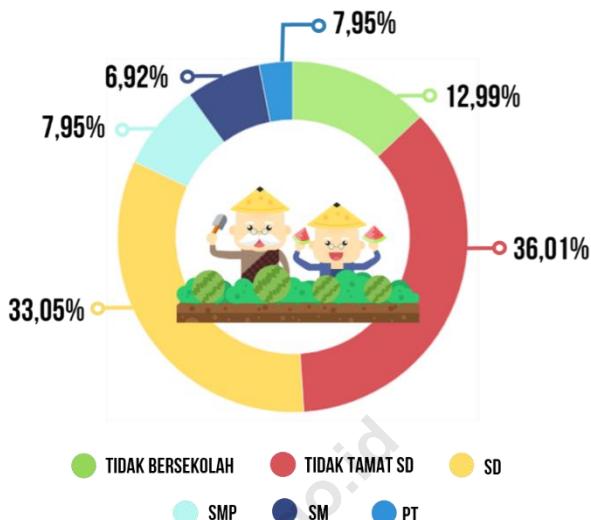


Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017

Jika melihat distribusi lansia yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan, persentase lansia bekerja didominasi oleh lansia yang tidak tamat SD (36,01 persen) dan SD (33,05 persen). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pekerja lansia berpendidikan SD ke bawah. Sementara itu, persentase lansia bekerja yang berpendidikan Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi berturut-turut hanya sebesar 6,92 persen dan 7,95 persen.



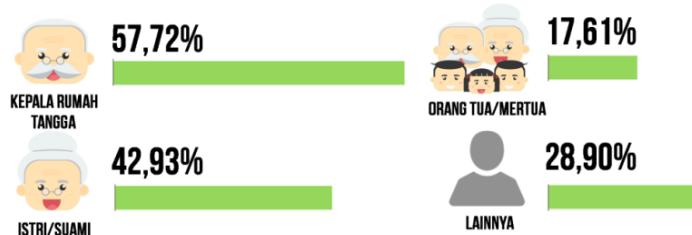
Gambar 5.3 Distribusi Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2017



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017

Meskipun berusia lanjut, tidak sedikit lansia yang berstatus sebagai Kepala Rumah Tangga (KRT). Akibatnya, lansia tersebut harus menopang kebutuhan keluarganya dengan bekerja. Dilihat berdasarkan status dalam rumah tangga, persentase lansia berstatus sebagai KRT yang bekerja mencapai 57,72 persen. Sementara itu, persentase lansia berstatus istri-suami yang bekerja adalah 42,93 persen.

Gambar 5.4 Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Status dalam Rumah Tangga, 2017



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017



B. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan Lansia

Stabilitas pekerjaan dan adanya jaminan pekerjaan menjadi salah satu indikator pekerjaan layak. Pekerjaan layak diindikasikan dengan pekerjaan yang stabil dan berkelanjutan. Sebaliknya, pekerjaan berisiko (*precarious work*) adalah pekerjaan yang berjangka pendek dan tidak stabil. Menurut ILO (2011), pekerja bebas baik di sektor pertanian maupun non-pertanian mewakili pekerjaan berisiko di Indonesia.

Tabel 5.2 Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2017

Karakteristik	Lapangan Usaha					Total
	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tipe Daerah						
Perkotaan	30,95	11,11	31,49	14,15	12,30	100,00
Perdesaan	74,25	7,56	10,70	3,63	3,86	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	59,25	7,59	13,95	7,81	11,41	100,00
Perempuan	48,27	11,74	29,88	9,04	1,08	100,00
Tingkat Pendidikan						
Tidak Pernah Sekolah	69,08	9,49	13,16	5,14	3,14	100,00
Tidak Tamat SD	61,78	9,06	17,00	6,44	5,72	100,00
Tamat SD/Sederajat	56,23	8,80	20,29	6,56	8,12	100,00
Tamat SMP/Sederajat	36,87	9,71	29,83	11,66	11,94	100,00
Tamat SMA/Sederajat	25,30	10,46	32,55	17,29	14,40	100,00
Tamat Pendidikan Tinggi	22,87	7,27	22,49	31,73	15,63	100,00
Total	55,18	9,13	19,85	8,26	7,58	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017

Dilihat berdasarkan lapangan usaha, sebesar 55,18 persen lansia bekerja di lapangan usaha pertanian. Penyerapan yang tinggi pada lapangan usaha pertanian dapat disebabkan karena lapangan usaha ini tidak memerlukan kualifikasi dan keterampilan khusus. Persentase lansia bekerja di lapangan usaha pertanian jauh lebih tinggi di perdesaan dibandingkan di perkotaan (74,25 persen



berbanding 30,95 persen). Di perkotaan, lebih banyak lansia yang terserap di lapangan usaha perdagangan, yaitu sebesar 31,49 persen.

Apabila dibandingkan antar tingkat pendidikan, terdapat perbedaan pola seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan. Pada lansia dengan tingkat pendidikan SMP/sederajat ke bawah, sebagian lansia terserap dalam lapangan usaha pertanian. Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan, penyerapan pekerja ini beralih ke lapangan usaha lain. Pada lansia dengan tingkat pendidikan tertinggi SMA/sederajat, sebesar 32,55 persen lansia terserap dalam lapangan usaha perdagangan. Sementara itu, pada lansia dengan tingkat pendidikan tertinggi Perguruan Tinggi, sebesar 31,73 persen lansia terserap dalam lapangan usaha jasa. Hal ini disebabkan semakin tinggi tingkat pendidikan lansia, maka semakin tinggi kualifikasi dan keterampilan yang dimilikinya. Akibatnya, terjadi pergeseran lapangan usaha dari pertanian menjadi jasa yang memerlukan keterampilan tertentu. Dengan demikian, lapangan pekerjaan lansia sangat bergantung pada latar belakang pendidikannya.

Tabel 5.3 Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2017

Karakteristik	Status Pekerjaan					Total
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh	Buruh/Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga/Tidak dibayar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tipe Daerah						
Perkotaan	32,62	30,14	17,02	10,97	9,25	100,00
Perdesaan	24,40	43,58	5,39	11,62	15,01	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	25,63	45,87	12,21	12,17	4,12	100,00
Perempuan	32,09	23,72	7,63	9,90	26,67	100,00
Total	28,02	37,66	10,51	11,33	12,48	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017



Status pekerjaan lansia menentukan apakah lansia tersebut termasuk dalam *precarious work*. Persentase lansia yang terserap dalam *precarious work* yaitu pekerja bebas adalah 11,33 persen. Ketidakstabilan pekerjaan ini menyebabkan upah yang diterima lansia tidak menentu yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat kesejahteraan lansia.

Selain untuk menentukan *precarious work*, status pekerjaan juga dapat menentukan apakah lansia termasuk dalam *vulnerable employment*. Termasuk dalam *vulnerable employment* di antaranya adalah pekerja keluarga tidak dibayar dan berusaha sendiri. Kedua status pekerjaan tersebut cenderung tidak formal, tidak memiliki jaminan sosial, dan lebih berisiko untuk bangkrut ketika keadaan ekonomi memburuk (UN, 2012).

Tabel 5.4 Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Penggolongan Pekerjaan, 2017

Karakteristik	Penggolongan Pekerjaan	
	Precarious Work	Vulnerable Employment
(1)	(2)	(3)
Tipe Daerah		
Perkotaan	10,97	41,87
Perdesaan	11,62	39,41
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	12,17	29,75
Perempuan	9,90	58,76
Total	11,33	40,50

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017

Persentase lansia yang termasuk dalam *vulnerable employment* adalah 40,50 persen. Persentase ini lebih tinggi pada lansia di perkotaan dibandingkan di perdesaan (41,87 persen berbanding 39,41 persen) dan pada lansia perempuan dibandingkan lansia laki-laki (58,76 persen berbanding 29,75 persen). Lansia dengan pekerjaan yang termasuk dalam *vulnerable employment* cenderung untuk jatuh dalam kemiskinan ketika permintaan menurun.

Empat dari Sepuluh Lansia termasuk Vulnerable Employment



C. Jam Kerja Layak

Satu dari Empat Lansia Bekerja Berlebihan

Seiring dengan penurunan kondisi fisik, lansia selayaknya tidak bekerja secara berlebihan dari segi waktu. Dengan demikian, lansia dapat menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Apabila lansia bekerja secara berlebihan, kondisi fisik dan mental lansia terancam dalam jangka panjang. Jam kerja berlebih juga akan menurunkan produktivitas pekerjaan (ILO, 2011). Menurut ILO, jumlah jam kerja maksimal dalam seminggu adalah 48 jam. Apabila melebihi batas tersebut, maka pekerjaan dianggap tidak layak dari segi jam kerja.

Tabel 5.5 Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu, 2017

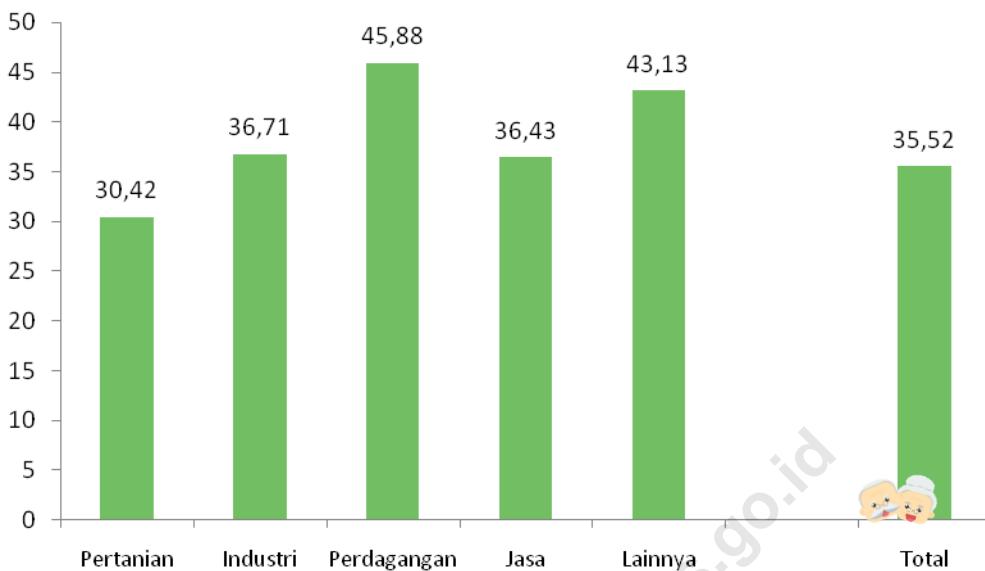
Karakteristik	Jumlah Jam Kerja (dalam jam)					Total
	0jam	1–14jam	15–34jam	35–48jam	49jam atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tipe Daerah						
Perkotaan	4,04	10,76	25,27	29,35	30,59	100,00
Perdesaan	3,53	13,60	36,71	26,85	19,31	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	3,72	9,38	29,33	31,18	26,38	100,00
Perempuan	3,81	17,46	35,70	22,39	20,64	100,00
Total	3,75	12,35	31,67	27,95	24,27	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017

Faktanya, sebesar 24,27 persen lansia di Indonesia bekerja secara berlebihan. Persentase lansia bekerja berlebihan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (30,59 persen berbanding 19,31 persen). Persentase jam kerja yang lebih rendah di perdesaan dapat disebabkan karena sebagian lansia di perdesaan bekerja di sektor pertanian dimana pekerjaan tersebut tidak memerlukan waktu kerja yang lama.



Gambar 5.5 Rata-rata Jumlah Jam Kerja (dalam jam) Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2017



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2017

Secara rata-rata, jumlah jam kerja lansia per minggu adalah 35,52 jam atau setara dengan 5 jam per hari. Dilihat dari lapangan usaha, rata-rata jumlah jam kerja tertinggi adalah sektor perdagangan dan sektor lainnya dimana rata-rata jumlah jam kerja lansia pada sektor tersebut berturut-turut mencapai 45,88 jam per minggu dan 43,13 jam per minggu. Sementara itu, sektor dengan jam kerja terendah adalah sektor pertanian dengan rata-rata jumlah jam kerja hanya 30,42 jam per minggu.

D. Pendapatan yang Mencukupi

Lansia berhak memperoleh pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhannya dan menjamin kesejahteraan hidupnya. Selain itu, lansia memerlukan biaya untuk perawatan kesehatan disebabkan kondisi fisik yang menurun. Oleh karena itu, lansia berhak atas pendapatan yang mencukupi.

Separuh lansia
bekerja dengan
pendapatan
kurang dari 1
juta



Tabel 5.6 Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Upah/Gaji/Pendapatan dalam Sebulan, 2017

Karakteristik	Upah/Gaji/Pendapatan (Rupiah)				Total
	Kurang dari 1.000.000	1.000.000 – 1.999.999	2.000.000 – 2.999.999	3.000.000 atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tipe Daerah					
Perkotaan	42,80	29,65	12,85	14,70	100,00
Perdesaan	59,38	26,10	7,37	7,14	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	40,37	32,03	13,57	14,03	100,00
Perempuan	67,85	21,12	4,71	6,32	100,00
Total	50,50	28,00	10,31	11,19	100,00

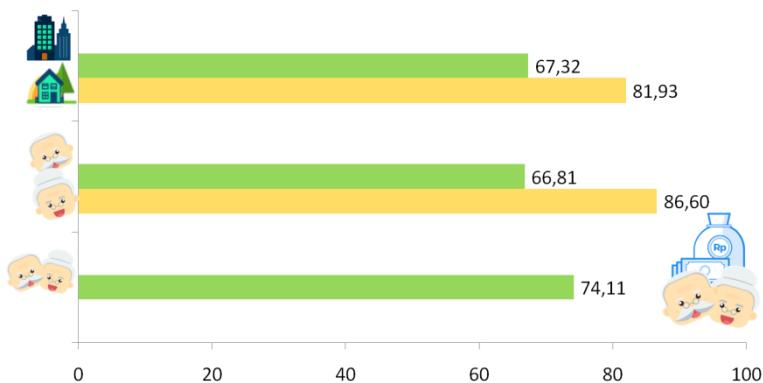
Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2017

Berdasarkan Tabel 5.6, separuh lansia yang bekerja menerima upah kurang dari satu juta per bulan. Rendahnya upah yang diterima lansia ini dapat disebabkan karena sebagian lansia bekerja di sektor pertanian dan tingkat pendidikan lansia yang rendah. Apabila dibedakan berdasarkan tipe daerah, lansia yang tinggal di perdesaan memperoleh pendapatan yang lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Sebesar 59,38 persen lansia di perdesaan memperoleh pendapatan kurang dari 1.000.000 per bulan. Persentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan persentase lansia perkotaan yang memperoleh pendapatan kurang dari 1.000.000 per bulan yaitu sebesar 42,80 persen.

Sementara itu, lansia perempuan memperoleh pendapatan yang lebih rendah dibandingkan lansia laki-laki. Sebesar 67,85 persen lansia perempuan memperoleh pendapatan kurang dari 1.000.000 per bulan. Persentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan persentase lansia laki-laki yang memperoleh pendapatan kurang dari 1.000.000 per bulan yaitu sebesar 40,37 persen.



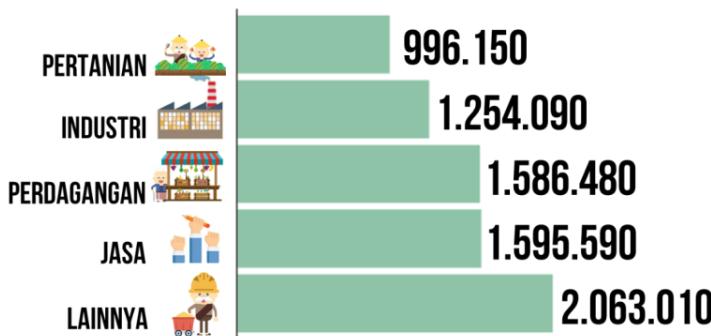
Gambar 5.6 Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja dengan Upah Rendah, 2017



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017

Menurut ILO (2011), upah rendah bernilai di bawah 2/3 median pendapatan. Berdasarkan Gambar 5.6, sebesar 74,11 persen lansia memperoleh upah rendah. Dengan kata lain, 3 dari 4 lansia bekerja memperoleh pendapatan tidak layak. Apabila dibedakan berdasarkan tipe daerah, persentase lansia bekerja dengan upah rendah lebih besar di perdesaan dibandingkan di perkotaan (81,93 persen berbanding 67,32 persen). Hal ini dapat disebabkan karena lapangan usaha lansia di perdesaan didominasi pertanian dengan upah yang rendah. Kemudian, apabila dibedakan berdasarkan jenis kelamin, persentase lansia perempuan dengan upah rendah lebih tinggi dibandingkan lansia laki-laki (86,60 persen berbanding 66,81 persen).

Gambar 5.7 Rata-rata Besarnya Upah/Gaji/Pendapatan (ribuan rupiah) Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2017



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017



Lansia yang bekerja di sektor pertanian memperoleh pendapatan yang paling rendah yaitu rata-rata 996.150 rupiah per bulan. Sedangkan, sektor dengan rata-rata pendapatan tertinggi adalah sektor lainnya yang mencakup pertambangan, penggalian, konstruksi dan lain-lain. Lansia yang bekerja di sektor ini memperoleh pendapatan rata-rata 2.063.010 rupiah per bulan. Mengingat bahwa sebagian lansia bekerja di sektor pertanian, maka diperlukan perhatian terkait kesejahteraan ekonomi lansia tersebut.

https://www.bps.go.id



BAB 06

SOSIAL EKONOMI



Lansia kini lebih mapan dibandingkan pendahulunya

Sebesar 15,02 persen lansia tua (80 tahun ke atas) dan 22,30 persen lansia muda (60-69 tahun) tergolong kelompok pengeluaran 20 persen tertinggi

Memasuki usia senja, lansia memerlukan dukungan baik secara sosial maupun ekonomi. Hal ini disebabkan terjadinya transisi dari usia muda ke usia senja yang ditandai dengan penurunan kondisi fisik lansia. Akibatnya, kapabilitas lansia menurun dan lansia lebih bergantung pada orang lain. Transisi ini juga mengakibatkan meningkatnya waktu luang yang dimiliki lansia disebabkan transisi dari masa bekerja menuju masa pensiun. Waktu luang ini dapat diisi dengan bersosialisasi dan bepergian yang menjadi suatu kebutuhan bagi lansia disebabkan karena lansia rentan untuk merasa kesepian. Transisi tersebut juga mengakibatkan lansia memerlukan dukungan secara finansial untuk melanjutkan hidupnya. Penelitian terkait menemukan bahwa kerawanan sosial meningkat seiring dengan bertambahnya usia (Melchiorre, 2013). Rasa kesepian dan dukungan sosial yang rendah ini merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi kondisi psikis lansia. Oleh karena itu, penting untuk memastikan kebutuhan sosial dan ekonomi lansia terpenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.

A. Rumah Layak bagi Lansia

**Sekitar 9 dari 10
Lansia Tinggal di
Rumah Layak
Huni**

Rumah tempat tinggal mencerminkan banyak hal. Perumahan dapat merefleksikan kondisi ekonomi dan kesehatan mereka yang tinggal di dalamnya. Hal ini tidak terkecuali bagi lansia. Pada lansia, aspek perumahan menjadi sorotan disebabkan lansia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. Oleh karena itu, lansia memerlukan rumah yang nyaman, aman, dan sehat untuk ditinggali.

Kepemilikan tempat tinggal merupakan salah satu aspek dari perumahan. Dengan memiliki rumah sendiri, individu dapat mengalihkan biaya yang dikeluarkan untuk sewa tempat tinggal ke kebutuhan lain, seperti investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Selain itu, memiliki rumah sendiri dapat meningkatkan kepuasan hidup karena hal tersebut dianggap sebagai sebuah pencapaian. Kepemilikan tempat tinggal pada lansia dapat dilihat pada Tabel 6.1.



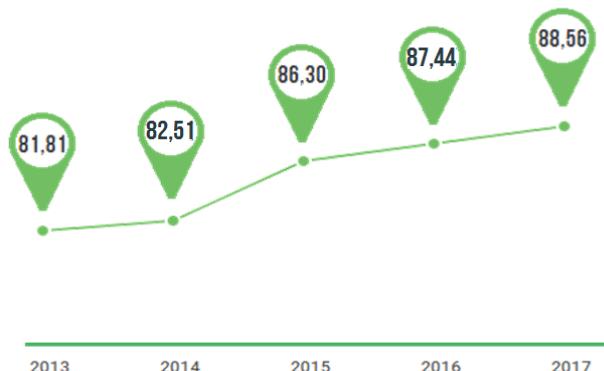
Tabel 6.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2017

Karakteristik	Status Kepemilikan Tempat Tinggal				Total
	Milik sendiri	Kontrak/ sewa	Bebas sewa	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tipe Daerah					
Perkotaan	89,24	3,76	6,16	0,84	100,00
Perdesaan	95,25	0,31	4,13	0,31	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	93,01	2,19	4,25	0,55	100,00
Perempuan	91,59	1,87	5,95	0,59	100,00
Total	92,26	2,02	5,14	0,57	100,00

Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Persentase lansia yang memiliki rumah sendiri mencapai 92,26 persen. Persentase ini lebih tinggi pada lansia perdesaan dibandingkan lansia perkotaan (95,25 persen berbanding 89,24 persen). Tingginya persentase ini dapat disebabkan mahalnya harga rumah di perkotaan atau preferensi lansia untuk tinggal di perdesaan.

Gambar 6.1 Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni, 2013-2017



Sumber : BPS, Susenas Kor 2013- 2017

Selain kepemilikan tempat tinggal, kelayakan rumah tempat tinggal merupakan faktor krusial dalam kualitas hidup lansia. Beberapa penelitian mengemukakan hubungan yang berbanding lurus antara



rumah tidak layak huni dan angka kesakitan. Hubungan ini lebih terlihat pada lansia disebabkan lansia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah (Blackman *et al.*, 1989). Gambar 6.1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan persentase lansia yang tinggal di rumah layak huni selama lima tahun terakhir. Persentase lansia yang tinggal di rumah layak huni mencapai 88,56 persen di tahun 2017. Persentase ini meningkat dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 87,44 persen.

Tabel 6.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Status Kelayakan Rumah, 2017

Karakteristik	Status Layak Huni			Total
	Rumah layak huni	Rawan layak huni	Tidak layak huni	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tipe Daerah				
Perkotaan	94,78	4,68	0,54	100,00
Perdesaan	82,44	13,83	3,74	100,00
Kelompok Pengeluaran				
40% terbawah	81,47	14,78	3,75	100,00
40% menengah	91,68	7,08	1,24	100,00
20% teratas	98,06	1,55	0,39	100,00
Total	88,56	9,29	2,15	100,00

Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

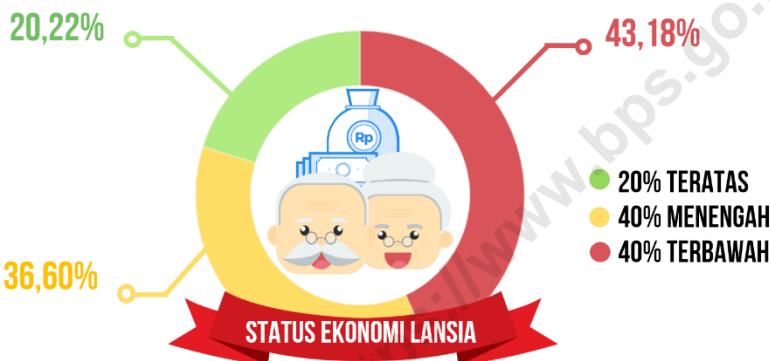
Berdasarkan Tabel 6.2, dilihat dari tipe daerah, persentase lansia perkotaan yang tinggal di rumah layak huni lebih tinggi dibandingkan lansia perdesaan (94,78 persen berbanding 82,44 persen). Berdasarkan kelompok pengeluaran, semakin tinggi kelompok pengeluaran lansia, semakin besar persentase lansia yang tinggal di rumah layak huni. Yang cukup menjadi perhatian adalah adanya kesenjangan yang cukup tinggi pada lansia yang tinggal di rumah tidak layak huni (rutilahu) antara daerah perkotaan dan perdesaan. Ternyata, lansia di perdesaan hampir tujuh kali lipat lebih tinggi tinggal di rumah tidak layak huni dibandingkan lansia di perkotaan.



B. Status Ekonomi Lansia

Transisi menuju lansia dapat diartikan sebagai transisi dari masa bekerja menuju masa pensiun. Apabila lansia tetap bekerja, produktivitas yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan penduduk berusia muda. Akibatnya, upah yang diperoleh lansia juga rendah. Selain itu, lansia memerlukan biaya untuk perawatan kesehatan. Seluruh faktor tersebut mengakibatkan lansia rentan hidup dalam kemiskinan. Beberapa literatur mengindikasikan bahwa rendahnya status ekonomi berkaitan dengan kualitas hidup yang buruk. Sehingga, status ekonomi menentukan kualitas hidup lansia.

Gambar 6.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga, 2017



Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Idealnya, ketika seseorang memasuki masa tua mereka sudah memiliki kemapanan ekonomi, sehingga di saat produktivitas mulai menurun kualitas hidup lansia masih terjaga. Akan tetapi, fakta yang terjadi saat ini masih ada lansia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Dalam hal ini status ekonomi rumah tangga dilihat dari kelompok pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari tiga kategori, yaitu : 40 persen terbawah (ekonomi rendah), 40 persen menengah (ekonomi menengah), dan 20 persen teratas (ekonomi tinggi).

Berdasarkan Gambar 6.2, terlihat bahwa lansia Indonesia masih didominasi oleh mereka yang tinggal pada rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah (43,18 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa kehidupan lansia Indonesia masih cukup memprihatinkan, apalagi jika hal ini terjadi pada lansia dengan



kondisi kesehatan yang sudah tidak prima dan membutuhkan biaya pengobatan yang relatif tinggi.

Fenomena ini terlihat pada Tabel 6.3, di mana rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah lebih banyak terdapat pada lansia tua (80+) yang besarannya lebih dari 50 persen. Uraian fakta tersebut semakin memperkokoh fenomena yang banyak terjadi pada negara berkembang, di mana penuaan penduduk tidak beriringan dengan kemapanan ekonomi yang dimiliki. Sehingga argumen yang diungkapkan dalam Adioetomo (2013) bahwa Indonesia *getting older before getting rich* tidak terbantahkan.

Tabel 6.3 Persentase Penduduk Lansia Menurut Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga, 2017

Karakteristik	Kelompok Pengeluaran			Total
	40% terbawah	40% menengah	20% teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tipe Daerah				
Perkotaan	43,88	35,53	20,59	100,00
Perdesaan	44,30	38,00	17,70	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-laki	41,68	37,29	21,04	100,00
Perempuan	44,54	35,98	19,48	100,00
Kelompok umur				
Lansia Muda (60-69)	39,58	38,12	22,30	100,00
Lansia Madya (70-79)	48,17	34,60	17,23	100,00
Lansia Tua (80 +)	52,73	32,25	15,02	100,00
Total	43,18	36,60	20,22	100,00

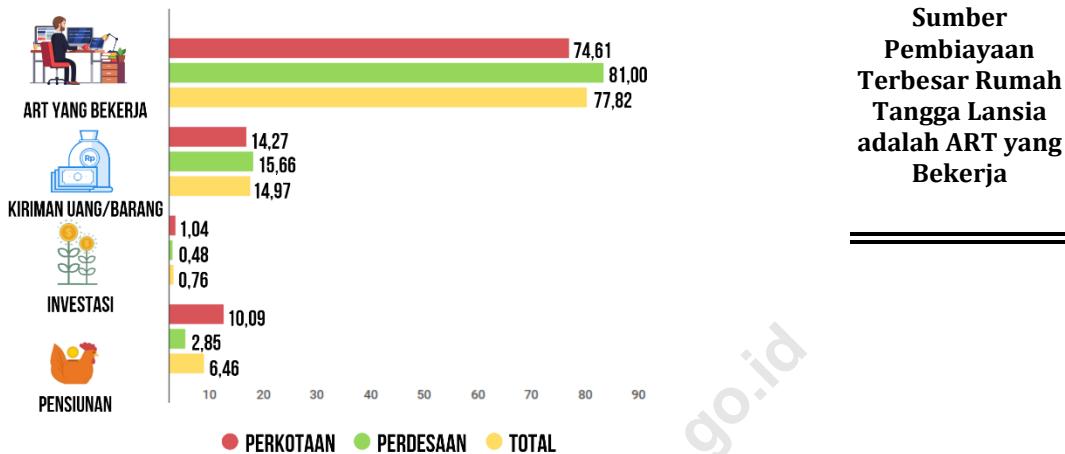
Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Persentase rumah tangga lansia menurut sumber pembiayaan terbesar dapat dilihat pada Gambar 6.3. Apabila dirinci menurut sumber pembiayaan terbesar dalam rumah tangga, sebesar 77,82 persen rumah tangga lansia memperoleh pembiayaan terbesar dari ART yang bekerja. Persentase rumah tangga lansia di perdesaan dengan sumber pembiayaan terbesar ART yang bekerja lebih tinggi dibandingkan rumah tangga lansia di perkotaan (81,00 persen berbanding 74,61 persen). Sementara itu, di perkotaan, persentase rumah tangga lansia dengan sumber pembiayaan terbesar berupa



pensiunan lebih tinggi dibandingkan rumah tangga lansia perdesaan (10,09 persen berbanding 2,85 persen).

Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Sumber Pembiayaan Terbesar Rumah Tangga, 2017



Sumber :BPS, Susenas Kor 2017

Jika membandingkan antar kelompok pengeluaran rumah tangga, terdapat perbedaan yang cukup besar antar kategori kelompok pengeluaran. Semakin tinggi kelompok pengeluaran, semakin kecil persentase rumah tangga lansia dengan sumber pembiayaan terbesar dari ART yang bekerja.

Tabel 6.4 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga dan Sumber Pembiayaan Terbesar Rumah Tangga, 2017

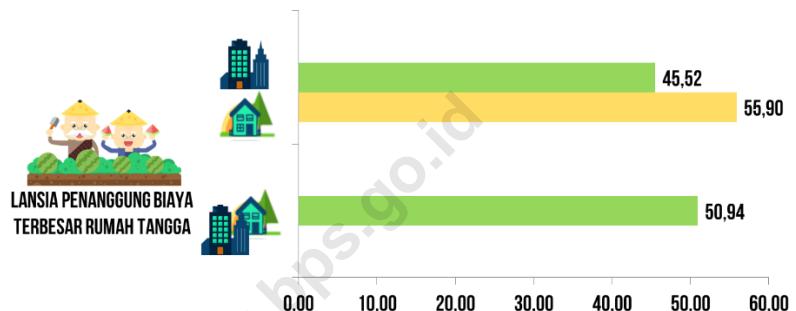
Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga	Sumber pembiayaan terbesar rumah tangga					Total
	ART yang bekerja	Kiriman uang/ barang	Investasi (deposito, royalti, saham, bunga bank, dan sejenis)	Pensiunan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
40% terbawah	81,42	16,09	0,51	1,98	100,00	
40% menengah	78,59	14,76	0,55	6,10	100,00	
20% teratas	69,06	13,04	1,65	16,26	100,00	
Total	77,82	14,97	0,76	6,46	100,00	

Sumber : BPS, Susenas Kor 2017



Sebaliknya, seiring peningkatan kelompok pengeluaran, semakin besar persentase rumah tangga lansia dengan sumber pembiayaan terbesar berupa uang pensiun. Pada rumah tangga lansia yang tergolong 40 persen terbawah, persentase rumah tangga dengan sumber pembiayaan utama pensiunan jauh lebih rendah dibandingkan rumah tangga lansia yang tergolong 20 persen teratas (1,98 persen berbanding 16,26 persen).

Gambar 6.4 Persentase Rumah Tangga Lansia dengan Lansia sebagai Penanggung Pembiayaan Terbesar, 2017



Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Dari seluruh rumah tangga lansia dengan sumber pembiayaan terbesar adalah ART yang bekerja, sebesar 50,94 persen penanggung pembiayaan terbesar adalah lansia. Persentase ini lebih tinggi di perdesaan dibandingkan di perkotaan (55,90 persen berbanding 45,52 persen). Dengan kata lain, meskipun berusia lanjut, lansia masih menjadi tulang punggung dari rumah tangganya. Hal ini menjadi menarik jika kita kaji, apakah bekerja pada lansia merupakan suatu bentuk keterpaksaan atau sukarela sebagai bagian bagian dari aktualisasi diri.

C. Lansia yang Bepergian

Bepergian merupakan salah satu aktivitas waktu luang yang dilakukan oleh lansia. Dengan bepergian, lansia dapat bersilaturahmi dengan keluarga, bersosialisasi, dan tujuan lainnya. Selain itu, bepergian juga dapat memengaruhi psikologis lansia (Rosenbloom, 1988). Bepergian penting bagi lansia karena lansia rentan depresi ketika merasa terisolir.



Berdasarkan Gambar 6.4, terlihat bahwa sebesar 17,67 persen lansia pernah bepergian selama setahun terakhir. Sedangkan, 82,33 persen sisanya tidak bepergian selama setahun terakhir. Apabila dilihat berdasarkan tipe daerah, terdapat perbedaan antara persentase lansia perkotaan dan perdesaan yang pernah bepergian.

Gambar 6.5 Persentase Penduduk Lansia yang Bepergian Setahun Terakhir, 2017



Sekitar 17 dari 100 Lansia
Bepergian dalam Setahun Terakhir

Sumber :BPS, Susenas Kor 2017

Persentase lansia di perkotaan yang pernah bepergian lebih tinggi dibandingkan persentase lansia perdesaan (22,95 persen berbanding 12,47 persen). Sarana transportasi di daerah perdesaan yang lebih terbatas mengakibatkan berkurangnya aktivitas bepergian lansia perdesaan (Allman, et al. 2006).

Tabel 6.5 Persentase Penduduk Lansia yang Bepergian Setahun Terakhir, 2017

Karakteristik	Bepergian	Tidak Bepergian	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tipe Daerah			
Perkotaan	22,95	77,05	100,00
Perdesaan	12,47	87,53	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-laki	18,69	81,31	100,00
Perempuan	16,75	83,25	100,00
Kelompok Pengeluaran			
40% terbawah	8,11	91,89	100,00
40% menengah	17,93	82,07	100,00
20% teratas	37,63	62,37	100,00
Total	17,67	82,33	100,00

Sumber : BPS, Susenas Kor 2017



Selain itu, terdapat perbedaan persentase lansia bepergian antar kelompok pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi kelompok pengeluaran, semakin besar persentase lansia yang bepergian. Pada lansia dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, persentase lansia yang pernah bepergian hanya 8,11 persen. Sedangkan, pada lansia dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas, persentase lansia yang pernah bepergian mencapai 37,63 persen. Persentase lansia yang bepergian dapat dilihat pada Tabel 6.5.

D. Lansia Korban Kejahatan

**Masih Terjadi
Tindak
Kejahatan pada
Penduduk
Lansia**

Lansia merupakan kelompok penduduk yang rentan ketika mengalami tindak kejahatan. Akibat kondisi fisik yang tidak sebugar ketika masih muda, lansia cenderung pasrah ketika terjadi tindak kejahatan (Yin, 1985). Ketika lansia menjadi korban kejahatan, dampaknya lebih besar dibandingkan kelompok umur lain. Hal ini disebabkan lansia lebih rentan untuk terluka secara fisik karena fisik mereka yang rapuh.

Tabel 6.6 **Persentase Penduduk Lansia yang Menjadi Korban Kejahatan Setahun Terakhir, 2017**

Karakteristik	Pernah Menjadi Korban	Tidak Menjadi Korban	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tipe Daerah			
Perkotaan	1,49	98,51	100,00
Perdesaan	1,17	98,83	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-laki	1,74	98,26	100,00
Perempuan	0,95	99,05	100,00
Total	1,33	98,67	100,00

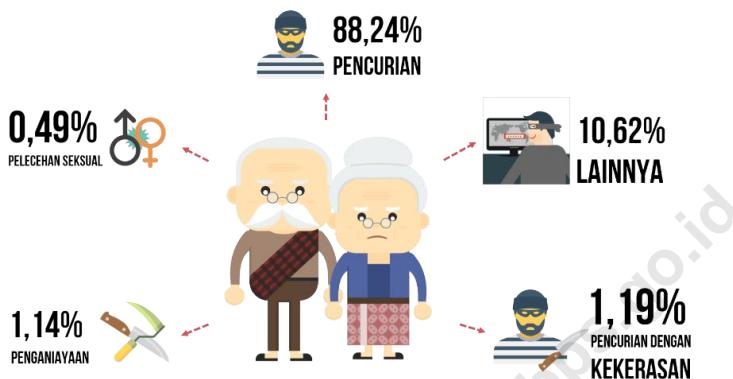
Sumber : BPS, Susenas Kor 2017

Berdasarkan Tabel 6.6, dapat dilihat bahwa sebesar 1,33 persen penduduk lansia menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir. Persentase lansia laki-laki yang pernah menjadi korban kejahatan selama setahun terakhir lebih tinggi dibandingkan lansia perempuan



(1,74 persen berbanding 0,95 persen). Kejahatan yang dialami lansia dapat berupa pencurian, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan lainnya. Persentase lansia menurut jenis kejahatan yang dialami dapat dilihat pada Gambar 6.6.

Gambar 6.6 Persentase Penduduk Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2017



Sumber: BPS, Susenas Kor 2017

Persentase terbesar jenis kejahatan yang dialami lansia adalah pencurian (88,24 persen). Artinya, dari 10 lansia yang menjadi korban kejahatan, sekitar 9 di antaranya menjadi korban pencurian.



BAB 07

PERLINDUNGAN SOSIAL



Lebih dari separuh lansia memiliki jaminan kesehatan (63,24%)

Sebesar 42,63% rumah tangga membeli/menerima raskin/rastra

Perlindungan sosial yang terdapat pada rencana pembangunan nasional diartikan sebagai suatu langkah kebijakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin, terutama kelompok masyarakat yang paling miskin (*the poorest*) dan kelompok masyarakat miskin (*the poor*). Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial dilaksanakan salah satunya melalui bantuan sosial. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial dapat bersifat sementara dan/atau berkelanjutan seperti dalam bentuk bantuan langsung maupun penyediaan aksesibilitas.

Lansia merupakan bagian dari masyarakat yang perlu diperhatikan khususnya terkait dengan program-program perlindungan sosial. Bab ini akan memberikan gambaran umum mengenai pencapaian penyelenggaraan perlindungan sosial yang telah dilakukan pemerintah khususnya untuk penduduk lansia. Terdapat beberapa jenis program perlindungan sosial tetapi tidak semuanya diperuntukkan langsung kepada penduduk lansia. Jenis perlindungan sosial yang dicakup dalam bab ini antara lain bantuan beras miskin (raskin)/beras sejahtera (rastra), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), jaminan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan kredit usaha.

A. Raskin/Rastrra

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga Sasaran. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan



beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Hampir separuh rumah tangga lansia membeli/menerima beras miskin (raskin)/beras sejahtera (rastra) dalam empat bulan terakhir di tahun 2017, yaitu sebesar 42,63 persen. Persentase ini lebih sedikit/menurun dibandingkan dengan persentase tahun sebelumnya (52,38 persen). Hal ini dimungkinkan karena pada tahun 2017 program raskin/rastra bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan secara bertahap di 44 kota di Indonesia, yang selanjutnya pada tahun 2018 BPNT akan diperluas pelaksanaannya menjadi 317 kabupaten/kota. Persentase rumah tangga lansia yang membeli/menerima raskin/rastra diperdesaan lebih banyak daripada di perkotaan (53,11 persen berbanding 32,09 persen).

Tabel 7.1 Karakteristik Penyaluran Bantuan Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) kepada Rumah Tangga Lansia, 2017

Karakteristik Penyaluran Raskin	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase rumah tangga lansia yang membeli/menerima raskin/rastra	32,09	53,11	42,63
Rata-rata banyaknya (kg) raskin/rastra yang diterima/dibeli rumah tangga lansia perbulan	6,35	6,94	6,72
Rata-rata harga per kg (rupiah) raskin/rastra yang dibeli rumah tangga lansia	2 087,96	2 013,67	2 041,54
Kelompok pengeluaran rumah tangga lansia penerima raskin/rastra			
40% terbawah	52,49	60,02	57,00
40% menengah	33,03	49,62	41,96
20% teratas	9,12	31,67	14,47

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017

Tabel 7.1 menunjukkan rata-rata banyaknya raskin/rastra yang diterima/dibeli oleh satu rumah tangga lansia sebanyak 6,72 kg per bulan. Jumlah tersebut masih jauh lebih rendah daripada jumlah alokasi sasaran yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 15 kg per



**Hampir Separuh
Rumah Tangga
Lansia Membeli/
Menerima
Raskin/Rastra
(42,63%)**

bulan per rumah tangga sasaran. Umumnya, hal ini terjadi karena adanya kebijakan lokal yang menetapkan supaya beras dibagi secara merata kepada hampir seluruh rumah tangga di lingkungannya. Dengan kata lain, rumah tangga penerima raskin/rastra lebih banyak daripada jumlah rumah tangga sasaran yang ditetapkan pemerintah. Hal ini bisa dilihat juga dari kelompok pengeluaran rumah tangga lansia penerima raskin/rastra, dimana baik kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, 40 persen menengah, maupun 20 persen teratas menerima raskin/rastra, walaupun penerima terbesar terdapat di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah (57 persen). Persentase rumah tangga lansia yang menerima raskin/rastra lebih dari lima puluh persen paling banyak terdapat di provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Barat, berturut-turut sebesar 58,15 persen dan 56,89 persen (lihat Lampiran 7.1). Akan tetapi, bila dilihat dari banyaknya raskin/rastra yang diterima khususnya di provinsi Nusa Tenggara Barat paling sedikit dibandingkan provinsi lainnya, yaitu hanya 4,98 kg (lihat Lampiran 7.2). Terlihat bahwa provinsi dengan persentase rumah tangga lansia yang paling banyak menerima raskin/rastra justru banyaknya raskin/rastra yang diterima tiap rumah tangga lebih sedikit dibandingkan dengan provinsi lainnya.

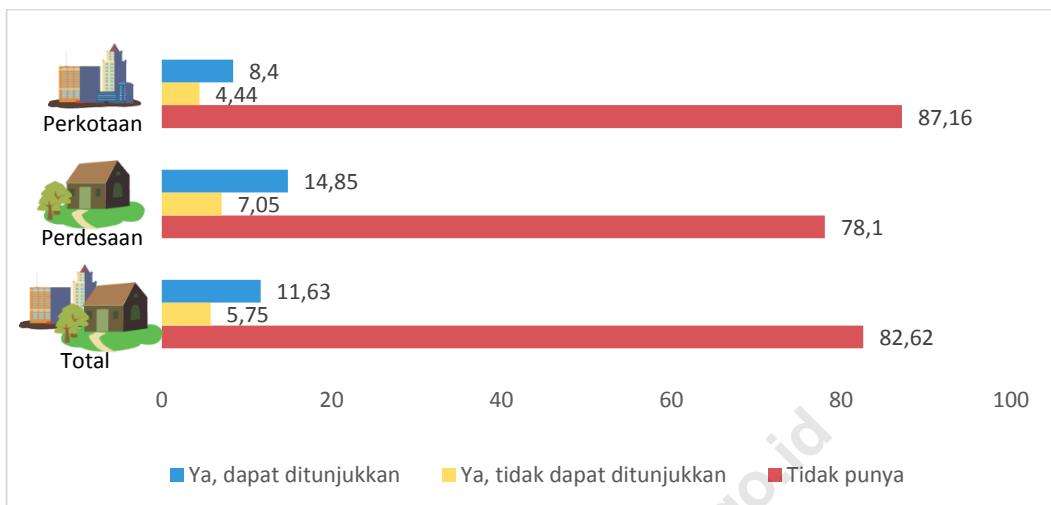
Tabel 7.1 juga menunjukkan bahwa rata-rata harga raskin/rastra yang dibayar rumah tangga lansia adalah sebesar 2.041,54 rupiah per kilogram. Rata-rata harga di perdesaan sedikit lebih rendah daripada di perkotaan (2.013,67 rupiah berbanding 2.087,96 rupiah per kg).

B. Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda rumah tangga miskin. KPS berguna antara lain untuk mendapatkan manfaat dari program raskin/rastra. Sejak tahun 2015, keberadaan KPS digantikan oleh Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Perbaikan pengelolaan KPS/KKS ini bertujuan untuk memperketat prosedur penyaluran kepada rumah tangga sasaran, sehingga penyalahgunaan bantuan sosial bisa diminimalisir.



Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Kartu Perlindungan Sosial atau Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/KKS), 2017



Sumber: BPS, Susenas Kor 2017

Persentase rumah tangga lansia yang memiliki KPS/KKS sebesar 17,38 persen. Persentase rumah tangga lansia di perkotaan yang memiliki KPS/KKS lebih kecil daripada perdesaan (12,84 persen berbanding 21,90 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat perekonomian lansia yang tinggal di perdesaan relatif lebih rendah daripada di perkotaan. Persentase rumah tangga lansia yang memiliki KPS/KKS paling tinggi terdapat di provinsi DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur, berturut-turut sebesar 28,22 persen dan 26,48 persen (lihat Lampiran 7.4.3).

C. Jaminan Sosial

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, sementara Pasal 34 menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sementara itu, menurut Undang-undang RI No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional



**Masih Sedikit Rumah Tangga Lansia yang Memiliki/
Menerima Jaminan Sosial (12,63%)**

pasal 1 menyebutkan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Jaminan sosial merupakan salah satu skema perlindungan sosial. Perbedaannya dengan bantuan sosial adalah jaminan sosial hanya diberikan kepada para peserta sesuai dengan kontribusinya berupa premi atau tabungan yang dibayarkannya. Jaminan pensiun/veteran, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kematian, dan pesangon PHK adalah bentuk jaminan sosial yang diterapkan di Indonesia.

Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Tipe Daerah, 2017

Kepemilikan Jaminan Sosial	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah tangga lansia yang memiliki/menerima jaminan sosial	18,83	6,47	12,63
Jenis jaminan sosial			
- Jaminan pensiun/veteran	15,25	4,92	10,07
- Jaminan hari tua	5,27	1,63	3,44
- Asuransi kecelakaan kerja	4,38	1,51	2,94
- Jaminan/asuransi kematian	4,08	1,57	2,82
- Pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK)	1,45	0,51	0,98

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017

Rumah tangga lansia yang memiliki jaminan sosial di perkotaan (18,83 persen) jauh lebih besar dibandingkan perdesaan (6,47 persen). Hal ini dimungkinkan akses dan fasilitas yang lebih baik memudahkan lansia di perkotaan lebih mudah untuk mendapatkan jaminan sosial dibandingkan mereka yang tinggal di perdesaan.

Jaminan pensiun/veteran merupakan jenis jaminan sosial yang paling banyak dimiliki oleh rumah tangga lansia dengan persentase sebesar 10,07 persen. Jenis jaminan sosial yang paling sedikit



dimiliki oleh rumah tangga lansia adalah pesangon PHK (0,98 persen).

Dilihat menurut kelompok pengeluarannya, rumah tangga lansia dengan 40 persen kelompok pengeluaran terbawah yang memiliki jaminan sosial hanya sekitar 4,72 persen. Sedangkan rumah tangga lansia dengan 20 persen kelompok pengeluaran teratas sebesar 29,63 persen yang telah memiliki jaminan sosial (lihat Tabel 7.3).

Tabel 7.3 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial, 2017

Kelompok pengeluaran (1)	Kepemilikan jaminan sosial		Total (4)
	Memiliki (2)	Tidak memiliki (3)	
40% terbawah	4,72	95,28	100,00
40% menengah	12,31	87,69	100,00
20% teratas	29,36	70,64	100,00
Total	12,63	87,37	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017

D. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sejak tahun 2017 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.



Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang meliputi: komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun; dan komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia 6 (enam) sampai 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat



penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

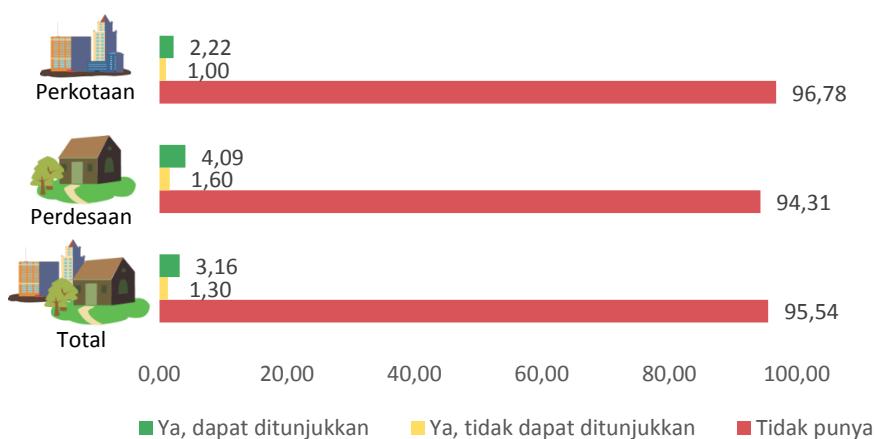
Tabel 7.4 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat/Menjadi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 2017

Penerimaan PKH	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah tangga lansia yang masih tercatat/menjadi penerima PKH	2,99	5,50	4,25

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017

Selama tahun 2017, rumah tangga lansia yang masih tercatat/menjadi penerima PKH yaitu sebesar 4,25 persen (lihat Tabel 7.4). Persentase rumah tangga lansia yang masih tercatat/menjadi penerima PKH di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan (5,50 persen berbanding 2,99 persen). Sementara itu, persentase rumah tangga lansia yang memiliki kartu PKH sebesar 4,46 persen, dengan persentase di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan (5,69 persen berbanding 3,22 persen). Lihat Gambar 7.2.

Gambar 7.2 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Kartu PKH, 2017



Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



E. Kredit Pengembangan Usaha

Selain melalui bantuan sosial dan jaminan sosial, program perlindungan sosial juga disalurkan melalui bantuan pengembangan usaha. Bantuan pengembangan usaha disalurkan melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit perbankan dan koperasi, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Sebenarnya program pengembangan usaha ini disalurkan kepada masyarakat secara umum, namun penyaluran dan pengaruhnya secara khusus kepada lansia juga dapat dilihat.

Rumah tangga lansia yang pernah menerima bantuan kredit pengembangan usaha dalam setahun terakhir yaitu sebesar 19,22 persen. Persentase rumah tangga lansia yang pernah menerima kredit pengembangan usaha di perkotaan lebih besar daripada di perdesaan (20,34 persen berbanding 18,10 persen). Sementara itu, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada penyaluran masing-masing jenis kredit pengembangan usaha antara rumah tangga lansia yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan (lihat Tabel 7.5).

Tabel 7.5 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Kredit Pengembangan Usaha dan Tipe Daerah, 2017

Penerimaan Kredit Pengembangan Usaha	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah tangga lansia yang pernah menerima kredit pengembangan usaha			
	20,34	18,10	19,22
Jenis Kredit Pengembangan Usaha			
- Kredit usaha rakyat (KUR)	3,83	3,98	3,91
- Kredit Bank Umum selain KUR	4,98	3,94	4,46
- Kredit Bank Perkreditan Rakyat	1,63	1,25	1,44
- Kredit Koperasi	3,99	3,88	3,93
- Perorangan (dengan bunga)	2,39	2,32	2,35
- Pegadaian	1,18	0,84	1,01
- Perusahaan Leasing	3,45	1,65	2,55
- Kelompok Usaha Bersama (KUBE/KUB)	0,24	0,44	0,34
- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	0,36	0,47	0,41
- Lainnya	2,66	2,79	2,73

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



F. Jaminan Kesehatan

Lebih dari separuh lansia memiliki jaminan kesehatan (63,24%)

Program jaminan pemberian/asuransi kesehatan memberikan perlindungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan. Permasalahan kesehatan menjadi hal yang harus diperhatikan pada lansia. Lansia membutuhkan akses pengobatan dan layanan kesehatan yang mudah dan murah.

Jaminan kesehatan belum menjangkau seluruh lansia. Sekitar tiga dari lima lansia telah memiliki jaminan kesehatan (63,24 persen). Menurut jenis kelamin, tidak ada perbedaan kepemilikan jaminan kesehatan antara lansia laki-laki dan perempuan. Menurut daerah tempat tinggalnya, persentase lansia di perkotaan memiliki jaminan kesehatan (67,53 persen) lebih besar dibandingkan di perdesaan (59,01 persen).

Tabel 7.6 Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan, 2017

Karakteristik Demografi	Kepemilikan Jaminan Kesehatan					Lansia yang memiliki jaminan kesehatan
	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/kantor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	33,47	17,08	12,88	0,83	1,51	63,24
Tipe daerah						
Perkotaan	31,25	24,61	10,54	1,41	2,69	67,53
Perdesaan	35,67	9,65	15,18	0,25	0,35	59,01
Jenis kelamin						
Laki-laki	33,18	17,72	12,60	0,88	1,77	63,63
Perempuan	33,73	16,49	13,13	0,78	1,28	62,89
Kelompok pengeluaran						
40% terbawah	40,34	7,92	13,73	0,20	0,37	60,46
40% menengah	31,51	16,29	13,48	0,42	1,16	60,62
20% teratas	22,34	38,04	9,97	2,91	4,58	73,92

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017

Jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh lansia adalah BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran), yaitu sebesar 33,47 persen. Sedangkan jaminan kesehatan yang paling sedikit dimiliki



lansia adalah asuransi kantor (0,83 persen). Kondisi ini mengindikasikan bahwa lansia di Indonesia masih tergantung pada bantuan pembiayaan jaminan kesehatan dari pemerintah. (Lihat tabel 7.6).

Hampir separuh lansia yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan, yaitu sebesar 41,29 persen. Menurut jenis kelamin, tidak ada perbedaan yang signifikan penggunaan jaminan kesehatan antara lansia laki-laki dan lansia perempuan. Sedangkan menurut tempat tinggal, ternyata lebih banyak lansia di perkotaan yang menggunakan jaminan kesehatan tersebut (48,79 persen berbanding 33,69 persen).

Sama halnya dengan kepemilikan jaminan kesehatan, jenis jaminan kesehatan yang paling banyak digunakan para lansia adalah BPJS Kesehatan PBI, yaitu sebesar 21,45 persen. Sedangkan jenis jaminan kesehatan yang paling sedikit digunakan adalah asuransi swasta, yaitu hanya 0,49 persen. (Lihat tabel 7.7).

Tabel 7.7 Persentase Penduduk Lansia yang Menggunakan Jaminan Kesehatan, 2017

Karakteristik Demografi	Penggunaan Jaminan Kesehatan					Lansia yang menggunakan jaminan kesehatan
	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/kantor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	21,45	13,96	4,46	0,49	1,11	41,29
Tipe daerah						
Perkotaan	21,48	21,18	3,46	0,85	2,08	48,79
Perdesaan	21,42	6,65	5,46	0,12	0,12	33,69
Jenis kelamin						
Laki-laki	21,51	14,56	4,07	0,54	1,27	41,78
Perempuan	21,40	13,45	4,79	0,44	0,96	40,87
Kelompok pengeluaran						
40% terbawah	25,07	5,68	5,10	0,07	0,17	36,02
40% menengah	21,11	11,80	4,49	0,23	0,76	38,25
20% teratas	16,14	30,90	3,35	1,58	3,18	54,77

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Dilihat menurut kelompok pengeluarannya, terdapat 60,46 persen lansia dengan 40 persen kelompok pengeluaran yang telah memiliki jaminan kesehatan dan hanya 36,02 persen lansia yang telah menggunakan jaminan kesehatan (lihat Tabel 7.6). Sementara itu, sebesar 73,92 persen lansia dengan 20 persen kelompok pengeluaran teratas telah memiliki jaminan kesehatan dan sebesar 54,77 persen lansia yang telah menggunakannya (lihat Tabel 7.7).

https://www.bps.go.id



**BAB
08**

PROGRAM PRO LANSIA



Sebanyak 30.000 lansia penerima
ASLUT* tersebar di seluruh
provinsi di Indonesia

*ASLUT = Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar

BAB 8

PROGRAM PRO LANSIA

Dari tahun ke tahun angka harapan hidup manusia semakin meningkat. Hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah penduduk lansia. Peningkatan jumlah lansia ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sekaligus sebagai tantangan dalam pembangunan. Peningkatan jumlah lansia akan memberi dampak terhadap kondisi ekonomi di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun dalam pemerintahan.

Menurut Maruli A Hasoloan (2017), bila permasalahan tersebut tidak diantisipasi dari sekarang, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa proses pembangunan akan mengalami berbagai hambatan. Oleh karena itu, fenomena tersebut harus dicarikan solusinya. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan program pemberdayaan bagi lanjut usia produktif. Pemberdayaan dan pengembangan tenaga kerja lansia diarahkan dalam memajukan hak-hak ketenagkerjaan, perluasan kesempatan kerja, serta wirausaha yang diwujudkan melalui pelatihan keterampilan kerja, pendampingan usaha, dan perluasan usaha yang sesuai bagi tenaga kerja lansia. Sebagai warga negara yang mempunyai hak mendapatkan pekerjaan yang layak, maka lansia juga berhak mendapatkan akses informasi, pelatihan, pekerjaan dan perlindungan. Kita terus mendorong pola pembinaan pemberdayaan dan pengembangan tenaga kerja lansia yang lebih baik, terencana, dan komprehensif (Maruli, 2017).

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Kartasasmita dalam Puspitasari dan Arsiyah, 2015). Pemberdayaan sejatinya adalah memberikan daya (energi) kepada seseorang untuk dapat melakukan sesuatu agar bisa bertransformasi (Sigit Iko, 2017). Sedangkan menurut Undang-undang RI Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, pasal 1 (11) menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pemberdayaan lansia dimaksudkan agar lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



A. Kebijakan Umum Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Di dalam Undang-undang RI Nomor 13 tahun 1998 pasal 7 dan 8, pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia; dan pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Menurut Undang-undang tersebut, melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial pemberdayaan lansia ditujukan pada lansia potensial dan lansia tidak potensial. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia meliputi: pelayanan keagamaan dan mental spiritual; pelayanan kesehatan; pelayanan kesempatan kerja; pelayanan pendidikan dan pelatihan; pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan bantuan sosial. Sedangkan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia tidak potensial meliputi: pelayanan keagamaan dan mental spiritual; pelayanan kesehatan; pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; dan pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum.

Di dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia, masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang seluas-luasnya untuk ikut berperan, baik dilakukan secara perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi sosial, atau organisasi kemasyarakatan. Dan di dalam kebijakan pelaksanaannya ditetapkan secara terkoordinasi antar instansi terkait, baik pemerintah maupun masyarakat, yang diwujudkan dalam satu wadah yang bersifat nonstruktural dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

**Kebijakan umum
pelayanan
kesejahteraan
sosial tertuang
di dalam UU RI
No 13 tahun
1998**



**Pelayanan lansia
dalam panti
tertuang di
dalam
Permensos RI No
19 tahun 2012**

B. Program-program Pelayanan Lansia

Di dalam Permensos RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lansia menyebutkan bahwa pelayanan sosial lansia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lansia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya. Pelayanan sosial lansia ini meliputi kegiatan pelayanan dalam panti dan luar panti; perlindungan; dan pengembangan kelembagaan sosial lansia. Secara garis besar program-program pelayanan dan pemberdayaan lansia antara lain sebagai berikut:

1. Pelayanan dalam Panti

Dalam Permensos RI Nomor 19 Tahun 2012, pelayanan dalam panti dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan lansia; terpenuhinya kebutuhan dasar lansia; dan meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan maupun menyediakan berbagai bentuk pelayanan sosial lansia. Pelayanan dalam panti dilaksanakan dengan menempatkan lansia dalam panti lansia untuk memenuhi kebutuhan secara layak.

Jenis pelayanan yang diberikan dalam panti, meliputi: pemberian tempat tinggal yang layak; jaminan hidup berupa makan, pakaian, pemeliharaan kesehatan; pengisian waktu luang termasuk rekreasi; bimbingan mental, sosial, keterampilan, agama; dan pengurusan pemakaman atau sebutan lain.

2. Program Pendampingan Sosial Lansia Melalui Perawatan di Rumah (*Home Care*)

Home Care adalah bentuk pelayanan pendampingan dan perawatan lansia di rumah sebagai wujud perhatian terhadap lansia dengan mengutamakan peran masyarakat berbasis keluarga. Sasaran program pelayanan *Home Care* adalah lansia yang memiliki hambatan seperti sakit, penyandang cacat atau uzur, dan keluarga lansia.

Tujuan penyelenggaraan *Home Care* adalah:



- a. Meningkatnya kemampuan lansia untuk menyesuaikan diri terhadap proses perubahan dirinya secara fisik, mental dan sosial.
- b. Terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak lansia agar mampu berperan dan berfungsi di masyarakat secara wajar.
- c. Meningkatnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam pendampingan dan perawatan lansia dirumah.
- d. Terciptanya rasa aman, nyaman, dan tenang bagi lansia, baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya.

Dengan adanya program pendampingan *Home Care* diharapkan dapat membantu bagi lansia yang memiliki hambatan fisik, mental, dan sosial, termasuk memberikan dukungan dan pelayanan untuk hidup mandiri sehingga mengurangi beban pendamping baik dari anggota keluarga, teman, kerabat, maupun tetangga yang membantu memenuhi kebutuhannya.

Tabel 8.1 Jumlah Penduduk Lansia Penerima Program *Home Care*, 2017

Provinsi (1)	Jumlah penerima bantuan (orang) (2)
Sumatera Selatan	80
Lampung	30
Banten	50
Jawa Barat	500
DI Yogyakarta	230
Jawa Tengah	250
Jawa Timur	320
Kalimantan Timur	30
Sulawesi Selatan	370
Sulawesi Tenggara	70
Maluku	70
Total	2 000

Sumber: Data sekunder Kementerian Sosial RI

Jumlah penerima program *Home Care* sebesar 2.000 lansia tersebar di 11 provinsi di Indonesia (lihat Tabel 8.1). Penerima program *Home Care* hanya 11 provinsi dikarenakan hanya provinsi-provinsi tersebut



**Tahun 2017,
sebanyak 30.000
lansia penerima
ASLUT tersebar
di seluruh
provinsi di
Indonesia**

yang mengirimkan proposal usulan ke Kementerian Sosial yang selanjutnya diverifikasi oleh direktorat teknis.

3. Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT)

ASLUT adalah bagian rehabilitasi sosial untuk membantu lansia telantar agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. ASLUT bertujuan untuk:

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar minimal lansia telantar;
- b. Meningkatnya kepedulian keluarga dan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak lansia telantar;
- c. Terlaksananya rehabilitasi perawatan sosial dan advokasi sosial bagi lansia telantar.

Rehabilitasi dan ASLUT dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi;
- b. Pendataan, seleksi, dan verifikasi calon penerima program;
- c. Penetapan dana penggantian penerima program;
- d. Pembinaan dan pemantapan pendamping;
- e. Penyaluran dana ASLUT;
- f. Pendampingan;
- g. Supervisi, monitoring, dan evaluasi;
- h. Pelaporan;
- i. Sanksi.

4. Pelayanan Sosial Kedaruratan Bagi Lansia

Pelayanan Sosial Kedaruratan bagi Lansia adalah perlindungan lansia dari dampak bencana, kekerasan, perlakuan salah, eksplorasi, ketidakberdayaan, dan penelantaran. Ketelantaran adalah pengabaian lansia karena berbagai sebab sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar baik secara jasmani, rohani, dan sosial.

Sasaran pelayanan tersebut yaitu para lansia yang menjadi korban bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial; dan lansia dengan permasalahan khusus seperti korban tindak kekerasan, korban perlakuan baik fisik mental maupun sosial, korban



eksploitasi, korban kerusuhan, terpisah dari anak dan keluarga, mengalami ketidakberdayaan, tinggal di rumah atau kamar tidak layak, dan tinggal di tempat tidak layak huni (kuburan, kolong jembatan, tempat terpencil, atau daerah rawan bencana).

Pelayanan kedaruratan lansia meliputi: penyelamatan dan evakuasi, pemulihan kondisi fisik, pemulihan kondisi psikologis lansia (konseling dan bimbingan psikososial), pemulihan kondisi sosial, intervensi krisis, advokasi, dan rujukan.

Jumlah penerima program ASLUT sebesar 30.000 lansia tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dimana jumlah penerima lansia laki-laki sebesar 8.326 orang dan lansia perempuan sebesar 21.674 orang (lihat Lampiran 8.2).

5. Program *Family Support* Lansia

Family Support adalah setiap upaya yang ditujukan kepada lansia guna memperkuat keberfungsiannya fisik, psikologis, sosial, dan spiritual maupun ekonomi dengan dukungan dan penyertaan keluarga lansia. Tujuan program *Family Support* adalah memberikan bantuan dan dukungan kepada lansia potensial melalui peningkatan peran keluarga guna memperkuat ketahanan sosio-ekonomi yang memungkinkan lansia terlindungi dari resiko sosial sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraannya.

Program *Family Support* lansia sesuai dengan tujuan dan bentuk program pada dasarnya adalah:

- a. Sebagai salah satu upaya bagi lansia yang harus *exit* dari program ASLUT agar tetap mendapatkan bantuan untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya, karena dikhawatirkan jika tidak mendapatkan bantuan akan mengalami penurunan kesejahteraan sosialnya.
- b. Agar anggota keluarga tidak menya-nyiakan lansia hanya karena kemiskinan keluarga.
- c. Agar anggota keluarga memiliki komitmen, dukungan, kepedulian, dan tanggung jawab dalam upaya menyejahterakan lansianya.

Sasaran
pelayanan sosial
kedaruratan
bagi lansia yaitu
para lansia yang
menjadi korban
bencana alam,
bencana non
alam, dan
bencana sosial;
dan lansia
dengan
permasalahan
khusus



Jumlah penerima program *Family Support* lansia sebesar 1.000 orang tersebar di 5 provinsi di Indonesia (lihat Tabel 8.2). Penerima program *Famili Support* hanya 5 provinsi dikarenakan hanya provinsi-provinsi tersebut yang mengirimkan proposal usulan ke Kementerian Sosial yang selanjutnya diverifikasi oleh direktorat teknis.



Tabel 8.2 Jumlah Penduduk Lansia Penerima Program *Family Support*, 2017

Provinsi	Jumlah penerima bantuan (orang)
(1)	(4)
Lampung	200
Banten	200
Jawa Barat	200
Jawa Tengah	200
Nusa Tenggara	
Barat	200
Total	1 000

Sumber: Data sekunder Kementerian Sosial RI

6. *Day Care Services*

Day Care Services adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi lansia bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari, di dalam atau di luar panti dalam waktu tertentu (maksimum 8 jam) dan tidak menginap yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat secara profesional. Terdapat tiga jenis *Day Care*, yaitu:

- a. Sosial yang fokus pada interaksi, rekreasi, dan pemberian makanan.
- b. Kesehatan yang fokus pada pelayanan medis dan pengobatan bagi lansia yang memiliki masalah kesehatan yang parah.
- c. Kondisi tertentu seperti Alzheimer.

Pelayanan yang diberikan diantaranya adalah pengisian waktu luang misal dengan mendengar musik, kesenian, olahraga, konseling, terapi fisik, bimbingan mental, terapi bicara, dan pengobatan.



7. Pengembangan Kawasan Ramah Lansia

Kemensos mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak lansia. Di dalam Permensos, yang dimaksud Kawasan Ramah Lanjut Usia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan lanjut usia.

Pengembangan kawasan ramah lansia tertuang di dalam Permensos RI No 4 tahun 2017

Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia bertujuan untuk:

- a. Tersedianya wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan serta pemenuhan hak lansia;
- b. Terwujudnya peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia;
- c. Terwujudnya lansia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif;
- d. Terwujudnya perlindungan dan pendampingan bagi lansia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.

Di dalam Permensos mengatur tentang kriteria kawasan ramah lansia dari berbagai sisi. Kriteria Kawasan Ramah Lansia terdiri atas:

- a. Memiliki kebijakan kelanjutusiaan;
- b. Perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Ruang terbuka dan bangunan yang ramah lansia;
- d. Transportasi yang ramah lansia;
- e. Penghormatan dan inklusi sosial;
- f. Partisipasi sosial;
- g. Partisipasi sipil;
- h. Pekerjaan ramah lansia;
- i. Dukungan komunitas dan pelayanan sosial;
- j. Pelayanan kesehatan;



- k. Layanan keagamaan dan mental spiritual;
 - l. Komunikasi dan informasi;
 - m. Advokasi sosial;
 - n. Bantuan hukum;
 - o. Perlindungan lansia dari ancaman dan tindak kekerasan.
-
-

Tujuh dimensi lansia tangguh dari BKKBN:

1. dimensi spiritual,
 2. dimensi intelektual,
 3. dimensi fisik,
 4. dimensi emosional,
 5. dimensi sosial kemasyarakatan,
 6. dimensi profesional vokasional,
 7. dimensi lingkungan.
-
-

Dalam mengembangkan Kawasan Ramah Lansia dilakukan koordinasi antarkementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha yang dilakukan mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

8. Program Lansia Tangguh

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengembangkan kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) melalui program Lansia Tangguh yang saat ini telah berkembang di sebagian besar kecamatan. Upaya mewujudkan Lansia Tangguh dapat dilaksanakan melalui penerapan 7 dimensi Lansia Tangguh yang terdiri dari: dimensi spiritual; dimensi intelektual; dimensi fisik; dimensi emosional; dimensi sosial kemasyarakatan; dimensi profesional vokasional; dan dimensi lingkungan.

Tujuan pembangunan keluarga Lansia Tangguh yaitu meningkatkan lansia dan pemberdayaan keluarga rentan sehingga mampu berpartisipasi dalam kehidupan keluarga. Untuk mencapai tujuan pembangunan keluarga Lansia Tangguh ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Pengembangan kemitraan,
- b. Penguatan komitmen para pengelola dan pelaksana,
- c. Pemberdayaan keluarga dalam pembinaan Lansia Tangguh,
- d. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan.

Program Lansia Tangguh di kabupaten/kota yaitu:

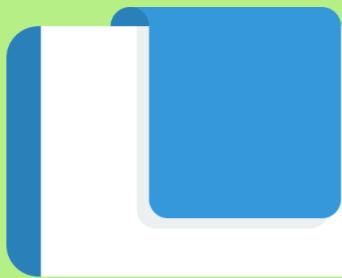
- a. Sosialisasi program (sosialisasi kebijakan dan strategi program, pedoman, materi, *grand design*, peta kerja, profil program Lansia Tangguh, melakukan workshop/pokja dan seminar).



- b. Penguatan jejaring kemitraan (koordinasi kemitraan dan pokja program Lansia Tangguh).
- c. Penguatan SDM (*capacity building* yaitu melakukan ToT, pelatihan, orientasi pengelola/pelaksana dan kader, serta pentaloka).
- d. Sarana dan prasarana (modul dan materi).
- e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi (menumbuhkembangkan kelompok BKL dan pembentukan model Lansia Tangguh)

<https://www.bps.go.id>





DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, S.M. (2013). Ageing Monograph: Evidence from the 2010 Census. Jakarta : UNFPA Indonesia.
- Allman, et al. (2006). The UAB Study Of Aging: Background and Insights into Life-Space Mobility among Older Americans in Rural and Urban Settings. *Aging Health Journal*, Vol. 2(3).
- Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Penduduk Lanjut Usia 2016. Jakarta:BPS.
- Bappenas. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. 2018. Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Diunduh dari <http://sdgs.bappenas.go.id/>. Diakses pada 7 Maret 2018.
- BKKBN. <http://aplikasi.bkkbn.go.id/bkl/Report/LaporanBKL.aspx>
- Blackman, T., F. Evasion, M. McLaugh dan R. Woods. (1989). Housing and Health: A Case Study of Two Areas of West Belfast. *Journal of Social Policy*, Vol.1.
- Dinas Sosial DIY. Materi Program Pendampingan Sosial Lanjut Usia Melalui Perawatan di Rumah (*Home Care*). Dinas Sosial DIY.
- Glies et al. (2011). The Labor Supply and Retirement Behavior of China's Older Workers and Elderly In Comparative Perspective. *Policy Research Working Paper : The World Bank*.
- Howell, F. & Priebe, J. (2013). Asistensi Sosial untuk Usia Lanjut di Indonesia, Kajian Empiris Program ASLUT. TNP2K dan Australian AID.
- International Labour Office. (2011). Profil Pekerjaan yang Layak Indonesia. Geneva: ILO.
- Karyadi, Untung. Materi Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Kedaruratan Bagi Lansia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Sosial DIY.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kompas. 2012. Belajar Baca-Tulis agar Bisa Menulis SMS. Diunduh dari <https://regional.kompas.com/>. Diakses pada 1 Maret 2018.



Melchiorre, M. G., et al. (2013). Social Support, Socio-Economic Status, Health and Abuse among Older People in Seven European Countries. *PLoS ONE*, Vol. 8 (1).

Pedoman Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT), April 2016, Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Carolyne Clara Endang Setyaningsih).

Peraturan Menteri Sosial No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia.

Peraturan Menteri Sosial No. 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia.

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Petunjuk Pelaksanaan Uji Coba *Family Support* Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Kemensos RI, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia. 2014.

Puspitasari dan Arsiyah. (2015). Peran Pemerintah dalam pemberdayaan Lanjut Usia di Kabupaten Sidoarjo. Vol. 3, No. 2 Page, 117-240. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah.

Ramdhani, R. (2015). *Makalah Manajemen Laboratorium*. Diunduh dari <http://documentslide.com/documents/tugas-makalah-manajemen-laboratorium-kimia.html>. Diakses pada Desember 2015.

Republika. 2017. Anies-Sandi Siapkan Program 'Baca Bersama' untuk Lansia. Diunduh dari <http://nasional.republika.co.id/>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2018.

Rosenbloom, S. (1988). The Mobility Needs of the Elderly. *Transportation in an Aging Society: Improving Mobility and Safety for Older Persons*, Vol. 2.

Satariano, W. (2006). *Epidemiology of Aging*. London : Jones & Bartlett Learning, LLC.

Seidel, R. (1996), Robotics, Lecture handout: Engineering and Society, the University of Middletown, Middletown.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taahun 1945.

Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional



United Nations. (2012). *Proportion of Own-Account and Contributing Family Workers in Total Employment*. Diunduh dari <http://mdgs.un.org/unsd/mi/wiki/1-7-Proportion-of-own-account-and-contributing-family-workers-in-total-employment.ashx> Diakses pada 9 Maret 2018

WHO. (1977). Prevention of Mental Disorders in the Elderly. World Health Organization. Copenhagen.

Wirakartakusumah, M. Djuhari, Hisar Sirait, dan Zainul Hidayat. (1996). *Pelibatan Penduduk Usia Lanjut dalam Keluarga*. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Yin, Peter. (1985). *Victimization and the Aged*. Springfield, IL: Thomas.

_____. 2017. *Kemnaker Siapkan Program Pemberdayaan Bagi Pekerja Lanjut Usia*. Diunduh dari <http://www.kemnaker.go.id/berita/berita-naker/kemnaker-siapkan-program-pemberdayaan-bagi-pekerja-lanjut-usia>. Diakses pada Januari 2018.

_____. 2017. *Pemberdayaan Itu Tidak Sama dengan Empowerment*. November 2017. Diunduh dari <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/11/26/p00e93396-pemberdayaan-itu-tidak-sama-dengan-empowerment>. Diakses pada Januari 2018.

_____. 2017. *Kemensos Keluarkan Peraturan Kawasan Ramah Lansia*. Mei 2017. Diunduh dari http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/05/16/o_q11ef335-kemensos-keluarkan-peraturan-kawasan-ramah-lansia. Diakses pada Januari 2018.

_____. 2017. *Transformasi Subsidi Rastra Menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bansos Rastra*. Diunduh dari <https://www.kemsos.go.id/berita/transformasi-subsidi-rastra-menjadi-bantuan-pangan-non-tunai-bpnt-dan-bansos-rastra>. Diakses Pada Februari 2018.

_____. 2017. *Raskin – Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Diunduh dari <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin/>. Diakses pada Februari 2018.

_____. 2017. *Tentang Kartu Perlindungan Sosial*. Diunduh dari <http://www.tnp2k.go.id/id/program/kartu-perlindungan-sosial/tentang-kartu-perlindungan-sosial/>. Diakses pada Februari 2018.



- _____. 2017. *Program Keluarga Harapan*. Diunduh dari <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan>. Diakses pada Februari 2018
- _____. 2017. *Glossary: Day Care Services (Layanan Harian)*. Maret 2017. Diunduh dari <https://www.kemsos.go.id/content/day-care-services-layanan-harian>. Diakses pada Januari 2018.
- _____. 2017. *Hari Lanjut Usia Nasional 2017: Membangun Keluarga Peduli Lansia*. Mei 2017. Diunduh dari <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/hari-lanjut-usia-nasional-2017-membangun-keluarga-peduli-lansia>. Diakses pada Januari 2018.

https://www.bps.go.id





CATATAN TEKNIS



http://www.bps.go.id

CATATAN TEKNIS

Penduduk Lanjut Usia adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas (Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia).

Angka Harapan Hidup (e_0) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Tipe Daerah menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas umum.

Blok Sensus adalah bagian dari desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang petugas pencacah survei/sensus dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan BPS.

Rumah Tangga Biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga biasa umumnya terdiri dari ibu, bapak, dan anak. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah Tangga Khusus adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) berjumlah 10 orang atau lebih.



Rumah Tangga Lansia adalah rumah tangga yang minimal salah satu anggota rumah tangganya berumur 60 tahun ke atas.

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga (kepala rumah tangga, suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, famili lain, pembantu rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya).

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia adalah perbandingan antara jumlah penduduk lansia (60 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun). Menggambarkan seberapa besar beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk lansia.

Kawin adalah seseorang yang pada saat pencacahan hidup sebagai suami atau istri berdasarkan peraturan hukum/adat/ajaran agama. Baik yang mendapatkan surat nikah ataupun tidak, namun sah menurut hukum/ adat/ajaran agama. Termasuk kategori kawin adalah mereka yang mempunyai pasangan perempuan (bagi laki-laki) atau pasangan laki-laki (bagi perempuan) tanpa terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum (adat, agama, negara) namun memiliki hubungan layaknya pasangan suami istri, baik tinggal bersama dalam satu rumah maupun tidak.

Cerai Hidup adalah seseorang yang pada saat pencacahan telah berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi.



Termasuk kategori ini adalah mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum, mereka yang pernah hidup bersama tetapi pada saat pencacahan sudah berpisah (tidak hidup bersama lagi), serta perempuan yang mengaku belum pernah menikah/kawin/hidup bersama tetapi mempunyai anak termasuk yang sudah meninggal. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain.

Cerai Mati adalah seseorang ditinggal mati oleh suami atauistrinya dan belum kawin lagi.

Dapat Membaca dan Menulis adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf tertentu.

Buta Huruf atau Buta Aksara adalah tidak bisa membaca dan menulis kalimat sederhana dengan suatu aksara, termasuk huruf Braille. Orang cacat yang pernah dapat membaca dan menulis digolongkan tidak buta huruf.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah.

Tidak/Belum Pernah Sekolah adalah tidak atau belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan formal, termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak dan tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Tidak tamat SD adalah pernah/ sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.

SD meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.

SMP meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan dan sederajat.



SMA/Sederajat atau lebih meliputi tamat jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah, dan yang sederajat. Termasuk menamatkan pendidikan program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/ mengeluarkan gelar sarjana muda, program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi, program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

Keluhan Kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal dll.

Sakit adalah menderita penyakit baik akut/kronis maupun mengalami gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktivitas kerja sehari-harinya menjadi terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan ringan (misalnya masuk angin atau pilek) yang tidak mengganggu kegiatan sehari-harinya dianggap tidak sakit.

Angkatan Kerja Penduduk Lansia adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan sedang bekerja, sementara tidak bekerja, mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah, yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).

Mencari Pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang



belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Mempersiapkan Suatu Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat ijin usaha, dsb.

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha, mereka yang putus asa mencari pekerjaan dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan yang lain).

Bukan Angkatan Kerja Penduduk Lansia adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Termasuk penduduk umur 60 tahun ke atas yang tidak melakukan kegiatan bekerja, sementara tidak bekerja, atau mencari pekerjaan.

Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor/ instansi tempat seseorang bekerja.

Status/Kedudukan Pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaannya, yang mencakup berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh dibayar, atau sebagai buruh/karyawan/pegawai.

Jam Kerja adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.



Rumah Tidak Layak Huni didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya (Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/ M/2008).

Suatu rumah tempat tinggal termasuk kriteria tidak layak huni jika memenuhi setidaknya dua dari tujuh kriteria berikut ini; (1) Luas lantai per kapita <7,2 m², (2) Jenis atap rumah terbuat dari daun/lainnya, (3) Jenis dinding rumah terbuat dari bambu/lainnya, (4) Jenis lantai tanah, (5) Tidak mempunyai fasilitas buang air besar, (6) Sumber penerangan bukan listrik, dan (7) Jarak sumber air minum utama ke tempat pembuangan kotoran/tinja kurang dari 10 m.

Korban Kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

Pencurian adalah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) adalah salah satu program pemerintah untuk rakyat miskin yang diselenggarakan oleh BULOG dengan menjual beras dengan harga murah bersubsidi.

Titik Distribusi Beras Raskin adalah titik distribusi yang resmi seperti kantor kelurahan/desa, pos RW atau tempat yang lebih dekat dengan masyarakat.

Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Sasaran dari program Jamkesmas adalah masyarakat sangat miskin, miskin, dan mendekati miskin/tidak



mampu. Pengelola Jamkesmas adalah Kementerian Kesehatan RI dan PT Askes (Persero), sedangkan yang memberikan pelayanan kesehatan adalah puskesmas dan jaringannya, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk. Jamkesmas merupakan pengganti ASKESKIN (Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin). Pemegang kartu Jamkesmas dibebaskan dari biaya pengobatan dan rawat inap di puskesmas atau di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang ditunjuk.

Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat daerah. Sasaran Program Jamkesda adalah seluruh masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan berupa Jamkesmas, ASKES dan asuransi kesehatan lainnya.

JPK PNS/Veteran/Pensiun (Askes) adalah jaminan pemeliharaan kesehatan bagi PNS/Veteran/Pensiunan yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan yang dikelola PT Askes (Persero).

JPK Jamsostek adalah jaminan **pemeliharaan** kesehatan untuk tenaga kerja swasta di sektor formal yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan yang dikelola PT Jamsostek.

Kredit Usaha adalah sejumlah dana yang bersifat pinjaman yang diterima untuk membantu menjalankan atau memperbesar kegiatan usaha. Pada dasarnya jenis kredit usaha terdiri dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Program pemerintah lainnya.



LAMPIRAN TABEL

Provinsi	Tidak Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,46	29,73	69,80	100,00
Sumatera Utara	1,22	26,71	72,07	100,00
Sumatera Barat	0,62	31,34	68,04	100,00
Riau	0,93	24,60	74,48	100,00
Jambi	0,57	22,68	76,74	100,00
Sumatera Selatan	0,77	20,18	79,05	100,00
Bengkulu	0,58	27,48	71,93	100,00
Lampung	0,80	20,55	78,65	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,04	16,81	82,15	100,00
Kepulauan Riau	0,56	18,48	80,96	100,00
DKI Jakarta	0,41	20,48	79,11	100,00
Jawa Barat	0,41	20,94	78,65	100,00
Jawa Tengah	0,49	22,41	77,09	100,00
DI Yogyakarta	0,46	39,73	59,81	100,00
Jawa Timur	0,25	22,84	76,21	100,00

Provinsi	0-15 Tahun	16-30 Tahun	31 Tahun ke Atas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	32,60	28,38	39,02	100,00
Sumatera Utara	32,24	26,33	41,43	100,00
Sumatera Barat	30,90	26,76	42,35	100,00
Riau	32,83	26,78	40,39	100,00
Jambi	29,95	25,08	44,97	100,00
Sumatera Selatan	30,39	26,55	43,06	100,00
Bengkulu	30,70	27,40	41,90	100,00
Lampung	29,85	26,18	43,97	100,00
Kep. Bangka Belitung	29,59	25,66	44,75	100,00

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	203,04	199,07	402,11
Sumatera Utara	903,13	910,29	1 813,42
Sumatera Barat	278,69	273,43	552,12
Riau	324,73	332,27	657,00
Jambi	131,95	126,64	258,59
Sumatera Selatan	383,23	378,90	762,14
Bengkulu	78,63	80,42	159,04
Lampung	281,13	277,17	558,30
Kep. Bangka Belitung	90,71	82,81	173,52
Kepulauan Riau	211,59	213,95	425,54
DKI Jakarta	1 335,42	1 389,80	2 725,22
Jawa Barat	4 081,30	3 953,16	8 034,46
Jawa Tengah	1 791,71	1 756,69	3 548,40
DI Yogyakarta	328,86	305,52	634,38
Jawa Timur	2 182,78	2 154,21	4 336,99

Provinsi	0-15 Tahun	16-30 Tahun	31 Tahun ke Atas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	32,60	28,38	39,02	100,00
Sumatera Utara	32,24	26,33	41,43	100,00
Sumatera Barat	30,90	26,76	42,35	100,00
Riau	32,83	26,78	40,39	100,00
Jambi	29,95	25,08	44,97	100,00
Sumatera Selatan	30,39	26,55	43,06	100,00
Bengkulu	30,70	27,40	41,90	100,00
Lampung	29,85	26,18	43,97	100,00
Kep. Bangka Belitung	29,59	25,66	44,75	100,00

Tabel 2.1.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2017

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)				Perkotaan
	Lansia Muda (60-69)	Lansia Madya (70-79)	Lansia Tua (80+)	Lansia (60+)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	4,01	1,59	0,44	6,05	
Sumatera Utara	4,80	1,75	0,51	7,07	
Sumatera Barat	5,60	2,12	0,84	8,55	
Riau	3,52	1,17	0,32	5,01	
Jambi	4,75	1,58	0,59	6,92	
Sumatera Selatan	4,84	1,87	0,51	7,22	
Bengkulu	3,83	1,23	0,75	5,81	
Lampung	4,98	1,92	0,73	7,63	
Kep. Bangka Belitung	5,09	1,56	0,79	7,44	
Kepulauan Riau	2,71	0,97	0,12	3,80	
DKI Jakarta	4,96	1,67	0,39	7,02	
Jawa Barat	5,04	2,23	0,61	7,88	
Jawa Tengah	7,03	3,54	1,31	11,87	
DI Yogyakarta	6,76	3,80	1,61	12,17	
Jawa Timur	7,02	3,11	1,13	11,26	
Banten	3,61	1,29	0,31	5,21	
Bali	5,85	2,68	0,92	9,45	
Nusa Tenggara Barat	5,00	2,32	0,51	7,84	
Nusa Tenggara Timur	4,39	1,91	0,56	6,87	
Kalimantan Barat	5,07	2,04	0,52	7,63	
Kalimantan Tengah	3,68	1,34	0,29	5,31	
Kalimantan Selatan	4,56	1,54	0,47	6,58	
Kalimantan Timur	4,01	1,11	0,29	5,41	
Kalimantan Utara	3,99	1,16	0,36	5,50	
Sulawesi Utara	6,47	2,47	0,89	9,83	
Sulawesi Tengah	4,76	1,72	0,44	6,93	
Sulawesi Selatan	4,98	2,29	0,77	8,03	
Sulawesi Tenggara	4,14	1,71	0,56	6,42	
Gorontalo	4,95	1,97	0,53	7,46	
Sulawesi Barat	4,33	2,06	0,56	6,96	
Maluku	4,19	1,84	0,63	6,66	
Maluku Utara	3,72	1,35	0,50	5,56	
Papua Barat	3,10	0,85	0,17	4,12	
Papua	3,26	1,04	0,20	4,50	
Indonesia	5,37	2,30	0,73	8,41	

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 2.1.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2017

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)				Perdesaan
	Lansia Muda (60-69)	Lansia Madya (70-79)	Lansia Tua (80+)	Lansia (60+)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	4,41	1,78	0,66	6,85	
Sumatera Utara	4,89	1,97	0,56	7,43	
Sumatera Barat	6,13	2,64	1,01	9,78	
Riau	3,66	1,25	0,40	5,31	
Jambi	4,51	1,87	0,56	6,94	
Sumatera Selatan	4,90	2,01	0,61	7,53	
Bengkulu	4,79	1,94	0,63	7,37	
Lampung	5,40	2,28	0,89	8,58	
Kep. Bangka Belitung	4,74	1,62	0,57	6,93	
Kepulauan Riau	4,85	1,76	0,40	7,01	
DKI Jakarta	-	-	-	-	
Jawa Barat	6,45	2,93	1,00	10,37	
Jawa Tengah	7,59	3,96	1,48	13,04	
DI Yogyakarta	9,80	5,49	2,70	17,99	
Jawa Timur	7,95	3,86	1,27	13,08	
Banten	4,67	1,78	0,46	6,91	
Bali	7,78	3,93	1,46	13,18	
Nusa Tenggara Barat	5,24	2,25	0,00	8,23	
Nusa Tenggara Timur	5,01	2,35	0,00	8,10	
Kalimantan Barat	4,75	1,81	0,53	7,09	
Kalimantan Tengah	3,91	1,39	0,38	5,68	
Kalimantan Selatan	4,76	1,93	0,53	7,21	
Kalimantan Timur	4,19	1,45	0,39	6,04	
Kalimantan Utara	4,48	1,41	0,32	6,20	
Sulawesi Utara	7,01	2,85	1,00	10,85	
Sulawesi Tengah	5,08	2,15	0,73	7,95	
Sulawesi Selatan	6,00	2,94	1,08	10,02	
Sulawesi Tenggara	4,43	1,89	0,66	6,98	
Gorontalo	5,17	1,82	0,51	7,51	
Sulawesi Barat	4,06	1,83	0,51	6,40	
Maluku	4,59	1,95	0,56	7,10	
Maluku Utara	4,19	1,44	0,41	6,04	
Papua Barat	3,36	1,03	0,16	4,54	
Papua	2,05	0,46	0,08	2,60	
Indonesia	5,97	2,72	0,93	9,61	

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 2.1.3 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2017

Laki-laki

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)			
	Lansia Muda (60-69)	Lansia Madya (70-79)	Lansia Tua (80+)	Lansia (60+)
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	4,19	1,46	0,47	6,12
Sumatera Utara	4,64	1,62	0,35	6,62
Sumatera Barat	5,74	2,04	0,66	8,44
Riau	3,71	1,12	0,30	5,13
Jambi	4,65	1,66	0,53	6,85
Sumatera Selatan	4,84	1,82	0,43	7,10
Bengkulu	4,61	1,64	0,52	6,77
Lampung	5,39	2,09	0,75	8,23
Kep. Bangka Belitung	4,88	1,49	0,49	6,86
Kepulauan Riau	3,04	1,06	0,11	4,21
DKI Jakarta	4,89	1,62	0,25	6,77
Jawa Barat	5,44	2,23	0,56	8,23
Jawa Tengah	7,26	3,36	1,13	11,75
DI Yogyakarta	7,44	3,76	1,56	12,76
Jawa Timur	7,46	3,03	0,88	11,37
Banten	4,00	1,31	0,25	5,56
Bali	6,29	2,90	0,86	10,06
Nusa Tenggara Barat	5,11	2,08	0,63	7,82
Nusa Tenggara Timur	4,75	2,13	0,62	7,51
Kalimantan Barat	4,85	1,88	0,39	7,12
Kalimantan Tengah	3,92	1,27	0,32	5,51
Kalimantan Selatan	4,50	1,54	0,39	6,43
Kalimantan Timur	4,35	1,16	0,27	5,78
Kalimantan Utara	4,23	1,37	0,37	5,96
Sulawesi Utara	6,62	2,36	0,69	9,67
Sulawesi Tengah	5,01	1,88	0,62	7,51
Sulawesi Selatan	5,25	2,28	0,74	8,27
Sulawesi Tenggara	4,23	1,74	0,50	6,46
Gorontalo	4,93	1,59	0,42	6,94
Sulawesi Barat	3,94	1,75	0,37	6,06
Maluku	4,22	1,91	0,50	6,63
Maluku Utara	4,18	1,37	0,30	5,85
Papua Barat	3,40	1,04	0,08	4,53
Papua	2,58	0,70	0,14	3,42
Indonesia	5,60	2,24	0,64	8,48

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 2.1.4 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2017

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)				Perempuan
	Lansia Muda (60-69)	Lansia Madya (70-79)	Lansia Tua (80+)	Lansia (60+)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	4,38	1,99	0,72	7,10	
Sumatera Utara	5,05	2,10	0,72	7,87	
Sumatera Barat	6,08	2,80	1,22	10,09	
Riau	3,50	1,33	0,43	5,25	
Jambi	4,52	1,89	0,61	7,02	
Sumatera Selatan	4,92	2,10	0,72	7,74	
Bengkulu	4,35	1,80	0,83	6,97	
Lampung	5,17	2,28	0,95	8,41	
Kep. Bangka Belitung	4,98	1,70	0,89	7,56	
Kepulauan Riau	3,02	1,11	0,21	4,35	
DKI Jakarta	5,03	1,72	0,53	7,28	
Jawa Barat	5,44	2,62	0,89	8,95	
Jawa Tengah	7,37	4,14	1,66	13,17	
DI Yogyakarta	7,88	4,84	2,30	15,01	
Jawa Timur	7,49	3,91	1,52	12,92	
Banten	3,85	1,57	0,46	5,89	
Bali	6,80	3,36	1,37	11,54	
Nusa Tenggara Barat	5,16	2,47	0,65	8,28	
Nusa Tenggara Timur	5,00	2,38	0,78	8,15	
Kalimantan Barat	4,86	1,88	0,66	7,40	
Kalimantan Tengah	3,72	1,49	0,38	5,59	
Kalimantan Selatan	4,85	1,98	0,61	7,44	
Kalimantan Timur	3,77	1,30	0,38	5,45	
Kalimantan Utara	4,16	1,14	0,31	5,61	
Sulawesi Utara	6,89	2,99	1,22	11,10	
Sulawesi Tengah	4,98	2,21	0,68	7,87	
Sulawesi Selatan	5,92	3,07	1,15	10,15	
Sulawesi Tenggara	4,45	1,93	0,76	7,13	
Gorontalo	5,26	2,16	0,62	8,04	
Sulawesi Barat	4,31	2,00	0,66	6,97	
Maluku	4,64	1,90	0,68	7,22	
Maluku Utara	3,93	1,46	0,57	5,96	
Papua Barat	3,09	0,86	0,26	4,21	
Papua	2,15	0,53	0,09	2,78	
Indonesia	5,71	2,75	1,02	9,47	

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 2.1.5 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2017

Laki-laki + Perempuan di Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)			
	Lansia Muda (60-69)	Lansia Madya (70-79)	Lansia Tua (80+)	Lansia (60+)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	4,29	1,73	0,60	6,61
Sumatera Utara	4,85	1,86	0,54	7,25
Sumatera Barat	5,91	2,42	0,94	9,27
Riau	3,61	1,22	0,37	5,19
Jambi	4,59	1,78	0,57	6,93
Sumatera Selatan	4,88	1,96	0,57	7,41
Bengkulu	4,48	1,71	0,67	6,87
Lampung	5,28	2,18	0,85	8,32
Kep. Bangka Belitung	4,92	1,59	0,69	7,20
Kepulauan Riau	3,03	1,09	0,16	4,28
DKI Jakarta	4,96	1,67	0,39	7,02
Jawa Barat	5,44	2,42	0,72	8,58
Jawa Tengah	7,32	3,75	1,40	12,46
DI Yogyakarta	7,66	4,30	1,93	13,90
Jawa Timur	7,48	3,48	1,20	12,16
Banten	3,93	1,44	0,36	5,72
Bali	6,55	3,13	1,12	10,79
Nusa Tenggara Barat	5,13	2,28	0,64	8,06
Nusa Tenggara Timur	4,88	2,26	0,70	7,83
Kalimantan Barat	4,85	1,88	0,52	7,26
Kalimantan Tengah	3,83	1,38	0,35	5,55
Kalimantan Selatan	4,67	1,76	0,50	6,93
Kalimantan Timur	4,07	1,23	0,32	5,62
Kalimantan Utara	4,20	1,26	0,34	5,80
Sulawesi Utara	6,75	2,67	0,95	10,37
Sulawesi Tengah	4,99	2,04	0,65	7,69
Sulawesi Selatan	5,59	2,68	0,95	9,23
Sulawesi Tenggara	4,34	1,83	0,63	6,80
Gorontalo	5,09	1,88	0,52	7,49
Sulawesi Barat	4,12	1,88	0,52	6,52
Maluku	4,43	1,91	0,59	6,92
Maluku Utara	4,06	1,41	0,44	5,91
Papua Barat	3,26	0,96	0,16	4,38
Papua	2,38	0,62	0,11	3,11
Indonesia	5,65	2,49	0,83	8,97

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 2.2 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017

Provinsi	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	20,87	23,58	22,77
Sumatera Utara	22,81	24,22	23,50
Sumatera Barat	26,54	31,26	29,30
Riau	16,86	17,40	17,19
Jambi	22,01	20,10	20,68
Sumatera Selatan	22,84	21,99	22,28
Bengkulu	17,71	21,38	20,20
Lampung	22,87	24,55	24,11
Kep. Bangka Belitung	21,95	19,54	20,80
Kepulauan Riau	11,01	21,66	12,57
DKI Jakarta	20,41	-	20,41
Jawa Barat	22,95	27,68	24,34
Jawa Tengah	33,64	35,66	34,68
DI Yogyakarta	29,96	46,46	34,58
Jawa Timur	31,26	36,12	33,65
Banten	16,92	22,95	18,68
Bali	23,92	35,73	28,05
Nusa Tenggara Barat	22,82	22,05	22,39
Nusa Tenggara Timur	23,58	28,88	27,72
Kalimantan Barat	24,83	22,70	23,36
Kalimantan Tengah	15,69	17,29	16,72
Kalimantan Selatan	19,59	21,23	20,51
Kalimantan Timur	17,17	19,17	17,85
Kalimantan Utara	18,80	21,88	20,06
Sulawesi Utara	28,67	31,31	30,05
Sulawesi Tengah	22,21	24,52	23,93
Sulawesi Selatan	26,58	31,83	29,80
Sulawesi Tenggara	19,61	23,20	22,04
Gorontalo	22,47	22,41	22,43
Sulawesi Barat	24,71	21,43	22,07
Maluku	23,69	26,06	25,05
Maluku Utara	20,55	21,13	20,97
Papua Barat	14,25	14,78	14,58
Papua	14,30	7,93	9,59
Indonesia	24,74	28,17	26,35

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 2.3 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2017

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	5,62	6,48	6,05	6,33	7,36	6,85	6,12	7,10	6,61
Sumatera Utara	6,55	7,58	7,07	6,69	8,17	7,43	6,62	7,87	7,25
Sumatera Barat	7,76	9,34	8,55	8,92	10,63	9,78	8,44	10,09	9,27
Riau	4,93	5,09	5,01	5,26	5,36	5,31	5,13	5,25	5,19
Jambi	6,81	7,03	6,92	6,86	7,02	6,94	6,85	7,02	6,93
Sumatera Selatan	6,81	7,64	7,22	7,26	7,81	7,53	7,10	7,74	7,41
Bengkulu	5,68	5,94	5,81	7,27	7,47	7,37	6,77	6,97	6,87
Lampung	7,45	7,81	7,63	8,52	8,64	8,58	8,23	8,41	8,32
Kep. Bangka Belitung	7,03	7,88	7,44	6,68	7,21	6,93	6,86	7,56	7,20
Kepulauan Riau	3,73	3,86	3,80	6,86	7,17	7,01	4,21	4,35	4,28
DKI Jakarta	6,77	7,28	7,02	-	-	-	6,77	7,28	7,02
Jawa Barat	7,56	8,22	7,88	9,95	10,81	10,37	8,23	8,95	8,58
Jawa Tengah	11,14	12,59	11,87	12,33	13,73	13,04	11,75	13,17	12,46
DI Yogyakarta	11,14	13,19	12,17	16,66	19,27	17,99	12,76	15,01	13,90
Jawa Timur	10,56	11,95	11,26	12,21	13,93	13,08	11,37	12,92	12,16
Banten	5,10	5,32	5,21	6,62	7,22	6,91	5,56	5,89	5,72
Bali	8,82	10,08	9,45	12,26	14,09	13,18	10,06	11,54	10,79
Nusa Tenggara Barat	7,56	8,10	7,84	8,03	8,42	8,23	7,82	8,28	8,06
Nusa Tenggara Timur	6,52	7,21	6,87	7,78	8,41	8,10	7,51	8,15	7,83
Kalimantan Barat	7,43	7,83	7,63	6,98	7,20	7,09	7,12	7,40	7,26
Kalimantan Tengah	5,32	5,31	5,31	5,61	5,76	5,68	5,51	5,59	5,55
Kalimantan Selatan	6,17	6,99	6,58	6,64	7,80	7,21	6,43	7,44	6,93
Kalimantan Timur	5,52	5,29	5,41	6,28	5,77	6,04	5,78	5,45	5,62
Kalimantan Utara	5,67	5,31	5,50	6,35	6,04	6,20	5,96	5,61	5,80
Sulawesi Utara	9,06	10,62	9,83	10,21	11,54	10,85	9,67	11,10	10,37
Sulawesi Tengah	6,62	7,23	6,93	7,81	8,10	7,95	7,51	7,87	7,69
Sulawesi Selatan	7,15	8,88	8,03	9,01	10,97	10,02	8,27	10,15	9,23
Sulawesi Tenggara	6,16	6,67	6,42	6,61	7,35	6,98	6,46	7,13	6,80
Gorontalo	6,67	8,22	7,46	7,09	7,94	7,51	6,94	8,04	7,49
Sulawesi Barat	6,29	7,60	6,96	6,01	6,80	6,40	6,06	6,97	6,52
Maluku	6,24	7,09	6,66	6,90	7,31	7,10	6,63	7,22	6,92
Maluku Utara	5,24	5,89	5,56	6,08	5,99	6,04	5,85	5,96	5,91
Papua Barat	4,16	4,07	4,12	4,76	4,30	4,54	4,53	4,21	4,38
Papua	4,68	4,29	4,50	2,94	2,23	2,60	3,42	2,78	3,11
Indonesia	7,95	8,87	8,41	9,08	10,15	9,61	8,48	9,47	8,97

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 2.4 Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2017

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	8,82	10,11	9,46	10,32	11,86	11,10	9,85	11,33	10,59
Sumatera Utara	10,35	11,90	11,13	11,35	13,86	12,60	10,82	12,82	11,83
Sumatera Barat	12,41	14,91	13,67	15,03	18,01	16,52	13,91	16,68	15,30
Riau	7,54	7,82	7,68	8,33	8,57	8,45	8,01	8,26	8,13
Jambi	10,26	10,67	10,46	10,54	10,88	10,71	10,46	10,81	10,63
Sumatera Selatan	10,43	11,73	11,08	11,49	12,39	11,93	11,10	12,14	11,61
Bengkulu	8,50	8,76	8,63	11,29	11,69	11,48	10,39	10,70	10,54
Lampung	11,46	12,03	11,74	13,46	13,72	13,59	12,91	13,24	13,07
Kep. Bangka Belitung	10,58	12,18	11,34	10,11	11,24	10,64	10,35	11,74	11,01
Kepulauan Riau	5,68	5,90	5,79	10,99	11,52	11,25	6,45	6,69	6,57
DKI Jakarta	9,93	10,63	10,28	-	-	-	9,93	10,63	10,28
Jawa Barat	11,54	12,58	12,05	15,81	17,23	16,51	12,70	13,85	13,27
Jawa Tengah	17,44	19,64	18,55	19,71	21,87	20,80	18,58	20,75	19,68
DI Yogyakarta	16,65	20,03	18,34	27,79	31,90	29,89	19,68	23,38	21,53
Jawa Timur	16,01	18,11	17,07	19,00	21,69	20,37	17,45	19,84	18,66
Banten	7,55	7,87	7,71	10,53	11,56	11,03	8,41	8,91	8,66
Bali	13,18	15,13	14,14	19,50	22,67	21,08	15,35	17,74	16,54
Nusa Tenggara Barat	12,19	12,57	12,39	13,37	13,39	13,38	12,84	13,02	12,93
Nusa Tenggara Timur	10,58	11,64	11,11	14,09	14,88	14,49	13,26	14,13	13,70
Kalimantan Barat	11,52	12,16	11,84	11,10	11,47	11,28	11,23	11,70	11,46
Kalimantan Tengah	7,90	8,03	7,96	8,46	8,89	8,66	8,26	8,57	8,41
Kalimantan Selatan	9,43	10,73	10,07	10,35	12,23	11,27	9,94	11,56	10,74
Kalimantan Timur	8,25	7,99	8,12	9,56	8,96	9,28	8,69	8,31	8,51
Kalimantan Utara	8,72	8,40	8,57	10,06	9,86	9,97	9,29	9,00	9,16
Sulawesi Utara	13,78	16,51	15,11	16,12	18,69	17,35	15,00	17,62	16,27
Sulawesi Tengah	10,06	10,83	10,45	12,52	13,07	12,78	11,86	12,44	12,15
Sulawesi Selatan	11,24	13,72	12,52	14,87	17,88	16,42	13,39	16,19	14,83
Sulawesi Tenggara	10,10	10,63	10,37	11,33	12,47	11,90	10,93	11,85	11,39
Gorontalo	10,08	12,56	11,33	11,19	12,44	11,81	10,78	12,49	11,63
Sulawesi Barat	10,17	12,32	11,26	10,04	10,98	10,51	10,07	11,26	10,67
Maluku	9,85	11,24	10,54	12,06	12,57	12,31	11,11	12,00	11,55
Maluku Utara	8,29	9,36	8,82	10,32	10,16	10,24	9,74	9,93	9,83
Papua Barat	6,23	6,26	6,25	7,47	6,89	7,19	6,97	6,64	6,81
Papua	6,81	6,48	6,66	4,53	3,44	4,01	5,19	4,26	4,75
Indonesia	12,14	13,55	12,84	14,56	16,27	15,41	13,25	14,80	14,02

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 2.5.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2017

Perkotaan

Provinsi	Status Keanggotaan Rumah Tangga				
	Kepala Rumah Tangga (KRT)	Istri/Suami	Mertua/Orang Tua	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	68,81	16,37	13,32	1,50	100,00
Sumatera Utara	63,90	20,91	13,39	1,79	100,00
Sumatera Barat	57,82	20,19	18,32	3,67	100,00
Riau	63,61	16,14	18,09	2,16	100,00
Jambi	57,99	19,56	20,98	1,47	100,00
Sumatera Selatan	58,33	22,11	16,81	2,75	100,00
Bengkulu	61,24	18,16	18,51	2,08	100,00
Lampung	59,09	23,13	15,65	2,14	100,00
Kep. Bangka Belitung	63,38	20,02	13,98	2,62	100,00
Kepulauan Riau	58,49	19,28	19,26	2,96	100,00
DKI Jakarta	70,12	19,09	8,64	2,15	100,00
Jawa Barat	65,25	18,83	13,75	2,16	100,00
Jawa Tengah	61,49	19,87	16,54	2,10	100,00
DI Yogyakarta	59,13	21,86	16,30	2,71	100,00
Jawa Timur	60,86	18,20	17,97	2,97	100,00
Banten	67,15	16,68	15,40	0,76	100,00
Bali	37,98	17,15	38,50	6,37	100,00
Nusa Tenggara Barat	65,33	16,80	16,26	1,60	100,00
Nusa Tenggara Timur	57,60	19,01	16,64	6,74	100,00
Kalimantan Barat	59,58	20,14	17,35	2,93	100,00
Kalimantan Tengah	62,19	20,48	16,92	0,40	100,00
Kalimantan Selatan	66,80	14,57	16,62	2,01	100,00
Kalimantan Timur	66,85	16,52	13,68	2,95	100,00
Kalimantan Utara	66,72	17,14	13,46	2,68	100,00
Sulawesi Utara	56,50	21,69	18,08	3,73	100,00
Sulawesi Tengah	60,99	17,95	16,48	4,58	100,00
Sulawesi Selatan	62,30	18,73	15,12	3,85	100,00
Sulawesi Tenggara	61,51	24,31	11,49	2,69	100,00
Gorontalo	52,80	17,23	22,39	7,58	100,00
Sulawesi Barat	60,19	17,32	18,58	3,91	100,00
Maluku	62,26	18,54	15,04	4,16	100,00
Maluku Utara	66,33	14,78	12,41	6,47	100,00
Papua Barat	59,70	15,81	19,62	4,86	100,00
Papua	65,99	19,82	12,96	1,23	100,00
Indonesia	62,53	19,02	15,94	2,51	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 2.5.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2017

Provinsi	Status Keanggotaan Rumah Tangga					Perdesaan
	Kepala Rumah Tangga (KRT)	Istri/Suami	Mertua/Orang Tua	Lainnya	Total	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	75,69	15,71	7,90	0,71	100,00	
Sumatera Utara	66,92	19,90	11,82	1,37	100,00	
Sumatera Barat	60,18	19,13	17,81	2,88	100,00	
Riau	66,17	16,73	15,29	1,80	100,00	
Jambi	62,66	22,46	13,61	1,27	100,00	
Sumatera Selatan	57,54	22,22	19,14	1,09	100,00	
Bengkulu	59,70	22,67	16,59	1,04	100,00	
Lampung	61,85	19,86	16,34	1,95	100,00	
Kep. Bangka Belitung	60,32	24,00	14,73	0,95	100,00	
Kepulauan Riau	70,38	16,13	9,90	3,59	100,00	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	
Jawa Barat	66,93	21,00	10,72	1,34	100,00	
Jawa Tengah	58,20	20,79	19,05	1,97	100,00	
DI Yogyakarta	54,37	22,34	19,67	3,61	100,00	
Jawa Timur	59,04	17,93	20,20	2,83	100,00	
Banten	68,51	18,88	11,40	1,20	100,00	
Bali	45,07	21,71	28,65	4,57	100,00	
Nusa Tenggara Barat	61,22	21,43	15,56	1,80	100,00	
Nusa Tenggara Timur	58,00	18,91	18,69	4,40	100,00	
Kalimantan Barat	56,33	19,44	22,84	1,39	100,00	
Kalimantan Tengah	65,61	17,00	15,82	1,56	100,00	
Kalimantan Selatan	66,10	16,64	15,26	2,00	100,00	
Kalimantan Timur	66,25	18,54	13,88	1,32	100,00	
Kalimantan Utara	65,38	21,46	11,40	1,76	100,00	
Sulawesi Utara	57,40	23,94	16,76	1,90	100,00	
Sulawesi Tengah	59,65	20,46	17,14	2,76	100,00	
Sulawesi Selatan	58,42	18,31	18,60	4,67	100,00	
Sulawesi Tenggara	61,33	19,15	16,60	2,92	100,00	
Gorontalo	54,30	24,16	16,99	4,55	100,00	
Sulawesi Barat	61,24	15,78	18,88	4,10	100,00	
Maluku	57,35	23,05	16,44	3,16	100,00	
Maluku Utara	58,76	22,27	17,08	1,89	100,00	
Papua Barat	63,22	20,80	14,35	1,63	100,00	
Papua	66,76	21,19	11,32	0,73	100,00	
Indonesia	60,88	19,74	17,11	2,26	100,00	

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 2.5.3 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2017

Laki-laki

Provinsi	Status Keanggotaan Rumah Tangga					Total
	Kepala Rumah Tangga (KRT)	Istri/Suami	Mertua/Orang Tua	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Aceh	95,71	0,20	3,53	0,56	100,00	
Sumatera Utara	93,40	0,14	5,50	0,96	100,00	
Sumatera Barat	87,37	0,41	8,64	3,59	100,00	
Riau	92,96	0,03	5,13	1,88	100,00	
Jambi	92,65	0,33	6,32	0,71	100,00	
Sumatera Selatan	90,57	0,07	8,24	1,12	100,00	
Bengkulu	90,82	0,11	8,28	0,78	100,00	
Lampung	92,35	0,05	5,98	1,63	100,00	
Kep. Bangka Belitung	92,29	0,37	5,85	1,49	100,00	
Kepulauan Riau	87,89	1,98	7,49	2,64	100,00	
DKI Jakarta	94,61	0,15	3,65	1,59	100,00	
Jawa Barat	93,58	0,19	4,85	1,38	100,00	
Jawa Tengah	90,43	0,47	7,73	1,37	100,00	
DI Yogyakarta	88,71	0,42	9,12	1,75	100,00	
Jawa Timur	89,33	0,63	8,57	1,47	100,00	
Banten	94,52	0,20	4,73	0,54	100,00	
Bali	70,93	0,28	26,02	2,77	100,00	
Nusa Tenggara Barat	89,55	0,30	9,33	0,81	100,00	
Nusa Tenggara Timur	87,03	0,32	9,56	3,09	100,00	
Kalimantan Barat	88,38	0,18	10,59	0,85	100,00	
Kalimantan Tengah	91,28	0,47	7,88	0,37	100,00	
Kalimantan Selatan	93,31	0,54	5,45	0,70	100,00	
Kalimantan Timur	91,67	0,51	6,31	1,50	100,00	
Kalimantan Utara	91,27	0,36	7,01	1,37	100,00	
Sulawesi Utara	86,59	0,74	10,62	2,05	100,00	
Sulawesi Tengah	88,68	0,52	8,00	2,80	100,00	
Sulawesi Selatan	89,94	0,13	8,01	1,92	100,00	
Sulawesi Tenggara	91,78	0,04	6,12	2,06	100,00	
Gorontalo	87,14	0,17	8,54	4,15	100,00	
Sulawesi Barat	88,21	0,40	9,07	2,32	100,00	
Maluku	89,65	0,23	7,39	2,72	100,00	
Maluku Utara	87,44	0,18	8,86	3,52	100,00	
Papua Barat	89,56	0,00	7,92	2,52	100,00	
Papua	91,47	0,48	7,27	0,78	100,00	
Indonesia	90,75	0,36	7,40	1,50	100,00	

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 2.5.4 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2017

Provinsi	Status Keanggotaan Rumah Tangga					Perempuan
	Kepala Rumah Tangga (KRT)	Istri/Suami	Mertua/Orang Tua	Lainnya	Total	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	55,00	29,35	14,41	1,24	100,00	
Sumatera Utara	41,97	37,39	18,55	2,09	100,00	
Sumatera Barat	36,05	35,35	25,75	2,85	100,00	
Riau	36,61	33,46	27,93	2,00	100,00	
Jambi	29,24	43,11	25,69	1,97	100,00	
Sumatera Selatan	26,79	43,13	27,86	2,21	100,00	
Bengkulu	29,10	43,00	26,03	1,86	100,00	
Lampung	29,06	41,91	26,65	2,38	100,00	
Kep. Bangka Belitung	32,27	42,89	22,63	2,21	100,00	
Kepulauan Riau	34,71	35,17	26,52	3,60	100,00	
DKI Jakarta	47,17	36,83	13,32	2,68	100,00	
Jawa Barat	39,60	37,88	20,16	2,36	100,00	
Jawa Tengah	32,81	37,81	26,77	2,62	100,00	
DI Yogyakarta	31,04	40,13	24,69	4,15	100,00	
Jawa Timur	34,66	33,00	28,22	4,12	100,00	
Banten	41,26	34,45	22,99	1,30	100,00	
Bali	14,72	35,85	41,37	8,06	100,00	
Nusa Tenggara Barat	39,37	36,44	21,69	2,51	100,00	
Nusa Tenggara Timur	31,64	35,73	26,19	6,43	100,00	
Kalimantan Barat	26,53	39,11	31,41	2,95	100,00	
Kalimantan Tengah	35,56	37,27	25,15	2,02	100,00	
Kalimantan Selatan	42,51	29,29	25,03	3,17	100,00	
Kalimantan Timur	37,34	36,85	22,46	3,36	100,00	
Kalimantan Utara	35,95	41,59	19,13	3,33	100,00	
Sulawesi Utara	30,14	43,06	23,46	3,34	100,00	
Sulawesi Tengah	31,40	39,12	25,92	3,56	100,00	
Sulawesi Selatan	36,23	32,74	24,72	6,31	100,00	
Sulawesi Tenggara	33,74	39,52	23,17	3,57	100,00	
Gorontalo	24,86	40,23	27,95	6,96	100,00	
Sulawesi Barat	37,15	29,91	27,36	5,58	100,00	
Maluku	30,89	40,95	23,84	4,32	100,00	
Maluku Utara	33,44	40,91	23,02	2,63	100,00	
Papua Barat	29,01	41,56	26,25	3,17	100,00	
Papua	32,31	48,21	18,36	1,12	100,00	
Indonesia	35,45	36,58	24,79	3,19	100,00	

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 2.5.5 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2017

Laki-laki + Perempuan di Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Status Keanggotaan Rumah Tangga					Total
	Kepala Rumah Tangga (KRT)	Istri/Suami	Mertua/Orang Tua	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Aceh	73,80	15,89	9,39	0,93	100,00	
Sumatera Utara	65,42	20,40	12,60	1,58	100,00	
Sumatera Barat	59,28	19,54	18,00	3,18	100,00	
Riau	65,19	16,51	16,37	1,94	100,00	
Jambi	61,19	21,55	15,93	1,33	100,00	
Sumatera Selatan	57,82	22,18	18,31	1,68	100,00	
Bengkulu	60,12	21,45	17,11	1,32	100,00	
Lampung	61,15	20,69	16,17	2,00	100,00	
Kep. Bangka Belitung	61,97	21,85	14,33	1,85	100,00	
Kepulauan Riau	61,41	18,51	16,96	3,12	100,00	
DKI Jakarta	70,12	19,09	8,64	2,15	100,00	
Jawa Barat	65,82	19,57	12,72	1,89	100,00	
Jawa Tengah	59,74	20,36	17,87	2,03	100,00	
DI Yogyakarta	57,30	22,05	17,60	3,06	100,00	
Jawa Timur	59,90	18,06	19,15	2,89	100,00	
Banten	67,65	17,48	13,95	0,92	100,00	
Bali	41,10	19,15	34,17	5,58	100,00	
Nusa Tenggara Barat	63,01	19,42	15,87	1,71	100,00	
Nusa Tenggara Timur	57,92	18,93	18,30	4,85	100,00	
Kalimantan Barat	57,41	19,67	21,01	1,90	100,00	
Kalimantan Tengah	64,43	18,20	16,20	1,16	100,00	
Kalimantan Selatan	66,39	15,77	15,83	2,01	100,00	
Kalimantan Timur	66,64	17,25	13,75	2,36	100,00	
Kalimantan Utara	66,11	19,11	12,52	2,26	100,00	
Sulawesi Utara	57,00	22,93	17,35	2,72	100,00	
Sulawesi Tengah	59,96	19,87	16,98	3,18	100,00	
Sulawesi Selatan	59,75	18,46	17,40	4,39	100,00	
Sulawesi Tenggara	61,38	20,71	15,05	2,85	100,00	
Gorontalo	53,76	21,65	18,95	5,65	100,00	
Sulawesi Barat	61,01	16,12	18,82	4,06	100,00	
Maluku	59,27	21,28	15,89	3,55	100,00	
Maluku Utara	60,73	20,33	15,86	3,08	100,00	
Papua Barat	61,93	18,97	16,29	2,82	100,00	
Papua	66,46	20,66	11,96	0,92	100,00	
Indonesia	61,70	19,38	16,53	2,39	100,00	

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 2.6.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2017

Provinsi	Status Perkawinan				Perkotaan Total (6)
	Belum Kawin (1)	Kawin (2)	Cerai Hidup (4)	Cerai Mati (5)	
Aceh	0,91	55,44	1,65	42,00	100,00
Sumatera Utara	1,00	59,08	1,93	37,98	100,00
Sumatera Barat	0,42	58,26	5,92	35,40	100,00
Riau	0,93	58,08	2,65	38,34	100,00
Jambi	1,02	62,36	0,67	35,95	100,00
Sumatera Selatan	1,33	64,23	2,53	31,91	100,00
Bengkulu	0,76	58,51	1,77	38,96	100,00
Lampung	0,91	67,44	0,88	30,77	100,00
Kep. Bangka Belitung	2,48	59,28	2,02	36,22	100,00
Kepulauan Riau	1,69	60,66	3,75	33,90	100,00
DKI Jakarta	1,49	57,88	2,50	38,13	100,00
Jawa Barat	0,47	59,75	2,53	37,24	100,00
Jawa Tengah	0,84	58,73	2,17	38,26	100,00
DI Yogyakarta	2,11	60,52	1,76	35,60	100,00
Jawa Timur	1,37	57,49	2,50	38,64	100,00
Banten	0,39	56,07	1,71	41,83	100,00
Bali	3,94	67,09	1,90	27,07	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,05	52,73	3,59	42,62	100,00
Nusa Tenggara Timur	4,76	60,52	0,87	33,85	100,00
Kalimantan Barat	1,63	62,00	1,56	34,81	100,00
Kalimantan Tengah	0,23	65,03	1,37	33,36	100,00
Kalimantan Selatan	1,05	54,79	3,00	41,15	100,00
Kalimantan Timur	2,86	62,59	1,89	32,66	100,00
Kalimantan Utara	1,32	57,38	3,18	38,12	100,00
Sulawesi Utara	2,41	59,15	2,94	35,50	100,00
Sulawesi Tengah	1,62	55,85	2,38	40,14	100,00
Sulawesi Selatan	3,79	57,48	3,71	35,01	100,00
Sulawesi Tenggara	1,61	68,53	1,58	28,28	100,00
Gorontalo	7,23	52,81	4,05	35,92	100,00
Sulawesi Barat	4,26	52,51	5,99	37,24	100,00
Maluku	2,04	53,94	3,83	40,19	100,00
Maluku Utara	3,62	51,32	2,70	42,36	100,00
Papua Barat	1,44	59,54	2,80	36,22	100,00
Papua	0,90	68,33	3,10	27,67	100,00
Indonesia	1,20	59,01	2,42	37,37	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 2.6.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2017

Perdesaan

Provinsi	Status Perkawinan				Total
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,55	55,13	2,13	42,19	100,00
Sumatera Utara	0,83	56,29	1,78	41,10	100,00
Sumatera Barat	0,61	58,26	3,83	37,30	100,00
Riau	0,49	59,57	2,00	37,94	100,00
Jambi	0,12	67,22	2,30	30,37	100,00
Sumatera Selatan	0,61	65,15	1,54	32,70	100,00
Bengkulu	0,21	66,98	1,75	31,06	100,00
Lampung	0,50	64,71	2,01	32,78	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,71	66,86	1,34	30,10	100,00
Kepulauan Riau	2,72	57,91	4,08	35,30	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,44	63,32	1,93	34,31	100,00
Jawa Tengah	0,35	62,01	1,79	35,86	100,00
DI Yogyakarta	1,39	63,09	2,68	32,83	100,00
Jawa Timur	0,64	57,82	2,30	39,24	100,00
Banten	0,08	61,15	2,18	36,58	100,00
Bali	2,81	63,11	0,79	33,29	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,99	61,60	3,40	34,01	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,72	59,28	1,57	36,42	100,00
Kalimantan Barat	0,73	61,82	1,68	35,77	100,00
Kalimantan Tengah	1,16	59,68	3,68	35,48	100,00
Kalimantan Selatan	0,92	54,14	4,70	40,24	100,00
Kalimantan Timur	0,51	61,45	3,17	34,87	100,00
Kalimantan Utara	0,06	68,70	3,04	28,20	100,00
Sulawesi Utara	1,54	63,34	1,81	33,30	100,00
Sulawesi Tengah	1,96	62,05	2,96	33,04	100,00
Sulawesi Selatan	3,27	55,14	3,27	38,31	100,00
Sulawesi Tenggara	1,22	60,13	3,46	35,19	100,00
Gorontalo	3,68	67,55	0,75	28,01	100,00
Sulawesi Barat	2,84	52,36	4,21	40,58	100,00
Maluku	1,93	63,58	1,56	32,93	100,00
Maluku Utara	1,09	62,65	2,43	33,83	100,00
Papua Barat	1,29	66,24	2,13	30,35	100,00
Papua	0,38	68,52	1,63	29,47	100,00
Indonesia	0,86	60,61	2,19	36,34	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 2.6.3 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2017

Provinsi	Status Perkawinan				Laki-laki
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
		(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,55	83,71	1,42	14,32	100,00
Sumatera Utara	0,77	79,71	1,46	18,06	100,00
Sumatera Barat	0,71	82,13	3,53	13,63	100,00
Riau	0,85	81,22	1,42	16,51	100,00
Jambi	0,34	85,45	0,66	13,55	100,00
Sumatera Selatan	0,69	83,69	1,15	14,47	100,00
Bengkulu	0,35	83,00	1,64	15,01	100,00
Lampung	0,93	85,70	1,09	12,29	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,64	80,99	1,08	16,29	100,00
Kepulauan Riau	2,45	81,20	4,40	11,95	100,00
DKI Jakarta	1,39	77,51	2,24	18,85	100,00
Jawa Barat	0,52	82,86	1,76	14,86	100,00
Jawa Tengah	0,50	82,29	1,31	15,90	100,00
DI Yogyakarta	1,28	82,27	1,04	15,41	100,00
Jawa Timur	0,65	81,92	1,64	15,79	100,00
Banten	0,26	80,14	1,21	18,39	100,00
Bali	2,08	81,54	0,98	15,40	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,87	78,10	2,98	18,05	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,50	79,27	1,12	17,10	100,00
Kalimantan Barat	0,89	79,91	1,98	17,22	100,00
Kalimantan Tengah	0,54	80,47	2,83	16,16	100,00
Kalimantan Selatan	0,85	81,47	2,74	14,94	100,00
Kalimantan Timur	1,37	80,48	1,47	16,69	100,00
Kalimantan Utara	1,12	76,01	3,14	19,73	100,00
Sulawesi Utara	2,00	76,85	1,76	19,39	100,00
Sulawesi Tengah	1,76	79,53	2,46	16,25	100,00
Sulawesi Selatan	1,00	80,18	1,92	16,90	100,00
Sulawesi Tenggara	0,97	84,45	1,67	12,91	100,00
Gorontalo	4,09	82,76	1,65	11,50	100,00
Sulawesi Barat	1,55	74,90	2,35	21,20	100,00
Maluku	1,40	74,39	1,77	22,45	100,00
Maluku Utara	2,22	74,79	1,77	21,22	100,00
Papua Barat	2,41	76,99	2,56	18,03	100,00
Papua	0,73	78,60	2,49	18,19	100,00
Indonesia	0,79	81,68	1,64	15,88	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 2.6.4 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2017

Provinsi	Status Perkawinan				Total (6)
	Belum Kawin (2)	Kawin (3)	Cerai Hidup (4)	Cerai Mati (5)	
	(1)				
Aceh	0,74	30,76	2,50	66,01	100,00
Sumatera Utara	1,04	39,21	2,19	57,56	100,00
Sumatera Barat	0,40	38,51	5,54	55,55	100,00
Riau	0,47	36,13	3,10	60,30	100,00
Jambi	0,46	45,62	2,93	50,99	100,00
Sumatera Selatan	1,02	46,95	2,61	49,42	100,00
Bengkulu	0,37	46,19	1,87	51,57	100,00
Lampung	0,27	44,52	2,38	52,83	100,00
Kep. Bangka Belitung	2,60	44,90	2,33	50,17	100,00
Kepulauan Riau	1,44	38,58	3,26	56,73	100,00
DKI Jakarta	1,59	39,48	2,74	56,19	100,00
Jawa Barat	0,40	40,27	2,87	56,45	100,00
Jawa Tengah	0,65	41,32	2,54	55,49	100,00
DI Yogyakarta	2,30	44,15	3,02	50,53	100,00
Jawa Timur	1,28	36,86	3,04	58,82	100,00
Banten	0,30	36,10	2,54	61,06	100,00
Bali	4,65	51,01	1,79	42,54	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,15	39,62	3,93	55,30	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,65	41,68	1,73	52,94	100,00
Kalimantan Barat	1,17	43,91	1,31	53,62	100,00
Kalimantan Tengah	1,17	41,15	2,95	54,74	100,00
Kalimantan Selatan	1,09	30,40	5,10	63,41	100,00
Kalimantan Timur	2,75	40,76	3,39	53,10	100,00
Kalimantan Utara	0,30	46,39	3,09	50,22	100,00
Sulawesi Utara	1,87	47,49	2,83	47,81	100,00
Sulawesi Tengah	2,00	41,76	3,18	53,06	100,00
Sulawesi Selatan	5,36	37,06	4,59	52,98	100,00
Sulawesi Tenggara	1,66	42,87	4,01	51,46	100,00
Gorontalo	5,73	44,42	2,20	47,65	100,00
Sulawesi Barat	4,56	32,66	6,59	56,19	100,00
Maluku	2,51	46,17	3,09	48,22	100,00
Maluku Utara	1,27	44,29	3,24	51,20	100,00
Papua Barat	0,07	48,03	2,15	49,74	100,00
Papua	0,38	54,59	1,81	43,21	100,00
Indonesia	1,23	40,06	2,90	55,81	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 2.6.5 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2017

Provinsi	Status Perkawinan				Total
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
		(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,65	55,22	2,00	42,14	100,00
Sumatera Utara	0,92	57,68	1,86	39,55	100,00
Sumatera Barat	0,54	58,26	4,63	36,57	100,00
Riau	0,66	59,00	2,25	38,09	100,00
Jambi	0,40	65,69	1,78	32,13	100,00
Sumatera Selatan	0,86	64,82	1,90	32,42	100,00
Bengkulu	0,36	64,68	1,75	33,20	100,00
Lampung	0,60	65,40	1,72	32,27	100,00
Kep. Bangka Belitung	2,13	62,76	1,71	33,40	100,00
Kepulauan Riau	1,94	59,98	3,83	34,24	100,00
DKI Jakarta	1,49	57,88	2,50	38,13	100,00
Jawa Barat	0,46	60,96	2,33	36,25	100,00
Jawa Tengah	0,58	60,47	1,97	36,98	100,00
DI Yogyakarta	1,83	61,51	2,12	34,54	100,00
Jawa Timur	0,99	57,66	2,39	38,96	100,00
Banten	0,28	57,92	1,88	39,92	100,00
Bali	3,44	65,34	1,41	29,80	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,02	57,74	3,49	37,75	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,11	59,52	1,44	35,94	100,00
Kalimantan Barat	1,03	61,88	1,64	35,45	100,00
Kalimantan Tengah	0,84	61,52	2,88	34,75	100,00
Kalimantan Selatan	0,98	54,41	3,99	40,62	100,00
Kalimantan Timur	2,01	62,18	2,35	33,46	100,00
Kalimantan Utara	0,75	62,54	3,12	33,59	100,00
Sulawesi Utara	1,93	61,46	2,32	34,29	100,00
Sulawesi Tengah	1,88	60,60	2,82	34,70	100,00
Sulawesi Selatan	3,45	55,95	3,42	37,18	100,00
Sulawesi Tenggara	1,34	62,67	2,89	33,10	100,00
Gorontalo	4,97	62,21	1,95	30,88	100,00
Sulawesi Barat	3,16	52,39	4,61	39,84	100,00
Maluku	1,97	59,80	2,45	35,77	100,00
Maluku Utara	1,75	59,70	2,50	36,05	100,00
Papua Barat	1,35	63,77	2,38	32,50	100,00
Papua	0,58	68,45	2,20	28,77	100,00
Indonesia	1,02	59,82	2,30	36,85	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 2.7.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2017

Provinsi	Status Tinggal Bersama						Perkotaan
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	Total	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	7,59	11,52	41,65	31,86	7,38	100,00	
Sumatera Utara	6,98	17,87	30,91	37,38	6,86	100,00	
Sumatera Barat	7,43	17,40	24,91	42,67	7,59	100,00	
Riau	5,86	14,10	34,83	37,84	7,37	100,00	
Jambi	4,10	14,36	31,91	42,89	6,74	100,00	
Sumatera Selatan	4,35	14,48	32,23	42,97	5,97	100,00	
Bengkulu	4,92	10,80	34,93	42,21	7,14	100,00	
Lampung	4,12	13,62	35,48	40,37	6,41	100,00	
Kep. Bangka	11,23	18,23	34,51	29,91	6,12	100,00	
Kepulauan Riau	6,05	14,12	42,77	31,33	5,73	100,00	
DKI Jakarta	6,04	12,05	38,90	36,19	6,81	100,00	
Jawa Barat	11,12	18,19	32,51	30,70	7,49	100,00	
Jawa Tengah	10,93	20,06	24,72	37,33	6,96	100,00	
DI Yogyakarta	11,72	22,88	25,45	32,82	7,13	100,00	
Jawa Timur	10,50	18,78	23,80	36,72	10,21	100,00	
Banten	6,39	15,31	35,39	39,12	3,79	100,00	
Bali	3,47	14,24	18,90	52,90	10,50	100,00	
Nusa Tenggara	12,40	14,43	29,86	29,89	13,43	100,00	
Nusa Tenggara	3,53	6,19	23,48	47,78	19,01	100,00	
Kalimantan Barat	5,47	10,72	31,21	44,75	7,86	100,00	
Kalimantan Tengah	8,97	16,62	38,41	29,81	6,19	100,00	
Kalimantan Selatan	7,75	14,42	36,83	31,73	9,26	100,00	
Kalimantan Timur	6,86	16,68	31,88	35,98	8,60	100,00	
Kalimantan Utara	5,28	10,17	36,37	39,57	8,61	100,00	
Sulawesi Utara	7,35	17,23	24,37	39,49	11,56	100,00	
Sulawesi Tengah	5,46	11,79	25,35	43,42	13,99	100,00	
Sulawesi Selatan	4,96	9,28	27,34	45,32	13,10	100,00	
Sulawesi Tenggara	6,88	20,52	25,08	40,34	7,17	100,00	
Gorontalo	3,99	13,81	26,14	35,30	20,74	100,00	
Sulawesi Barat	3,99	8,59	32,74	42,29	12,39	100,00	
Maluku	4,82	5,17	23,66	51,54	14,80	100,00	
Maluku Utara	4,60	10,20	18,96	49,44	16,80	100,00	
Papua Barat	3,82	7,32	31,61	46,40	10,85	100,00	
Papua	6,79	13,00	43,72	28,12	8,38	100,00	
Indonesia	9,15	17,18	29,17	36,31	8,19	100,00	

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 2.7.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2017

Provinsi	Status Tinggal Bersama						Perdesaan
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	Total	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	15,68	14,28	39,62	25,15	5,26	100,00	
Sumatera Utara	13,76	20,58	27,58	29,80	8,29	100,00	
Sumatera Barat	11,51	17,80	25,86	37,68	7,15	100,00	
Riau	9,36	18,87	30,36	34,50	6,90	100,00	
Jambi	7,83	23,94	28,91	31,36	7,97	100,00	
Sumatera Selatan	7,38	21,94	26,65	37,42	6,60	100,00	
Bengkulu	8,13	21,04	27,64	37,88	5,31	100,00	
Lampung	8,48	20,93	28,77	31,86	9,97	100,00	
Kep. Bangka	10,46	20,40	36,58	28,32	4,24	100,00	
Kepulauan Riau	17,73	12,15	29,71	24,91	15,50	100,00	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	
Jawa Barat	15,56	30,90	22,99	21,99	8,55	100,00	
Jawa Tengah	9,68	22,10	21,94	37,89	8,40	100,00	
DI Yogyakarta	8,83	23,60	20,98	39,55	7,04	100,00	
Jawa Timur	10,86	19,01	21,51	38,35	10,27	100,00	
Banten	10,50	15,50	27,93	39,12	6,95	100,00	
Bali	7,95	23,20	21,66	39,80	7,38	100,00	
Nusa Tenggara	10,39	24,42	27,00	27,59	10,60	100,00	
Nusa Tenggara	6,32	10,61	23,71	44,50	14,85	100,00	
Kalimantan Barat	7,32	16,39	30,12	41,39	4,77	100,00	
Kalimantan Tengah	11,66	19,94	31,13	30,10	7,16	100,00	
Kalimantan Selatan	13,57	20,61	29,08	26,65	10,08	100,00	
Kalimantan Timur	7,83	18,26	32,84	34,57	6,50	100,00	
Kalimantan Utara	6,95	9,88	30,77	48,01	4,40	100,00	
Sulawesi Utara	7,58	19,73	21,43	39,79	11,47	100,00	
Sulawesi Tengah	6,97	15,26	30,22	37,35	10,20	100,00	
Sulawesi Selatan	7,35	12,09	23,94	43,04	13,58	100,00	
Sulawesi Tenggara	7,95	17,40	24,98	37,79	11,88	100,00	
Gorontalo	6,27	22,04	22,51	32,97	16,21	100,00	
Sulawesi Barat	8,22	9,52	35,96	37,29	9,01	100,00	
Maluku	5,43	8,91	24,43	47,53	13,70	100,00	
Maluku Utara	5,12	11,47	25,94	47,80	9,66	100,00	
Papua Barat	4,67	10,15	36,66	39,15	9,36	100,00	
Papua	7,66	17,21	44,78	22,92	7,42	100,00	
Indonesia	10,44	20,57	24,69	35,16	9,14	100,00	

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 2.7.3 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2017

Laki-laki

Provinsi	Status Tinggal Bersama					
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	4,33	17,99	50,68	23,60	3,41	100,00
Sumatera Utara	4,74	24,69	35,01	29,31	6,25	100,00
Sumatera Barat	4,77	22,71	30,77	34,70	7,05	100,00
Riau	4,85	21,22	38,84	28,70	6,38	100,00
Jambi	2,56	25,00	35,62	30,59	6,23	100,00
Sumatera Selatan	3,26	23,50	34,82	32,99	5,43	100,00
Bengkulu	3,71	22,50	34,90	34,28	4,60	100,00
Lampung	3,74	22,72	36,12	28,16	9,26	100,00
Kep. Bangka	8,50	24,08	37,04	26,81	3,58	100,00
Kepulauan Riau	7,25	18,84	45,41	22,28	6,22	100,00
DKI Jakarta	3,12	14,92	43,48	32,95	5,53	100,00
Jawa Barat	5,99	28,57	35,35	23,48	6,61	100,00
Jawa Tengah	4,70	26,90	27,21	34,49	6,70	100,00
DI Yogyakarta	5,18	29,36	28,00	32,09	5,37	100,00
Jawa Timur	4,72	25,31	26,76	34,81	8,40	100,00
Banten	4,53	18,71	39,08	34,07	3,61	100,00
Bali	2,62	22,23	24,05	44,69	6,41	100,00
Nusa Tenggara	5,56	25,17	35,74	24,53	9,00	100,00
Nusa Tenggara	3,61	11,85	30,32	41,22	13,00	100,00
Kalimantan Barat	4,60	16,99	34,73	39,33	4,36	100,00
Kalimantan Tengah	7,63	23,98	38,14	25,01	5,24	100,00
Kalimantan Selatan	5,47	24,24	37,73	24,04	8,52	100,00
Kalimantan Timur	4,76	20,76	38,71	29,05	6,72	100,00
Kalimantan Utara	6,29	12,50	40,37	36,44	4,40	100,00
Sulawesi Utara	5,43	22,10	25,45	36,79	10,23	100,00
Sulawesi Tengah	3,64	18,16	32,26	36,00	9,94	100,00
Sulawesi Selatan	3,46	15,29	30,56	41,13	9,55	100,00
Sulawesi Tenggara	3,49	23,34	29,63	34,99	8,55	100,00
Gorontalo	1,77	23,98	27,99	30,88	15,38	100,00
Sulawesi Barat	4,43	11,90	40,86	35,65	7,17	100,00
Maluku	4,31	8,45	26,77	46,53	13,94	100,00
Maluku Utara	3,75	12,62	25,92	45,98	11,73	100,00
Papua Barat	4,63	10,54	40,38	34,01	10,44	100,00
Papua	7,13	18,13	47,25	21,15	6,34	100,00
Indonesia	4,75	24,09	32,07	31,90	7,19	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 2.7.4 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2017

Provinsi	Status Tinggal Bersama					Perempuan
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	21,30	9,69	31,17	29,91	7,93	100,00
Sumatera Utara	15,11	14,66	24,40	37,14	8,69	100,00
Sumatera Barat	14,23	13,46	21,13	43,63	7,54	100,00
Riau	11,27	12,74	25,11	43,07	7,81	100,00
Jambi	10,82	16,79	24,00	39,45	8,95	100,00
Sumatera Selatan	9,19	15,29	22,78	45,47	7,27	100,00
Bengkulu	10,85	13,98	24,28	43,87	7,03	100,00
Lampung	11,13	15,34	24,64	40,02	8,87	100,00
Kep. Bangka	13,21	14,48	33,90	31,50	6,90	100,00
Kepulauan Riau	10,60	8,39	33,67	37,29	10,05	100,00
DKI Jakarta	8,78	9,37	34,61	39,23	8,01	100,00
Jawa Barat	18,89	16,77	23,55	31,77	9,02	100,00
Jawa Tengah	15,15	16,09	19,76	40,37	8,63	100,00
DI Yogyakarta	15,16	17,96	20,16	38,18	8,54	100,00
Jawa Timur	15,81	13,41	19,01	39,95	11,82	100,00
Banten	11,19	12,11	26,39	44,08	6,24	100,00
Bali	7,94	14,61	16,63	49,29	11,53	100,00
Nusa Tenggara	16,34	15,53	21,57	32,20	14,36	100,00
Nusa Tenggara	7,77	7,89	17,67	48,65	18,02	100,00
Kalimantan Barat	8,80	12,02	26,26	45,69	7,24	100,00
Kalimantan Tengah	14,07	13,21	28,81	35,36	8,54	100,00
Kalimantan Selatan	16,17	12,51	27,53	32,98	10,82	100,00
Kalimantan Timur	10,09	13,14	24,63	42,98	9,15	100,00
Kalimantan Utara	5,74	7,09	25,95	51,78	9,44	100,00
Sulawesi Utara	9,34	15,43	20,30	42,26	12,67	100,00
Sulawesi Tengah	9,58	10,76	25,92	41,53	12,22	100,00
Sulawesi Selatan	8,92	7,88	20,86	45,92	16,43	100,00
Sulawesi Tenggara	11,40	13,80	20,81	41,80	12,19	100,00
Gorontalo	8,63	14,80	20,23	36,35	19,99	100,00
Sulawesi Barat	9,79	7,05	30,32	40,81	12,03	100,00
Maluku	6,01	6,50	21,67	51,51	14,31	100,00
Maluku Utara	6,25	9,63	22,30	50,52	11,30	100,00
Papua Barat	4,03	7,41	28,17	51,12	9,28	100,00
Papua	7,57	12,06	40,43	30,15	9,78	100,00
Indonesia	14,37	14,18	22,25	39,19	10,01	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 2.7.5 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2017

Laki-laki + Perempuan di Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Status Tinggal Bersama					
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	13,46	13,52	40,18	26,99	5,84	100,00
Sumatera Utara	10,39	19,23	29,23	33,57	7,58	100,00
Sumatera Barat	9,95	17,65	25,50	39,59	7,32	100,00
Riau	8,02	17,04	32,08	35,78	7,08	100,00
Jambi	6,66	20,93	29,85	34,98	7,58	100,00
Sumatera Selatan	6,30	19,29	28,64	39,40	6,37	100,00
Bengkulu	7,26	18,26	29,62	39,05	5,81	100,00
Lampung	7,38	19,08	30,46	34,01	9,07	100,00
Kep. Bangka	10,88	19,23	35,46	29,18	5,26	100,00
Kepulauan Riau	8,92	13,64	39,56	29,75	8,13	100,00
DKI Jakarta	6,04	12,05	38,90	36,19	6,81	100,00
Jawa Barat	12,62	22,50	29,28	27,74	7,85	100,00
Jawa Tengah	10,26	21,14	23,24	37,63	7,72	100,00
DI Yogyakarta	10,61	23,15	23,73	35,41	7,09	100,00
Jawa Timur	10,69	18,90	22,59	37,58	10,24	100,00
Banten	7,89	15,38	32,68	39,12	4,94	100,00
Bali	5,44	18,18	20,12	47,13	9,13	100,00
Nusa Tenggara	11,26	20,07	28,24	28,59	11,83	100,00
Nusa Tenggara	5,80	9,77	23,67	45,13	15,64	100,00
Kalimantan Barat	6,70	14,50	30,48	42,51	5,80	100,00
Kalimantan Tengah	10,73	18,79	33,64	30,00	6,83	100,00
Kalimantan Selatan	11,14	18,02	32,33	28,78	9,74	100,00
Kalimantan Timur	7,22	17,25	32,23	35,47	7,84	100,00
Kalimantan Utara	6,04	10,04	33,81	43,42	6,69	100,00
Sulawesi Utara	7,48	18,60	22,75	39,66	11,51	100,00
Sulawesi Tengah	6,62	14,45	29,08	38,77	11,08	100,00
Sulawesi Selatan	6,53	11,13	25,11	43,82	13,42	100,00
Sulawesi Tenggara	7,63	18,34	25,01	38,56	10,46	100,00
Gorontalo	5,45	19,06	23,83	33,81	17,85	100,00
Sulawesi Barat	7,28	9,31	35,25	38,40	9,76	100,00
Maluku	5,19	7,44	24,13	49,10	14,13	100,00
Maluku Utara	4,99	11,14	24,13	48,23	11,52	100,00
Papua Barat	4,36	9,11	34,81	41,82	9,91	100,00
Papua	7,32	15,57	44,37	24,95	7,80	100,00
Indonesia	9,80	18,89	26,91	35,73	8,67	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2017

Provinsi	Jenis Kelamin		Tipe Daerah		Total
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	92,33	77,06	90,87	81,55	84,11
Sumatera Utara	97,77	91,32	96,85	91,70	94,26
Sumatera Barat	97,00	90,79	96,97	91,51	93,60
Riau	94,54	86,30	93,77	88,43	90,48
Jambi	91,03	76,35	93,57	79,24	83,74
Sumatera Selatan	95,94	85,72	97,11	87,14	90,69
Bengkulu	91,83	72,87	89,56	79,73	82,40
Lampung	89,95	72,51	90,46	78,28	81,35
Kep. Bangka Belitung	95,18	82,82	92,05	85,29	88,94
Kepulauan Riau	95,87	83,82	92,23	82,63	89,87
DKI Jakarta	99,09	97,56	98,30	-	98,30
Jawa Barat	93,14	83,46	89,94	84,71	88,16
Jawa Tengah	84,16	60,34	78,07	65,63	71,47
DI Yogyakarta	87,96	66,82	82,01	67,53	76,45
Jawa Timur	79,45	55,88	78,50	56,25	66,76
Banten	91,32	73,48	83,91	79,54	82,32
Bali	82,00	55,29	75,22	58,43	67,83
Nusa Tenggara Barat	64,24	34,45	53,30	44,78	48,48
Nusa Tenggara Timur	79,37	63,39	85,12	67,67	70,97
Kalimantan Barat	77,73	52,98	79,19	58,41	65,34
Kalimantan Tengah	95,61	86,44	95,59	88,87	91,19
Kalimantan Selatan	94,10	80,04	93,00	82,09	86,65
Kalimantan Timur	96,09	83,49	92,27	86,79	90,29
Kalimantan Utara	77,18	62,59	79,87	59,41	70,54
Sulawesi Utara	99,41	98,84	99,26	98,99	99,11
Sulawesi Tengah	90,29	80,20	94,96	82,25	85,23
Sulawesi Selatan	75,58	60,99	84,86	58,21	67,38
Sulawesi Tenggara	79,86	55,86	74,46	64,18	67,29
Gorontalo	94,11	93,03	96,09	92,08	93,53
Sulawesi Barat	73,71	61,95	77,59	64,55	67,45
Maluku	98,60	95,57	98,81	95,89	97,03
Maluku Utara	94,36	82,54	94,63	86,36	88,51
Papua Barat	89,21	80,64	96,86	78,58	85,30
Papua	72,47	64,27	87,16	57,36	69,00
Indonesia	87,16	70,09	85,42	71,07	78,19

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 3.2.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2017

Perkotaan

Provinsi	Tidak pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	8,42	24,18	31,22	14,33	14,12	7,73	100,00
Sumatera Utara	4,03	22,53	30,77	15,05	20,24	7,38	100,00
Sumatera Barat	2,22	25,46	29,16	14,30	18,79	10,0	100,00
Riau	6,41	26,33	27,57	14,39	17,75	7,55	100,00
Jambi	11,09	25,04	29,11	12,08	16,57	6,10	100,00
Sumatera Selatan	3,19	25,79	34,40	12,67	17,75	6,20	100,00
Bengkulu	7,37	27,01	26,90	13,79	16,57	8,37	100,00
Lampung	9,05	33,37	34,29	5,54	11,39	6,35	100,00
Kep. Bangka Belitung	8,79	32,63	29,08	13,17	14,10	2,24	100,00
Kepulauan Riau	8,06	24,47	31,09	14,73	15,70	5,95	100,00
DKI Jakarta	4,26	12,59	26,50	13,10	27,65	15,9	100,00
Jawa Barat	11,98	28,85	35,40	7,07	10,84	5,86	100,00
Jawa Tengah	18,33	31,30	30,26	8,34	8,04	3,72	100,00
DI Yogyakarta	16,54	20,90	34,08	12,19	11,23	5,06	100,00
Jawa Timur	17,40	32,54	35,79	7,83	4,32	2,12	100,00
Banten	19,93	20,62	28,48	6,76	13,80	10,4	100,00
Bali	23,23	25,78	31,46	5,39	8,01	6,12	100,00
Nusa Tenggara Barat	39,92	30,09	14,13	4,16	6,58	5,12	100,00
Nusa Tenggara Timur	15,63	19,48	32,60	6,85	17,25	8,21	100,00
Kalimantan Barat	24,37	24,44	25,59	9,10	12,24	4,26	100,00
Kalimantan Tengah	3,46	25,23	34,55	8,31	18,73	9,72	100,00
Kalimantan Selatan	6,04	32,08	26,56	11,84	17,01	6,47	100,00
Kalimantan Timur	9,03	23,66	30,15	11,20	18,20	7,77	100,00
Kalimantan Utara	11,55	30,38	28,17	9,09	15,96	4,85	100,00
Sulawesi Utara	1,19	29,33	23,34	16,97	21,27	7,90	100,00
Sulawesi Tengah	4,06	22,61	26,72	11,64	23,43	11,5	100,00
Sulawesi Selatan	12,38	29,75	23,76	8,10	16,09	9,92	100,00
Sulawesi Tenggara	22,65	26,27	20,04	5,96	15,28	9,80	100,00
Gorontalo	3,59	27,99	27,90	11,25	22,41	6,86	100,00
Sulawesi Barat	12,69	28,37	30,82	5,89	13,28	8,95	100,00
Maluku	3,14	23,59	34,31	14,58	13,64	10,7	100,00
Maluku Utara	5,08	27,81	28,68	15,02	19,13	4,28	100,00
Papua Barat	3,10	12,11	37,47	18,45	22,32	6,54	100,00
Papua	5,16	41,65	29,49	15,19	5,22	3,30	100,00
Indonesia	13,71	27,79	31,89	9,04	11,63	5,94	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 3.2.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2017

Provinsi	Tidak pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	Perdesaan	
						PT	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	14,10	37,06	35,67	5,77	4,75	2,64	100,00
Sumatera Utara	10,93	37,48	32,18	11,77	6,36	1,29	100,00
Sumatera Barat	7,08	51,77	25,32	8,89	5,58	1,38	100,00
Riau	15,08	46,08	30,33	4,75	2,98	0,78	100,00
Jambi	20,68	42,87	25,34	5,06	4,79	1,27	100,00
Sumatera Selatan	11,45	49,92	30,33	4,47	3,12	0,71	100,00
Bengkulu	17,60	48,15	25,88	2,87	3,65	1,85	100,00
Lampung	16,37	44,95	32,35	2,58	2,55	1,19	100,00
Kep. Bangka Belitung	16,33	45,85	32,37	3,18	1,48	0,78	100,00
Kepulauan Riau	17,83	49,58	30,52	0,67	1,05	0,36	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	17,86	33,93	42,93	2,37	1,81	1,11	100,00
Jawa Tengah	27,61	36,20	29,65	2,97	2,36	1,21	100,00
DI Yogyakarta	32,62	19,03	39,56	4,83	3,33	0,63	100,00
Jawa Timur	36,21	27,56	32,71	2,33	0,79	0,40	100,00
Banten	22,27	43,47	29,18	1,52	2,78	0,78	100,00
Bali	35,99	30,50	25,77	4,21	2,16	1,37	100,00
Nusa Tenggara Barat	48,13	32,58	15,13	1,40	1,98	0,78	100,00
Nusa Tenggara Timur	26,58	39,75	26,71	2,34	3,21	1,41	100,00
Kalimantan Barat	40,04	32,89	22,27	2,35	1,78	0,67	100,00
Kalimantan Tengah	12,01	42,32	35,68	4,54	4,46	0,99	100,00
Kalimantan Selatan	13,47	49,97	26,73	4,20	4,86	0,76	100,00
Kalimantan Timur	13,93	28,59	49,02	3,39	4,41	0,66	100,00
Kalimantan Utara	34,54	31,80	21,02	6,13	3,18	3,32	100,00
Sulawesi Utara	1,89	42,89	31,28	12,33	9,10	2,51	100,00
Sulawesi Tengah	12,22	37,28	38,79	5,76	4,60	1,36	100,00
Sulawesi Selatan	32,78	36,90	21,34	3,38	4,07	1,52	100,00
Sulawesi Tenggara	26,98	38,61	23,70	4,02	5,53	1,16	100,00
Gorontalo	6,00	58,94	24,28	5,91	4,01	0,87	100,00
Sulawesi Barat	30,14	34,85	23,51	5,46	4,28	1,77	100,00
Maluku	5,95	30,06	47,42	9,16	5,17	2,25	100,00
Maluku Utara	12,93	41,55	32,91	6,59	5,03	0,99	100,00
Papua Barat	15,88	30,05	34,93	8,44	5,93	4,77	100,00
Papua	39,13	24,80	27,03	8,12	0,28	0,64	100,00
Indonesia	25,02	35,92	31,55	3,75	2,71	1,04	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 3.2.3 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2017

Laki-laki

Provinsi	Tidak pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	5,99	28,63	38,82	10,46	10,65	5,46	100,00
Sumatera Utara	3,68	23,36	33,55	16,55	17,40	5,47	100,00
Sumatera Barat	2,93	37,87	28,88	12,36	13,30	4,66	100,00
Riau	7,46	33,92	32,46	10,18	11,72	4,27	100,00
Jambi	9,82	33,45	31,55	9,28	12,40	3,50	100,00
Sumatera Selatan	4,19	37,62	33,54	9,23	11,77	3,65	100,00
Bengkulu	7,09	40,38	30,19	7,00	10,51	4,83	100,00
Lampung	6,93	42,97	35,62	4,24	7,02	3,21	100,00
Kep. Bangka Belitung	6,62	37,50	30,25	10,32	13,39	1,92	100,00
Kepulauan Riau	3,49	27,79	29,52	12,99	18,75	7,46	100,00
DKI Jakarta	2,15	8,25	24,74	13,70	30,49	20,68	100,00
Jawa Barat	8,53	28,55	40,60	5,82	10,74	5,76	100,00
Jawa Tengah	11,95	33,03	36,76	6,85	7,40	4,01	100,00
DI Yogyakarta	11,64	22,75	38,62	11,02	11,80	4,18	100,00
Jawa Timur	16,59	30,38	41,16	5,88	4,20	1,77	100,00
Banten	10,38	28,42	32,07	5,73	13,70	9,71	100,00
Bali	15,16	29,24	33,38	7,43	7,96	6,83	100,00
Nusa Tenggara Barat	31,78	34,46	19,96	3,61	5,60	4,60	100,00
Nusa Tenggara Timur	16,46	36,24	29,82	4,00	8,99	4,48	100,00
Kalimantan Barat	23,08	34,08	25,11	6,04	8,63	3,06	100,00
Kalimantan Tengah	4,62	34,56	37,10	6,73	11,54	5,45	100,00
Kalimantan Selatan	4,58	34,31	30,73	11,52	14,44	4,42	100,00
Kalimantan Timur	4,77	21,93	36,57	11,13	19,25	6,36	100,00
Kalimantan Utara	16,41	30,27	23,21	10,16	13,82	6,14	100,00
Sulawesi Utara	1,57	33,33	27,25	14,98	17,66	5,21	100,00
Sulawesi Tengah	6,39	30,60	36,09	8,90	13,03	4,99	100,00
Sulawesi Selatan	19,53	32,71	23,66	5,37	11,85	6,87	100,00
Sulawesi Tenggara	13,93	35,73	26,42	5,05	13,66	5,21	100,00
Gorontalo	3,91	51,82	21,75	8,89	9,96	3,67	100,00
Sulawesi Barat	21,27	31,66	25,51	8,19	8,94	4,43	100,00
Maluku	2,43	24,80	41,15	13,67	11,03	6,92	100,00
Maluku Utara	5,01	35,57	33,55	9,68	13,70	2,49	100,00
Papua Barat	8,43	20,84	35,21	14,76	15,05	5,70	100,00
Papua	22,97	32,89	26,46	13,30	1,87	2,51	100,00
Indonesia	11,25	30,60	35,73	7,57	9,96	4,89	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 3.2.4 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2017

Provinsi	Tidak pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	Perempuan	
						PT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	18,16	37,72	30,70	6,13	4,47	2,82	100,00
Sumatera Utara	10,69	35,64	29,74	10,76	9,80	3,36	100,00
Sumatera Barat	7,11	44,87	25,05	9,80	8,43	4,74	100,00
Riau	16,18	43,21	26,00	6,67	5,48	2,46	100,00
Jambi	25,64	41,14	21,42	5,22	4,52	2,05	100,00
Sumatera Selatan	12,59	44,83	30,12	5,65	5,08	1,73	100,00
Bengkulu	22,64	44,47	22,09	4,65	3,76	2,39	100,00
Lampung	22,33	41,05	29,98	2,39	2,48	1,76	100,00
Kep. Bangka	17,78	39,89	30,92	6,87	3,31	1,23	100,00
Kepulauan Riau	17,48	33,50	32,40	9,54	5,39	1,68	100,00
DKI Jakarta	6,24	16,65	28,15	12,53	24,99	11,44	100,00
Jawa Barat	19,11	32,48	35,47	5,15	4,98	2,81	100,00
Jawa Tengah	33,18	34,66	23,94	4,29	2,95	0,97	100,00
DI Yogyakarta	31,98	18,04	34,16	7,98	5,18	2,67	100,00
Jawa Timur	36,53	29,51	28,16	4,11	0,96	0,73	100,00
Banten	30,99	29,44	25,47	4,00	5,94	4,16	100,00
Bali	40,96	26,64	25,04	2,61	3,20	1,55	100,00
Nusa Tenggara	55,94	28,86	10,01	1,70	2,54	0,94	100,00
Nusa Tenggara	31,77	35,61	26,02	2,46	3,05	1,09	100,00
Kalimantan Barat	46,52	26,07	21,65	3,16	1,92	0,68	100,00
Kalimantan Tengah	13,84	38,43	33,34	4,89	7,05	2,44	100,00
Kalimantan Selatan	15,49	49,73	23,06	3,74	5,96	2,02	100,00
Kalimantan Timur	17,87	29,56	37,49	5,14	6,12	3,82	100,00
Kalimantan Utara	28,77	31,93	26,95	4,85	5,73	1,78	100,00
Sulawesi Utara	1,58	39,95	28,13	13,91	11,76	4,68	100,00
Sulawesi Tengah	14,20	37,07	35,84	5,38	5,01	2,50	100,00
Sulawesi Selatan	30,61	35,79	21,02	4,72	5,37	2,49	100,00
Sulawesi Tenggara	36,35	34,10	19,11	4,20	3,77	2,47	100,00
Gorontalo	6,18	44,18	28,91	6,94	11,31	2,48	100,00
Sulawesi Barat	30,64	34,95	24,81	3,24	3,94	2,43	100,00
Maluku	7,12	30,06	43,34	9,06	6,11	4,32	100,00
Maluku Utara	16,90	40,44	30,03	7,86	3,57	1,20	100,00
Papua Barat	14,46	26,58	36,64	8,98	8,26	5,08	100,00
Papua	29,80	29,32	30,08	7,58	2,67	0,54	100,00
Indonesia	26,77	33,04	28,10	5,29	4,60	2,20	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 3.2.5 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2017

Laki-laki + Perempuan di Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Tidak pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	12,54	33,52	34,45	8,13	7,32	4,04	100,00
Sumatera Utara	7,49	30,04	31,48	13,40	13,27	4,32	100,00
Sumatera Barat	5,22	41,70	26,79	10,96	10,63	4,70	100,00
Riau	11,76	38,50	29,28	8,45	8,64	3,37	100,00
Jambi	17,67	37,27	26,52	7,27	8,49	2,79	100,00
Sumatera Selatan	8,51	41,32	31,78	7,39	8,33	2,66	100,00
Bengkulu	14,83	42,42	26,16	5,83	7,15	3,62	100,00
Lampung	14,52	42,03	32,84	3,33	4,78	2,50	100,00
Kep. Bangka Belitung	12,26	38,71	30,59	8,58	8,30	1,57	100,00
Kepulauan Riau	10,46	30,64	30,95	11,28	12,10	4,58	100,00
DKI Jakarta	4,26	12,59	26,50	13,10	27,65	15,91	100,00
Jawa Barat	13,97	30,57	37,96	5,47	7,78	4,25	100,00
Jawa Tengah	23,26	33,90	29,94	5,49	5,03	2,39	100,00
DI Yogyakarta	22,72	20,18	36,19	9,36	8,20	3,36	100,00
Jawa Timur	27,33	29,91	34,16	4,93	2,46	1,21	100,00
Banten	20,78	28,93	28,74	4,86	9,79	6,91	100,00
Bali	28,85	27,86	28,96	4,87	5,44	4,03	100,00
Nusa Tenggara Barat	44,56	31,50	14,70	2,60	3,98	2,66	100,00
Nusa Tenggara Timur	24,51	35,91	27,82	3,19	5,87	2,70	100,00
Kalimantan Barat	34,82	30,07	23,38	4,60	5,27	1,87	100,00
Kalimantan Tengah	9,06	36,42	35,29	5,84	9,38	4,00	100,00
Kalimantan Selatan	10,36	42,48	26,66	7,40	9,95	3,15	100,00
Kalimantan Timur	10,81	25,45	36,99	8,37	13,20	5,19	100,00
Kalimantan Utara	22,03	31,02	24,91	7,74	10,14	4,15	100,00
Sulawesi Utara	1,57	36,80	27,71	14,42	14,57	4,93	100,00
Sulawesi Tengah	10,31	33,84	35,96	7,14	9,01	3,74	100,00
Sulawesi Selatan	25,76	34,44	22,18	5,01	8,21	4,41	100,00
Sulawesi Tenggara	25,67	34,88	22,59	4,61	8,48	3,77	100,00
Gorontalo	5,12	47,72	25,59	7,85	10,68	3,04	100,00
Sulawesi Barat	26,26	33,41	25,13	5,55	6,28	3,36	100,00
Maluku	4,85	27,52	42,28	11,28	8,49	5,58	100,00
Maluku Utara	10,89	37,98	31,81	8,78	8,69	1,85	100,00
Papua Barat	11,18	23,46	35,87	12,12	11,95	5,42	100,00
Papua	25,86	31,38	27,99	10,88	2,21	1,68	100,00
Indonesia	19,40	31,89	31,72	6,37	7,14	3,47	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 3.3 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Lansia (tahun) Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2017

Provinsi	Jenis Kelamin		Tipe Daerah		Total
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	6,11	4,16	6,79	4,40	5,06
Sumatera Utara	7,15	5,21	7,35	4,84	6,09
Sumatera Barat	6,23	5,22	7,67	4,43	5,67
Riau	5,74	4,02	6,90	3,64	4,89
Jambi	5,58	3,44	6,38	3,66	4,52
Sumatera Selatan	5,74	4,10	6,96	3,75	4,90
Bengkulu	5,45	3,52	6,83	3,62	4,49
Lampung	5,09	3,53	5,93	3,78	4,32
Kep. Bangka Belitung	5,56	3,89	5,80	3,44	4,72
Kepulauan Riau	6,99	4,49	6,61	3,08	5,75
DKI Jakarta	10,05	8,07	9,03	-	9,03
Jawa Barat	5,95	4,35	5,75	3,91	5,12
Jawa Tengah	5,10	2,97	4,76	3,27	3,97
DI Yogyakarta	6,20	4,37	6,01	3,91	5,20
Jawa Timur	4,68	3,01	4,70	2,95	3,78
Banten	6,42	3,87	6,24	3,20	5,13
Bali	5,45	2,89	4,94	3,01	4,09
Nusa Tenggara Barat	3,76	1,77	3,48	2,11	2,71
Nusa Tenggara Timur	4,91	3,11	6,54	3,36	3,96
Kalimantan Barat	4,38	2,43	5,11	2,55	3,40
Kalimantan Tengah	5,98	4,47	7,22	4,22	5,25
Kalimantan Selatan	6,12	3,64	6,45	3,62	4,81
Kalimantan Timur	7,23	4,74	6,92	4,61	6,08
Kalimantan Utara	5,70	3,57	5,79	3,47	4,73
Sulawesi Utara	6,96	6,30	7,60	5,81	6,61
Sulawesi Tengah	6,10	4,45	7,97	4,45	5,28
Sulawesi Selatan	5,22	3,47	6,53	3,04	4,24
Sulawesi Tenggara	5,16	3,04	5,62	3,37	4,05
Gorontalo	5,19	5,30	7,30	4,08	5,25
Sulawesi Barat	4,61	3,38	5,97	3,38	3,95
Maluku	6,88	5,58	7,49	5,38	6,21
Maluku Utara	5,85	3,97	6,82	4,25	4,92
Papua Barat	6,67	5,38	8,00	4,97	6,08
Papua	4,51	3,71	5,68	3,21	4,17
Indonesia	5,61	3,78	5,80	3,51	4,65

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 3.4 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Lansia (tahun) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2017

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)			
	Lansia Muda (60-69)	Lansia Madya (70-79)	Lansia Tua (80+)	Lansia (60+)
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	5,71	4,03	3,33	5,06
Sumatera Utara	6,74	5,33	2,88	6,09
Sumatera Barat	6,14	5,08	4,25	5,67
Riau	5,45	3,90	2,60	4,89
Jambi	5,14	3,50	2,66	4,52
Sumatera Selatan	5,47	4,15	2,61	4,90
Bengkulu	5,11	3,80	2,13	4,49
Lampung	5,01	3,52	2,09	4,32
Kep. Bangka Belitung	5,22	4,06	2,61	4,72
Kepulauan Riau	6,29	4,75	2,16	5,75
DKI Jakarta	9,33	8,57	7,17	9,03
Jawa Barat	5,73	4,36	3,13	5,12
Jawa Tengah	4,76	3,15	2,01	3,97
DI Yogyakarta	6,37	4,37	2,41	5,20
Jawa Timur	4,34	3,15	2,11	3,78
Banten	5,82	3,86	2,71	5,13
Bali	5,01	2,99	1,81	4,09
Nusa Tenggara Barat	3,02	2,21	2,00	2,71
Nusa Tenggara Timur	4,61	3,19	1,96	3,96
Kalimantan Barat	3,89	2,66	1,60	3,40
Kalimantan Tengah	5,61	4,75	3,32	5,25
Kalimantan Selatan	5,29	4,23	2,29	4,81
Kalimantan Timur	6,64	5,09	2,81	6,08
Kalimantan Utara	5,10	4,01	2,86	4,73
Sulawesi Utara	7,08	6,18	4,53	6,61
Sulawesi Tengah	5,96	4,21	3,36	5,28
Sulawesi Selatan	5,03	3,33	2,13	4,24
Sulawesi Tenggara	4,90	2,76	1,94	4,05
Gorontalo	5,55	4,78	4,03	5,25
Sulawesi Barat	4,31	3,61	2,31	3,95
Maluku	6,84	5,18	4,79	6,21
Maluku Utara	5,45	4,03	2,84	4,92
Papua Barat	6,54	4,97	3,56	6,08
Papua	4,30	3,72	3,97	4,17
Indonesia	5,31	3,84	2,54	4,65

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 3.5 Persentase Penduduk Lansia yang Mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Provinsi, 2017

Provinsi	Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	Menggunakan HP	Menggunakan Komputer	Mengakses Internet
	(1)	(2)	(4)
Aceh	39,45	1,61	1,28
Sumatera Utara	65,65	1,69	2,32
Sumatera Barat	58,31	2,14	2,49
Riau	57,19	1,58	2,02
Jambi	45,77	1,25	1,04
Sumatera Selatan	45,28	1,17	1,84
Bengkulu	41,87	0,88	1,39
Lampung	40,48	0,80	1,08
Kep. Bangka Belitung	44,11	1,64	1,40
Kepulauan Riau	62,58	3,93	6,81
DKI Jakarta	65,04	10,46	19,65
Jawa Barat	36,01	1,96	3,84
Jawa Tengah	30,55	0,82	1,49
DI Yogyakarta	34,13	2,29	4,63
Jawa Timur	32,46	1,41	2,28
Banten	32,52	4,40	6,60
Bali	31,87	1,76	2,17
Nusa Tenggara Barat	32,16	1,34	1,06
Nusa Tenggara Timur	42,37	1,38	0,93
Kalimantan Barat	36,18	0,73	1,49
Kalimantan Tengah	49,95	1,51	2,22
Kalimantan Selatan	48,89	1,47	1,95
Kalimantan Timur	62,96	2,67	4,47
Kalimantan Utara	63,9	1,89	1,46
Sulawesi Utara	57,62	3,13	3,47
Sulawesi Tengah	47,88	1,69	1,52
Sulawesi Selatan	53,2	1,18	1,68
Sulawesi Tenggara	52,13	0,56	0,61
Gorontalo	48,05	1,21	1,17
Sulawesi Barat	41,56	0,55	0,56
Maluku	54,37	1,4	1,46
Maluku Utara	41,64	1,35	1,44
Papua Barat	51,01	2,44	3,03
Papua	39,23	2,03	2,16
Indonesia	39,58	1,82	2,98

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 3.6 Persentase Penduduk Lansia yang Mengakses Internet Menurut Provinsi dan Media Akses, 2017

Provinsi	Media Akses				
	Komputer	Laptop	Tablet	HP	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	17,75	32,38	9,27	78,85	0,00
Sumatera Utara	15,32	32,66	6,38	89,52	0,00
Sumatera Barat	26,64	27,73	11,07	83,40	0,00
Riau	5,16	21,60	17,30	83,91	0,00
Jambi	22,63	23,73	4,64	91,31	0,00
Sumatera Selatan	19,46	31,77	3,47	83,13	0,00
Bengkulu	9,06	22,81	3,79	95,56	0,00
Lampung	19,77	29,38	0,00	85,54	0,00
Kep. Bangka Belitung	29,92	50,79	13,69	71,54	0,00
Kepulauan Riau	8,83	31,49	5,33	85,22	0,00
DKI Jakarta	19,30	24,65	8,98	96,41	0,49
Jawa Barat	19,31	19,95	2,18	94,62	0,30
Jawa Tengah	12,47	23,03	6,65	96,17	0,00
DI Yogyakarta	15,78	17,98	4,11	93,39	0,00
Jawa Timur	14,82	26,47	8,67	92,17	0,00
Banten	20,44	41,00	5,86	93,43	1,41
Bali	13,41	18,12	7,65	94,50	0,00
Nusa Tenggara Barat	10,46	32,30	20,60	89,40	0,00
Nusa Tenggara Timur	17,38	17,34	21,99	81,52	0,00
Kalimantan Barat	11,79	17,18	2,74	96,49	0,00
Kalimantan Tengah	17,89	34,99	14,97	90,16	5,53
Kalimantan Selatan	4,10	23,07	9,56	89,63	0,00
Kalimantan Timur	16,29	31,54	6,78	95,17	0,00
Kalimantan Utara	42,52	37,14	25,75	78,87	0,00
Sulawesi Utara	8,74	29,83	8,84	95,35	0,83
Sulawesi Tengah	27,72	33,74	5,83	88,89	0,00
Sulawesi Selatan	14,92	17,99	8,54	89,86	0,00
Sulawesi Tenggara	6,92	31,21	0,00	83,05	0,00
Gorontalo	5,09	34,28	17,65	94,91	0,00
Sulawesi Barat	6,96	36,59	0,00	100,00	0,00
Maluku	25,94	25,92	16,07	92,79	0,00
Maluku Utara	8,64	18,84	11,94	79,42	0,00
Papua Barat	10,01	7,06	0,00	86,67	0,00
Papua	0,00	9,09	10,44	94,04	0,22
Indonesia	17,05	25,12	6,67	93,30	0,30

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 4.1 Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2017

Provinsi	Jenis Kelamin		Tipe Daerah		Total
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	53,62	58,24	49,69	58,53	56,10
Sumatera Utara	45,95	47,57	43,55	50,09	46,84
Sumatera Barat	49,62	48,93	51,18	48,04	49,24
Riau	47,58	53,71	49,03	51,57	50,60
Jambi	44,56	40,95	37,30	45,28	42,77
Sumatera Selatan	48,94	50,97	47,12	51,57	49,98
Bengkulu	45,31	46,75	55,67	42,44	46,02
Lampung	48,18	49,89	43,46	50,91	49,03
Kep. Bangka Belitung	53,34	54,85	52,80	55,64	54,10
Kepulauan Riau	37,41	44,18	40,00	43,18	40,78
DKI Jakarta	42,51	46,03	44,33	-	44,33
Jawa Barat	51,25	53,67	51,40	54,63	52,49
Jawa Tengah	47,84	48,46	48,48	47,89	48,17
DI Yogyakarta	40,79	48,62	42,62	48,94	45,05
Jawa Timur	47,79	48,05	47,39	48,41	47,93
Banten	47,66	51,36	48,05	52,11	49,53
Bali	45,12	45,96	38,79	54,19	45,57
Nusa Tenggara Barat	53,51	55,96	53,03	56,17	54,81
Nusa Tenggara Timur	51,67	53,31	52,15	52,62	52,53
Kalimantan Barat	50,81	51,17	45,59	53,69	50,99
Kalimantan Tengah	49,85	48,37	46,89	50,32	49,14
Kalimantan Selatan	51,79	54,97	53,05	53,78	53,47
Kalimantan Timur	40,25	39,50	38,55	42,28	39,90
Kalimantan Utara	49,55	45,75	41,41	55,49	47,83
Sulawesi Utara	47,03	46,24	44,24	48,55	46,61
Sulawesi Tengah	52,78	55,38	48,47	55,80	54,08
Sulawesi Selatan	45,65	46,70	44,25	47,29	46,24
Sulawesi Tenggara	52,58	53,30	56,26	51,52	52,96
Gorontalo	56,38	57,68	51,74	60,11	57,08
Sulawesi Barat	48,69	46,42	47,97	47,34	47,48
Maluku	33,76	37,16	29,04	39,69	35,52
Maluku Utara	37,40	38,73	39,95	37,39	38,06
Papua Barat	40,40	42,80	35,69	44,87	41,50
Papua	36,75	36,58	37,84	35,94	36,68
Indonesia	48,13	49,62	47,70	50,11	48,91

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 4.2 Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2017

Provinsi	Jenis Kelamin		Tipe Daerah		Total
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	35,56	36,41	31,28	37,81	36,02
Sumatera Utara	25,85	24,87	22,35	28,25	25,32
Sumatera Barat	26,38	24,50	24,12	26,11	25,35
Riau	26,91	29,68	25,51	30,00	28,28
Jambi	23,98	22,44	15,30	26,85	23,22
Sumatera Selatan	24,25	25,51	22,30	26,34	24,90
Bengkulu	26,11	29,27	30,90	26,48	27,68
Lampung	26,35	30,16	22,09	30,30	28,22
Kep. Bangka Belitung	22,51	23,28	18,70	27,84	22,90
Kepulauan Riau	18,50	22,54	17,95	28,38	20,51
DKI Jakarta	18,61	22,77	20,76	-	20,76
Jawa Barat	30,22	29,03	28,38	32,00	29,61
Jawa Tengah	25,84	24,82	24,55	25,95	25,29
DI Yogyakarta	21,99	23,25	19,64	27,54	22,68
Jawa Timur	26,15	24,19	23,76	26,29	25,10
Banten	28,37	29,49	26,18	33,75	28,94
Bali	26,49	26,50	20,92	33,59	26,50
Nusa Tenggara Barat	31,95	30,31	29,97	31,94	31,08
Nusa Tenggara Timur	31,19	32,76	26,50	33,31	32,02
Kalimantan Barat	30,20	32,11	25,05	34,21	31,16
Kalimantan Tengah	30,07	26,71	26,97	29,24	28,46
Kalimantan Selatan	26,09	25,54	24,84	26,49	25,80
Kalimantan Timur	21,13	20,89	19,34	23,98	21,02
Kalimantan Utara	29,76	24,44	18,45	37,95	27,34
Sulawesi Utara	28,65	26,58	25,21	29,49	27,56
Sulawesi Tengah	35,64	35,12	27,79	37,70	35,38
Sulawesi Selatan	26,88	25,33	23,98	27,07	26,01
Sulawesi Tenggara	32,83	35,65	32,75	34,98	34,31
Gorontalo	32,54	32,87	31,17	33,59	32,71
Sulawesi Barat	29,10	23,95	26,46	26,32	26,35
Maluku	19,83	21,11	11,63	26,20	20,49
Maluku Utara	30,79	28,09	30,63	29,05	29,46
Papua Barat	24,14	27,82	25,10	26,23	25,82
Papua	25,22	23,94	22,93	25,80	24,68
Indonesia	27,03	26,43	24,74	28,66	26,72

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 4.3 Rata-rata Lama Sakit Penduduk Lansia (hari) Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2017

Provinsi	Jenis Kelamin		Tipe Daerah		Total
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	8,21	7,37	8,30	7,58	7,7
Sumatera Utara	9,02	8,42	8,05	9,21	8,7
Sumatera Barat	9,26	9,59	9,94	9,14	9,4
Riau	9,54	7,94	9,93	8,07	8,7
Jambi	8,29	7,48	8,18	7,83	7,9
Sumatera Selatan	7,76	6,45	7,50	6,87	7,0
Bengkulu	9,08	8,38	10,60	7,90	8,7
Lampung	7,98	6,05	8,37	6,62	6,9
Kep. Bangka Belitung	7,44	7,86	6,67	8,44	7,6
Kepulauan Riau	10,33	10,48	10,48	10,27	10,
DKI Jakarta	7,23	6,50	6,81	-	6,8
Jawa Barat	8,74	8,13	8,55	8,22	8,4
Jawa Tengah	9,13	8,81	9,07	8,87	8,9
DI Yogyakarta	9,18	9,54	11,34	7,15	9,3
Jawa Timur	9,56	8,23	9,40	8,44	8,8
Banten	9,23	7,19	7,51	9,09	8,1
Bali	9,01	6,49	8,19	7,25	7,6
Nusa Tenggara Barat	8,81	7,58	8,82	7,71	8,1
Nusa Tenggara Timur	9,01	8,01	8,97	8,38	8,4
Kalimantan Barat	7,50	7,52	7,80	7,41	7,5
Kalimantan Tengah	7,29	6,25	6,43	7,00	6,8
Kalimantan Selatan	8,72	7,61	8,08	8,18	8,1
Kalimantan Timur	8,82	9,65	9,32	9,02	9,2
Kalimantan Utara	7,21	8,58	9,68	6,66	7,7
Sulawesi Utara	9,42	8,23	9,28	8,50	8,8
Sulawesi Tengah	8,55	7,93	8,30	8,23	8,2
Sulawesi Selatan	10,69	9,95	10,44	10,21	10,
Sulawesi Tenggara	9,72	9,18	10,94	8,81	9,4
Gorontalo	7,50	8,04	9,18	7,05	7,7
Sulawesi Barat	9,16	10,58	10,25	9,73	9,8
Maluku	10,25	6,95	8,07	8,61	8,4
Maluku Utara	11,39	9,42	10,63	10,40	10,
Papua Barat	10,69	9,37	7,15	11,65	10,
Papua	8,04	7,94	11,25	6,15	8,0
Indonesia	8,99	8,16	8,79	8,36	8,5

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 4.4 Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, 2017

Provinsi	Lamanya Sakit (hari)				
	1-7	8-14	15-21	22+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	76,59	9,08	5,37	8,96	100,00
Sumatera Utara	72,68	9,18	3,57	14,56	100,00
Sumatera Barat	68,62	8,68	7,78	14,92	100,00
Riau	72,97	8,48	3,89	14,66	100,00
Jambi	76,33	8,01	3,91	11,75	100,00
Sumatera Selatan	79,36	6,63	4,53	9,48	100,00
Bengkulu	75,14	6,45	3,48	14,93	100,00
Lampung	80,66	5,97	4,76	8,61	100,00
Kep. Bangka Belitung	79,55	3,86	3,99	12,60	100,00
Kepulauan Riau	66,64	8,52	3,21	21,63	100,00
DKI Jakarta	82,75	5,69	2,68	8,88	100,00
Jawa Barat	74,68	8,81	3,74	12,77	100,00
Jawa Tengah	72,06	7,53	5,21	15,20	100,00
DI Yogyakarta	71,28	7,62	3,18	17,92	100,00
Jawa Timur	72,43	8,32	3,65	15,60	100,00
Banten	72,92	11,39	4,30	11,39	100,00
Bali	78,02	6,45	2,84	12,69	100,00
Nusa Tenggara Barat	77,14	7,47	2,04	13,35	100,00
Nusa Tenggara Timur	74,21	10,73	2,76	12,30	100,00
Kalimantan Barat	78,25	6,34	4,12	11,30	100,00
Kalimantan Tengah	80,64	7,64	4,55	7,17	100,00
Kalimantan Selatan	75,52	6,36	3,47	14,65	100,00
Kalimantan Timur	71,96	7,87	2,90	17,28	100,00
Kalimantan Utara	80,75	5,50	0,00	13,74	100,00
Sulawesi Utara	73,53	9,91	3,05	13,50	100,00
Sulawesi Tengah	76,79	5,88	4,94	12,39	100,00
Sulawesi Selatan	66,93	8,59	4,08	20,40	100,00
Sulawesi Tenggara	72,85	5,10	4,38	17,68	100,00
Gorontalo	76,16	11,03	3,48	9,32	100,00
Sulawesi Barat	66,94	11,58	4,85	16,63	100,00
Maluku	73,36	12,12	1,72	12,80	100,00
Maluku Utara	64,04	13,33	3,50	19,13	100,00
Papua Barat	71,47	7,66	0,96	19,90	100,00
Papua	75,36	12,02	1,80	10,82	100,00
Indonesia	73,87	8,18	4,05	13,90	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 4.5 **Percentase Penduduk Lansia yang Sakit Parah Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2017**

Provinsi	Jenis Kelamin		Tipe Daerah		Total
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	46,41	42,10	49,43	42,38	44,06
Sumatera Utara	40,11	36,34	36,60	39,27	38,10
Sumatera Barat	40,22	37,88	43,88	36,18	38,98
Riau	42,99	35,65	43,19	37,07	39,19
Jambi	37,32	23,64	31,29	30,62	30,76
Sumatera Selatan	39,50	31,37	41,32	32,37	35,23
Bengkulu	42,29	37,07	40,70	39,04	39,54
Lampung	35,64	30,58	38,32	31,66	32,98
Kep. Bangka Belitung	33,21	24,21	34,78	23,70	28,59
Kepulauan Riau	29,86	40,48	37,57	31,97	35,67
DKI Jakarta	45,72	34,49	39,36	-	39,36
Jawa Barat	40,45	36,90	39,73	36,81	38,66
Jawa Tengah	33,80	32,27	34,89	31,43	33,01
DI Yogyakarta	43,37	36,75	43,12	35,73	39,67
Jawa Timur	36,69	31,21	36,15	31,98	33,84
Banten	34,85	26,01	30,60	29,91	30,31
Bali	31,91	22,88	28,53	26,00	27,12
Nusa Tenggara Barat	35,17	32,40	27,04	38,58	33,74
Nusa Tenggara Timur	35,48	25,31	31,80	29,68	30,01
Kalimantan Barat	33,26	35,97	41,51	32,15	34,66
Kalimantan Tengah	32,13	26,03	29,99	29,06	29,37
Kalimantan Selatan	36,80	32,17	38,86	31,34	34,37
Kalimantan Timur	36,31	38,78	43,93	28,25	37,44
Kalimantan Utara	45,28	37,61	46,25	39,79	42,16
Sulawesi Utara	41,38	31,75	37,32	35,94	36,51
Sulawesi Tengah	38,03	32,64	37,58	34,85	35,35
Sulawesi Selatan	42,75	34,77	44,10	35,73	38,38
Sulawesi Tenggara	37,91	29,89	32,97	33,78	33,55
Gorontalo	36,23	32,54	41,90	30,20	34,24
Sulawesi Barat	30,34	41,00	35,86	35,39	35,50
Maluku	30,13	22,05	27,84	25,25	25,83
Maluku Utara	35,25	38,91	40,71	35,59	36,97
Papua Barat	38,62	46,75	44,92	41,34	42,62
Papua	27,17	27,63	32,89	24,21	27,36
Indonesia	37,68	33,13	37,45	33,49	35,31

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 4.6 Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Mengobati Sendiri Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2017

Provinsi	Jenis Kelamin		Tipe Daerah		Total
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	59,59	59,25	59,07	59,51	59,40
Sumatera Utara	72,48	73,00	72,07	73,37	72,77
Sumatera Barat	52,89	53,60	44,81	58,87	53,27
Riau	72,14	70,03	64,95	74,64	71,04
Jambi	72,23	69,61	60,45	74,96	70,99
Sumatera Selatan	75,95	77,35	71,70	79,20	76,68
Bengkulu	69,86	70,35	58,39	75,83	70,11
Lampung	73,59	70,88	74,76	71,50	72,23
Kep. Bangka Belitung	70,98	67,28	65,72	72,84	69,08
Kepulauan Riau	65,43	64,24	69,24	52,12	64,79
DKI Jakarta	66,90	66,30	66,58	-	66,58
Jawa Barat	73,99	72,67	71,12	77,28	73,30
Jawa Tengah	66,89	65,47	65,36	66,82	66,13
DI Yogyakarta	54,52	51,70	52,75	53,02	52,86
Jawa Timur	71,75	69,31	67,48	73,01	70,43
Banten	75,01	77,03	68,94	87,56	76,07
Bali	44,04	44,76	44,04	44,78	44,43
Nusa Tenggara Barat	66,44	68,52	71,55	64,66	67,56
Nusa Tenggara Timur	60,58	62,16	67,43	60,03	61,42
Kalimantan Barat	76,95	70,81	67,42	76,60	73,86
Kalimantan Tengah	77,50	82,29	79,14	80,08	79,77
Kalimantan Selatan	77,35	78,49	73,89	80,88	77,98
Kalimantan Timur	71,21	59,20	64,90	67,07	65,73
Kalimantan Utara	52,86	58,38	54,14	56,26	55,26
Sulawesi Utara	61,54	58,65	61,51	58,95	60,04
Sulawesi Tengah	77,62	77,75	78,19	77,55	77,69
Sulawesi Selatan	64,97	62,34	59,66	65,35	63,47
Sulawesi Tenggara	71,40	71,34	75,01	69,64	71,37
Gorontalo	73,75	71,88	68,21	74,96	72,74
Sulawesi Barat	64,26	64,02	57,22	66,14	64,14
Maluku	79,73	75,75	68,28	81,96	77,58
Maluku Utara	68,13	66,99	64,42	68,73	67,55
Papua Barat	63,87	58,29	65,99	59,05	61,24
Papua	65,84	62,65	67,37	62,55	64,50
Indonesia	69,63	68,16	67,03	70,55	68,85

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 4.7 Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Berobat Jalan Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2017

Provinsi	Jenis Kelamin		Tipe Daerah		Total
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	72,90	73,44	73,63	73,06	73,20
Sumatera Utara	48,84	48,46	49,11	48,21	48,63
Sumatera Barat	59,79	61,87	62,90	59,62	60,92
Riau	44,88	45,29	47,46	43,69	45,09
Jambi	42,88	43,97	48,51	41,47	43,40
Sumatera Selatan	44,87	47,43	49,63	44,48	46,21
Bengkulu	53,51	52,41	56,95	51,01	52,95
Lampung	49,99	52,44	52,76	50,77	51,22
Kep. Bangka Belitung	51,21	56,22	55,34	52,03	53,77
Kepulauan Riau	50,37	52,70	47,59	63,11	51,63
DKI Jakarta	55,94	61,09	58,70	-	58,70
Jawa Barat	53,88	53,82	55,48	50,87	53,85
Jawa Tengah	53,24	55,31	55,65	53,18	54,35
DI Yogyakarta	59,93	59,11	60,81	57,55	59,45
Jawa Timur	49,00	48,95	51,17	47,05	48,97
Banten	51,74	52,35	58,78	41,21	52,06
Bali	68,55	72,08	66,70	73,85	70,44
Nusa Tenggara Barat	59,98	62,96	55,58	65,95	61,59
Nusa Tenggara Timur	48,60	48,60	46,30	49,13	48,60
Kalimantan Barat	41,75	48,07	57,36	39,64	44,93
Kalimantan Tengah	44,93	40,76	44,55	42,17	42,95
Kalimantan Selatan	43,10	38,84	43,26	39,02	40,78
Kalimantan Timur	55,31	55,21	54,71	56,15	55,26
Kalimantan Utara	53,34	47,64	46,15	55,07	50,86
Sulawesi Utara	60,33	60,43	60,10	60,59	60,38
Sulawesi Tengah	41,62	43,50	33,38	45,02	42,58
Sulawesi Selatan	50,76	48,97	53,13	48,09	49,75
Sulawesi Tenggara	39,65	44,62	38,47	44,07	42,27
Gorontalo	50,62	50,73	53,81	49,14	50,68
Sulawesi Barat	44,88	41,21	48,94	41,24	42,97
Maluku	31,12	31,17	33,94	29,83	31,15
Maluku Utara	46,24	50,27	58,68	44,36	48,27
Papua Barat	48,30	49,45	49,18	48,68	48,84
Papua	54,87	54,72	55,64	54,24	54,80
Indonesia	51,93	52,87	54,52	50,48	52,43

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 4.8 Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan Menurut Provinsi dan Tempat Berobat, 2017

Provinsi	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik dokter/bidan	Klinik/dokter bersama	Puskesmas/Pustu	UKBM	Pengobatan tradisional	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	23,91	3,67	31,65	9,56	40,39	2,82	3,23	1,50
Sumatera Utara	13,43	9,75	45,30	10,55	20,04	3,44	4,93	0,74
Sumatera Barat	14,73	7,83	39,98	5,71	33,27	4,84	7,18	0,40
Riau	15,14	15,03	32,55	12,22	28,28	1,76	4,70	1,76
Jambi	13,08	6,16	44,60	8,12	30,22	0,00	4,85	0,69
Sumatera Selatan	10,51	9,10	49,52	7,31	23,07	3,35	3,51	0,92
Bengkulu	11,05	6,80	48,08	12,22	26,06	2,62	3,72	0,38
Lampung	7,26	8,73	54,46	8,47	21,64	3,89	3,79	0,41
Kep. Bangka Belitung	14,75	6,25	30,41	8,12	39,08	6,19	4,46	2,39
Kepulauan Riau	25,48	5,54	23,60	9,15	31,57	8,01	3,20	0,49
DKI Jakarta	22,57	23,53	6,82	21,59	28,42	0,83	3,64	0,00
Jawa Barat	10,31	8,24	37,03	17,34	29,54	2,65	2,66	1,23
Jawa Tengah	9,61	10,08	49,44	8,60	23,32	3,67	2,46	0,78
DI Yogyakarta	12,84	19,51	31,44	8,65	32,13	2,06	2,06	0,82
Jawa Timur	9,46	8,31	51,39	7,91	22,16	5,06	2,87	1,00
Banten	6,92	16,35	30,40	29,18	23,19	0,61	2,46	1,04
Bali	11,91	4,29	64,10	7,70	15,64	0,48	2,48	1,07
Nusa Tenggara Barat	6,81	1,73	50,48	10,23	28,82	3,19	3,83	2,53
Nusa Tenggara Timur	9,03	4,62	19,93	5,01	48,68	16,31	1,42	1,20
Kalimantan Barat	12,88	4,55	32,26	9,54	35,22	7,87	5,36	1,98
Kalimantan Tengah	21,97	2,58	20,22	8,26	48,18	5,69	2,54	0,50
Kalimantan Selatan	10,17	2,49	43,96	7,55	34,29	7,74	2,66	0,43
Kalimantan Timur	18,66	11,33	20,79	7,54	44,67	2,50	1,99	2,63
Kalimantan Utara	27,12	2,60	15,77	9,35	49,36	0,51	3,43	0,00
Sulawesi Utara	12,09	3,82	43,20	10,12	33,80	2,28	1,71	1,54
Sulawesi Tengah	11,66	1,18	29,67	2,70	47,91	13,73	2,23	0,58
Sulawesi Selatan	16,66	3,49	30,02	8,40	43,53	4,02	1,82	1,86
Sulawesi Tenggara	12,50	2,38	32,41	6,74	42,56	4,08	3,26	2,78
Gorontalo	11,09	1,03	38,99	10,09	41,81	1,90	1,91	0,98
Sulawesi Barat	11,69	4,06	25,94	0,79	58,95	2,43	1,06	1,24
Maluku	10,95	1,58	26,77	10,93	51,37	3,70	0,74	0,45
Maluku Utara	26,03	1,98	24,52	6,82	38,77	7,41	3,87	0,64
Papua Barat	19,93	9,72	9,10	8,55	57,20	2,02	0,24	1,64
Papua	26,22	5,34	14,68	3,36	50,21	7,44	0,71	0,11
Indonesia	11,46	8,80	41,78	11,11	27,84	3,80	2,97	1,04

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 4.9 Persentase Penduduk Lansia yang Tidak Berobat Jalan Menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2017

Provinsi	Alasan Utama Tidak Berobat Jalan				Total
	Tidak ada biaya	Mengobati sendiri	Merasa tidak perlu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	6,03	58,65	27,73	7,59	100,00
Sumatera Utara	8,27	63,99	22,40	5,34	100,00
Sumatera Barat	3,97	45,69	41,65	8,69	100,00
Riau	8,41	52,02	33,45	6,12	100,00
Jambi	9,38	58,78	27,89	3,96	100,00
Sumatera Selatan	1,49	69,57	23,59	5,35	100,00
Bengkulu	5,77	60,04	26,25	7,94	100,00
Lampung	5,53	66,63	24,95	2,89	100,00
Kep. Bangka Belitung	2,66	63,10	31,23	3,01	100,00
Kepulauan Riau	0,00	55,86	38,99	5,14	100,00
DKI Jakarta	1,07	67,91	25,31	5,71	100,00
Jawa Barat	7,25	64,96	22,09	5,70	100,00
Jawa Tengah	2,50	64,59	27,62	5,28	100,00
DI Yogyakarta	0,72	68,30	26,66	4,32	100,00
Jawa Timur	2,98	67,42	25,99	3,61	100,00
Banten	14,32	58,73	23,75	3,20	100,00
Bali	3,81	67,16	25,57	3,46	100,00
Nusa Tenggara Barat	6,24	64,92	24,19	4,65	100,00
Nusa Tenggara Timur	8,24	65,00	20,47	6,30	100,00
Kalimantan Barat	11,75	59,04	26,71	2,49	100,00
Kalimantan Tengah	7,23	69,09	20,17	3,51	100,00
Kalimantan Selatan	2,25	80,33	13,33	4,09	100,00
Kalimantan Timur	4,21	55,52	34,44	5,82	100,00
Kalimantan Utara	3,29	68,44	25,95	2,32	100,00
Sulawesi Utara	5,94	57,50	34,04	2,52	100,00
Sulawesi Tengah	5,71	70,43	18,71	5,15	100,00
Sulawesi Selatan	4,51	63,17	26,13	6,19	100,00
Sulawesi Tenggara	5,88	60,84	28,56	4,72	100,00
Gorontalo	2,79	84,89	10,60	1,73	100,00
Sulawesi Barat	5,43	53,98	34,21	6,37	100,00
Maluku	6,88	58,52	32,32	2,28	100,00
Maluku Utara	7,14	58,64	29,45	4,78	100,00
Papua Barat	3,02	72,28	20,05	4,64	100,00
Papua	4,24	60,73	22,16	12,88	100,00
Indonesia	4,97	64,79	25,39	4,84	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 4.10 Persentase Penduduk Lansia yang Pernah Dirawat Inap Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2017

Provinsi	Jenis Kelamin		Tipe Daerah		Total
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	16,12	13,45	18,74	13,14	14,68
Sumatera Utara	6,83	6,91	7,07	6,69	6,88
Sumatera Barat	7,04	6,65	7,95	6,13	6,83
Riau	7,65	6,78	8,05	6,71	7,22
Jambi	8,76	5,66	5,88	7,84	7,22
Sumatera Selatan	7,10	6,13	8,97	5,30	6,61
Bengkulu	9,37	6,90	11,33	6,96	8,14
Lampung	8,79	7,37	9,87	7,49	8,09
Kep. Bangka Belitung	6,74	7,01	6,86	6,90	6,88
Kepulauan Riau	5,72	6,97	6,47	5,96	6,34
DKI Jakarta	8,74	6,67	7,67	-	7,67
Jawa Barat	8,39	6,48	7,73	6,80	7,41
Jawa Tengah	10,02	8,03	9,07	8,87	8,96
DI Yogyakarta	11,38	7,96	8,39	11,32	9,52
Jawa Timur	7,65	5,95	7,27	6,26	6,73
Banten	7,59	4,16	6,23	5,22	5,86
Bali	7,24	5,91	7,21	5,67	6,53
Nusa Tenggara Barat	9,66	5,86	8,95	6,65	7,65
Nusa Tenggara Timur	6,26	4,53	9,56	4,37	5,35
Kalimantan Barat	6,69	6,12	9,58	4,81	6,40
Kalimantan Tengah	8,40	3,86	7,64	5,46	6,21
Kalimantan Selatan	8,40	6,42	10,97	4,74	7,35
Kalimantan Timur	11,04	8,42	9,39	10,59	9,83
Kalimantan Utara	15,97	12,15	14,73	13,65	14,20
Sulawesi Utara	11,36	9,34	10,22	10,37	10,30
Sulawesi Tengah	11,38	8,02	9,89	9,63	9,69
Sulawesi Selatan	9,32	8,06	10,01	7,88	8,61
Sulawesi Tenggara	8,95	7,65	12,90	6,26	8,27
Gorontalo	9,55	11,08	11,73	9,59	10,37
Sulawesi Barat	8,09	4,16	7,76	5,49	6,00
Maluku	4,75	3,78	3,60	4,67	4,25
Maluku Utara	7,41	7,53	9,61	6,71	7,47
Papua Barat	9,08	8,28	6,00	10,29	8,72
Papua	7,85	5,97	11,92	3,93	7,05
Indonesia	8,61	6,83	8,16	7,20	7,68

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 4.11 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Kebiasaan Merokok, 2017

Provinsi	Merokok			Tidak Merokok
	Setiap Hari	Tidak Setiap Hari	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	19,45	2,00	21,45	78,55
Sumatera Utara	19,92	1,59	21,52	78,48
Sumatera Barat	23,31	1,51	24,82	75,18
Riau	23,29	2,12	25,41	74,59
Jambi	23,48	2,08	25,56	74,44
Sumatera Selatan	23,40	2,58	25,98	74,02
Bengkulu	27,14	2,58	29,72	70,28
Lampung	27,42	3,08	30,50	69,50
Kep. Bangka Belitung	19,76	1,09	20,85	79,15
Kepulauan Riau	21,77	2,53	24,30	75,70
DKI Jakarta	12,38	1,75	14,13	85,87
Jawa Barat	26,05	2,88	28,92	71,08
Jawa Tengah	21,71	2,65	24,37	75,63
DI Yogyakarta	15,64	2,01	17,65	82,35
Jawa Timur	20,99	2,57	23,55	76,45
Banten	25,43	2,36	27,79	72,21
Bali	10,69	1,62	12,31	87,69
Nusa Tenggara Barat	26,55	2,62	29,17	70,83
Nusa Tenggara Timur	16,12	3,91	20,03	79,97
Kalimantan Barat	22,17	2,24	24,41	75,59
Kalimantan Tengah	22,05	2,37	24,42	75,58
Kalimantan Selatan	16,64	1,51	18,16	81,84
Kalimantan Timur	17,74	1,95	19,70	80,30
Kalimantan Utara	20,65	3,09	23,74	76,26
Sulawesi Utara	18,08	3,40	21,48	78,52
Sulawesi Tengah	24,59	3,02	27,62	72,38
Sulawesi Selatan	18,54	1,37	19,91	80,09
Sulawesi Tenggara	24,77	2,14	26,91	73,09
Gorontalo	26,54	5,03	31,57	68,43
Sulawesi Barat	18,73	3,67	22,40	77,60
Maluku	15,59	6,07	21,66	78,34
Maluku Utara	20,47	5,72	26,20	73,80
Papua Barat	18,37	6,41	24,78	75,22
Papua	14,37	6,25	20,61	79,39
Indonesia	21,73	2,53	24,26	75,74

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 5.1.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2017

Perkotaan

Provinsi	Jenis Kegiatan dalam Sempinggu Terakhir				Total
	Bekerja	Pengangguran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	38,73	0,70	37,78	22,79	100,00
Sumatera Utara	40,37	2,14	33,99	23,51	100,00
Sumatera Barat	42,94	1,03	36,65	19,38	100,00
Riau	30,39	1,85	42,65	25,11	100,00
Jambi	33,34	0,75	43,61	22,30	100,00
Sumatera Selatan	35,39	1,10	42,40	21,12	100,00
Bengkulu	40,94	0,74	33,56	24,77	100,00
Lampung	39,08	0,10	40,35	20,48	100,00
Kep. Bangka Belitung	33,71	0,52	47,58	18,19	100,00
Kepulauan Riau	31,54	1,87	39,59	27,01	100,00
DKI Jakarta	27,41	1,65	42,23	28,71	100,00
Jawa Barat	39,84	0,97	39,77	19,43	100,00
Jawa Tengah	44,39	0,65	36,56	18,40	100,00
DI Yogyakarta	55,77	0,26	32,18	11,79	100,00
Jawa Timur	46,45	0,75	35,98	16,82	100,00
Banten	35,20	1,23	38,78	24,79	100,00
Bali	50,90	0,12	35,21	13,76	100,00
Nusa Tenggara Barat	45,29	0,52	35,51	18,68	100,00
Nusa Tenggara Timur	31,80	0,45	38,47	29,28	100,00
Kalimantan Barat	32,80	0,96	41,90	24,34	100,00
Kalimantan Tengah	37,79	0,62	42,58	19,01	100,00
Kalimantan Selatan	36,98	0,56	44,80	17,66	100,00
Kalimantan Timur	32,84	1,49	44,55	21,12	100,00
Kalimantan Utara	35,95	0,33	44,05	19,67	100,00
Sulawesi Utara	38,97	0,39	40,86	19,78	100,00
Sulawesi Tengah	44,79	3,32	33,44	18,45	100,00
Sulawesi Selatan	31,80	0,39	43,92	23,89	100,00
Sulawesi Tenggara	34,19	0,00	47,72	18,09	100,00
Gorontalo	44,45	0,65	40,29	14,61	100,00
Sulawesi Barat	39,74	1,31	34,59	24,36	100,00
Maluku	31,22	0,89	41,53	26,36	100,00
Maluku Utara	34,12	0,67	41,69	23,51	100,00
Papua Barat	34,61	1,58	36,08	27,72	100,00
Papua	31,68	0,47	46,96	20,89	100,00
Indonesia	40,93	0,91	38,32	19,84	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017



Tabel 5.1.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2017

Provinsi	Jenis Kegiatan dalam Sempinggu Terakhir				Perdesaan
	Bekerja	Pengangguran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	43,40	0,32	32,59	23,69	100,00
Sumatera Utara	57,00	1,00	22,66	19,34	100,00
Sumatera Barat	51,40	0,46	30,34	17,81	100,00
Riau	50,39	0,42	29,70	19,48	100,00
Jambi	55,51	0,25	29,82	14,41	100,00
Sumatera Selatan	58,77	0,00	25,11	16,12	100,00
Bengkulu	61,17	0,00	21,46	17,38	100,00
Lampung	54,94	0,22	29,09	15,74	100,00
Kep. Bangka Belitung	53,57	0,62	29,81	16,00	100,00
Kepulauan Riau	51,25	0,46	36,03	12,25	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	51,43	0,88	30,56	17,12	100,00
Jawa Tengah	56,87	0,71	26,13	16,29	100,00
DI Yogyakarta	69,45	0,46	17,51	12,58	100,00
Jawa Timur	60,00	0,45	24,06	15,48	100,00
Banten	40,15	1,54	34,69	23,62	100,00
Bali	62,45	0,00	25,97	11,58	100,00
Nusa Tenggara Barat	54,27	0,00	27,45	18,29	100,00
Nusa Tenggara Timur	58,82	0,34	22,43	18,40	100,00
Kalimantan Barat	51,10	0,55	28,32	20,03	100,00
Kalimantan Tengah	51,61	1,01	30,77	16,61	100,00
Kalimantan Selatan	58,45	0,00	26,86	14,68	100,00
Kalimantan Timur	52,08	1,80	31,28	14,83	100,00
Kalimantan Utara	50,88	0,61	30,79	17,72	100,00
Sulawesi Utara	45,87	0,00	35,10	19,03	100,00
Sulawesi Tengah	54,19	2,02	28,55	15,25	100,00
Sulawesi Selatan	45,07	0,15	33,14	21,64	100,00
Sulawesi Tenggara	53,98	0,00	27,18	18,85	100,00
Gorontalo	51,57	0,00	28,22	20,20	100,00
Sulawesi Barat	50,39	0,65	33,36	15,60	100,00
Maluku	49,43	0,29	30,44	19,84	100,00
Maluku Utara	50,43	0,45	28,91	20,21	100,00
Papua Barat	59,67	0,29	21,71	18,32	100,00
Papua	62,99	0,52	17,37	19,12	100,00
Indonesia	55,34	0,55	27,05	17,06	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017



Tabel 5.1.3 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2017

Laki-laki

Provinsi	Jenis Kegiatan dalam Sempinggu Terakhir				Total
	Bekerja	Pengangguran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	60,18	0,73	9,68	29,41	100,00
Sumatera Utara	60,82	2,56	11,56	25,06	100,00
Sumatera Barat	64,86	0,92	11,56	22,66	100,00
Riau	59,15	1,95	11,70	27,20	100,00
Jambi	63,81	0,46	13,84	21,89	100,00
Sumatera Selatan	65,89	0,70	11,00	22,42	100,00
Bengkulu	67,78	0,09	11,46	20,66	100,00
Lampung	67,93	0,15	12,81	19,11	100,00
Kep. Bangka Belitung	57,57	0,79	21,06	20,59	100,00
Kepulauan Riau	51,74	0,00	20,28	27,97	100,00
DKI Jakarta	37,68	2,25	18,35	41,72	100,00
Jawa Barat	60,48	1,53	14,88	23,12	100,00
Jawa Tengah	65,56	0,84	14,97	18,63	100,00
DI Yogyakarta	72,22	0,21	14,13	13,44	100,00
Jawa Timur	69,34	0,65	12,79	17,22	100,00
Banten	53,54	1,88	13,63	30,94	100,00
Bali	65,25	0,00	21,45	13,30	100,00
Nusa Tenggara Barat	63,26	0,49	14,01	22,23	100,00
Nusa Tenggara Timur	65,94	0,17	10,78	23,11	100,00
Kalimantan Barat	61,36	0,93	14,13	23,57	100,00
Kalimantan Tengah	60,43	0,56	16,99	22,02	100,00
Kalimantan Selatan	66,03	0,43	15,06	18,48	100,00
Kalimantan Timur	53,38	2,46	23,48	20,68	100,00
Kalimantan Utara	59,40	0,33	15,74	24,54	100,00
Sulawesi Utara	62,39	0,31	14,86	22,44	100,00
Sulawesi Tengah	70,39	1,36	11,37	16,88	100,00
Sulawesi Selatan	60,37	0,39	13,22	26,02	100,00
Sulawesi Tenggara	61,74	0,00	17,45	20,81	100,00
Gorontalo	65,10	0,59	16,74	17,58	100,00
Sulawesi Barat	65,64	0,68	12,81	20,87	100,00
Maluku	53,98	0,21	18,68	27,13	100,00
Maluku Utara	61,47	0,87	16,21	21,45	100,00
Papua Barat	59,97	1,48	13,68	24,87	100,00
Papua	57,39	0,70	16,09	25,82	100,00
Indonesia	63,29	1,00	14,14	21,58	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017



Tabel 5.1.4 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2017

Provinsi	Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir				Perempuan
	Bekerja	Pengangguran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	26,18	0,17	55,44	18,21	100,00
Sumatera Utara	37,36	0,75	43,45	18,44	100,00
Sumatera Barat	33,74	0,52	50,69	15,04	100,00
Riau	25,27	0,00	58,67	16,06	100,00
Jambi	33,61	0,36	54,01	12,02	100,00
Sumatera Selatan	35,64	0,13	50,44	13,79	100,00
Bengkulu	41,73	0,36	39,29	18,62	100,00
Lampung	33,03	0,23	51,76	14,99	100,00
Kep. Bangka Belitung	25,25	0,31	60,98	13,46	100,00
Kepulauan Riau	18,07	3,31	59,54	19,08	100,00
DKI Jakarta	17,68	1,08	64,86	16,39	100,00
Jawa Barat	26,97	0,38	58,18	14,48	100,00
Jawa Tengah	37,71	0,54	45,63	16,12	100,00
DI Yogyakarta	51,47	0,44	37,13	10,96	100,00
Jawa Timur	39,43	0,55	44,86	15,16	100,00
Banten	20,00	0,79	61,56	17,65	100,00
Bali	47,20	0,14	40,14	12,53	100,00
Nusa Tenggara Barat	38,67	0,00	46,21	15,12	100,00
Nusa Tenggara Timur	42,13	0,54	39,13	18,20	100,00
Kalimantan Barat	27,79	0,44	52,33	19,44	100,00
Kalimantan Tengah	30,90	1,20	55,35	12,54	100,00
Kalimantan Selatan	33,30	0,10	52,73	13,87	100,00
Kalimantan Timur	22,85	0,58	59,60	16,98	100,00
Kalimantan Utara	19,83	0,60	68,23	11,34	100,00
Sulawesi Utara	25,00	0,10	58,17	16,73	100,00
Sulawesi Tengah	32,66	3,39	48,61	15,34	100,00
Sulawesi Selatan	24,36	0,12	55,80	19,71	100,00
Sulawesi Tenggara	35,46	0,00	47,92	16,62	100,00
Gorontalo	34,00	0,00	47,97	18,03	100,00
Sulawesi Barat	33,05	0,88	51,78	14,29	100,00
Maluku	30,11	0,86	51,15	17,88	100,00
Maluku Utara	30,03	0,10	49,33	20,54	100,00
Papua Barat	35,54	0,00	45,59	18,87	100,00
Papua	38,51	0,22	49,49	11,77	100,00
Indonesia	33,79	0,50	50,06	15,65	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017



Tabel 5.1.5 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2017

Laki-laki + Perempuan di Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Jenis Kegiatan dalam Sempinggu Terakhir				Total
	Bekerja	Pengangguran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	42,03	0,43	34,11	23,43	100,00
Sumatera Utara	48,28	1,59	28,60	21,52	100,00
Sumatera Barat	47,78	0,70	33,04	18,48	100,00
Riau	42,46	0,99	34,84	21,71	100,00
Jambi	48,53	0,41	34,16	16,90	100,00
Sumatera Selatan	50,22	0,40	31,43	17,95	100,00
Bengkulu	54,93	0,23	25,19	19,66	100,00
Lampung	50,55	0,19	32,21	17,05	100,00
Kep. Bangka Belitung	42,35	0,56	39,85	17,24	100,00
Kepulauan Riau	35,85	1,56	38,81	23,77	100,00
DKI Jakarta	27,41	1,65	42,23	28,71	100,00
Jawa Barat	43,41	0,94	36,93	18,72	100,00
Jawa Tengah	50,86	0,68	31,15	17,30	100,00
DI Yogyakarta	60,91	0,33	26,67	12,09	100,00
Jawa Timur	53,46	0,60	29,82	16,13	100,00
Banten	36,96	1,34	37,32	24,37	100,00
Bali	55,55	0,07	31,49	12,88	100,00
Nusa Tenggara Barat	50,23	0,23	31,08	18,46	100,00
Nusa Tenggara Timur	53,50	0,36	25,59	20,55	100,00
Kalimantan Barat	44,75	0,69	33,03	21,53	100,00
Kalimantan Tengah	46,40	0,87	35,22	17,51	100,00
Kalimantan Selatan	48,69	0,25	35,02	16,04	100,00
Kalimantan Timur	39,38	1,59	40,04	18,98	100,00
Kalimantan Utara	42,32	0,45	38,40	18,84	100,00
Sulawesi Utara	42,47	0,19	37,94	19,40	100,00
Sulawesi Tengah	51,64	2,37	29,88	16,11	100,00
Sulawesi Selatan	40,14	0,24	37,15	22,47	100,00
Sulawesi Tenggara	48,01	0,00	33,37	18,62	100,00
Gorontalo	48,54	0,28	33,37	17,82	100,00
Sulawesi Barat	48,25	0,78	33,61	17,36	100,00
Maluku	42,01	0,54	34,96	22,49	100,00
Maluku Utara	46,45	0,50	32,03	21,02	100,00
Papua Barat	49,24	0,83	27,70	22,24	100,00
Papua	49,42	0,50	30,19	19,89	100,00
Indonesia	47,92	0,74	32,85	18,49	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017



Tabel 5.2 Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2017

Provinsi	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SM	Tamat PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	33,56	35,10	48,79	56,89	44,10	35,09
Sumatera Utara	41,92	46,18	52,56	54,13	45,59	35,20
Sumatera Barat	38,57	48,50	51,92	52,23	45,53	26,36
Riau	36,29	43,49	48,02	42,22	32,19	29,52
Jambi	38,24	47,91	55,94	55,00	43,30	30,35
Sumatera Selatan	39,80	50,46	59,35	51,11	37,70	15,50
Bengkulu	36,99	57,18	62,24	52,98	61,53	35,16
Lampung	31,26	49,60	60,14	56,50	40,81	29,76
Kep. Bangka Belitung	30,25	42,51	49,51	44,66	31,75	24,62
Kepulauan Riau	37,18	30,37	37,92	60,32	35,38	18,89
DKI Jakarta	30,81	30,41	32,71	31,10	21,80	23,05
Jawa Barat	35,50	41,76	52,80	36,82	31,94	29,59
Jawa Tengah	38,42	52,25	60,42	52,92	43,26	34,45
DI Yogyakarta	47,63	61,88	73,21	66,60	55,29	48,95
Jawa Timur	49,06	53,14	63,66	51,32	39,77	33,66
Banten	29,51	36,07	48,16	35,33	26,63	33,61
Bali	54,14	54,69	62,68	53,63	58,13	38,54
Nusa Tenggara Barat	50,83	51,19	49,60	64,58	44,44	27,01
Nusa Tenggara Timur	47,99	54,05	63,06	48,69	46,14	34,31
Kalimantan Barat	36,05	46,08	50,23	50,72	40,33	39,39
Kalimantan Tengah	35,16	41,13	58,65	57,84	36,79	26,93
Kalimantan Selatan	46,16	48,57	60,65	40,31	37,61	32,53
Kalimantan Timur	27,01	34,24	49,07	36,13	39,44	38,60
Kalimantan Utara	46,76	39,17	47,30	40,07	47,38	27,07
Sulawesi Utara	24,79	37,55	48,73	51,58	34,53	39,78
Sulawesi Tengah	53,84	48,98	54,14	58,13	46,01	46,27
Sulawesi Selatan	35,23	41,90	42,67	46,77	34,54	38,60
Sulawesi Tenggara	36,36	49,65	60,32	53,46	47,37	25,21
Gorontalo	50,54	47,46	58,61	53,29	26,49	28,05
Sulawesi Barat	46,66	44,31	52,21	74,31	46,39	41,95
Maluku	46,80	34,68	47,29	45,62	43,80	25,93
Maluku Utara	38,76	44,75	48,22	59,07	41,06	38,31
Papua Barat	52,77	45,19	56,89	44,20	54,06	34,93
Papua	61,49	54,53	45,75	46,73	38,44	34,93
Indonesia	42,65	48,09	56,31	47,96	37,68	31,70

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017



Tabel 5.3 Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2017

Provinsi	Keanggotaan Rumah Tangga			
	Kepala Rumah Tangga	Isteri/Suami	Orang Tua/Mertua	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	48,65	34,46	7,21	28,40
Sumatera Utara	56,66	44,19	12,04	23,34
Sumatera Barat	57,62	44,30	18,14	32,91
Riau	53,03	27,79	11,27	48,06
Jambi	58,42	40,33	13,57	37,30
Sumatera Selatan	62,67	45,16	17,45	24,83
Bengkulu	66,90	59,93	7,23	54,88
Lampung	64,03	45,07	9,57	38,56
Kep. Bangka Belitung	51,55	30,18	15,57	25,00
Kepulauan Riau	48,68	21,79	5,09	29,38
DKI Jakarta	32,69	16,20	10,41	50,88
Jawa Barat	51,59	34,58	11,69	29,96
Jawa Tengah	60,40	50,38	19,28	22,95
DI Yogyakarta	69,27	62,90	31,95	27,54
Jawa Timur	65,03	50,11	21,66	28,70
Banten	46,33	24,31	6,79	59,55
Bali	68,40	64,02	35,38	43,27
Nusa Tenggara Barat	59,65	46,18	22,68	5,57
Nusa Tenggara Timur	64,29	53,25	20,80	27,58
Kalimantan Barat	57,85	40,09	14,77	21,28
Kalimantan Tengah	60,24	34,18	13,60	5,99
Kalimantan Selatan	57,87	47,18	12,77	35,17
Kalimantan Timur	49,66	28,30	13,29	10,83
Kalimantan Utara	58,40	23,49	9,76	35,54
Sulawesi Utara	59,25	29,56	9,95	26,21
Sulawesi Tengah	63,39	41,48	19,96	37,78
Sulawesi Selatan	52,67	31,43	13,71	20,71
Sulawesi Tenggara	58,26	43,73	7,33	12,97
Gorontalo	66,56	39,27	15,59	8,61
Sulawesi Barat	59,77	44,10	10,59	34,37
Maluku	51,24	35,50	20,67	17,81
Maluku Utara	60,82	43,15	14,99	18,76
Papua Barat	57,57	37,19	22,52	39,80
Papua	57,29	41,04	18,40	54,56
Indonesia	57,72	42,93	17,61	28,90

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017



Tabel 5.4 Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama, 2017

Provinsi	Lapangan Usaha Utama					Total
	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	57,36	9,05	15,72	9,31	8,56	100,00
Sumatera Utara	56,44	5,62	19,85	9,72	8,36	100,00
Sumatera Barat	58,69	6,25	22,67	5,81	6,58	100,00
Riau	63,60	4,71	15,22	10,80	5,66	100,00
Jambi	70,08	3,34	16,90	5,59	4,10	100,00
Sumatera Selatan	66,78	5,01	15,33	6,60	6,28	100,00
Bengkulu	70,99	4,47	12,47	6,93	5,14	100,00
Lampung	70,95	5,39	13,72	5,09	4,85	100,00
Kep. Bangka Belitung	50,13	9,95	19,47	11,12	9,34	100,00
Kepulauan Riau	31,19	8,08	29,97	13,40	17,37	100,00
DKI Jakarta	0,06	9,33	43,96	25,18	21,47	100,00
Jawa Barat	44,34	9,49	25,87	9,78	10,52	100,00
Jawa Tengah	54,52	13,23	18,61	6,74	6,90	100,00
DI Yogyakarta	58,45	9,85	17,74	7,23	6,73	100,00
Jawa Timur	59,38	7,94	18,37	7,91	6,41	100,00
Banten	37,50	10,29	21,97	16,39	13,85	100,00
Bali	45,83	18,19	22,89	6,92	6,17	100,00
Nusa Tenggara Barat	60,69	10,67	19,27	5,64	3,73	100,00
Nusa Tenggara Timur	77,06	9,10	8,50	2,41	2,93	100,00
Kalimantan Barat	71,09	6,23	11,87	6,06	4,75	100,00
Kalimantan Tengah	62,15	4,00	16,49	8,27	9,09	100,00
Kalimantan Selatan	54,88	7,41	20,43	9,81	7,46	100,00
Kalimantan Timur	38,53	6,56	32,05	10,49	12,37	100,00
Kalimantan Utara	53,26	5,40	21,56	7,68	12,10	100,00
Sulawesi Utara	43,76	7,86	26,68	10,14	11,57	100,00
Sulawesi Tengah	68,48	6,04	14,06	6,92	4,49	100,00
Sulawesi Selatan	62,73	6,28	18,68	7,93	4,39	100,00
Sulawesi Tenggara	62,94	9,90	18,24	3,70	5,23	100,00
Gorontalo	51,13	8,01	18,30	11,49	11,07	100,00
Sulawesi Barat	70,18	7,02	12,98	4,61	5,21	100,00
Maluku	58,09	11,19	17,01	7,47	6,24	100,00
Maluku Utara	64,39	14,01	10,67	5,54	5,39	100,00
Papua Barat	50,60	7,52	22,68	8,00	11,20	100,00
Papua	72,05	2,72	10,45	9,56	5,21	100,00
Indonesia	55,18	9,13	19,85	8,26	7,58	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017



Tabel 5.5 Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, 2017

Provinsi	Status Pekerjaan					Total
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh	Buruh/Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	32,65	41,32	10,48	7,50	8,05	100,00
Sumatera Utara	34,49	37,40	11,00	5,46	11,65	100,00
Sumatera Barat	33,78	37,91	6,84	9,93	11,55	100,00
Riau	38,61	38,12	11,57	4,27	7,42	100,00
Jambi	29,13	43,79	10,00	6,12	10,97	100,00
Sumatera Selatan	29,28	38,36	11,31	5,90	15,15	100,00
Bengkulu	25,54	47,20	4,99	5,63	16,65	100,00
Lampung	22,66	44,77	5,37	10,40	16,81	100,00
Kep. Bangka Belitung	40,14	31,90	14,73	3,53	9,69	100,00
Kepulauan Riau	46,21	25,61	17,64	5,48	5,05	100,00
DKI Jakarta	35,77	23,19	29,37	4,57	7,11	100,00
Jawa Barat	26,04	33,43	11,92	18,99	9,63	100,00
Jawa Tengah	27,57	38,31	9,42	12,01	12,69	100,00
DI Yogyakarta	19,72	44,63	7,19	8,31	20,16	100,00
Jawa Timur	24,41	36,93	10,72	14,24	13,70	100,00
Banten	31,53	25,54	20,78	16,43	5,72	100,00
Bali	28,02	36,86	10,19	4,83	20,09	100,00
Nusa Tenggara Barat	23,93	47,18	3,83	12,95	12,11	100,00
Nusa Tenggara	24,65	52,07	2,43	1,94	18,91	100,00
Kalimantan Barat	35,25	37,67	8,92	3,34	14,82	100,00
Kalimantan Tengah	34,12	39,66	11,57	2,95	11,71	100,00
Kalimantan Selatan	33,93	37,83	10,96	5,10	12,18	100,00
Kalimantan Timur	36,37	34,37	17,71	4,48	7,07	100,00
Kalimantan Utara	35,83	34,51	17,31	5,61	6,73	100,00
Sulawesi Utara	39,96	27,67	13,67	8,60	10,10	100,00
Sulawesi Tengah	32,83	44,86	6,29	4,05	11,97	100,00
Sulawesi Selatan	33,64	43,62	8,54	3,61	10,59	100,00
Sulawesi Tenggara	29,39	52,92	3,73	2,69	11,27	100,00
Gorontalo	37,45	32,24	14,79	7,48	8,03	100,00
Sulawesi Barat	31,87	47,36	7,22	3,58	9,98	100,00
Maluku	49,02	27,13	7,20	3,10	13,55	100,00
Maluku Utara	29,63	44,72	8,73	5,74	11,18	100,00
Papua Barat	36,75	35,24	15,89	0,40	11,72	100,00
Papua	33,69	41,96	11,32	1,45	11,59	100,00
Indonesia	28,02	37,66	10,51	11,33	12,48	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017



Tabel 5.6 Rata-rata dan Persentase Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu dari Penduduk Lansia Bekerja Menurut Provinsi, 2017

Provinsi	Rata-rata Jumlah Jam Kerja	Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu					Total
		0 jam	1-14 jam	15-34 jam	35-48 jam	49 jam atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	34,12	4,02	12,26	35,11	25,47	23,14	100,00
Sumatera Utara	35,35	2,29	13,56	34,44	28,09	21,62	100,00
Sumatera Barat	34,16	4,08	14,87	34,24	23,65	23,17	100,00
Riau	31,72	3,70	15,68	41,82	19,75	19,05	100,00
Jambi	30,70	3,25	16,22	40,01	25,77	14,74	100,00
Sumatera Selatan	33,55	2,97	12,75	35,15	29,67	19,46	100,00
Bengkulu	31,75	5,67	14,74	33,54	28,57	17,47	100,00
Lampung	32,13	2,18	16,79	37,44	26,00	17,59	100,00
Kep. Bangka	37,77	2,80	6,43	32,48	33,29	25,00	100,00
Kepulauan Riau	38,58	2,51	14,56	17,44	35,56	29,94	100,00
DKI Jakarta	45,45	1,11	8,52	16,31	35,27	38,79	100,00
Jawa Barat	37,61	3,88	8,65	31,67	28,89	26,91	100,00
Jawa Tengah	35,29	5,62	12,24	28,57	28,73	24,83	100,00
DI Yogyakarta	34,87	2,85	14,85	29,06	27,07	26,18	100,00
Jawa Timur	36,39	2,92	12,45	31,06	27,13	26,44	100,00
Banten	37,69	2,09	8,77	31,02	30,73	27,39	100,00
Bali	36,35	1,85	12,97	30,10	28,74	26,34	100,00
Nusa Tenggara Barat	31,94	5,38	18,61	31,10	22,99	21,91	100,00
Nusa Tenggara	31,96	2,78	13,02	40,66	28,77	14,77	100,00
Kalimantan Barat	31,92	3,69	13,56	37,97	29,45	15,33	100,00
Kalimantan Tengah	34,59	3,04	13,56	34,12	28,21	21,07	100,00
Kalimantan Selatan	33,73	3,10	14,66	34,29	27,77	20,18	100,00
Kalimantan Timur	39,75	2,92	5,66	27,48	35,37	28,58	100,00
Kalimantan Utara	36,93	8,27	10,71	22,43	35,81	22,78	100,00
Sulawesi Utara	34,85	4,12	10,16	34,05	34,14	17,52	100,00
Sulawesi Tengah	32,54	5,78	12,78	35,32	25,97	20,16	100,00
Sulawesi Selatan	32,05	4,71	19,20	31,72	24,96	19,40	100,00
Sulawesi Tenggara	33,51	5,10	12,18	34,22	27,29	21,21	100,00
Gorontalo	34,03	7,79	12,06	30,17	24,78	25,19	100,00
Sulawesi Barat	28,95	7,08	18,84	37,38	19,42	17,28	100,00
Maluku	33,95	3,28	11,65	36,48	30,05	18,54	100,00
Maluku Utara	33,64	6,61	13,68	31,82	23,49	24,40	100,00
Papua Barat	36,05	6,23	9,48	29,81	30,71	23,77	100,00
Papua	32,35	3,88	9,73	45,28	26,72	14,39	100,00
Indonesia	35,52	3,75	12,35	31,67	27,95	24,27	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017



Tabel 5.7 Rata-rata dan Persentase Pendapatan/Upah/Gaji dari Penduduk Lansia Bekerja Menurut Provinsi, 2017

Provinsi	Rata-rata Jumlah Pendapatan/ Upah/Gaji (000 rupiah)	Pendapatan/Upah/Gaji (Rupiah)					Total
		Kurang dari 1.000.000	1.000.000 s.d. 1.999.999	2.000.000 s.d. 2.999.999	Lebih dari 3.000.000		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Aceh	1400,46	43,70	33,87	12,67	9,75	100,00	
Sumatera Utara	1480,90	39,42	32,58	17,04	10,97	100,00	
Sumatera Barat	1305,07	48,07	31,66	11,26	9,01	100,00	
Riau	1500,45	39,80	32,75	14,18	13,28	100,00	
Jambi	1402,48	44,75	36,31	12,05	6,88	100,00	
Sumatera Selatan	1205,10	52,09	27,93	13,26	6,73	100,00	
Bengkulu	1364,85	54,61	25,26	7,73	12,39	100,00	
Lampung	1222,41	54,40	27,90	8,49	9,20	100,00	
Kep. Bangka Belitung	1563,95	37,24	33,66	15,28	13,81	100,00	
Kepulauan Riau	2225,00	32,34	28,92	11,67	27,07	100,00	
DKI Jakarta	3290,59	21,74	22,41	17,66	38,19	100,00	
Jawa Barat	1534,37	43,45	31,88	12,07	12,60	100,00	
Jawa Tengah	1088,63	59,62	26,82	6,99	6,56	100,00	
DI Yogyakarta	1059,29	55,46	28,59	7,47	8,48	100,00	
Jawa Timur	1179,21	57,55	26,39	7,79	8,27	100,00	
Banten	2160,48	38,05	24,41	14,86	22,68	100,00	
Bali	1307,81	52,10	24,44	12,09	11,36	100,00	
Nusa Tenggara Barat	1024,08	66,12	19,46	3,92	10,50	100,00	
Nusa Tenggara Timur	851,69	72,82	13,77	4,73	8,68	100,00	
Kalimantan Barat	1291,24	54,63	24,99	10,47	9,91	100,00	
Kalimantan Tengah	1646,02	39,49	27,53	17,13	15,85	100,00	
Kalimantan Selatan	1375,21	47,53	28,27	10,94	13,26	100,00	
Kalimantan Timur	2099,84	23,11	35,30	18,65	22,95	100,00	
Kalimantan Utara	2150,32	24,41	37,65	11,35	26,60	100,00	
Sulawesi Utara	1934,31	29,71	33,31	19,09	17,89	100,00	
Sulawesi Tengah	1398,70	55,24	24,06	8,40	12,31	100,00	
Sulawesi Selatan	1510,33	47,61	26,49	9,98	15,92	100,00	
Sulawesi Tenggara	1110,55	57,85	28,33	6,38	7,44	100,00	
Gorontalo	1573,66	47,97	29,05	11,08	11,89	100,00	
Sulawesi Barat	909,93	68,21	21,06	2,65	8,09	100,00	
Maluku	1443,19	53,29	21,35	11,13	14,23	100,00	
Maluku Utara	1650,48	32,34	28,94	18,48	20,24	100,00	
Papua Barat	2088,60	21,73	32,80	24,09	21,39	100,00	
Papua	2388,98	28,30	26,41	16,58	28,71	100,00	
Indonesia	1386,90	50,50	28,00	10,31	11,19	100,00	

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017



Tabel 6.1.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2017

Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal				Perkotaan
	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Lainnya	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	92,64	1,77	4,32	1,26	100,00
Sumatera Utara	82,30	7,34	8,84	1,52	100,00
Sumatera Barat	87,49	4,85	7,43	0,23	100,00
Riau	82,34	11,48	5,63	0,55	100,00
Jambi	85,21	7,82	6,04	0,93	100,00
Sumatera Selatan	81,28	8,54	9,01	1,17	100,00
Bengkulu	88,08	7,85	4,08	0,00	100,00
Lampung	87,97	4,17	7,74	0,12	100,00
Kep. Bangka Belitung	92,91	0,91	5,92	0,26	100,00
Kepulauan Riau	87,02	9,16	3,63	0,19	100,00
DKI Jakarta	80,37	9,54	7,62	2,46	100,00
Jawa Barat	89,36	3,43	6,32	0,89	100,00
Jawa Tengah	91,96	1,27	6,57	0,21	100,00
DI Yogyakarta	90,35	2,13	7,52	0,00	100,00
Jawa Timur	91,51	2,95	4,75	0,80	100,00
Banten	92,23	3,68	2,82	1,27	100,00
Bali	93,65	2,47	3,14	0,73	100,00
Nusa Tenggara Barat	90,13	1,28	8,40	0,18	100,00
Nusa Tenggara Timur	88,94	3,24	6,58	1,24	100,00
Kalimantan Barat	90,81	3,55	4,29	1,34	100,00
Kalimantan Tengah	89,51	4,79	4,65	1,06	100,00
Kalimantan Selatan	87,65	7,73	4,18	0,44	100,00
Kalimantan Timur	86,39	7,60	5,21	0,79	100,00
Kalimantan Utara	86,53	5,32	7,09	1,05	100,00
Sulawesi Utara	85,80	2,87	11,07	0,26	100,00
Sulawesi Tengah	88,93	4,40	6,67	0,00	100,00
Sulawesi Selatan	91,32	2,10	5,61	0,96	100,00
Sulawesi Tenggara	92,29	1,85	5,29	0,57	100,00
Gorontalo	85,59	0,61	13,80	0,00	100,00
Sulawesi Barat	95,25	1,57	3,18	0,00	100,00
Maluku	88,68	1,19	9,50	0,63	100,00
Maluku Utara	88,47	2,25	8,00	1,28	100,00
Papua Barat	84,35	4,54	6,71	4,40	100,00
Papua	77,48	6,51	10,10	5,91	100,00
Indonesia	89,24	3,76	6,16	0,84	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 6.1.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2017

Perdesaan

Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal				Total
	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	95,70	0,40	3,30	0,59	100,00
Sumatera Utara	91,59	1,04	6,57	0,80	100,00
Sumatera Barat	89,87	0,73	9,17	0,23	100,00
Riau	94,32	1,77	3,07	0,84	100,00
Jambi	95,11	0,58	3,86	0,45	100,00
Sumatera Selatan	93,58	0,51	5,54	0,37	100,00
Bengkulu	97,68	0,24	1,40	0,68	100,00
Lampung	95,33	0,37	4,05	0,25	100,00
Kep. Bangka Belitung	97,53	0,57	1,57	0,33	100,00
Kepulauan Riau	97,28	0,87	1,74	0,10	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	94,16	0,13	5,00	0,71	100,00
Jawa Tengah	95,17	0,08	4,55	0,20	100,00
DI Yogyakarta	98,63	0,00	1,37	0,00	100,00
Jawa Timur	96,94	0,26	2,69	0,12	100,00
Banten	96,48	0,21	3,31	0,00	100,00
Bali	96,39	0,24	3,37	0,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	93,06	0,04	6,90	0,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	96,62	0,07	2,97	0,34	100,00
Kalimantan Barat	96,41	0,20	3,20	0,19	100,00
Kalimantan Tengah	95,28	0,33	4,01	0,37	100,00
Kalimantan Selatan	93,77	1,28	4,75	0,20	100,00
Kalimantan Timur	94,29	0,88	3,82	1,02	100,00
Kalimantan Utara	94,87	3,09	1,84	0,20	100,00
Sulawesi Utara	92,73	0,07	7,02	0,18	100,00
Sulawesi Tengah	95,72	0,13	4,08	0,08	100,00
Sulawesi Selatan	95,66	0,12	3,69	0,53	100,00
Sulawesi Tenggara	96,71	0,07	3,19	0,03	100,00
Gorontalo	94,18	0,51	5,15	0,16	100,00
Sulawesi Barat	95,74	0,13	4,13	0,00	100,00
Maluku	94,61	0,12	5,07	0,20	100,00
Maluku Utara	97,57	0,00	2,28	0,16	100,00
Papua Barat	96,12	1,59	1,58	0,72	100,00
Papua	94,13	1,65	3,35	0,87	100,00
Indonesia	95,25	0,31	4,13	0,31	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 6.1.3 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2017

Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal				Laki-laki
	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Lainnya	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	96,02	0,77	2,29	0,93	100,00
Sumatera Utara	87,75	3,99	7,25	1,01	100,00
Sumatera Barat	88,78	2,75	8,23	0,24	100,00
Riau	89,95	6,70	2,89	0,45	100,00
Jambi	92,99	2,66	3,80	0,55	100,00
Sumatera Selatan	90,34	3,74	5,36	0,56	100,00
Bengkulu	95,14	2,46	2,14	0,25	100,00
Lampung	95,00	1,23	3,64	0,13	100,00
Kep. Bangka Belitung	96,33	0,90	2,35	0,41	100,00
Kepulauan Riau	90,93	5,36	3,50	0,21	100,00
DKI Jakarta	80,21	10,05	7,30	2,44	100,00
Jawa Barat	92,38	2,22	4,52	0,88	100,00
Jawa Tengah	94,76	0,74	4,38	0,11	100,00
DI Yogyakarta	94,45	1,48	4,07	0,00	100,00
Jawa Timur	94,81	1,79	3,01	0,39	100,00
Banten	93,76	2,97	2,54	0,72	100,00
Bali	95,37	1,42	2,71	0,50	100,00
Nusa Tenggara Barat	93,17	0,48	6,35	0,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	95,53	0,65	3,15	0,67	100,00
Kalimantan Barat	95,78	1,21	2,54	0,46	100,00
Kalimantan Tengah	92,67	2,33	3,98	1,01	100,00
Kalimantan Selatan	91,19	4,33	4,20	0,28	100,00
Kalimantan Timur	87,47	7,34	4,25	0,95	100,00
Kalimantan Utara	88,55	5,77	4,99	0,69	100,00
Sulawesi Utara	90,86	1,67	7,22	0,24	100,00
Sulawesi Tengah	94,49	1,46	3,99	0,05	100,00
Sulawesi Selatan	94,48	0,74	4,16	0,62	100,00
Sulawesi Tenggara	95,65	0,90	3,27	0,18	100,00
Gorontalo	92,18	0,70	7,11	0,00	100,00
Sulawesi Barat	95,75	0,96	3,29	0,00	100,00
Maluku	92,87	0,37	6,40	0,36	100,00
Maluku Utara	95,40	0,30	3,73	0,57	100,00
Papua Barat	91,85	3,59	2,45	2,11	100,00
Papua	88,69	3,50	4,76	3,05	100,00
Indonesia	93,01	2,19	4,25	0,55	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 6.1.4 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2017

Perempuan

Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal				Total
	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	93,87	0,79	4,69	0,65	100,00
Sumatera Utara	86,32	4,33	8,07	1,28	100,00
Sumatera Barat	89,10	1,94	8,72	0,23	100,00
Riau	89,49	4,25	5,24	1,02	100,00
Jambi	91,00	3,05	5,30	0,65	100,00
Sumatera Selatan	88,11	3,02	8,12	0,74	100,00
Bengkulu	95,01	2,15	2,10	0,75	100,00
Lampung	91,91	1,43	6,36	0,30	100,00
Kep. Bangka Belitung	93,75	0,62	5,46	0,17	100,00
Kepulauan Riau	88,14	8,91	2,82	0,13	100,00
DKI Jakarta	80,53	9,06	7,93	2,48	100,00
Jawa Barat	89,67	2,40	7,15	0,78	100,00
Jawa Tengah	92,70	0,54	6,48	0,28	100,00
DI Yogyakarta	92,76	1,18	6,06	0,00	100,00
Jawa Timur	94,00	1,31	4,22	0,47	100,00
Banten	93,79	1,87	3,45	0,89	100,00
Bali	94,40	1,55	3,71	0,33	100,00
Nusa Tenggara Barat	90,56	0,67	8,62	0,15	100,00
Nusa Tenggara Timur	94,84	0,70	4,11	0,36	100,00
Kalimantan Barat	93,31	1,42	4,58	0,69	100,00
Kalimantan Tengah	93,96	1,37	4,50	0,18	100,00
Kalimantan Selatan	91,22	3,67	4,80	0,31	100,00
Kalimantan Timur	91,35	2,62	5,25	0,79	100,00
Kalimantan Utara	92,47	2,56	4,35	0,62	100,00
Sulawesi Utara	88,49	1,01	10,32	0,19	100,00
Sulawesi Tengah	93,77	0,79	5,38	0,06	100,00
Sulawesi Selatan	93,92	0,85	4,50	0,72	100,00
Sulawesi Tenggara	95,12	0,34	4,32	0,21	100,00
Gorontalo	90,10	0,41	9,30	0,19	100,00
Sulawesi Barat	95,53	0,00	4,47	0,00	100,00
Maluku	91,75	0,69	7,18	0,38	100,00
Maluku Utara	95,00	0,87	3,80	0,33	100,00
Papua Barat	91,72	1,58	4,67	2,03	100,00
Papua	86,17	3,62	7,66	2,55	100,00
Indonesia	91,59	1,87	5,95	0,59	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 6.1.5 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2017

Laki-laki + Perempuan di Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal				Total
	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	94,86	0,78	3,58	0,78	100,00
Sumatera Utara	86,97	4,17	7,70	1,16	100,00
Sumatera Barat	88,96	2,31	8,50	0,23	100,00
Riau	89,72	5,50	4,05	0,73	100,00
Jambi	92,00	2,85	4,55	0,60	100,00
Sumatera Selatan	89,20	3,37	6,78	0,66	100,00
Bengkulu	95,07	2,30	2,12	0,50	100,00
Lampung	93,47	1,33	4,98	0,21	100,00
Kep. Bangka Belitung	95,03	0,76	3,92	0,29	100,00
Kepulauan Riau	89,54	7,12	3,17	0,17	100,00
DKI Jakarta	80,37	9,54	7,62	2,46	100,00
Jawa Barat	90,99	2,31	5,87	0,83	100,00
Jawa Tengah	93,66	0,64	5,50	0,20	100,00
DI Yogyakarta	93,53	1,31	5,16	0,00	100,00
Jawa Timur	94,37	1,53	3,66	0,44	100,00
Banten	93,77	2,42	3,00	0,81	100,00
Bali	94,86	1,49	3,24	0,41	100,00
Nusa Tenggara Barat	91,79	0,58	7,55	0,08	100,00
Nusa Tenggara Timur	95,17	0,67	3,65	0,51	100,00
Kalimantan Barat	94,55	1,32	3,56	0,58	100,00
Kalimantan Tengah	93,29	1,87	4,23	0,61	100,00
Kalimantan Selatan	91,21	3,98	4,51	0,30	100,00
Kalimantan Timur	89,26	5,16	4,71	0,87	100,00
Kalimantan Utara	90,33	4,31	4,70	0,66	100,00
Sulawesi Utara	89,62	1,33	8,84	0,21	100,00
Sulawesi Tengah	94,13	1,13	4,68	0,06	100,00
Sulawesi Selatan	94,17	0,80	4,35	0,68	100,00
Sulawesi Tenggara	95,37	0,61	3,82	0,19	100,00
Gorontalo	91,07	0,54	8,29	0,10	100,00
Sulawesi Barat	95,63	0,45	3,92	0,00	100,00
Maluku	92,29	0,54	6,80	0,37	100,00
Maluku Utara	95,20	0,58	3,76	0,45	100,00
Papua Barat	91,79	2,67	3,46	2,07	100,00
Papua	87,62	3,55	5,99	2,84	100,00
Indonesia	92,26	2,02	5,14	0,57	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 6.2.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal, 2017

Perkotaan

Provinsi	Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal			Total
	Rumah Layak Huni	Hampir Tidak Layak Huni	Tidak Layak Huni	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	96,96	2,92	0,12	100,00
Sumatera Utara	98,27	1,63	0,10	100,00
Sumatera Barat	97,21	2,79	0,00	100,00
Riau	99,74	0,26	0,00	100,00
Jambi	98,56	1,44	0,00	100,00
Sumatera Selatan	97,76	2,24	0,00	100,00
Bengkulu	98,44	1,39	0,17	100,00
Lampung	95,22	4,50	0,27	100,00
Kep. Bangka Belitung	99,57	0,43	0,00	100,00
Kepulauan Riau	99,32	0,68	0,00	100,00
DKI Jakarta	97,56	2,25	0,19	100,00
Jawa Barat	94,21	5,35	0,43	100,00
Jawa Tengah	92,45	6,83	0,71	100,00
DI Yogyakarta	94,88	4,86	0,26	100,00
Jawa Timur	93,33	5,77	0,90	100,00
Banten	96,14	3,32	0,54	100,00
Bali	97,54	2,25	0,21	100,00
Nusa Tenggara Barat	89,53	7,98	2,49	100,00
Nusa Tenggara Timur	90,38	7,08	2,54	100,00
Kalimantan Barat	99,12	0,88	0,00	100,00
Kalimantan Tengah	99,44	0,56	0,00	100,00
Kalimantan Selatan	99,24	0,76	0,00	100,00
Kalimantan Timur	99,36	0,64	0,00	100,00
Kalimantan Utara	99,86	0,14	0,00	100,00
Sulawesi Utara	97,95	1,90	0,14	100,00
Sulawesi Tengah	97,43	2,43	0,14	100,00
Sulawesi Selatan	94,33	4,80	0,88	100,00
Sulawesi Tenggara	96,87	2,82	0,31	100,00
Gorontalo	92,58	6,00	1,41	100,00
Sulawesi Barat	89,26	9,49	1,25	100,00
Maluku	95,50	2,90	1,60	100,00
Maluku Utara	95,90	3,53	0,57	100,00
Papua Barat	97,69	2,19	0,12	100,00
Papua	96,81	3,19	0,00	100,00
Indonesia	94,78	4,68	0,54	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 6.2.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal, 2017

Provinsi	Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal			Perdesaan
	Rumah Layak Huni	Hampir Tidak Layak Huni	Tidak Layak Huni	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	76,36	15,88	7,76	100,00
Sumatera Utara	86,72	10,25	3,03	100,00
Sumatera Barat	84,41	12,34	3,24	100,00
Riau	89,51	9,10	1,38	100,00
Jambi	89,61	9,21	1,18	100,00
Sumatera Selatan	81,50	15,90	2,60	100,00
Bengkulu	83,80	14,41	1,80	100,00
Lampung	89,06	8,64	2,29	100,00
Kep. Bangka Belitung	95,35	4,51	0,14	100,00
Kepulauan Riau	84,88	14,64	0,48	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	82,06	15,04	2,90	100,00
Jawa Tengah	84,95	12,92	2,13	100,00
DI Yogyakarta	93,85	5,92	0,23	100,00
Jawa Timur	81,42	15,21	3,38	100,00
Banten	74,65	21,25	4,10	100,00
Bali	92,21	6,05	1,74	100,00
Nusa Tenggara Barat	74,70	20,11	5,19	100,00
Nusa Tenggara Timur	53,24	24,02	22,74	100,00
Kalimantan Barat	85,95	11,70	2,36	100,00
Kalimantan Tengah	86,41	11,29	2,31	100,00
Kalimantan Selatan	86,93	11,06	2,02	100,00
Kalimantan Timur	95,85	3,71	0,44	100,00
Kalimantan Utara	90,58	8,07	1,35	100,00
Sulawesi Utara	87,08	9,94	2,98	100,00
Sulawesi Tengah	79,91	13,62	6,47	100,00
Sulawesi Selatan	82,45	13,98	3,56	100,00
Sulawesi Tenggara	84,61	12,48	2,91	100,00
Gorontalo	69,87	22,01	8,12	100,00
Sulawesi Barat	70,18	20,71	9,11	100,00
Maluku	74,06	17,29	8,65	100,00
Maluku Utara	71,27	18,59	10,14	100,00
Papua Barat	75,70	14,13	10,18	100,00
Papua	52,45	19,76	27,80	100,00
Indonesia	82,44	13,83	3,74	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 6.2.3 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal, 2017

Laki-laki

Provinsi	Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal			Total
	Rumah Layak Huni	Hampir Tidak Layak Huni	Tidak Layak Huni	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	83,18	11,06	5,76	100,00
Sumatera Utara	92,62	5,66	1,73	100,00
Sumatera Barat	89,12	9,24	1,64	100,00
Riau	94,35	4,99	0,66	100,00
Jambi	92,32	7,02	0,66	100,00
Sumatera Selatan	86,55	11,00	2,45	100,00
Bengkulu	87,79	11,26	0,95	100,00
Lampung	90,42	7,73	1,85	100,00
Kep. Bangka Belitung	97,19	2,81	0,00	100,00
Kepulauan Riau	95,08	4,92	0,00	100,00
DKI Jakarta	98,63	1,37	0,00	100,00
Jawa Barat	90,68	8,16	1,16	100,00
Jawa Tengah	89,46	9,20	1,34	100,00
DI Yogyakarta	95,47	4,29	0,24	100,00
Jawa Timur	87,91	10,06	2,03	100,00
Banten	88,61	9,61	1,78	100,00
Bali	95,24	3,69	1,07	100,00
Nusa Tenggara Barat	81,90	14,08	4,02	100,00
Nusa Tenggara Timur	61,26	20,46	18,29	100,00
Kalimantan Barat	89,12	9,00	1,88	100,00
Kalimantan Tengah	91,74	7,01	1,25	100,00
Kalimantan Selatan	92,07	6,63	1,30	100,00
Kalimantan Timur	97,67	2,03	0,30	100,00
Kalimantan Utara	96,66	3,20	0,13	100,00
Sulawesi Utara	91,20	6,64	2,16	100,00
Sulawesi Tengah	83,16	11,89	4,96	100,00
Sulawesi Selatan	86,90	10,54	2,56	100,00
Sulawesi Tenggara	87,95	9,88	2,17	100,00
Gorontalo	79,01	14,59	6,40	100,00
Sulawesi Barat	72,61	19,83	7,56	100,00
Maluku	82,46	12,02	5,52	100,00
Maluku Utara	77,24	14,95	7,81	100,00
Papua Barat	83,95	9,54	6,50	100,00
Papua	67,15	13,31	19,54	100,00
Indonesia	89,09	8,81	2,10	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 6.2.4 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal, 2017

Provinsi	Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal			Perempuan
	Rumah Layak Huni	Hampir Tidak Layak Huni	Tidak Layak Huni	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	81,02	13,40	5,58	100,00
Sumatera Utara	92,34	6,22	1,44	100,00
Sumatera Barat	89,47	8,23	2,31	100,00
Riau	92,50	6,45	1,05	100,00
Jambi	92,52	6,51	0,97	100,00
Sumatera Selatan	88,00	11,06	0,94	100,00
Bengkulu	87,74	10,49	1,77	100,00
Lampung	90,83	7,46	1,72	100,00
Kep. Bangka Belitung	98,07	1,81	0,12	100,00
Kepulauan Riau	96,48	3,28	0,24	100,00
DKI Jakarta	96,56	3,07	0,37	100,00
Jawa Barat	89,53	9,10	1,38	100,00
Jawa Tengah	87,61	10,81	1,58	100,00
DI Yogyakarta	93,66	6,09	0,25	100,00
Jawa Timur	86,31	11,34	2,36	100,00
Banten	88,04	10,06	1,89	100,00
Bali	95,16	4,13	0,71	100,00
Nusa Tenggara Barat	80,48	15,51	4,01	100,00
Nusa Tenggara Timur	59,38	21,13	19,48	100,00
Kalimantan Barat	91,55	7,18	1,27	100,00
Kalimantan Tengah	89,99	8,22	1,79	100,00
Kalimantan Selatan	92,09	6,85	1,06	100,00
Kalimantan Timur	98,58	1,42	0,00	100,00
Kalimantan Utara	94,38	4,42	1,20	100,00
Sulawesi Utara	92,67	6,04	1,29	100,00
Sulawesi Tengah	84,86	10,12	5,03	100,00
Sulawesi Selatan	86,26	11,04	2,70	100,00
Sulawesi Tenggara	88,66	9,26	2,08	100,00
Gorontalo	77,32	17,61	5,07	100,00
Sulawesi Barat	75,99	16,81	7,20	100,00
Maluku	82,47	11,31	6,23	100,00
Maluku Utara	78,11	14,39	7,49	100,00
Papua Barat	83,57	9,98	6,45	100,00
Papua	73,36	13,25	13,39	100,00
Indonesia	88,08	9,72	2,20	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 6.2.5 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal, 2017

Laki-laki + Perempuan di Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal			Total
	Rumah Layak Huni	Hampir Tidak Layak Huni	Tidak Layak Huni	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	82,02	12,32	5,66	100,00
Sumatera Utara	92,47	5,96	1,57	100,00
Sumatera Barat	89,31	8,69	2,00	100,00
Riau	93,44	5,71	0,85	100,00
Jambi	92,42	6,77	0,81	100,00
Sumatera Selatan	87,29	11,03	1,68	100,00
Bengkulu	87,77	10,88	1,36	100,00
Lampung	90,62	7,60	1,78	100,00
Kep. Bangka Belitung	97,63	2,30	0,06	100,00
Kepulauan Riau	95,78	4,11	0,12	100,00
DKI Jakarta	97,56	2,25	0,19	100,00
Jawa Barat	90,09	8,64	1,27	100,00
Jawa Tengah	88,48	10,06	1,46	100,00
DI Yogyakarta	94,48	5,27	0,25	100,00
Jawa Timur	87,04	10,75	2,21	100,00
Banten	88,32	9,84	1,84	100,00
Bali	95,19	3,93	0,88	100,00
Nusa Tenggara Barat	81,15	14,83	4,02	100,00
Nusa Tenggara Timur	60,27	20,81	18,92	100,00
Kalimantan Barat	90,34	8,09	1,57	100,00
Kalimantan Tengah	90,90	7,59	1,51	100,00
Kalimantan Selatan	92,08	6,75	1,17	100,00
Kalimantan Timur	98,09	1,75	0,16	100,00
Kalimantan Utara	95,63	3,76	0,62	100,00
Sulawesi Utara	91,97	6,33	1,71	100,00
Sulawesi Tengah	84,01	11,00	4,99	100,00
Sulawesi Selatan	86,54	10,82	2,64	100,00
Sulawesi Tenggara	88,32	9,56	2,13	100,00
Gorontalo	78,11	16,21	5,69	100,00
Sulawesi Barat	74,41	18,22	7,37	100,00
Maluku	82,46	11,65	5,88	100,00
Maluku Utara	77,67	14,68	7,65	100,00
Papua Barat	83,78	9,74	6,48	100,00
Papua	69,78	13,29	16,94	100,00
Indonesia	88,56	9,29	2,15	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 6.3.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Ekonomi Rumah Tangga, 2017

Provinsi	Status Ekonomi Rumah Tangga			Perkotaan
	40 % Ekonomi Terbawah	40 % Ekonomi Menengah	20 % Ekonomi Teratas	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	33,03	47,79	19,17	100,00
Sumatera Utara	36,33	45,20	18,48	100,00
Sumatera Barat	28,37	47,73	23,90	100,00
Riau	29,17	46,23	24,60	100,00
Jambi	39,21	43,51	17,28	100,00
Sumatera Selatan	39,29	36,70	24,01	100,00
Bengkulu	42,72	39,31	17,97	100,00
Lampung	45,28	38,78	15,94	100,00
Kep. Bangka Belitung	10,72	55,70	33,58	100,00
Kepulauan Riau	22,88	42,55	34,58	100,00
DKI Jakarta	11,63	32,81	55,57	100,00
Jawa Barat	45,67	33,55	20,79	100,00
Jawa Tengah	57,87	32,31	9,82	100,00
DI Yogyakarta	53,34	26,70	19,96	100,00
Jawa Timur	53,18	32,78	14,04	100,00
Banten	31,54	38,28	30,18	100,00
Bali	36,69	40,64	22,67	100,00
Nusa Tenggara Barat	55,94	30,41	13,64	100,00
Nusa Tenggara Timur	44,14	40,32	15,54	100,00
Kalimantan Barat	34,39	44,14	21,47	100,00
Kalimantan Tengah	28,66	43,36	27,98	100,00
Kalimantan Selatan	25,85	48,61	25,54	100,00
Kalimantan Timur	12,98	49,61	37,41	100,00
Kalimantan Utara	10,59	61,65	27,76	100,00
Sulawesi Utara	33,85	37,59	28,56	100,00
Sulawesi Tengah	29,46	40,39	30,14	100,00
Sulawesi Selatan	39,33	35,79	24,88	100,00
Sulawesi Tenggara	46,83	34,79	18,38	100,00
Gorontalo	35,52	46,26	18,22	100,00
Sulawesi Barat	62,16	30,46	7,38	100,00
Maluku	32,42	52,39	15,19	100,00
Maluku Utara	28,69	49,95	21,36	100,00
Papua Barat	16,66	52,91	30,42	100,00
Papua	15,21	46,42	38,37	100,00
Indonesia	43,88	35,53	20,59	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 6.3.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Ekonomi Rumah Tangga, 2017

Perdesaan

Provinsi	Status Ekonomi Rumah Tangga			Total
	40 % Ekonomi Terbawah	40 % Ekonomi Menengah	20 % Ekonomi Teratas	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	32,31	44,67	23,01	100,00
Sumatera Utara	24,72	53,73	21,55	100,00
Sumatera Barat	21,84	50,56	27,59	100,00
Riau	17,10	47,23	35,67	100,00
Jambi	31,96	43,48	24,56	100,00
Sumatera Selatan	40,34	33,65	26,01	100,00
Bengkulu	28,81	43,95	27,23	100,00
Lampung	42,32	41,81	15,87	100,00
Kep. Bangka Belitung	3,46	50,03	46,51	100,00
Kepulauan Riau	14,77	54,45	30,78	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	44,14	34,37	21,49	100,00
Jawa Tengah	52,92	34,77	12,32	100,00
DI Yogyakarta	55,01	30,03	14,96	100,00
Jawa Timur	54,28	34,29	11,43	100,00
Banten	33,77	49,15	17,08	100,00
Bali	30,58	38,99	30,42	100,00
Nusa Tenggara Barat	49,65	36,07	14,28	100,00
Nusa Tenggara Timur	59,35	32,31	8,34	100,00
Kalimantan Barat	36,76	45,88	17,36	100,00
Kalimantan Tengah	20,00	46,89	33,12	100,00
Kalimantan Selatan	27,99	48,28	23,73	100,00
Kalimantan Timur	16,31	44,15	39,55	100,00
Kalimantan Utara	11,92	57,95	30,13	100,00
Sulawesi Utara	30,48	34,38	35,14	100,00
Sulawesi Tengah	32,56	47,08	20,36	100,00
Sulawesi Selatan	48,77	34,06	17,17	100,00
Sulawesi Tenggara	43,12	38,16	18,72	100,00
Gorontalo	44,82	33,55	21,63	100,00
Sulawesi Barat	50,64	35,67	13,69	100,00
Maluku	32,84	46,88	20,28	100,00
Maluku Utara	29,26	57,31	13,43	100,00
Papua Barat	33,69	32,00	34,30	100,00
Papua	39,78	21,42	38,80	100,00
Indonesia	44,30	38,00	17,70	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 6.3.3 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Ekonomi Rumah Tangga, 2017

Provinsi	Status Ekonomi Rumah Tangga			Laki-laki
	40 % Ekonomi Terbawah	40 % Ekonomi Menengah	20 % Ekonomi Teratas	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	35,73	45,65	18,62	100,00
Sumatera Utara	27,97	49,32	22,70	100,00
Sumatera Barat	23,62	53,01	23,38	100,00
Riau	19,01	47,80	33,19	100,00
Jambi	32,27	47,93	19,80	100,00
Sumatera Selatan	38,36	41,12	20,52	100,00
Bengkulu	31,66	47,17	21,18	100,00
Lampung	44,13	42,74	13,14	100,00
Kep. Bangka Belitung	4,08	52,60	43,33	100,00
Kepulauan Riau	16,45	39,45	44,10	100,00
DKI Jakarta	5,85	28,38	65,77	100,00
Jawa Barat	39,42	36,38	24,20	100,00
Jawa Tengah	53,88	33,02	13,10	100,00
DI Yogyakarta	49,34	28,66	22,00	100,00
Jawa Timur	51,71	33,84	14,44	100,00
Banten	29,62	37,62	32,76	100,00
Bali	29,86	41,31	28,83	100,00
Nusa Tenggara Barat	52,08	34,62	13,30	100,00
Nusa Tenggara Timur	57,62	33,60	8,78	100,00
Kalimantan Barat	37,92	43,94	18,14	100,00
Kalimantan Tengah	22,49	47,83	29,68	100,00
Kalimantan Selatan	26,65	45,86	27,48	100,00
Kalimantan Timur	10,16	43,48	46,37	100,00
Kalimantan Utara	11,04	53,88	35,08	100,00
Sulawesi Utara	29,90	38,18	31,92	100,00
Sulawesi Tengah	37,78	44,63	17,59	100,00
Sulawesi Selatan	46,51	35,40	18,09	100,00
Sulawesi Tenggara	47,49	36,30	16,21	100,00
Gorontalo	39,29	43,26	17,46	100,00
Sulawesi Barat	55,60	34,64	9,76	100,00
Maluku	30,45	50,98	18,57	100,00
Maluku Utara	37,10	48,28	14,63	100,00
Papua Barat	25,42	43,12	31,46	100,00
Papua	32,17	25,92	41,91	100,00
Indonesia	41,68	37,29	21,04	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 6.3.4 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Ekonomi Rumah Tangga, 2017

Provinsi	Status Ekonomi Rumah Tangga			Perempuan	
	40 % Ekonomi Terbawah	40 % Ekonomi Menengah	20 % Ekonomi Teratas	Total	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	37,37	45,57	17,06	100,00	
Sumatera Utara	30,89	47,37	21,74	100,00	
Sumatera Barat	26,23	50,34	23,43	100,00	
Riau	21,42	50,56	28,02	100,00	
Jambi	37,95	43,44	18,61	100,00	
Sumatera Selatan	43,30	37,38	19,32	100,00	
Bengkulu	40,02	41,49	18,49	100,00	
Lampung	47,35	40,74	11,90	100,00	
Kep. Bangka Belitung	7,09	49,95	42,96	100,00	
Kepulauan Riau	18,27	41,83	39,90	100,00	
DKI Jakarta	4,32	27,10	68,59	100,00	
Jawa Barat	43,69	33,47	22,84	100,00	
Jawa Tengah	55,67	31,97	12,36	100,00	
DI Yogyakarta	53,95	27,30	18,75	100,00	
Jawa Timur	53,68	32,64	13,68	100,00	
Banten	32,62	42,50	24,87	100,00	
Bali	31,77	41,99	26,24	100,00	
Nusa Tenggara Barat	49,82	36,44	13,74	100,00	
Nusa Tenggara Timur	60,92	30,85	8,23	100,00	
Kalimantan Barat	40,57	43,32	16,10	100,00	
Kalimantan Tengah	26,71	46,75	26,53	100,00	
Kalimantan Selatan	31,43	45,10	23,47	100,00	
Kalimantan Timur	11,35	42,36	46,29	100,00	
Kalimantan Utara	11,51	51,28	37,21	100,00	
Sulawesi Utara	31,27	36,56	32,16	100,00	
Sulawesi Tengah	33,76	49,89	16,35	100,00	
Sulawesi Selatan	47,89	35,12	16,99	100,00	
Sulawesi Tenggara	46,94	38,42	14,63	100,00	
Gorontalo	39,71	42,53	17,76	100,00	
Sulawesi Barat	57,19	34,82	7,99	100,00	
Maluku	33,69	49,03	17,28	100,00	
Maluku Utara	32,98	52,35	14,67	100,00	
Papua Barat	26,43	38,74	34,83	100,00	
Papua	32,98	28,81	38,21	100,00	
Indonesia	44,54	35,98	19,48	100,00	

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 6.3.5 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Ekonomi Rumah Tangga, 2017

Laki-laki + Perempuan di Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Status Ekonomi Rumah Tangga			Total
	40 % Ekonomi Terbawah	40 % Ekonomi Menengah	20 % Ekonomi Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	36,61	45,60	17,78	100,00
Sumatera Utara	29,56	48,26	22,18	100,00
Sumatera Barat	25,05	51,55	23,40	100,00
Riau	20,20	49,16	30,64	100,00
Jambi	35,09	45,70	19,21	100,00
Sumatera Selatan	40,90	39,20	19,90	100,00
Bengkulu	35,82	44,34	19,84	100,00
Lampung	45,72	41,75	12,53	100,00
Kep. Bangka Belitung	5,60	51,26	43,14	100,00
Kepulauan Riau	17,35	40,63	42,01	100,00
DKI Jakarta	5,06	27,72	67,22	100,00
Jawa Barat	41,61	34,88	23,50	100,00
Jawa Tengah	54,83	32,46	12,70	100,00
DI Yogyakarta	51,85	27,92	20,23	100,00
Jawa Timur	52,77	33,19	14,03	100,00
Banten	31,14	40,09	28,78	100,00
Bali	30,87	41,67	27,46	100,00
Nusa Tenggara Barat	50,89	35,58	13,53	100,00
Nusa Tenggara Timur	59,35	32,16	8,49	100,00
Kalimantan Barat	39,25	43,63	17,12	100,00
Kalimantan Tengah	24,52	47,31	28,16	100,00
Kalimantan Selatan	29,18	45,46	25,36	100,00
Kalimantan Timur	10,71	42,96	46,33	100,00
Kalimantan Utara	11,26	52,69	36,05	100,00
Sulawesi Utara	30,62	37,33	32,05	100,00
Sulawesi Tengah	35,77	47,27	16,97	100,00
Sulawesi Selatan	47,29	35,24	17,47	100,00
Sulawesi Tenggara	47,20	37,41	15,38	100,00
Gorontalo	39,51	42,87	17,62	100,00
Sulawesi Barat	56,45	34,73	8,82	100,00
Maluku	32,13	49,97	17,90	100,00
Maluku Utara	35,06	50,29	14,65	100,00
Papua Barat	25,88	41,12	33,00	100,00
Papua	32,51	27,14	40,35	100,00
Indonesia	43,18	36,60	20,22	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 6.4 Persentase Penduduk Lansia yang Pernah Bepergian dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2017

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Lak-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	20,97	11,34	14,48	13,57	13,99
Sumatera Utara	24,28	22,02	24,55	21,97	23,14
Sumatera Barat	35,85	19,74	26,04	25,79	25,90
Riau	32,02	14,22	21,65	20,43	21,05
Jambi	18,58	13,23	16,54	13,25	14,91
Sumatera Selatan	20,23	14,09	16,19	16,36	16,28
Bengkulu	25,43	14,00	18,58	15,61	17,10
Lampung	18,17	11,62	15,15	11,34	13,27
Kep. Bangka Belitung	28,20	15,43	22,87	21,79	22,33
Kepulauan Riau	21,62	17,44	22,17	19,01	20,60
DKI Jakarta	33,98	-	34,28	33,69	33,98
Jawa Barat	20,18	10,54	17,62	16,24	16,91
Jawa Tengah	22,22	12,66	17,78	16,60	17,15
DI Yogyakarta	29,01	14,88	25,35	22,10	23,58
Jawa Timur	23,02	10,15	17,70	14,97	16,23
Banten	23,03	6,98	19,08	15,34	17,19
Bali	20,65	11,76	19,16	14,59	16,74
Nusa Tenggara Barat	10,86	8,46	10,88	8,28	9,50
Nusa Tenggara Timur	23,25	14,84	20,26	12,99	16,44
Kalimantan Barat	18,50	6,84	11,59	9,87	10,73
Kalimantan Tengah	23,43	8,37	14,29	12,78	13,56
Kalimantan Selatan	25,18	18,06	21,37	20,74	21,04
Kalimantan Timur	20,63	7,83	16,83	15,00	15,99
Kalimantan Utara	21,47	14,80	18,02	18,93	18,43
Sulawesi Utara	21,19	24,48	22,62	23,35	23,00
Sulawesi Tengah	19,99	16,37	17,80	16,63	17,22
Sulawesi Selatan	26,40	11,46	17,65	15,78	16,60
Sulawesi Tenggara	19,53	18,59	20,44	17,45	18,87
Gorontalo	21,29	17,50	18,58	19,12	18,87
Sulawesi Barat	10,48	10,43	12,51	8,63	10,44
Maluku	17,62	11,02	15,15	12,16	13,60
Maluku Utara	12,95	9,29	12,85	7,58	10,24
Papua Barat	16,97	18,13	17,42	18,04	17,70
Papua	17,93	8,82	12,58	12,10	12,38
Indonesia	22,95	12,47	18,69	16,75	17,67

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 6.5 Persentase Penduduk Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017

Provinsi	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1,24	1,29	1,28
Sumatera Utara	2,36	1,62	1,99
Sumatera Barat	0,58	1,28	1,01
Riau	2,82	1,23	1,84
Jambi	0,45	1,04	0,85
Sumatera Selatan	2,31	1,44	1,75
Bengkulu	1,65	1,67	1,67
Lampung	1,26	1,24	1,24
Kep. Bangka Belitung	0,24	0,65	0,43
Kepulauan Riau	0,14	2,09	0,62
DKI Jakarta	0,90	-	0,90
Jawa Barat	2,01	1,49	1,83
Jawa Tengah	1,17	0,86	1,01
DI Yogyakarta	1,00	0,00	0,62
Jawa Timur	0,97	0,78	0,87
Banten	1,79	0,32	1,26
Bali	0,23	0,58	0,39
Nusa Tenggara Barat	1,93	2,35	2,17
Nusa Tenggara Timur	2,12	3,31	3,09
Kalimantan Barat	1,52	0,58	0,90
Kalimantan Tengah	1,42	0,20	0,62
Kalimantan Selatan	1,49	0,62	0,99
Kalimantan Timur	2,51	1,05	1,98
Kalimantan Utara	2,85	3,84	3,30
Sulawesi Utara	1,95	2,08	2,02
Sulawesi Tengah	3,91	1,46	2,04
Sulawesi Selatan	2,04	1,52	1,70
Sulawesi Tenggara	2,91	1,51	1,93
Gorontalo	1,08	1,51	1,35
Sulawesi Barat	2,10	1,13	1,35
Maluku	0,90	2,15	1,66
Maluku Utara	0,54	1,72	1,41
Papua Barat	5,46	2,52	3,60
Papua	4,31	2,00	2,90
Indonesia	1,49	1,17	1,33

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Membeli/Menerima Beras Miskin (Raskin)/Rastra Dalam Empat Bulan Terakhir, 2017

Provinsi	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	42,28	64,10	58,15
Sumatera Utara	26,85	48,14	37,64
Sumatera Barat	14,99	35,29	27,66
Riau	17,22	38,87	30,52
Jambi	19,07	29,08	25,85
Sumatera Selatan	31,54	40,66	37,41
Bengkulu	28,05	46,07	40,97
Lampung	36,37	56,78	51,77
Kep. Bangka Belitung	18,56	33,29	25,16
Kepulauan Riau	13,89	39,78	20,45
DKI Jakarta	11,90	-	11,90
Jawa Barat	42,27	65,46	50,04
Jawa Tengah	41,47	61,14	51,86
DI Yogyakarta	33,17	68,38	46,42
Jawa Timur	31,02	55,63	44,00
Banten	29,26	73,89	45,32
Bali	10,92	18,01	14,08
Nusa Tenggara Barat	56,45	57,24	56,89
Nusa Tenggara Timur	17,94	38,39	34,59
Kalimantan Barat	13,69	38,12	30,06
Kalimantan Tengah	8,00	33,06	24,70
Kalimantan Selatan	15,28	31,71	24,84
Kalimantan Timur	10,79	26,74	16,59
Kalimantan Utara	14,22	10,29	12,47
Sulawesi Utara	25,19	51,28	39,42
Sulawesi Tengah	20,31	52,19	44,55
Sulawesi Selatan	14,02	36,90	29,03
Sulawesi Tenggara	20,05	41,52	35,35
Gorontalo	25,61	59,69	46,97
Sulawesi Barat	36,81	51,19	48,04
Maluku	12,24	59,59	40,52
Maluku Utara	15,10	38,21	31,75
Papua Barat	24,97	53,04	42,51
Papua	27,42	56,06	44,93
Indonesia	32,09	53,11	42,63

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 7.2 Rata-rata Banyaknya (kg) Beras Miskin yang Diterima/Dibeli Rumah Tangga Lansia perbulan Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017

Provinsi	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	5,94	6,88	6,69
Sumatera Utara	9,34	8,14	8,56
Sumatera Barat	12,58	11,01	11,33
Riau	9,92	8,25	8,61
Jambi	9,77	7,50	8,04
Sumatera Selatan	6,91	9,10	8,44
Bengkulu	7,13	8,34	8,10
Lampung	7,29	6,64	6,75
Kep. Bangka Belitung	14,17	14,05	14,10
Kepulauan Riau	10,68	8,24	9,48
DKI Jakarta	9,79	-	9,79
Jawa Barat	4,77	5,02	4,88
Jawa Tengah	5,44	5,85	5,70
DI Yogyakarta	9,88	7,50	8,56
Jawa Timur	6,33	6,50	6,44
Banten	5,74	5,31	5,49
Bali	12,35	11,77	12,02
Nusa Tenggara Barat	5,01	4,95	4,98
Nusa Tenggara Timur	13,89	10,83	11,12
Kalimantan Barat	9,42	7,32	7,64
Kalimantan Tengah	9,68	7,47	7,71
Kalimantan Selatan	10,55	9,72	9,93
Kalimantan Timur	12,80	12,20	12,44
Kalimantan Utara	13,51	11,90	12,92
Sulawesi Utara	11,76	7,94	9,05
Sulawesi Tengah	9,47	7,98	8,14
Sulawesi Selatan	12,25	12,17	12,18
Sulawesi Tenggara	8,20	7,62	7,71
Gorontalo	10,28	11,51	11,26
Sulawesi Barat	8,28	7,53	7,66
Maluku	14,58	12,95	13,15
Maluku Utara	12,34	11,76	11,83
Papua Barat	11,50	14,99	14,22
Papua	20,03	13,32	14,91
Indonesia	6,35	6,94	6,72

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 7.3 Rata-rata Harga per kg (rupiah) Beras Miskin yang Dibeli/Diterima Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017

Provinsi	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1 119,48	1 056,78	1 069,23
Sumatera Utara	1 998,27	2 194,84	2 125,7
Sumatera Barat	1 925,37	1 979,31	1 968,31
Riau	1 344,96	1 813,78	1 711,83
Jambi	2 144,97	2 174,29	2 167,32
Sumatera Selatan	2 507,06	2 331,05	2 384,02
Bengkulu	2 313,04	2 284,06	2 289,68
Lampung	2 141,27	2 125,53	2 128,24
Kep. Bangka Belitung	197,14	626,71	451,77
Kepulauan Riau	1 875,24	1 767,56	1 822,16
DKI Jakarta	2 139,16	-	2 139,16
Jawa Barat	2 335,01	2 282,91	2 312,17
Jawa Tengah	2 031,07	2 021,46	2 025,09
DI Yogyakarta	1 865,1	1 965,54	1 920,78
Jawa Timur	1 840,2	1 848,43	1 845,69
Banten	2 457,73	2 367,32	2 404,69
Bali	1 784,37	1 819,36	1 804,33
Nusa Tenggara Barat	2 094,72	2 035,71	2 062,08
Nusa Tenggara Timur	1 303,5	1 434,09	1 421,5
Kalimantan Barat	2 376,39	2 825,85	2 758,34
Kalimantan Tengah	2 267,96	2 275,16	2 274,38
Kalimantan Selatan	1 918,44	2 194,61	2 123,59
Kalimantan Timur	1 765,6	1 082,35	1 365,26
Kalimantan Utara	1 828,34	878,63	1 479,38
Sulawesi Utara	1 940,16	2 068,23	2 031,03
Sulawesi Tengah	1 781,24	1 843,97	1 837,12
Sulawesi Selatan	1 615,48	1 783,66	1 755,72
Sulawesi Tenggara	2 367,18	2 070,53	2 118,87
Gorontalo	1 322,16	1 502,97	1 466,17
Sulawesi Barat	2 099,02	2 197,92	2 181,27
Maluku	2 203,07	2 538,91	2 498,05
Maluku Utara	2 095,98	2 485,75	2 433,96
Papua Barat	3 225,37	2 028,88	2 292,66
Papua	2 677,99	2 266,88	2 364,36
Indonesia	2 087,96	2 013,67	2 041,54

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 7.4.1 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Kepemilikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 2017

Provinsi	Kepemilikan KPS/KKS			Perkotaan	
	Memiliki, Dapat Ditunjukkan	Memiliki, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Memiliki	Total	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	6,40	2,30	91,30	100,00	
Sumatera Utara	7,83	3,16	89,00	100,00	
Sumatera Barat	7,58	4,42	88,00	100,00	
Riau	4,91	3,67	91,42	100,00	
Jambi	4,79	2,06	93,16	100,00	
Sumatera Selatan	3,67	2,96	93,37	100,00	
Bengkulu	10,09	3,67	86,24	100,00	
Lampung	8,16	3,85	87,98	100,00	
Kep. Bangka Belitung	4,64	5,10	90,26	100,00	
Kepulauan Riau	3,71	7,51	88,79	100,00	
DKI Jakarta	3,29	2,48	94,23	100,00	
Jawa Barat	8,16	5,65	86,19	100,00	
Jawa Tengah	11,97	5,13	82,90	100,00	
DI Yogyakarta	16,02	7,14	76,85	100,00	
Jawa Timur	8,67	4,26	87,08	100,00	
Banten	8,12	2,66	89,22	100,00	
Bali	6,77	1,89	91,34	100,00	
Nusa Tenggara Barat	14,15	8,10	77,74	100,00	
Nusa Tenggara Timur	8,83	4,53	86,63	100,00	
Kalimantan Barat	2,71	2,69	94,61	100,00	
Kalimantan Tengah	2,61	3,03	94,36	100,00	
Kalimantan Selatan	8,60	1,31	90,08	100,00	
Kalimantan Timur	4,44	3,49	92,07	100,00	
Kalimantan Utara	7,14	3,33	89,53	100,00	
Sulawesi Utara	8,45	4,60	86,95	100,00	
Sulawesi Tengah	6,06	1,20	92,74	100,00	
Sulawesi Selatan	4,58	2,82	92,60	100,00	
Sulawesi Tenggara	3,21	5,10	91,68	100,00	
Gorontalo	13,41	2,97	83,62	100,00	
Sulawesi Barat	13,17	4,61	82,22	100,00	
Maluku	4,68	0,76	94,55	100,00	
Maluku Utara	1,01	4,02	94,96	100,00	
Papua Barat	7,14	4,91	87,95	100,00	
Papua	2,54	5,71	91,76	100,00	
Indonesia	8,40	4,44	87,16	100,00	

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 7.4.2 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Kepemilikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 2017

Provinsi	Kepemilikan KPS/KKS			Perdesaan
	Memiliki, Dapat Ditunjukkan	Memiliki, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Memiliki	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	12,31	5,06	82,63	100,00
Sumatera Utara	10,81	3,59	85,59	100,00
Sumatera Barat	12,49	4,69	82,81	100,00
Riau	8,76	5,67	85,57	100,00
Jambi	10,35	3,92	85,73	100,00
Sumatera Selatan	7,97	4,04	87,99	100,00
Bengkulu	10,31	7,44	82,26	100,00
Lampung	11,22	6,48	82,30	100,00
Kep. Bangka Belitung	7,24	8,95	83,81	100,00
Kepulauan Riau	10,39	2,21	87,40	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	13,97	7,69	78,34	100,00
Jawa Tengah	17,58	7,95	74,47	100,00
DI Yogyakarta	25,44	11,18	63,38	100,00
Jawa Timur	17,53	8,10	74,37	100,00
Banten	13,30	10,59	76,11	100,00
Bali	12,95	5,46	81,59	100,00
Nusa Tenggara Barat	12,99	7,72	79,28	100,00
Nusa Tenggara Timur	21,95	7,53	70,53	100,00
Kalimantan Barat	7,58	3,56	88,86	100,00
Kalimantan Tengah	6,20	2,57	91,23	100,00
Kalimantan Selatan	10,09	5,89	84,02	100,00
Kalimantan Timur	8,35	7,08	84,57	100,00
Kalimantan Utara	8,09	6,81	85,10	100,00
Sulawesi Utara	14,47	5,63	79,90	100,00
Sulawesi Tengah	13,13	5,30	81,57	100,00
Sulawesi Selatan	15,51	6,68	77,81	100,00
Sulawesi Tenggara	19,70	5,07	75,23	100,00
Gorontalo	24,15	4,96	70,89	100,00
Sulawesi Barat	15,46	7,79	76,75	100,00
Maluku	14,62	5,89	79,49	100,00
Maluku Utara	5,78	2,48	91,74	100,00
Papua Barat	15,48	15,62	68,90	100,00
Papua	8,46	17,36	74,18	100,00
Indonesia	14,85	7,05	78,10	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 7.4.3 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Kepemilikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 2017

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan			
	Kepemilikan KPS/KKS			Total
	Memiliki, Dapat Ditunjukkan	Memiliki, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Memiliki	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	10,70	4,31	85,00	100,00
Sumatera Utara	9,34	3,38	87,27	100,00
Sumatera Barat	10,65	4,59	84,76	100,00
Riau	7,28	4,90	87,83	100,00
Jambi	8,56	3,32	88,12	100,00
Sumatera Selatan	6,44	3,65	89,91	100,00
Bengkulu	10,25	6,37	83,38	100,00
Lampung	10,47	5,84	83,69	100,00
Kep. Bangka Belitung	5,80	6,83	87,37	100,00
Kepulauan Riau	5,40	6,16	88,44	100,00
DKI Jakarta	3,29	2,48	94,23	100,00
Jawa Barat	10,11	6,33	83,56	100,00
Jawa Tengah	14,93	6,62	78,45	100,00
DI Yogyakarta	19,56	8,66	71,78	100,00
Jawa Timur	13,34	6,28	80,38	100,00
Banten	9,99	5,51	84,50	100,00
Bali	9,53	3,48	86,99	100,00
Nusa Tenggara Barat	13,51	7,89	78,59	100,00
Nusa Tenggara Timur	19,51	6,97	73,52	100,00
Kalimantan Barat	5,97	3,27	90,76	100,00
Kalimantan Tengah	5,00	2,72	92,28	100,00
Kalimantan Selatan	9,47	3,98	86,55	100,00
Kalimantan Timur	5,86	4,80	89,34	100,00
Kalimantan Utara	7,56	4,88	87,56	100,00
Sulawesi Utara	11,73	5,16	83,10	100,00
Sulawesi Tengah	11,44	4,32	84,25	100,00
Sulawesi Selatan	11,75	5,35	82,90	100,00
Sulawesi Tenggara	14,96	5,08	79,96	100,00
Gorontalo	20,14	4,22	75,64	100,00
Sulawesi Barat	14,95	7,09	77,95	100,00
Maluku	10,62	3,82	85,56	100,00
Maluku Utara	4,45	2,91	92,64	100,00
Papua Barat	12,35	11,60	76,05	100,00
Papua	6,16	12,83	81,01	100,00
Indonesia	11,63	5,75	82,62	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 7.5 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki/Menerima Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017

Provinsi	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	25,85	9,14	13,70
Sumatera Utara	20,15	9,73	14,87
Sumatera Barat	24,09	6,63	13,20
Riau	18,63	6,19	10,98
Jambi	19,97	8,84	12,43
Sumatera Selatan	24,16	4,68	11,63
Bengkulu	22,12	5,54	10,23
Lampung	14,71	4,80	7,23
Kep. Bangka Belitung	15,96	7,07	11,98
Kepulauan Riau	26,58	12,72	23,07
DKI Jakarta	22,77	-	22,77
Jawa Barat	18,25	6,67	14,37
Jawa Tengah	16,15	6,51	11,06
DI Yogyakarta	26,25	8,45	19,55
Jawa Timur	14,70	4,51	9,33
Banten	14,66	6,93	11,88
Bali	18,19	9,90	14,49
Nusa Tenggara Barat	17,40	2,94	9,45
Nusa Tenggara Timur	35,68	6,63	12,03
Kalimantan Barat	17,06	5,09	9,04
Kalimantan Tengah	30,36	10,58	17,17
Kalimantan Selatan	24,87	7,94	15,02
Kalimantan Timur	16,54	7,09	13,10
Kalimantan Utara	18,23	7,89	13,62
Sulawesi Utara	24,15	10,53	16,72
Sulawesi Tengah	38,29	7,03	14,52
Sulawesi Selatan	33,99	9,18	17,71
Sulawesi Tenggara	29,07	7,80	13,91
Gorontalo	27,70	6,09	14,16
Sulawesi Barat	26,82	6,40	10,88
Maluku	27,51	8,17	15,96
Maluku Utara	30,39	6,79	13,38
Papua Barat	29,33	13,16	19,23
Papua	29,08	5,89	14,90
Indonesia	18,83	6,47	12,63

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 7.6 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki/Menerima Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Sosial, 2017

Provinsi	Jenis Jaminan Sosial				
	Jaminan Pensiun/ Veteran	Jaminan Hari Tua	Asuransi Kecelakaan Kerja	Jaminan/ Asuransi Kematian	Pesangon PHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	11,75	5,24	4,39	4,29	0,92
Sumatera Utara	12,85	3,88	3,01	2,85	0,95
Sumatera Barat	12,20	5,99	4,74	5,14	0,74
Riau	8,39	1,71	1,79	2,04	0,96
Jambi	9,66	3,48	3,24	2,71	1,31
Sumatera Selatan	10,05	4,98	3,93	3,54	1,50
Bengkulu	9,11	2,14	1,53	1,30	0,46
Lampung	6,09	2,45	1,78	1,64	0,62
Kep. Bangka Belitung	9,38	3,13	3,55	3,34	1,28
Kepulauan Riau	10,32	12,65	11,73	9,42	2,05
DKI Jakarta	17,17	5,03	5,83	5,20	0,94
Jawa Barat	11,14	3,31	3,52	2,89	1,47
Jawa Tengah	8,69	2,83	2,31	2,15	0,85
DI Yogyakarta	15,97	8,16	5,49	4,32	0,81
Jawa Timur	7,20	1,77	1,63	1,59	0,64
Banten	8,93	4,40	2,81	1,80	1,06
Bali	10,99	5,07	4,84	4,51	1,05
Nusa Tenggara Barat	8,67	2,75	2,41	2,62	0,29
Nusa Tenggara Timur	10,42	5,24	2,64	2,93	0,63
Kalimantan Barat	6,75	2,69	2,61	2,98	0,82
Kalimantan Tengah	12,76	5,23	4,03	8,21	1,12
Kalimantan Selatan	12,47	4,66	2,88	4,07	1,91
Kalimantan Timur	8,71	3,42	4,04	1,36	2,41
Kalimantan Utara	10,40	3,19	3,57	0,75	0,42
Sulawesi Utara	13,95	3,01	2,29	2,35	1,41
Sulawesi Tengah	13,09	6,20	4,66	6,14	0,63
Sulawesi Selatan	14,50	5,48	3,89	5,72	1,18
Sulawesi Tenggara	12,35	4,39	1,70	2,65	0,43
Gorontalo	12,35	5,92	2,75	5,50	0,68
Sulawesi Barat	10,10	3,43	2,86	3,31	0,76
Maluku	15,56	2,14	1,70	2,19	0,16
Maluku Utara	12,36	5,36	5,17	5,82	0,94
Papua Barat	19,08	8,07	6,43	5,88	0,63
Papua	12,16	5,43	2,53	4,66	1,90
Indonesia	10,07	3,44	2,94	2,82	0,98

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 7.7 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Pernah Menjadi Penerima PKH Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017

Provinsi	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3,94	5,74	5,25
Sumatera Utara	3,54	4,31	3,93
Sumatera Barat	3,36	4,13	3,84
Riau	2,55	3,66	3,23
Jambi	2,05	2,23	2,17
Sumatera Selatan	2,54	4,69	3,92
Bengkulu	3,64	6,33	5,57
Lampung	4,95	5,74	5,54
Kep. Bangka Belitung	0,90	1,58	1,20
Kepulauan Riau	1,95	2,33	2,05
DKI Jakarta	1,09	-	1,09
Jawa Barat	3,70	5,13	4,18
Jawa Tengah	5,47	7,73	6,66
DI Yogyakarta	8,70	20,36	13,09
Jawa Timur	3,46	8,03	5,87
Banten	2,41	5,72	3,60
Bali	2,04	3,54	2,71
Nusa Tenggara Barat	8,56	6,79	7,59
Nusa Tenggara Timur	8,09	15,14	13,83
Kalimantan Barat	1,47	3,26	2,67
Kalimantan Tengah	0,52	2,63	1,93
Kalimantan Selatan	1,97	3,80	3,03
Kalimantan Timur	3,04	1,81	2,59
Kalimantan Utara	1,06	4,05	2,39
Sulawesi Utara	3,05	7,40	5,42
Sulawesi Tengah	2,95	4,14	3,86
Sulawesi Selatan	2,67	6,28	5,04
Sulawesi Tenggara	1,34	7,42	5,67
Gorontalo	3,39	8,95	6,87
Sulawesi Barat	7,67	7,46	7,51
Maluku	2,65	7,65	5,63
Maluku Utara	0,37	3,10	2,33
Papua Barat	4,28	5,00	4,73
Papua	1,04	1,31	1,20
Indonesia	3,75	6,67	5,22

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 7.8.1 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Kepemilikan Kartu PKH, 2017

Provinsi	Kepemilikan Kartu PKH			Perkotaan
	Memiliki, Dapat Ditunjukkan	Memiliki, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Memiliki	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1,98	0,64	97,38	100,00
Sumatera Utara	2,27	0,78	96,95	100,00
Sumatera Barat	1,66	1,33	97,01	100,00
Riau	0,83	0,58	98,59	100,00
Jambi	1,32	0,39	98,29	100,00
Sumatera Selatan	1,91	0,44	97,65	100,00
Bengkulu	2,82	0,82	96,36	100,00
Lampung	3,77	0,93	95,30	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,77	0,13	99,10	100,00
Kepulauan Riau	0,10	0,36	99,55	100,00
DKI Jakarta	0,26	0,45	99,29	100,00
Jawa Barat	2,64	0,65	96,71	100,00
Jawa Tengah	3,22	1,56	95,22	100,00
DI Yogyakarta	4,65	2,14	93,20	100,00
Jawa Timur	1,97	0,99	97,04	100,00
Banten	0,31	1,96	97,73	100,00
Bali	1,10	0,58	98,32	100,00
Nusa Tenggara Barat	5,28	2,72	92,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,79	3,51	92,70	100,00
Kalimantan Barat	1,40	0,07	98,53	100,00
Kalimantan Tengah	0,38	0,00	99,62	100,00
Kalimantan Selatan	1,19	0,55	98,26	100,00
Kalimantan Timur	1,32	0,31	98,37	100,00
Kalimantan Utara	0,00	1,06	98,94	100,00
Sulawesi Utara	1,41	1,08	97,51	100,00
Sulawesi Tengah	1,07	1,33	97,60	100,00
Sulawesi Selatan	1,51	0,63	97,86	100,00
Sulawesi Tenggara	0,85	0,11	99,04	100,00
Gorontalo	2,49	0,31	97,20	100,00
Sulawesi Barat	5,96	1,72	92,33	100,00
Maluku	1,03	0,46	98,51	100,00
Maluku Utara	0,19	0,17	99,63	100,00
Papua Barat	1,52	2,50	95,98	100,00
Papua	0,00	0,35	99,65	100,00
Indonesia	2,22	1,00	96,78	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 7.8.2 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Kepemilikan Kartu PKH, 2017

Perdesaan

Provinsi	Kepemilikan Kartu PKH			Total
	Memiliki, Dapat Ditunjukkan	Memiliki, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Memiliki	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	4,13	1,14	94,74	100,00
Sumatera Utara	2,75	1,08	96,17	100,00
Sumatera Barat	2,47	1,07	96,46	100,00
Riau	2,10	1,04	96,86	100,00
Jambi	0,86	0,72	98,43	100,00
Sumatera Selatan	2,94	0,82	96,23	100,00
Bengkulu	4,11	1,66	94,23	100,00
Lampung	2,97	1,72	95,31	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,81	0,77	98,42	100,00
Kepulauan Riau	1,96	0,01	98,03	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	3,57	1,14	95,29	100,00
Jawa Tengah	4,98	1,88	93,13	100,00
DI Yogyakarta	10,53	2,87	86,61	100,00
Jawa Timur	5,02	1,91	93,07	100,00
Banten	2,45	1,78	95,77	100,00
Bali	1,06	1,18	97,76	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,73	2,24	95,04	100,00
Nusa Tenggara Timur	9,08	3,94	86,98	100,00
Kalimantan Barat	2,20	0,69	97,11	100,00
Kalimantan Tengah	1,05	0,73	98,22	100,00
Kalimantan Selatan	1,38	1,41	97,21	100,00
Kalimantan Timur	0,61	0,83	98,56	100,00
Kalimantan Utara	3,72	0,33	95,95	100,00
Sulawesi Utara	3,82	1,91	94,28	100,00
Sulawesi Tengah	2,72	0,91	96,37	100,00
Sulawesi Selatan	4,62	1,17	94,21	100,00
Sulawesi Tenggara	4,46	1,51	94,03	100,00
Gorontalo	4,79	3,18	92,02	100,00
Sulawesi Barat	4,09	1,10	94,81	100,00
Maluku	4,96	1,62	93,43	100,00
Maluku Utara	2,18	0,85	96,98	100,00
Papua Barat	1,69	1,58	96,73	100,00
Papua	0,47	0,27	99,26	100,00
Indonesia	4,09	1,60	94,31	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 7.8.3 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Kepemilikan Kartu PKH, 2017

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan			
	Kepemilikan Kartu PKH			
	Memiliki, Dapat Ditunjukkan	Memiliki, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Memiliki	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3,54	1,00	95,46	100,00
Sumatera Utara	2,52	0,93	96,56	100,00
Sumatera Barat	2,17	1,17	96,67	100,00
Riau	1,61	0,86	97,53	100,00
Jambi	1,01	0,61	98,38	100,00
Sumatera Selatan	2,57	0,69	96,74	100,00
Bengkulu	3,74	1,42	94,84	100,00
Lampung	3,17	1,52	95,31	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,79	0,41	98,80	100,00
Kepulauan Riau	0,57	0,27	99,16	100,00
DKI Jakarta	0,26	0,45	99,29	100,00
Jawa Barat	2,95	0,81	96,24	100,00
Jawa Tengah	4,15	1,73	94,12	100,00
DI Yogyakarta	6,86	2,42	90,72	100,00
Jawa Timur	3,58	1,48	94,95	100,00
Banten	1,08	1,90	97,02	100,00
Bali	1,08	0,85	98,07	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,88	2,45	93,67	100,00
Nusa Tenggara Timur	8,09	3,86	88,04	100,00
Kalimantan Barat	1,94	0,48	97,58	100,00
Kalimantan Tengah	0,82	0,49	98,69	100,00
Kalimantan Selatan	1,30	1,05	97,65	100,00
Kalimantan Timur	1,06	0,50	98,44	100,00
Kalimantan Utara	1,66	0,73	97,61	100,00
Sulawesi Utara	2,72	1,53	95,74	100,00
Sulawesi Tengah	2,33	1,01	96,66	100,00
Sulawesi Selatan	3,55	0,99	95,46	100,00
Sulawesi Tenggara	3,42	1,11	95,47	100,00
Gorontalo	3,93	2,11	93,96	100,00
Sulawesi Barat	4,50	1,24	94,26	100,00
Maluku	3,37	1,15	95,48	100,00
Maluku Utara	1,62	0,66	97,72	100,00
Papua Barat	1,63	1,93	96,45	100,00
Papua	0,29	0,30	99,41	100,00
Indonesia	3,16	1,30	95,54	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 7.9.1 Persentase Rumah Tangga Lansia Masih Tercatat/Menjadi Penerima PKH Menurut Provinsi, 2017

Provinsi	Rumah Tangga Lansia Masih Teracatat/Menjadi Penerima PKH			Perkotaan
	Masih Tercatat/menjadi Penerima PKH	Tidak Tercatat/menjadi Penerima PKH	Tidak Tahu	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	72,51	7,43	20,06	100,00
Sumatera Utara	77,04	10,26	12,69	100,00
Sumatera Barat	95,64	1,16	3,20	100,00
Riau	69,55	28,28	2,17	100,00
Jambi	90,40	0,00	9,60	100,00
Sumatera Selatan	100,00	0,00	0,00	100,00
Bengkulu	83,94	0,00	16,06	100,00
Lampung	96,34	1,31	2,35	100,00
Kep. Bangka Belitung	85,53	0,00	14,47	100,00
Kepulauan Riau	13,86	68,40	17,74	100,00
DKI Jakarta	44,98	26,38	28,63	100,00
Jawa Barat	76,33	14,79	8,88	100,00
Jawa Tengah	82,15	7,97	9,89	100,00
DI Yogyakarta	84,20	10,57	5,23	100,00
Jawa Timur	78,76	8,03	13,21	100,00
Banten	96,98	1,56	1,45	100,00
Bali	78,22	17,71	4,07	100,00
Nusa Tenggara Barat	75,03	3,74	21,23	100,00
Nusa Tenggara Timur	83,08	14,57	2,35	100,00
Kalimantan Barat	100,00	0,00	0,00	100,00
Kalimantan Tengah	100,00	0,00	0,00	100,00
Kalimantan Selatan	60,68	11,40	27,91	100,00
Kalimantan Timur	60,16	20,04	19,80	100,00
Kalimantan Utara	100,00	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Utara	82,95	7,47	9,58	100,00
Sulawesi Tengah	100,00	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Selatan	92,21	5,77	2,01	100,00
Sulawesi Tenggara	62,76	28,55	8,69	100,00
Gorontalo	100,00	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Barat	89,23	0,00	10,77	100,00
Maluku	79,87	13,15	6,98	100,00
Maluku Utara	100,00	0,00	0,00	100,00
Papua Barat	81,55	9,02	9,43	100,00
Papua	47,31	0,00	52,69	100,00
Indonesia	79,84	10,02	10,14	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 7.9.2 Persentase Rumah Tangga Lansia Masih Tercatat/Menjadi Penerima PKH Menurut Provinsi, 2017

Provinsi	Rumah Tangga Lansia Masih Teracatat/Menjadi Penerima PKH			Perdesaan
	Masih Tercatat/menjadi Penerima PKH	Tidak Tercatat/menjadi Penerima PKH	Tidak Tahu	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	90,25	4,67	5,08	100,00
Sumatera Utara	85,17	10,24	4,59	100,00
Sumatera Barat	83,28	7,54	9,19	100,00
Riau	71,87	12,18	15,95	100,00
Jambi	69,63	14,80	15,57	100,00
Sumatera Selatan	70,16	5,12	24,71	100,00
Bengkulu	81,42	10,83	7,75	100,00
Lampung	77,82	8,12	14,06	100,00
Kep. Bangka Belitung	63,62	14,52	21,86	100,00
Kepulauan Riau	84,64	0,00	15,36	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	84,74	7,84	7,42	100,00
Jawa Tengah	87,29	6,25	6,46	100,00
DI Yogyakarta	85,61	7,30	7,08	100,00
Jawa Timur	80,70	10,92	8,38	100,00
Banten	72,05	22,73	5,22	100,00
Bali	80,77	3,66	15,57	100,00
Nusa Tenggara Barat	67,18	11,83	20,98	100,00
Nusa Tenggara Timur	83,26	11,85	4,89	100,00
Kalimantan Barat	76,54	11,02	12,44	100,00
Kalimantan Tengah	55,24	4,36	40,40	100,00
Kalimantan Selatan	65,69	23,04	11,27	100,00
Kalimantan Timur	41,70	32,15	26,15	100,00
Kalimantan Utara	85,91	13,30	0,79	100,00
Sulawesi Utara	75,48	11,65	12,87	100,00
Sulawesi Tengah	84,65	6,61	8,73	100,00
Sulawesi Selatan	92,45	2,87	4,68	100,00
Sulawesi Tenggara	84,28	6,90	8,82	100,00
Gorontalo	84,39	7,12	8,50	100,00
Sulawesi Barat	81,03	17,98	0,99	100,00
Maluku	84,03	9,78	6,20	100,00
Maluku Utara	66,03	29,32	4,64	100,00
Papua Barat	50,36	28,19	21,45	100,00
Papua	46,53	34,66	18,81	100,00
Indonesia	82,45	9,10	8,45	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 7.9.3 Persentase Rumah Tangga Lansia Masih Tercatat/Menjadi Penerima PKH Menurut Provinsi, 2017

Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Rumah Tangga Lansia Masih Teracatat/Menjadi Penerima PKH				Total
	Masih Tercatat/menjadi Penerima PKH	Tidak Tercatat/menjadi Penerima PKH	Tidak Tahu		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	86,62	5,23	8,15	100,00	
Sumatera Utara	81,56	10,25	8,19	100,00	
Sumatera Barat	87,34	5,44	7,22	100,00	
Riau	71,16	17,07	11,76	100,00	
Jambi	75,95	10,30	13,75	100,00	
Sumatera Selatan	77,06	3,94	19,00	100,00	
Bengkulu	81,88	8,83	9,29	100,00	
Lampung	81,88	6,63	11,50	100,00	
Kep. Bangka Belitung	72,64	8,54	18,82	100,00	
Kepulauan Riau	34,27	48,68	17,05	100,00	
DKI Jakarta	44,98	26,38	28,63	100,00	
Jawa Barat	79,79	11,93	8,28	100,00	
Jawa Tengah	85,30	6,92	7,79	100,00	
DI Yogyakarta	85,03	8,66	6,32	100,00	
Jawa Timur	80,16	10,12	9,73	100,00	
Banten	82,72	13,67	3,61	100,00	
Bali	79,71	9,53	10,77	100,00	
Nusa Tenggara Barat	71,17	7,73	21,11	100,00	
Nusa Tenggara Timur	83,24	12,15	4,61	100,00	
Kalimantan Barat	80,80	9,02	10,18	100,00	
Kalimantan Tengah	59,26	3,96	36,77	100,00	
Kalimantan Selatan	64,33	19,89	15,78	100,00	
Kalimantan Timur	55,48	23,11	21,41	100,00	
Kalimantan Utara	89,36	10,04	0,60	100,00	
Sulawesi Utara	77,39	10,58	12,03	100,00	
Sulawesi Tengah	87,46	5,40	7,13	100,00	
Sulawesi Selatan	92,41	3,40	4,19	100,00	
Sulawesi Tenggara	82,82	8,37	8,81	100,00	
Gorontalo	87,26	5,81	6,93	100,00	
Sulawesi Barat	82,87	13,94	3,19	100,00	
Maluku	83,24	10,41	6,34	100,00	
Maluku Utara	67,52	28,04	4,44	100,00	
Papua Barat	60,94	21,69	17,37	100,00	
Papua	46,80	23,04	30,17	100,00	
Indonesia	81,51	9,43	9,05	100,00	

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 7.10 Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	94,82	92,88	94,71	92,30	93,41
Sumatera Utara	64,93	45,54	57,44	53,30	55,19
Sumatera Barat	72,64	51,89	59,63	59,99	59,83
Riau	61,17	40,18	50,73	45,67	48,23
Jambi	60,73	40,96	46,97	47,39	47,18
Sumatera Selatan	92,85	98,84	96,91	96,51	96,71
Bengkulu	66,31	49,52	54,03	54,11	54,07
Lampung	66,40	47,10	52,03	51,92	51,98
Kep. Bangka Belitung	73,47	60,85	68,45	66,90	67,67
Kepulauan Riau	59,43	58,31	64,58	53,68	59,15
DKI Jakarta	87,20	-	87,06	87,34	87,20
Jawa Barat	63,62	51,16	59,15	59,61	59,39
Jawa Tengah	70,07	66,63	68,24	68,25	68,24
DI Yogyakarta	80,15	81,25	80,77	80,41	80,57
Jawa Timur	60,74	56,60	58,76	58,38	58,56
Banten	57,44	43,96	54,67	50,44	52,54
Bali	56,96	43,62	54,14	48,39	51,09
Nusa Tenggara Barat	69,26	48,98	60,37	55,51	57,80
Nusa Tenggara Timur	60,37	62,86	63,63	61,26	62,38
Kalimantan Barat	47,48	35,28	40,71	37,99	39,35
Kalimantan Tengah	62,81	55,37	59,09	56,69	57,93
Kalimantan Selatan	73,04	57,59	65,05	63,17	64,06
Kalimantan Timur	70,63	55,46	64,03	66,42	65,13
Kalimantan Utara	80,38	78,21	79,10	79,74	79,39
Sulawesi Utara	70,54	59,82	64,76	64,53	64,64
Sulawesi Tengah	71,22	59,43	62,93	61,46	62,19
Sulawesi Selatan	81,81	66,16	72,00	71,19	71,55
Sulawesi Tenggara	57,84	59,57	60,48	57,74	59,05
Gorontalo	88,38	77,71	81,57	81,59	81,58
Sulawesi Barat	95,70	81,05	85,96	82,86	84,30
Maluku	57,43	50,68	54,43	52,29	53,33
Maluku Utara	61,48	57,69	57,27	60,11	58,67
Papua Barat	85,81	84,15	87,63	81,33	84,76
Papua	82,01	90,39	86,66	87,73	87,11
Indonesia	67,53	59,01	63,63	62,89	63,24

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 7.11 Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2017

Provinsi	Jenis Jaminan Kesehatan				
	BPJS Kesehatan RI	BPJS Kesehatan Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	69,07	11,07	14,82	0,35	1,00
Sumatera Utara	26,61	18,84	7,31	1,39	3,11
Sumatera Barat	31,57	20,85	7,69	0,37	0,98
Riau	21,95	15,32	11,25	0,28	0,42
Jambi	24,50	18,29	2,78	0,55	1,17
Sumatera Selatan	17,87	14,16	69,35	1,16	1,31
Bengkulu	33,23	16,45	2,43	0,13	1,92
Lampung	28,07	13,14	12,80	0,48	0,81
Kep. Bangka Belitung	30,42	20,99	16,17	0,96	0,84
Kepulauan Riau	17,11	21,71	13,33	2,18	6,14
DKI Jakarta	42,37	34,47	2,91	6,98	3,71
Jawa Barat	31,87	19,88	5,70	0,93	2,39
Jawa Tengah	39,19	16,36	15,37	0,23	0,82
DI Yogyakarta	51,41	18,77	19,19	0,34	1,19
Jawa Timur	30,34	12,88	15,26	0,54	1,44
Banten	22,99	20,08	6,42	1,46	3,15
Bali	25,78	15,01	11,43	1,71	0,87
Nusa Tenggara Barat	39,31	12,12	11,43	0,41	0,40
Nusa Tenggara Timur	46,69	10,66	5,15	0,14	0,07
Kalimantan Barat	22,17	13,66	1,89	0,59	1,15
Kalimantan Tengah	22,54	18,27	16,99	0,54	0,54
Kalimantan Selatan	20,33	17,24	26,42	0,43	1,29
Kalimantan Timur	24,90	28,70	9,63	1,80	1,23
Kalimantan Utara	36,03	27,78	22,04	1,51	0,46
Sulawesi Utara	37,18	23,07	3,19	0,76	1,23
Sulawesi Tengah	37,35	17,31	7,31	0,14	0,43
Sulawesi Selatan	41,25	20,45	10,42	0,13	0,92
Sulawesi Tenggara	35,47	13,89	9,76	0,23	0,11
Gorontalo	62,57	16,81	4,06	0,25	0,32
Sulawesi Barat	49,67	13,87	24,21	1,03	0,00
Maluku	32,94	13,11	7,66	0,05	0,12
Maluku Utara	22,19	8,27	28,78	0,24	0,48
Papua Barat	62,02	13,90	13,89	0,33	0,17
Papua	31,75	16,86	41,84	0,37	0,79
Indonesia	33,47	17,08	12,88	0,83	1,51

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 7.12 Persentase Penduduk Lansia yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	75,17	67,28	72,35	66,75	69,21
Sumatera Utara	42,82	29,74	43,47	29,63	35,85
Sumatera Barat	61,27	42,02	51,49	48,65	49,92
Riau	58,96	23,45	38,74	36,09	37,35
Jambi	60,23	29,77	37,57	40,75	39,10
Sumatera Selatan	74,02	35,34	52,22	46,78	49,30
Bengkulu	62,29	32,34	40,39	45,41	42,90
Lampung	58,54	25,06	33,58	32,02	32,78
Kep. Bangka Belitung	54,79	50,06	53,14	52,18	52,63
Kepulauan Riau	55,89	60,01	51,97	61,47	57,20
DKI Jakarta	67,23	-	68,61	66,13	67,23
Jawa Barat	44,32	26,03	37,31	39,04	38,22
Jawa Tengah	46,13	32,55	39,45	38,85	39,12
DI Yogyakarta	58,80	52,15	60,94	52,68	56,11
Jawa Timur	42,55	25,63	33,47	34,24	33,88
Banten	39,39	20,64	33,59	33,81	33,71
Bali	29,68	18,89	28,98	19,45	23,76
Nusa Tenggara Barat	34,61	14,12	23,40	20,68	21,90
Nusa Tenggara Timur	60,81	56,46	55,50	58,77	57,24
Kalimantan Barat	48,15	26,91	37,93	32,48	35,00
Kalimantan Tengah	63,15	52,73	51,96	61,57	56,28
Kalimantan Selatan	65,50	41,26	55,10	49,01	51,94
Kalimantan Timur	66,05	46,26	56,81	60,13	58,32
Kalimantan Utara	71,63	60,85	57,42	77,13	65,46
Sulawesi Utara	59,96	38,05	46,70	47,95	47,35
Sulawesi Tengah	59,85	48,69	49,59	51,37	50,52
Sulawesi Selatan	69,11	55,69	60,28	60,52	60,41
Sulawesi Tenggara	56,89	49,77	54,04	50,11	51,86
Gorontalo	73,55	47,62	55,63	57,54	56,67
Sulawesi Barat	67,46	73,87	68,70	75,77	72,24
Maluku	43,16	39,61	45,09	37,26	40,85
Maluku Utara	51,95	56,66	51,31	58,53	55,09
Papua Barat	81,81	67,37	67,97	76,36	71,97
Papua	60,92	72,81	67,91	68,00	67,95
Indonesia	48,79	33,69	41,78	40,87	41,29

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 7.13 Persentase Penduduk Lansia yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2017

Provinsi	Jenis Jaminan Kesehatan				
	BPJS Kesehatan RI	BPJS Kesehatan Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	52,39	7,10	9,28	0,06	0,61
Sumatera Utara	17,39	13,71	2,50	0,32	1,95
Sumatera Barat	28,28	17,66	4,01	0,20	0,28
Riau	15,15	13,17	8,35	0,34	0,34
Jambi	18,42	16,49	2,87	0,46	0,85
Sumatera Selatan	13,35	14,20	20,14	0,98	0,74
Bengkulu	16,84	21,21	1,27	0,17	3,77
Lampung	17,63	10,10	4,55	0,00	0,60
Kep. Bangka Belitung	32,09	15,24	4,92	0,18	0,20
Kepulauan Riau	14,47	28,13	10,05	0,00	4,56
DKI Jakarta	31,45	26,51	1,87	5,09	2,48
Jawa Barat	19,31	14,95	1,71	0,83	1,61
Jawa Tengah	21,05	13,71	3,52	0,10	0,86
DI Yogyakarta	32,24	16,23	6,70	0,24	0,70
Jawa Timur	17,25	10,62	4,71	0,28	1,23
Banten	13,31	14,05	3,83	0,29	2,24
Bali	10,72	10,52	2,58	0,13	0,00
Nusa Tenggara Barat	11,94	7,28	2,77	0,40	0,00
Nusa Tenggara Timur	41,53	10,73	4,98	0,00	0,00
Kalimantan Barat	15,99	17,34	1,11	0,00	0,57
Kalimantan Tengah	25,45	14,70	16,03	0,00	0,10
Kalimantan Selatan	17,10	17,21	15,88	0,47	1,47
Kalimantan Timur	22,38	27,04	8,09	0,47	0,35
Kalimantan Utara	37,73	14,52	14,56	1,10	0,00
Sulawesi Utara	25,49	18,96	1,85	0,50	0,63
Sulawesi Tengah	34,15	12,07	4,29	0,00	0,00
Sulawesi Selatan	33,83	20,77	5,34	0,00	0,80
Sulawesi Tenggara	30,75	14,17	6,73	0,00	0,20
Gorontalo	37,87	14,34	4,44	0,10	0,51
Sulawesi Barat	44,63	18,62	8,98	0,00	0,00
Maluku	26,04	6,36	8,87	0,00	0,00
Maluku Utara	21,86	11,81	21,34	0,00	0,09
Papua Barat	39,82	13,22	19,39	0,00	0,83
Papua	32,76	8,28	27,79	0,00	1,17
Indonesia	21,45	13,96	4,46	0,49	1,11

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel 8.1 Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Menurut Provinsi, 2017

Provinsi	Jumlah Kelom- pok BKL	Jumlah Kelom- pok Aktif BKL	% Kelompok Aktif terhadap Kelompok BKL	Jumlah Keluarga Lansia	Jumlah Keluarga Lansia Aktif	% Keluarga Aktif terhadap Keluarga BKL
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	588	495	84	31 839	13 357	41
Sumatera Utara	1 044	680	65	83 426	11 582	13
Sumatera Barat	494	274	55	184	19 454	10
Riau	158	128	81	5 646	4 727	83
Jambi	452	222	49	9 568	8 155	85
Sumatera Selatan	518	513	99	26 022	8 512	32
Bengkulu	406	183	45	1 987	1 323	66
Lampung	334	36	10	8 357	7 781	93
Kep. Bangka Belitung	147	116	78	10 726	3 793	35
Kepulauan Riau	92	57	61	1 809	1 383	76
DKI Jakarta	870	153	17	162	28 234	17
Jawa Barat	6 210	1 987	31	433	196 208	45
Jawa Tengah	6 817	3 621	53	397	194 171	48
DI Yogyakarta	601	90	14	34 829	20 461	58
Jawa Timur	5 885	3 278	55	346	167 568	48
Banten	340	182	53	16 156	7 973	49
Bali	611	251	41	38 551	23 358	60
Nusa Tenggara Barat	635	379	59	36 587	27 789	75
Nusa Tenggara Timur	356	60	16	3 751	2 888	76
Kalimantan Barat	243	234	96	8 568	4 369	50
Kalimantan Tengah	184	102	55	22 300	5 516	24
Kalimantan Selatan	822	421	51	28 229	19 644	69
Kalimantan Timur	255	240	94	7 400	4 635	62
Kalimantan Utara	6	3	50	149	102	68
Sulawesi Utara	257	250	97	22 724	6 396	28
Sulawesi Tengah	412	348	84	22 592	11 753	52
Sulawesi Selatan	1 353	1 208	89	76 283	31 839	41
Sulawesi Tenggara	375	299	79	12 843	8 357	65
Gorontalo	74	40	54	3 712	1 795	48
Sulawesi Barat	130	90	69	5 404	3 401	62
Maluku	353	194	54	9 675	8 665	89
Maluku Utara	46	46	100	318	188	59
Papua Barat	28	2	7	227	178	78
Papua	46	4	8	1 414	1 072	75
Indonesia	31 142	16 186	1 953	2 056	856 627	1 880

Sumber: Bina Keluarga Lansia, BKKBN (2017), <http://aplikasi.bkkbn.go.id/bkl/Report/LaporanBKL.aspx>

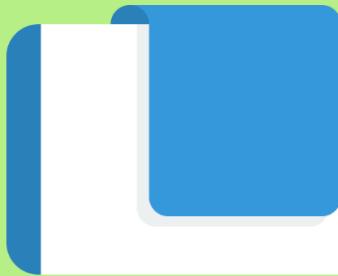


Tabel 8.2 Jumlah Penerima Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2017

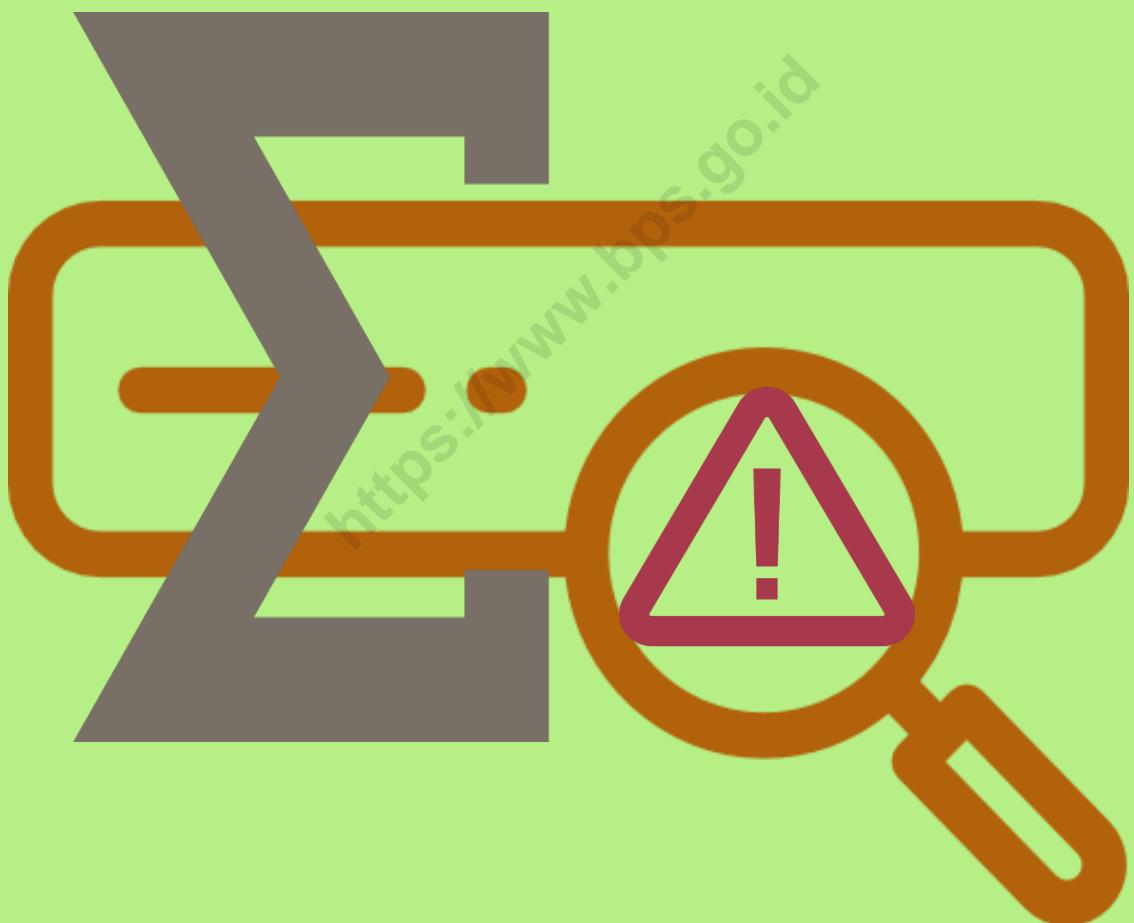
Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	169	481	650
Sumatera Utara	374	926	1 300
Sumatera Barat	273	877	1 150
Riau	181	419	600
Jambi	180	520	700
Sumatera Selatan	239	611	850
Bengkulu	180	420	600
Lampung	294	506	800
Kep. Bangka Belitung	98	252	350
Kepulauan Riau	132	218	350
DKI Jakarta	276	974	1 250
Jawa Barat	386	1 364	1 750
Jawa Tengah	399	1 301	1 700
DI Yogyakarta	336	1 064	1 400
Jawa Timur	325	1 375	1 700
Banten	232	1 018	1 250
Bali	242	558	800
Nusa Tenggara Barat	164	536	700
Nusa Tenggara Timur	522	928	1 450
Kalimantan Barat	390	710	1 100
Kalimantan Tengah	262	538	800
Kalimantan Selatan	225	875	1 100
Kalimantan Timur	269	421	690
Kalimantan Utara	44	66	110
Sulawesi Utara	327	623	950
Sulawesi Tengah	265	435	700
Sulawesi Selatan	308	942	1 250
Sulawesi Tenggara	235	515	750
Gorontalo	167	433	600
Sulawesi Barat	93	257	350
Maluku	364	536	900
Maluku Utara	98	552	650
Papua Barat	107	143	250
Papua	170	280	450
Indonesia	8 326	21 674	30 000

Sumber: Kementerian Sosial RI





PENGHITUNGAN *SAMPLING ERROR* *(RELATIVE STANDARD ERROR)*



PENGHITUNGAN *SAMPLING ERROR*

Nilai-nilai indikator yang diestimasi dari hasil Susenas 2016 dipengaruhi oleh dua jenis kesalahan (*error*), yaitu *non sampling error* dan *sampling error*. *Non sampling error* adalah kesalahan yang terjadi ketika proses pengumpulan maupun pengolahan data. Misalnya kesalahan dalam menginterpretasikan pertanyaan-pertanyaan di kuesioner, maupun kesalahan dalam melakukan input data ke komputer.

Sampling error adalah kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknik sampling tertentu dalam suatu survei. Secara statistik, besarnya *sampling error* hasil Susenas 2016 ditunjukkan oleh nilai *standard error* (galat baku) dari suatu ukuran statistik (rata-rata, persentase, atau jumlah). Untuk mengukur presisi suatu indikator digunakan nilai *relative standard error (RSE)*, yaitu perbandingan nilai *standard error* terhadap estimasi indikatornya, yang dinyatakan dalam persen. *Standard error* juga digunakan untuk menghitung besaran selang *kepercayaan (confidence interval)*, yaitu interval nilai yang dapat menggambarkan populasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan (*interval estimation*) dengan batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error* dan batas atas sebesar nilai estimasi ditambah dua *standard error*. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan nilai indikator yang semakin baik.

Menurut Aryago Mulia dkk (2008), kualitas hasil estimasi suatu survei bisa diamati dari RSE yang dihasilkan dimana keputusan mengenai keakuratan suatu estimasi bisa diamati dari hasil penghitungan RSE tersebut. Kesalahan sampling dari beberapa estimasi harus digunakan secara hati-hati. Untuk estimasi yang berdasarkan jumlah kasus yang kecil, kesalahan relatif adalah sangat besar. Secara umum, besaran SE meningkat seiring dengan meningkatnya besaran estimasi. Sebaliknya, RSE menurun jika ukuran estimasi tersebut meningkat. Estimasi yang sangat kecil



dengan demikian akan menghasilkan RSE yang tinggi sehingga nilainya menjadi tidak akurat. Nilai estimasi dengan $RSE \leq 25\%$ dianggap akurat, sedangkan nilai estimasi dengan $RSE > 25\%$ tetapi $\leq 50\%$ perlu hati-hati jika ingin digunakan, dan estimasi dengan $RSE > 50\%$ dianggap sangat tidak akurat dan seharusnya digabungkan dengan estimasi yang lain untuk memberikan estimasi dengan $RSE \leq 25\%$.

Penghitungan tingkat *sampling error* untuk indikator-indikator yang disajikan dalam publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia 2016 menggunakan *software STATA 14.0 for Windows*. Indikator yang dihitung *sampling error*-nya meliputi demografi, pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, kondisi sosial-ekonomi, dan perlindungan sosial. *Sampling error* disajikan dalam 46 tabel Menurut provinsi, tipe daerah (perkotaan dan perdesaan) dan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Tingkat *sampling error* yang disajikan meliputi nilai-nilai estimasi dari *standard error*, RSE, selang kepercayaan 95 persen, dan *design effect (deff)*.

Dalam publikasi ini penghitungan RSE menggunakan metode *Taylor Linearization* untuk mengestimasi nilai total maupun rata-ratanya. Namun tidak semua variabel hasil pendataan dihitung SE dan RSE, hanya beberapa variabel penting saja yang dihitung.



Tabel A.1 Sampling error Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Perkotaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	6,05	0,32	5,35	5,41	6,68	1,24	13 677
Sumatera Utara	7,07	0,24	3,44	6,59	7,55	2,83	33 785
Sumatera Barat	8,55	0,40	4,66	7,77	9,33	1,94	16 127
Riau	5,01	0,30	5,96	4,42	5,59	2,14	11 407
Jambi	6,92	0,42	6,09	6,09	7,74	1,32	6 638
Sumatera Selatan	7,22	0,40	5,52	6,44	8,00	3,11	12 393
Bengkulu	5,81	0,40	6,89	5,03	6,60	0,79	5 804
Lampung	7,63	0,44	5,80	6,76	8,49	2,75	9 069
Kep Bangka Belitung	7,44	0,44	5,85	6,59	8,30	0,89	6 509
Kepulauan Riau	3,80	0,37	9,78	3,07	4,52	2,88	9 706
DKI Jakarta	7,02	0,24	3,47	6,55	7,50	4,08	18 322
Jawa Barat	7,88	0,17	2,21	7,54	8,22	6,26	55 224
Jawa Tengah	11,87	0,21	1,76	11,46	12,28	3,05	51 932
DI Yogyakarta	12,17	0,50	4,15	11,18	13,16	2,73	8 268
Jawa Timur	11,26	0,21	1,91	10,84	11,68	4,01	54 866
Banten	5,21	0,23	4,34	4,76	5,65	3,89	16 870
Bali	9,45	0,41	4,34	8,64	10,25	2,31	13 189
Nusa Tenggara Barat	7,84	0,40	5,14	7,05	8,63	2,15	9 465
Nusa Tenggara Timur	6,87	0,48	6,97	5,93	7,80	1,77	8 447
Kalimantan Barat	7,63	0,38	4,94	6,89	8,37	1,36	9 083
Kalimantan Tengah	5,31	0,38	7,16	4,57	6,06	1,17	8 671
Kalimantan Selatan	6,58	0,36	5,43	5,88	7,28	1,63	10 389
Kalimantan Timur	5,41	0,28	5,25	4,85	5,97	1,61	12 295
Kalimantan Utara	5,50	0,48	8,65	4,57	6,43	0,74	4 102
Sulawesi Utara	9,83	0,42	4,25	9,01	10,65	0,99	11 329
Sulawesi Tengah	6,93	0,47	6,79	6,00	7,85	1,14	5 368
Sulawesi Selatan	8,03	0,33	4,09	7,39	8,67	2,17	19 461
Sulawesi Tenggara	6,42	0,65	10,08	5,15	7,68	2,51	6 465
Gorontalo	7,46	0,55	7,44	6,37	8,55	0,82	4 097
Sulawesi Barat	6,96	0,71	10,23	5,56	8,35	0,94	2 592
Maluku	6,66	0,39	5,87	5,90	7,43	0,75	7 636
Maluku Utara	5,56	0,45	8,09	4,68	6,44	0,56	4 304
Papua Barat	4,12	0,39	9,58	3,35	4,89	0,61	5 974
Papua	4,50	0,36	7,97	3,80	5,20	1,14	8 833
Indonesia	8,41	0,07	0,84	8,27	8,54	3,87	482 297

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel A.2 Sampling error Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Perdesaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	6,85	0,19	2,82	6,47	7,23	0,92	31 832
Sumatera Utara	7,43	0,20	2,73	7,03	7,82	1,81	42 582
Sumatera Barat	9,78	0,28	2,88	9,23	10,33	1,21	23 713
Riau	5,31	0,23	4,34	4,86	5,76	1,83	18 347
Jambi	6,94	0,27	3,95	6,40	7,48	1,21	16 712
Sumatera Selatan	7,53	0,22	2,87	7,10	7,95	1,52	24 761
Bengkulu	7,37	0,29	3,88	6,81	7,93	0,68	13 155
Lampung	8,58	0,25	2,96	8,08	9,08	2,14	24 811
Kep Bangka Belitung	6,93	0,47	6,72	6,02	7,85	0,99	6 543
Kepulauan Riau	7,01	0,82	11,69	5,40	8,62	1,39	3 366
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	10,37	0,26	2,53	9,86	10,89	4,33	27 995
Jawa Tengah	13,04	0,22	1,66	12,61	13,46	3,11	45 084
DI Yogyakarta	17,99	0,85	4,72	16,32	19,65	2,36	4 061
Jawa Timur	13,08	0,20	1,53	12,69	13,48	2,95	48 448
Banten	6,91	0,38	5,43	6,18	7,65	3,55	9 072
Bali	13,18	0,56	4,28	12,07	14,28	1,84	8 306
Nusa Tenggara Barat	8,23	0,37	4,47	7,51	8,95	2,13	12 399
Nusa Tenggara Timur	8,10	0,18	2,27	7,74	8,46	0,81	39 960
Kalimantan Barat	7,09	0,24	3,35	6,62	7,55	1,25	22 555
Kalimantan Tengah	5,68	0,29	5,15	5,11	6,26	1,15	16 674
Kalimantan Selatan	7,21	0,28	3,86	6,67	7,76	1,15	15 570
Kalimantan Timur	6,04	0,49	8,19	5,07	7,01	2,25	7 591
Kalimantan Utara	6,20	0,61	9,84	5,01	7,40	0,81	4 399
Sulawesi Utara	10,85	0,36	3,28	10,16	11,55	0,73	16 363
Sulawesi Tengah	7,95	0,28	3,53	7,40	8,50	1,02	19 423
Sulawesi Selatan	10,02	0,22	2,17	9,59	10,44	1,19	36 459
Sulawesi Tenggara	6,98	0,26	3,79	6,46	7,50	0,82	19 005
Gorontalo	7,51	0,46	6,19	6,60	8,42	1,00	8 062
Sulawesi Barat	6,40	0,34	5,30	5,74	7,07	0,87	9 886
Maluku	7,10	0,32	4,57	6,46	7,73	0,71	15 178
Maluku Utara	6,04	0,29	4,83	5,46	6,61	0,57	13 586
Papua Barat	4,54	0,38	8,31	3,80	5,28	0,79	11 523
Papua	2,60	0,19	7,20	2,23	2,97	1,43	33 031
Indonesia	9,61	0,06	0,65	9,49	9,73	2,39	650 452

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel A.3 Sampling error Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Laki-laki

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	6,12	0,19	3,16	5,74	6,50	0,73	22 549
Sumatera Utara	6,62	0,18	2,69	6,27	6,97	1,58	38 080
Sumatera Barat	8,44	0,25	3,00	7,94	8,93	0,95	19 665
Riau	5,13	0,22	4,33	4,70	5,57	1,49	15 134
Jambi	6,85	0,26	3,75	6,34	7,35	0,80	11 804
Sumatera Selatan	7,10	0,22	3,17	6,66	7,54	1,39	18 798
Bengkulu	6,77	0,28	4,14	6,22	7,32	0,53	9 619
Lampung	8,23	0,25	3,00	7,74	8,71	1,48	17 371
Kep Bangka Belitung	6,86	0,35	5,12	6,17	7,55	0,62	6 644
Kepulauan Riau	4,21	0,39	9,21	3,45	4,97	1,71	6 495
DKI Jakarta	6,77	0,28	4,21	6,21	7,32	2,90	9 172
Jawa Barat	8,23	0,16	1,96	7,91	8,54	3,62	41 599
Jawa Tengah	11,75	0,17	1,47	11,41	12,09	2,11	47 718
DI Yogyakarta	12,76	0,53	4,12	11,73	13,79	2,00	6 101
Jawa Timur	11,37	0,16	1,45	11,05	11,69	2,26	50 468
Banten	5,56	0,23	4,22	5,10	6,02	2,87	13 146
Bali	10,06	0,35	3,43	9,38	10,73	1,22	10 777
Nusa Tenggara Barat	7,82	0,33	4,20	7,18	8,47	1,56	10 716
Nusa Tenggara Timur	7,51	0,20	2,66	7,11	7,90	0,65	24 063
Kalimantan Barat	7,12	0,24	3,32	6,66	7,58	0,92	15 904
Kalimantan Tengah	5,51	0,27	4,89	4,98	6,04	0,82	12 934
Kalimantan Selatan	6,43	0,26	3,99	5,93	6,93	0,98	12 928
Kalimantan Timur	5,78	0,30	5,12	5,20	6,36	1,30	10 369
Kalimantan Utara	5,96	0,45	7,51	5,09	6,84	0,56	4 346
Sulawesi Utara	9,67	0,30	3,09	9,08	10,25	0,55	14 090
Sulawesi Tengah	7,51	0,28	3,76	6,95	8,06	0,75	12 637
Sulawesi Selatan	8,27	0,21	2,52	7,86	8,68	1,06	27 325
Sulawesi Tenggara	6,46	0,31	4,84	5,85	7,08	0,91	12 662
Gorontalo	6,94	0,42	6,02	6,12	7,76	0,68	6 106
Sulawesi Barat	6,06	0,34	5,53	5,41	6,72	0,57	6 302
Maluku	6,63	0,29	4,41	6,06	7,20	0,53	11 355
Maluku Utara	5,85	0,28	4,79	5,30	6,40	0,38	9 129
Papua Barat	4,53	0,33	7,18	3,89	5,16	0,51	8 973
Papua	3,42	0,19	5,64	3,04	3,80	0,83	21 947
Indonesia	8,48	0,05	0,63	8,37	8,58	2,10	566 926

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel A.4 Sampling error Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel	Perempuan
				Batas Atas	Batas Bawah			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	7,10	0,21	2,91	6,69	7,50	0,73	22 960	
Sumatera Utara	7,87	0,19	2,46	7,49	8,25	1,59	38 287	
Sumatera Barat	10,09	0,29	2,91	9,52	10,67	1,10	20 175	
Riau	5,25	0,22	4,18	4,82	5,68	1,35	14 620	
Jambi	7,02	0,27	3,92	6,48	7,56	0,86	11 546	
Sumatera Selatan	7,74	0,24	3,10	7,27	8,22	1,42	18 356	
Bengkulu	6,97	0,29	4,23	6,40	7,55	0,55	9 340	
Lampung	8,41	0,26	3,15	7,89	8,93	1,59	16 509	
Kep Bangka Belitung	7,56	0,41	5,46	6,75	8,37	0,72	6 408	
Kepulauan Riau	4,35	0,40	9,24	3,56	5,14	1,70	6 577	
DKI Jakarta	7,28	0,31	4,21	6,68	7,88	3,11	9 150	
Jawa Barat	8,95	0,18	2,00	8,60	9,30	4,03	41 620	
Jawa Tengah	13,17	0,18	1,38	12,81	13,52	2,15	49 298	
DI Yogyakarta	15,01	0,52	3,44	14,00	16,03	1,71	6 228	
Jawa Timur	12,92	0,18	1,41	12,57	13,28	2,53	52 846	
Banten	5,89	0,24	4,03	5,42	6,35	2,68	12 796	
Bali	11,54	0,39	3,40	10,77	12,30	1,37	10 718	
Nusa Tenggara Barat	8,28	0,33	4,03	7,62	8,93	1,62	11 148	
Nusa Tenggara Timur	8,15	0,22	2,67	7,73	8,58	0,73	24 344	
Kalimantan Barat	7,40	0,24	3,19	6,94	7,87	0,85	15 734	
Kalimantan Tengah	5,59	0,28	4,98	5,05	6,14	0,79	12 411	
Kalimantan Selatan	7,44	0,29	3,84	6,88	8,01	1,04	13 031	
Kalimantan Timur	5,45	0,33	6,00	4,81	6,09	1,52	9 517	
Kalimantan Utara	5,61	0,48	8,48	4,68	6,55	0,60	4 155	
Sulawesi Utara	11,10	0,34	3,09	10,43	11,77	0,62	13 602	
Sulawesi Tengah	7,87	0,29	3,71	7,30	8,45	0,74	12 154	
Sulawesi Selatan	10,15	0,23	2,32	9,68	10,61	1,17	28 595	
Sulawesi Tenggara	7,13	0,32	4,42	6,52	7,75	0,84	12 808	
Gorontalo	8,04	0,40	5,02	7,25	8,83	0,56	6 053	
Sulawesi Barat	6,97	0,41	5,91	6,16	7,78	0,75	6 176	
Maluku	7,22	0,30	4,16	6,63	7,81	0,50	11 459	
Maluku Utara	5,96	0,30	5,06	5,37	6,55	0,42	8 761	
Papua Barat	4,21	0,34	8,02	3,55	4,87	0,53	8 524	
Papua	2,78	0,18	6,59	2,42	3,13	0,83	19 917	
Indonesia	9,47	0,06	0,62	9,36	9,59	2,25	565 823	

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel A.5 Sampling error Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Laki-laki + Perempuan di Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	6,61	0,17	2,52	6,28	6,93	1,01	45 509
Sumatera Utara	7,25	0,16	2,20	6,93	7,56	2,33	76 367
Sumatera Barat	9,27	0,24	2,54	8,81	9,73	1,52	39 840
Riau	5,19	0,18	3,52	4,83	5,55	1,95	29 754
Jambi	6,93	0,23	3,32	6,48	7,38	1,25	23 350
Sumatera Selatan	7,41	0,20	2,71	7,02	7,81	2,10	37 154
Bengkulu	6,87	0,23	3,42	6,41	7,33	0,72	18 959
Lampung	8,32	0,22	2,67	7,88	8,75	2,32	33 880
Kep Bangka Belitung	7,20	0,32	4,42	6,58	7,82	0,94	13 052
Kepulauan Riau	4,28	0,35	8,16	3,59	4,96	2,67	13 072
DKI Jakarta	7,02	0,24	3,47	6,55	7,50	4,08	18 322
Jawa Barat	8,58	0,15	1,71	8,29	8,87	5,67	83 219
Jawa Tengah	12,46	0,15	1,21	12,17	12,76	3,08	97 016
DI Yogyakarta	13,90	0,44	3,15	13,04	14,76	2,60	12 329
Jawa Timur	12,16	0,15	1,21	11,87	12,45	3,48	103 314
Banten	5,72	0,19	3,38	5,34	6,10	3,73	25 942
Bali	10,79	0,33	3,08	10,14	11,44	2,11	21 495
Nusa Tenggara Barat	8,06	0,27	3,37	7,52	8,59	2,14	21 864
Nusa Tenggara Timur	7,83	0,18	2,27	7,48	8,18	1,00	48 407
Kalimantan Barat	7,26	0,20	2,77	6,86	7,65	1,28	31 638
Kalimantan Tengah	5,55	0,23	4,18	5,09	6,00	1,16	25 345
Kalimantan Selatan	6,93	0,22	3,20	6,50	7,37	1,36	25 959
Kalimantan Timur	5,62	0,25	4,49	5,13	6,12	1,85	19 886
Kalimantan Utara	5,80	0,38	6,51	5,06	6,54	0,77	8 501
Sulawesi Utara	10,37	0,27	2,63	9,83	10,90	0,85	27 692
Sulawesi Tengah	7,69	0,24	3,14	7,21	8,16	1,05	24 791
Sulawesi Selatan	9,23	0,19	2,04	8,86	9,60	1,59	55 920
Sulawesi Tenggara	6,80	0,27	4,00	6,27	7,33	1,31	25 470
Gorontalo	7,49	0,36	4,78	6,79	8,19	0,93	12 159
Sulawesi Barat	6,52	0,31	4,71	5,91	7,12	0,89	12 478
Maluku	6,92	0,25	3,61	6,43	7,41	0,73	22 814
Maluku Utara	5,91	0,25	4,15	5,42	6,39	0,57	17 890
Papua Barat	4,38	0,28	6,34	3,83	4,92	0,73	17 497
Papua	3,11	0,17	5,38	2,78	3,44	1,31	41 864
Indonesia	8,97	0,05	0,53	8,88	9,07	3,16	1 132 749

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel B.1 Sampling error Persentase Rumah Tangga Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Tipe Dearah, 2017

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	20,87	1,03	4,91	18,86	22,88	1,16	3 415
Sumatera Utara	22,81	0,75	3,28	21,34	24,27	2,71	8 397
Sumatera Barat	26,54	1,10	4,14	24,39	28,70	1,62	4 078
Riau	16,86	0,94	5,56	15,03	18,70	1,97	2 827
Jambi	22,01	1,24	5,63	19,58	24,44	1,19	1 689
Sumatera Selatan	22,84	1,09	4,78	20,70	24,97	2,39	3 099
Bengkulu	17,71	1,11	6,28	15,53	19,89	0,68	1 544
Lampung	22,87	1,12	4,89	20,68	25,06	1,97	2 345
Kep Bangka Belitung	21,95	1,16	5,29	19,67	24,23	0,77	1 789
Kepulauan Riau	11,01	1,01	9,21	9,02	12,99	2,50	2 603
DKI Jakarta	20,41	0,68	3,34	19,07	21,74	3,94	5 062
Jawa Barat	22,95	0,47	2,03	22,03	23,86	5,64	15 423
Jawa Tengah	33,64	0,51	1,52	32,63	34,64	2,62	14 490
DI Yogyakarta	29,96	1,20	4,02	27,60	32,32	2,70	2 566
Jawa Timur	31,26	0,54	1,71	30,21	32,31	3,67	15 722
Banten	16,92	0,76	4,51	15,42	18,41	4,43	4 401
Bali	23,92	1,15	4,79	21,67	26,16	2,62	3 517
Nusa Tenggara Barat	22,82	1,09	4,77	20,69	24,96	2,05	2 717
Nusa Tenggara Timur	23,58	1,57	6,66	20,50	26,66	1,68	1 921
Kalimantan Barat	24,83	1,11	4,48	22,65	27,01	1,20	2 225
Kalimantan Tengah	15,69	1,00	6,40	13,72	17,66	0,91	2 304
Kalimantan Selatan	19,59	0,96	4,92	17,70	21,48	1,44	2 982
Kalimantan Timur	17,17	0,83	4,84	15,54	18,80	1,43	3 149
Kalimantan Utara	18,80	1,64	8,70	15,59	22,00	0,82	1 016
Sulawesi Utara	28,67	1,20	4,20	26,31	31,04	1,05	2 983
Sulawesi Tengah	22,21	1,47	6,61	19,33	25,09	1,16	1 346
Sulawesi Selatan	26,58	1,02	3,82	24,59	28,57	2,06	4 662
Sulawesi Tenggara	19,61	1,63	8,33	16,40	22,81	1,63	1 570
Gorontalo	22,47	1,60	7,11	19,33	25,60	0,77	1 034
Sulawesi Barat	24,71	2,39	9,66	20,03	29,38	0,91	592
Maluku	23,69	1,41	5,94	20,93	26,45	0,84	1 666
Maluku Utara	20,55	1,76	8,57	17,10	24,00	0,70	1 023
Papua Barat	14,25	1,39	9,78	11,52	16,98	0,64	1 348
Papua	14,30	1,06	7,44	12,22	16,39	1,00	2 185
Indonesia	24,74	0,19	0,77	24,37	25,12	3,11	127 690

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel B.2 Sampling error Persentase Rumah Tangga Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Tipe Dearah, 2017

Perdesaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	23,58	0,61	2,58	22,39	24,78	0,69	8 119
Sumatera Utara	24,22	0,59	2,44	23,06	25,38	1,23	10 372
Sumatera Barat	31,26	0,80	2,55	29,70	32,83	0,85	5 996
Riau	17,40	0,70	4,03	16,02	18,77	1,30	4 703
Jambi	20,10	0,73	3,63	18,67	21,53	0,79	4 519
Sumatera Selatan	21,99	0,57	2,59	20,87	23,10	0,98	6 653
Bengkulu	21,38	0,77	3,61	19,87	22,89	0,46	3 543
Lampung	24,55	0,64	2,59	23,30	25,79	1,36	6 932
Kep Bangka Belitung	19,54	1,16	5,93	17,27	21,81	0,59	1 798
Kepulauan Riau	21,66	2,34	10,81	17,07	26,24	1,04	908
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	27,68	0,60	2,18	26,50	28,87	2,73	8 333
Jawa Tengah	35,66	0,51	1,42	34,67	36,65	2,05	12 934
DI Yogyakarta	46,46	2,01	4,32	42,52	50,39	1,93	1 156
Jawa Timur	36,12	0,49	1,35	35,16	37,07	2,14	14 165
Banten	22,95	1,11	4,83	20,78	25,13	2,41	2 278
Bali	35,73	1,36	3,81	33,07	38,40	1,23	2 238
Nusa Tenggara Barat	22,05	0,86	3,90	20,37	23,74	1,29	3 531
Nusa Tenggara Timur	28,88	0,60	2,08	27,70	30,06	0,60	8 874
Kalimantan Barat	22,70	0,70	3,08	21,33	24,07	0,88	5 688
Kalimantan Tengah	17,29	0,82	4,74	15,69	18,90	0,80	4 574
Kalimantan Selatan	21,23	0,73	3,44	19,79	22,66	0,78	4 506
Kalimantan Timur	19,17	1,58	8,24	16,07	22,27	1,90	1 985
Kalimantan Utara	21,88	2,02	9,22	17,93	25,84	0,60	1 022
Sulawesi Utara	31,31	0,91	2,90	29,53	33,09	0,49	4 346
Sulawesi Tengah	24,52	0,77	3,13	23,02	26,03	0,66	4 832
Sulawesi Selatan	31,83	0,64	2,00	30,58	33,08	0,91	9 139
Sulawesi Tenggara	23,20	0,80	3,43	21,64	24,76	0,56	4 584
Gorontalo	22,41	1,10	4,90	20,26	24,57	0,48	1 994
Sulawesi Barat	21,43	1,01	4,73	19,44	23,42	0,58	2 346
Maluku	26,06	1,08	4,13	23,95	28,17	0,49	3 196
Maluku Utara	21,13	0,92	4,34	19,34	22,93	0,36	3 048
Papua Barat	14,78	1,16	7,83	12,52	17,05	0,54	2 633
Papua	7,93	0,56	7,01	6,84	9,01	1,01	8 641
Indonesia	28,17	0,16	0,57	27,86	28,49	1,81	169 586

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel B.3 Sampling error Persentase Rumah Tangga Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Tipe Dearah, 2017

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	22,77	0,53	2,31	21,74	23,80	0,84	11 534
Sumatera Utara	23,50	0,48	2,04	22,56	24,44	1,89	18 769
Sumatera Barat	29,30	0,66	2,25	28,01	30,59	1,16	10 074
Riau	17,19	0,56	3,27	16,08	18,29	1,57	7 530
Jambi	20,68	0,63	3,05	19,44	21,92	0,94	6 208
Sumatera Selatan	22,28	0,53	2,38	21,24	23,32	1,45	9 752
Bengkulu	20,20	0,64	3,16	18,95	21,45	0,55	5 087
Lampung	24,11	0,55	2,30	23,02	25,20	1,59	9 277
Kep Bangka Belitung	20,80	0,82	3,94	19,19	22,41	0,67	3 587
Kepulauan Riau	12,57	0,97	7,71	10,67	14,47	2,10	3 511
DKI Jakarta	20,41	0,68	3,34	19,07	21,74	3,47	5 062
Jawa Barat	24,34	0,38	1,54	23,61	25,08	4,38	23 756
Jawa Tengah	34,68	0,36	1,04	33,97	35,38	2,30	27 424
DI Yogyakarta	34,58	1,04	2,99	32,55	36,61	2,26	3 722
Jawa Timur	33,65	0,36	1,08	32,93	34,36	2,84	29 887
Banten	18,68	0,63	3,36	17,45	19,92	3,46	6 679
Bali	28,05	0,91	3,23	26,28	29,83	2,01	5 755
Nusa Tenggara Barat	22,39	0,68	3,04	21,06	23,72	1,61	6 248
Nusa Tenggara Timur	27,72	0,58	2,11	26,58	28,87	0,84	10 795
Kalimantan Barat	23,36	0,59	2,54	22,20	24,52	1,01	7 913
Kalimantan Tengah	16,72	0,64	3,81	15,47	17,97	0,87	6 878
Kalimantan Selatan	20,51	0,59	2,87	19,36	21,66	1,04	7 488
Kalimantan Timur	17,85	0,77	4,32	16,34	19,36	1,58	5 134
Kalimantan Utara	20,06	1,27	6,35	17,56	22,56	0,70	2 038
Sulawesi Utara	30,05	0,75	2,49	28,59	31,52	0,73	7 329
Sulawesi Tengah	23,93	0,68	2,86	22,58	25,27	0,81	6 178
Sulawesi Selatan	29,80	0,56	1,89	28,70	30,91	1,35	13 801
Sulawesi Tenggara	22,04	0,74	3,38	20,58	23,50	0,84	6 154
Gorontalo	22,43	0,91	4,06	20,65	24,22	0,59	3 028
Sulawesi Barat	22,07	0,94	4,27	20,22	23,92	0,69	2 938
Maluku	25,05	0,86	3,45	23,36	26,74	0,63	4 862
Maluku Utara	20,97	0,83	3,94	19,35	22,58	0,46	4 071
Papua Barat	14,58	0,89	6,12	12,83	16,33	0,59	3 981
Papua	9,59	0,50	5,18	8,61	10,56	1,03	10 826
Indonesia	26,35	0,13	0,48	26,10	26,60	2,49	297 276

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel C.1 Sampling error Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal Sendiri menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Perkotaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	7,59	1,02	13,48	5,58	9,60	0,72	941
Sumatera Utara	6,98	0,71	10,20	5,58	8,38	2,06	2 647
Sumatera Barat	7,43	0,85	11,49	5,76	9,11	1,03	1 493
Riau	5,86	1,42	24,27	3,07	8,65	2,49	662
Jambi	4,10	0,94	23,02	2,25	5,96	0,89	548
Sumatera Selatan	4,35	0,85	19,63	2,68	6,03	1,97	971
Bengkulu	4,92	1,24	25,20	2,49	7,35	0,61	399
Lampung	4,12	0,90	21,80	2,36	5,88	1,83	830
Kep Bangka Belitung	11,23	1,65	14,66	8,00	14,46	0,78	590
Kepulauan Riau	6,05	1,62	26,82	2,87	9,23	1,59	594
DKI Jakarta	6,04	0,70	11,61	4,67	7,42	3,25	1 618
Jawa Barat	11,12	0,58	5,21	9,98	12,25	4,76	4 867
Jawa Tengah	10,93	0,49	4,51	9,96	11,90	2,57	6 023
DI Yogyakarta	11,72	1,18	10,06	9,41	14,04	2,23	1 096
Jawa Timur	10,50	0,47	4,50	9,57	11,42	2,76	6 395
Banten	6,39	0,92	14,36	4,59	8,19	3,27	1 109
Bali	3,47	0,53	15,26	2,43	4,51	1,10	1 427
Nusa Tenggara Barat	12,40	1,40	11,31	9,65	15,14	1,62	775
Nusa Tenggara Timur	3,53	1,09	30,93	1,39	5,67	1,41	610
Kalimantan Barat	5,47	0,95	17,40	3,60	7,34	1,07	835
Kalimantan Tengah	8,97	1,50	16,71	6,03	11,91	0,70	525
Kalimantan Selatan	7,75	1,11	14,36	5,57	9,93	1,06	752
Kalimantan Timur	6,86	1,25	18,19	4,42	9,31	1,60	698
Kalimantan Utara	5,28	1,83	34,70	1,69	8,87	0,75	230
Sulawesi Utara	7,35	0,93	12,60	5,54	9,17	0,74	1 275
Sulawesi Tengah	5,46	1,39	25,39	2,74	8,18	1,02	359
Sulawesi Selatan	4,96	0,68	13,67	3,63	6,29	1,39	1 595
Sulawesi Tenggara	6,88	1,61	23,34	3,73	10,03	1,11	452
Gorontalo	3,99	1,29	32,31	1,46	6,52	0,71	297
Sulawesi Barat	3,99	1,39	34,79	1,27	6,71	0,50	186
Maluku	4,82	1,10	22,75	2,67	6,97	0,64	553
Maluku Utara	4,60	1,34	29,21	1,96	7,23	0,39	254
Papua Barat	3,82	1,36	35,75	1,14	6,49	0,38	306
Papua	6,79	1,67	24,63	3,51	10,06	0,90	361
Indonesia	9,15	0,20	2,24	8,75	9,55	2,55	42 273

Keterangan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel C.2 Sampling error Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal Sendiri menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel	Perdesaan
				Batas Atas	Batas Bawah			(5)
				(6)	(7)			(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Aceh	15,68	0,89	5,70	13,93	17,43	0,54	2 390	
Sumatera Utara	13,76	0,78	5,64	12,24	15,28	0,95	3 255	
Sumatera Barat	11,51	0,80	6,96	9,94	13,08	0,69	2 522	
Riau	9,36	1,05	11,18	7,31	11,41	0,99	1 128	
Jambi	7,83	0,81	10,40	6,23	9,42	0,55	1 331	
Sumatera Selatan	7,38	0,59	8,04	6,22	8,55	0,73	2 096	
Bengkulu	8,13	0,91	11,22	6,34	9,92	0,39	1 096	
Lampung	8,48	0,69	8,12	7,13	9,83	1,13	2 319	
Kep Bangka Belitung	10,46	1,56	14,95	7,40	13,53	0,44	473	
Kepulauan Riau	17,73	5,73	32,30	6,50	28,95	1,76	252	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	15,56	0,81	5,22	13,97	17,15	2,53	3 083	
Jawa Tengah	9,68	0,43	4,48	8,83	10,53	1,75	6 401	
DI Yogyakarta	8,83	1,02	11,52	6,84	10,83	0,93	748	
Jawa Timur	10,86	0,44	4,04	10,00	11,72	1,81	7 168	
Banten	10,50	1,39	13,24	7,78	13,23	1,91	649	
Bali	7,95	0,88	11,06	6,23	9,67	0,77	1 306	
Nusa Tenggara Barat	10,39	1,21	11,63	8,02	12,76	1,27	1 023	
Nusa Tenggara Timur	6,32	0,48	7,59	5,38	7,27	0,47	3 899	
Kalimantan Barat	7,32	0,69	9,50	5,95	8,68	0,61	1 735	
Kalimantan Tengah	11,66	1,39	11,94	8,93	14,39	0,64	1 092	
Kalimantan Selatan	13,57	1,11	8,18	11,40	15,75	0,63	1 160	
Kalimantan Timur	7,83	1,67	21,32	4,56	11,11	1,01	487	
Kalimantan Utara	6,95	1,98	28,56	3,06	10,84	0,40	268	
Sulawesi Utara	7,58	0,82	10,76	5,98	9,18	0,48	2 003	
Sulawesi Tengah	6,97	0,79	11,33	5,43	8,52	0,60	1 500	
Sulawesi Selatan	7,35	0,48	6,50	6,41	8,29	0,64	4 021	
Sulawesi Tenggara	7,95	0,84	10,61	6,30	9,61	0,43	1 407	
Gorontalo	6,27	1,54	24,60	3,25	9,29	0,81	558	
Sulawesi Barat	8,22	1,25	15,24	5,77	10,68	0,50	721	
Maluku	5,43	1,00	18,37	3,47	7,39	0,51	1 210	
Maluku Utara	5,12	0,78	15,17	3,60	6,65	0,24	892	
Papua Barat	4,67	1,03	22,10	2,65	6,69	0,22	562	
Papua	7,66	1,23	16,05	5,25	10,06	0,48	854	
Indonesia	10,44	0,18	1,73	10,09	10,80	1,78	59 609	

Keterangan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel C.3 Sampling error Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal Sendiri menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Laki-laki

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	4,33	0,67	15,55	3,01	5,65	0,75	1 479
Sumatera Utara	4,74	0,56	11,77	3,65	5,84	1,41	2 526
Sumatera Barat	4,77	0,62	13,10	3,54	5,99	0,83	1 744
Riau	4,85	0,91	18,83	3,06	6,64	1,37	887
Jambi	2,56	0,55	21,59	1,48	3,65	0,65	907
Sumatera Selatan	3,26	0,57	17,38	2,15	4,37	1,32	1 469
Bengkulu	3,71	0,85	22,95	2,04	5,38	0,59	735
Lampung	3,74	0,52	13,86	2,72	4,75	1,13	1 606
Kep Bangka Belitung	8,50	1,52	17,94	5,51	11,49	0,66	522
Kepulauan Riau	7,25	2,25	31,03	2,84	11,66	1,46	422
DKI Jakarta	3,12	0,66	21,10	1,83	4,40	2,19	802
Jawa Barat	5,99	0,50	8,32	5,01	6,97	3,84	3 947
Jawa Tengah	4,70	0,32	6,74	4,08	5,32	1,94	5 911
DI Yogyakarta	5,18	0,82	15,92	3,56	6,79	1,43	847
Jawa Timur	4,72	0,32	6,71	4,10	5,34	2,14	6 299
Banten	4,53	0,81	17,89	2,94	6,12	2,32	879
Bali	2,62	0,45	17,16	1,74	3,51	0,74	1 297
Nusa Tenggara Barat	5,56	0,89	16,02	3,82	7,31	1,23	874
Nusa Tenggara Timur	3,61	0,45	12,57	2,72	4,50	0,50	2 157
Kalimantan Barat	4,60	0,68	14,76	3,27	5,93	0,81	1 306
Kalimantan Tengah	7,63	1,30	17,03	5,08	10,18	0,78	817
Kalimantan Selatan	5,47	0,97	17,83	3,56	7,37	1,07	858
Kalimantan Timur	4,76	0,96	20,24	2,87	6,65	0,96	655
Kalimantan Utara	6,29	1,98	31,40	2,42	10,16	0,62	261
Sulawesi Utara	5,43	0,84	15,56	3,77	7,08	0,73	1 550
Sulawesi Tengah	3,64	0,70	19,24	2,27	5,01	0,69	948
Sulawesi Selatan	3,46	0,46	13,31	2,56	4,37	0,97	2 389
Sulawesi Tenggara	3,49	0,71	20,35	2,10	4,88	0,55	867
Gorontalo	1,77	0,65	36,74	0,49	3,04	0,43	395
Sulawesi Barat	4,43	1,03	23,27	2,41	6,44	0,44	431
Maluku	4,31	1,10	25,48	2,16	6,47	0,74	846
Maluku Utara	3,75	0,83	22,25	2,12	5,39	0,30	576
Papua Barat	4,63	1,18	25,51	2,31	6,94	0,30	447
Papua	7,13	1,20	16,87	4,77	9,49	0,56	718
Indonesia	4,75	0,14	2,94	4,48	5,03	2,09	48 374

Keterangan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel C.4 Sampling error Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal Sendiri menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel	Perempuan
				Batas Atas	Batas Bawah			(5)
				(1)	(2)			(6)
Aceh	21,30	1,14	5,36	19,06	23,53	0,62	1 852	
Sumatera Utara	15,11	0,78	5,16	13,59	16,64	1,15	3 376	
Sumatera Barat	14,23	0,89	6,22	12,50	15,97	0,75	2 271	
Riau	11,27	1,32	11,68	8,69	13,85	1,27	903	
Jambi	10,82	1,08	9,96	8,70	12,93	0,63	972	
Sumatera Selatan	9,19	0,79	8,59	7,64	10,74	1,01	1 598	
Bengkulu	10,85	1,27	11,67	8,37	13,33	0,47	760	
Lampung	11,13	0,98	8,82	9,20	13,05	1,43	1 543	
Kep Bangka Belitung	13,21	1,46	11,09	10,34	16,08	0,42	541	
Kepulauan Riau	10,60	2,54	23,97	5,62	15,58	1,30	424	
DKI Jakarta	8,78	1,15	13,15	6,52	11,04	2,70	816	
Jawa Barat	18,89	0,74	3,94	17,43	20,35	3,31	4 003	
Jawa Tengah	15,15	0,52	3,42	14,13	16,17	2,05	6 513	
DI Yogyakarta	15,16	1,28	8,43	12,65	17,66	1,56	997	
Jawa Timur	15,81	0,51	3,21	14,81	16,80	2,15	7 264	
Banten	11,19	1,22	10,90	8,80	13,58	2,31	879	
Bali	7,94	0,79	9,92	6,39	9,48	0,89	1 436	
Nusa Tenggara Barat	16,34	1,47	9,01	13,45	19,22	1,44	924	
Nusa Tenggara Timur	7,77	0,70	9,00	6,40	9,14	0,64	2 352	
Kalimantan Barat	8,80	0,88	9,97	7,08	10,52	0,74	1 264	
Kalimantan Tengah	14,07	1,42	10,07	11,29	16,85	0,50	800	
Kalimantan Selatan	16,17	1,22	7,53	13,78	18,55	0,71	1 054	
Kalimantan Timur	10,09	1,61	15,94	6,94	13,24	1,14	530	
Kalimantan Utara	5,74	1,69	29,51	2,42	9,05	0,41	237	
Sulawesi Utara	9,34	0,87	9,34	7,63	11,05	0,52	1 728	
Sulawesi Tengah	9,58	1,12	11,70	7,39	11,78	0,71	911	
Sulawesi Selatan	8,92	0,57	6,42	7,80	10,04	0,79	3 227	
Sulawesi Tenggara	11,40	1,27	11,11	8,91	13,88	0,63	992	
Gorontalo	8,63	1,81	21,02	5,07	12,18	0,84	460	
Sulawesi Barat	9,79	1,73	17,66	6,40	13,18	0,67	476	
Maluku	6,01	0,99	16,49	4,07	7,96	0,47	917	
Maluku Utara	6,25	1,04	16,57	4,22	8,28	0,28	570	
Papua Barat	4,03	1,09	27,05	1,89	6,17	0,24	421	
Papua	7,57	1,37	18,10	4,88	10,25	0,50	497	
Indonesia	14,37	0,22	1,50	13,94	14,79	2,02	53 508	

Keterangan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel C.5 Sampling error Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal Sendiri menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Perkotaan+Perdesaan+Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	13,46	0,72	5,35	12,05	14,87	0,66	3 331
Sumatera Utara	10,39	0,53	5,11	9,35	11,43	1,36	5 902
Sumatera Barat	9,95	0,59	5,98	8,78	11,11	0,85	4 015
Riau	8,02	0,85	10,54	6,36	9,67	1,45	1 790
Jambi	6,66	0,63	9,47	5,42	7,89	0,68	1 879
Sumatera Selatan	6,30	0,49	7,84	5,33	7,27	1,10	3 067
Bengkulu	7,26	0,75	10,27	5,80	8,72	0,48	1 495
Lampung	7,38	0,57	7,67	6,27	8,49	1,40	3 149
Kep Bangka Belitung	10,88	1,14	10,52	8,64	13,12	0,60	1 063
Kepulauan Riau	8,92	1,94	21,72	5,12	12,71	1,78	846
DKI Jakarta	6,04	0,70	11,61	4,67	7,42	2,74	1 618
Jawa Barat	12,62	0,47	3,74	11,70	13,55	3,62	7 950
Jawa Tengah	10,26	0,33	3,18	9,63	10,90	2,14	12 424
DI Yogyakarta	10,61	0,83	7,78	8,99	12,23	1,63	1 844
Jawa Timur	10,69	0,32	3,01	10,06	11,32	2,25	13 563
Banten	7,89	0,77	9,82	6,37	9,41	2,55	1 758
Bali	5,44	0,48	8,91	4,49	6,39	0,91	2 733
Nusa Tenggara Barat	11,26	0,92	8,14	9,46	13,06	1,46	1 798
Nusa Tenggara Timur	5,80	0,44	7,60	4,93	6,66	0,64	4 509
Kalimantan Barat	6,70	0,56	8,39	5,60	7,80	0,78	2 570
Kalimantan Tengah	10,73	1,05	9,81	8,67	12,80	0,72	1 617
Kalimantan Selatan	11,14	0,80	7,17	9,57	12,70	0,80	1 912
Kalimantan Timur	7,22	1,00	13,82	5,26	9,17	1,29	1 185
Kalimantan Utara	6,04	1,34	22,22	3,41	8,67	0,55	498
Sulawesi Utara	7,48	0,61	8,19	6,28	8,68	0,60	3 278
Sulawesi Tengah	6,62	0,69	10,40	5,27	7,97	0,76	1 859
Sulawesi Selatan	6,53	0,39	5,99	5,76	7,30	0,87	5 616
Sulawesi Tenggara	7,63	0,76	9,93	6,14	9,11	0,62	1 859
Gorontalo	5,45	1,09	20,03	3,31	7,58	0,88	855
Sulawesi Barat	7,28	1,02	14,06	5,28	9,29	0,58	907
Maluku	5,19	0,74	14,34	3,73	6,65	0,59	1 763
Maluku Utara	4,99	0,67	13,49	3,67	6,31	0,30	1 146
Papua Barat	4,36	0,82	18,89	2,74	5,97	0,28	868
Papua	7,32	0,99	13,56	5,37	9,26	0,64	1 215
Indonesia	9,80	0,14	1,39	9,53	10,07	2,14	101 882

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel D.1 Sampling error Rata-rata Lama Sekolah dari Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Perkotaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	6,74	0,24	3,62	6,26	7,22	1,46	941
Sumatera Utara	7,30	0,18	2,44	6,95	7,65	4,29	2 647
Sumatera Barat	7,60	0,23	2,96	7,16	8,05	2,51	1 493
Riau	6,84	0,32	4,61	6,22	7,46	3,05	662
Jambi	6,34	0,31	4,89	5,74	6,95	1,84	548
Sumatera Selatan	6,93	0,24	3,39	6,47	7,39	3,53	971
Bengkulu	6,78	0,30	4,50	6,18	7,38	0,81	399
Lampung	5,89	0,24	4,06	5,42	6,36	2,88	830
Kep Bangka Belitung	5,79	0,24	4,13	5,32	6,26	1,01	590
Kepulauan Riau	6,59	0,34	5,17	5,92	7,26	2,19	594
DKI Jakarta	8,91	0,17	1,90	8,58	9,24	4,76	1 618
Jawa Barat	5,71	0,11	1,87	5,50	5,92	8,48	4 867
Jawa Tengah	4,74	0,08	1,67	4,58	4,89	3,58	6 023
DI Yogyakarta	6,00	0,18	2,95	5,66	6,35	3,10	1 096
Jawa Timur	4,69	0,07	1,56	4,55	4,84	5,00	6 395
Banten	6,17	0,27	4,35	5,64	6,70	6,19	1 109
Bali	4,90	0,19	3,80	4,54	5,27	2,24	1 427
Nusa Tenggara Barat	3,46	0,25	7,18	2,97	3,94	2,74	775
Nusa Tenggara Timur	6,50	0,33	5,08	5,85	7,15	1,99	610
Kalimantan Barat	5,08	0,26	5,03	4,58	5,58	1,88	835
Kalimantan Tengah	7,15	0,31	4,36	6,54	7,76	1,21	525
Kalimantan Selatan	6,41	0,25	3,94	5,92	6,91	1,87	752
Kalimantan Timur	6,87	0,24	3,44	6,41	7,33	1,79	698
Kalimantan Utara	5,75	0,42	7,27	4,93	6,57	0,92	230
Sulawesi Utara	7,54	0,20	2,65	7,15	7,93	1,17	1 275
Sulawesi Tengah	7,91	0,34	4,35	7,23	8,58	1,53	359
Sulawesi Selatan	6,46	0,21	3,22	6,05	6,87	2,52	1 595
Sulawesi Tenggara	5,57	0,78	13,95	4,05	7,10	6,02	452
Gorontalo	7,25	0,40	5,56	6,46	8,04	1,31	297
Sulawesi Barat	5,93	0,49	8,19	4,97	6,88	1,01	186
Maluku	7,44	0,27	3,66	6,90	7,97	1,02	553
Maluku Utara	6,79	0,38	5,56	6,05	7,53	0,74	254
Papua Barat	7,95	0,32	4,02	7,32	8,57	0,49	306
Papua	5,67	0,26	4,67	5,15	6,19	1,18	361
Indonesia	5,77	0,04	0,70	5,69	5,85	4,13	42 273

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel D.2 Sampling error Rata-rata Lama Sekolah dari Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Perdesaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	4,39	0,11	2,61	4,17	4,62	0,87	2 390
Sumatera Utara	4,84	0,11	2,27	4,62	5,05	1,70	3 255
Sumatera Barat	4,43	0,11	2,41	4,22	4,64	1,01	2 522
Riau	3,63	0,15	4,11	3,34	3,93	1,63	1 128
Jambi	3,66	0,13	3,60	3,40	3,91	0,82	1 331
Sumatera Selatan	3,75	0,11	2,89	3,54	3,97	1,69	2 096
Bengkulu	3,61	0,16	4,54	3,29	3,93	0,81	1 096
Lampung	3,77	0,09	2,44	3,59	3,95	1,62	2 319
Kep Bangka Belitung	3,44	0,22	6,39	3,01	3,87	0,92	473
Kepulauan Riau	3,08	0,26	8,37	2,58	3,59	0,71	252
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	3,90	0,10	2,44	3,72	4,09	4,85	3 083
Jawa Tengah	3,26	0,06	1,89	3,14	3,38	2,84	6 401
DI Yogyakarta	3,91	0,19	4,80	3,55	4,28	2,25	748
Jawa Timur	2,95	0,06	1,95	2,84	3,06	3,34	7 168
Banten	3,20	0,18	5,78	2,84	3,56	3,30	649
Bali	3,00	0,16	5,31	2,69	3,32	1,58	1 306
Nusa Tenggara Barat	2,11	0,14	6,82	1,83	2,39	1,85	1 023
Nusa Tenggara Timur	3,36	0,08	2,38	3,20	3,51	0,67	3 899
Kalimantan Barat	2,55	0,11	4,40	2,33	2,77	1,12	1 735
Kalimantan Tengah	4,22	0,16	3,80	3,90	4,53	0,81	1 092
Kalimantan Selatan	3,62	0,15	4,09	3,33	3,91	1,13	1 160
Kalimantan Timur	4,61	0,19	4,05	4,24	4,98	0,93	487
Kalimantan Utara	3,45	0,45	13,06	2,57	4,34	0,82	268
Sulawesi Utara	5,80	0,13	2,30	5,54	6,06	0,70	2 003
Sulawesi Tengah	4,44	0,12	2,67	4,21	4,68	0,74	1 500
Sulawesi Selatan	3,03	0,08	2,80	2,86	3,19	1,05	4 021
Sulawesi Tenggara	3,36	0,15	4,48	3,07	3,66	0,74	1 407
Gorontalo	4,08	0,18	4,44	3,73	4,44	0,65	558
Sulawesi Barat	3,37	0,20	5,80	2,99	3,76	0,68	721
Maluku	5,37	0,18	3,26	5,03	5,72	0,75	1 210
Maluku Utara	4,24	0,17	4,10	3,90	4,59	0,48	892
Papua Barat	4,94	0,32	6,55	4,30	5,57	0,56	562
Papua	3,21	0,21	6,62	2,79	3,62	0,94	854
Indonesia	3,51	0,02	0,70	3,46	3,55	2,79	59 609

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel D.3 Sampling error Rata-rata Lama Sekolah dari Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Laki-laki

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	6,08	0,14	2,25	5,81	6,35	0,76	1 479
Sumatera Utara	7,10	0,14	1,99	6,83	7,38	2,39	2 526
Sumatera Barat	6,19	0,13	2,17	5,93	6,46	1,03	1 744
Riau	5,70	0,20	3,56	5,31	6,10	1,75	887
Jambi	5,55	0,17	3,08	5,22	5,89	0,90	907
Sumatera Selatan	5,71	0,16	2,71	5,41	6,02	1,96	1 469
Bengkulu	5,43	0,18	3,41	5,07	5,79	0,59	735
Lampung	5,07	0,11	2,24	4,85	5,29	1,51	1 606
Kep Bangka Belitung	5,55	0,22	3,92	5,13	5,98	0,68	522
Kepulauan Riau	6,97	0,41	5,83	6,17	7,76	1,67	422
DKI Jakarta	9,89	0,21	2,15	9,47	10,31	3,36	802
Jawa Barat	5,91	0,09	1,53	5,73	6,08	4,17	3 947
Jawa Tengah	5,08	0,06	1,26	4,95	5,21	2,24	5 911
DI Yogyakarta	6,19	0,18	2,84	5,85	6,54	2,20	847
Jawa Timur	4,67	0,06	1,23	4,56	4,78	2,75	6 299
Banten	6,36	0,23	3,60	5,91	6,80	3,30	879
Bali	5,40	0,16	2,96	5,09	5,71	1,23	1 297
Nusa Tenggara Barat	3,74	0,18	4,91	3,38	4,10	1,52	874
Nusa Tenggara Timur	4,89	0,13	2,65	4,63	5,14	0,82	2 157
Kalimantan Barat	4,36	0,16	3,72	4,04	4,68	1,17	1 306
Kalimantan Tengah	5,94	0,19	3,17	5,57	6,31	0,69	817
Kalimantan Selatan	6,09	0,19	3,10	5,72	6,46	1,16	858
Kalimantan Timur	7,18	0,21	2,91	6,77	7,59	1,20	655
Kalimantan Utara	5,65	0,41	7,22	4,85	6,45	0,69	261
Sulawesi Utara	6,93	0,15	2,12	6,64	7,22	0,65	1 550
Sulawesi Tengah	6,07	0,18	2,90	5,72	6,41	0,86	948
Sulawesi Selatan	5,17	0,15	2,88	4,88	5,46	1,45	2 389
Sulawesi Tenggara	5,14	0,30	5,80	4,55	5,72	1,52	867
Gorontalo	5,16	0,28	5,49	4,61	5,72	0,82	395
Sulawesi Barat	4,59	0,25	5,45	4,10	5,08	0,56	431
Maluku	6,84	0,18	2,60	6,49	7,19	0,54	846
Maluku Utara	5,83	0,21	3,60	5,42	6,25	0,43	576
Papua Barat	6,63	0,27	4,09	6,10	7,16	0,38	447
Papua	4,50	0,22	4,90	4,07	4,94	0,94	718
Indonesia	5,58	0,03	0,52	5,52	5,64	2,37	48 374

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel D.4 Sampling error Rata-rata Lama Sekolah dari Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Perempuan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	4,15	0,13	3,07	3,90	4,40	0,90	1 852
Sumatera Utara	5,19	0,12	2,28	4,96	5,43	2,01	3 376
Sumatera Barat	5,19	0,13	2,59	4,93	5,46	1,21	2 271
Riau	4,00	0,18	4,61	3,64	4,36	1,62	903
Jambi	3,43	0,17	4,84	3,11	3,76	1,04	972
Sumatera Selatan	4,10	0,14	3,30	3,84	4,37	1,93	1 598
Bengkulu	3,50	0,17	4,76	3,17	3,83	0,58	760
Lampung	3,53	0,11	3,21	3,31	3,75	1,70	1 543
Kep Bangka Belitung	3,88	0,18	4,70	3,53	4,24	0,63	541
Kepulauan Riau	4,48	0,27	6,12	3,95	5,02	1,06	424
DKI Jakarta	7,99	0,20	2,53	7,60	8,39	2,93	816
Jawa Barat	4,33	0,09	2,02	4,16	4,50	4,88	4 003
Jawa Tengah	2,97	0,05	1,80	2,86	3,07	2,39	6 513
DI Yogyakarta	4,37	0,16	3,59	4,06	4,68	2,00	997
Jawa Timur	3,01	0,05	1,81	2,90	3,11	3,28	7 264
Banten	3,85	0,20	5,21	3,45	4,24	3,39	879
Bali	2,89	0,14	4,71	2,62	3,15	1,52	1 436
Nusa Tenggara Barat	1,77	0,15	8,27	1,48	2,05	2,12	924
Nusa Tenggara Timur	3,11	0,10	3,26	2,91	3,31	0,85	2 352
Kalimantan Barat	2,42	0,12	4,89	2,19	2,66	1,03	1 264
Kalimantan Tengah	4,46	0,19	4,32	4,08	4,84	0,78	800
Kalimantan Selatan	3,63	0,15	4,18	3,34	3,93	1,06	1 054
Kalimantan Timur	4,73	0,24	5,13	4,25	5,20	1,53	530
Kalimantan Utara	3,57	0,36	10,08	2,86	4,27	0,68	237
Sulawesi Utara	6,27	0,14	2,21	6,00	6,54	0,69	1 728
Sulawesi Tengah	4,44	0,17	3,73	4,12	4,77	1,00	911
Sulawesi Selatan	3,46	0,10	3,01	3,26	3,67	1,37	3 227
Sulawesi Tenggara	3,03	0,21	7,07	2,61	3,45	1,26	992
Gorontalo	5,29	0,23	4,40	4,83	5,75	0,73	460
Sulawesi Barat	3,37	0,23	6,78	2,92	3,82	0,75	476
Maluku	5,57	0,19	3,34	5,20	5,93	0,70	917
Maluku Utara	3,96	0,20	4,95	3,58	4,34	0,48	570
Papua Barat	5,34	0,38	7,15	4,59	6,09	0,63	421
Papua	3,71	0,24	6,41	3,24	4,17	0,90	497
Indonesia	3,77	0,03	0,71	3,72	3,82	2,62	53 508

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel D.5 Sampling error Rata-rata Lama Sekolah dari Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Laki-laki + Perempuan di Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	5,04	0,11	2,17	4,82	5,25	1,09	3 331
Sumatera Utara	6,06	0,11	1,85	5,84	6,28	3,14	5 902
Sumatera Barat	5,65	0,12	2,08	5,42	5,88	1,67	4 015
Riau	4,86	0,16	3,36	4,54	5,18	2,30	1 790
Jambi	4,50	0,14	3,11	4,23	4,78	1,24	1 879
Sumatera Selatan	4,89	0,13	2,60	4,64	5,13	2,86	3 067
Bengkulu	4,47	0,15	3,42	4,17	4,77	0,83	1 495
Lampung	4,31	0,09	2,18	4,13	4,49	2,09	3 149
Kep Bangka Belitung	4,71	0,17	3,57	4,38	5,04	0,88	1 063
Kepulauan Riau	5,73	0,30	5,16	5,15	6,31	1,88	846
DKI Jakarta	8,91	0,17	1,90	8,58	9,24	4,02	1 618
Jawa Barat	5,10	0,08	1,51	4,95	5,25	6,49	7 950
Jawa Tengah	3,96	0,05	1,25	3,86	4,05	3,04	12 424
DI Yogyakarta	5,20	0,14	2,61	4,94	5,47	2,67	1 844
Jawa Timur	3,77	0,05	1,26	3,68	3,87	4,09	13 563
Banten	5,09	0,19	3,64	4,73	5,45	4,64	1 758
Bali	4,07	0,13	3,13	3,82	4,31	1,85	2 733
Nusa Tenggara Barat	2,70	0,14	5,16	2,42	2,97	2,34	1 798
Nusa Tenggara Timur	3,95	0,09	2,37	3,77	4,14	1,05	4 509
Kalimantan Barat	3,39	0,12	3,53	3,16	3,63	1,49	2 570
Kalimantan Tengah	5,23	0,16	2,99	4,92	5,53	0,95	1 617
Kalimantan Selatan	4,79	0,14	2,95	4,51	5,07	1,42	1 912
Kalimantan Timur	6,05	0,17	2,81	5,72	6,38	1,41	1 185
Kalimantan Utara	4,70	0,32	6,87	4,07	5,34	0,89	498
Sulawesi Utara	6,58	0,12	1,77	6,35	6,81	0,89	3 278
Sulawesi Tengah	5,25	0,14	2,65	4,98	5,53	1,18	1 859
Sulawesi Selatan	4,21	0,10	2,46	4,01	4,41	1,90	5 616
Sulawesi Tenggara	4,03	0,23	5,74	3,58	4,49	2,17	1 859
Gorontalo	5,23	0,19	3,71	4,85	5,61	0,89	855
Sulawesi Barat	3,94	0,19	4,76	3,57	4,31	0,78	907
Maluku	6,18	0,15	2,46	5,88	6,48	0,84	1 763
Maluku Utara	4,91	0,17	3,42	4,58	5,24	0,58	1 146
Papua Barat	6,04	0,25	4,14	5,55	6,53	0,58	868
Papua	4,17	0,18	4,27	3,82	4,52	1,10	1 215
Indonesia	4,63	0,02	0,51	4,58	4,67	3,47	101 882

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel E.1 Sampling error Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Perkotaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	31,28	2,43	7,75	26,53	36,04	1,32	941
Sumatera Utara	22,35	1,25	5,60	19,90	24,81	2,38	2 647
Sumatera Barat	24,12	1,77	7,32	20,65	27,58	1,65	1 493
Riau	25,51	2,36	9,26	20,88	30,14	1,99	662
Jambi	15,30	2,05	13,41	11,27	19,32	1,28	548
Sumatera Selatan	22,30	2,25	10,09	17,89	26,71	3,28	971
Bengkulu	30,90	3,28	10,60	24,48	37,33	0,93	399
Lampung	22,09	2,15	9,72	17,88	26,30	2,40	830
Kep Bangka Belitung	18,70	2,17	11,60	14,45	22,95	0,88	590
Kepulauan Riau	17,95	2,59	14,45	12,87	23,04	1,57	594
DKI Jakarta	20,76	1,49	7,20	17,83	23,68	5,08	1 618
Jawa Barat	28,38	0,94	3,30	26,54	30,22	6,05	4 867
Jawa Tengah	24,55	0,81	3,31	22,96	26,15	3,69	6 023
DI Yogyakarta	19,64	1,43	7,27	16,84	22,44	2,14	1 096
Jawa Timur	23,76	0,77	3,26	22,25	25,28	3,84	6 395
Banten	26,18	2,21	8,43	21,85	30,51	5,86	1 109
Bali	20,92	1,41	6,75	18,15	23,69	1,59	1 427
Nusa Tenggara Barat	29,97	2,61	8,71	24,85	35,08	2,90	775
Nusa Tenggara Timur	26,50	3,15	11,88	20,33	32,67	2,05	610
Kalimantan Barat	25,05	2,30	9,18	20,54	29,55	1,73	835
Kalimantan Tengah	26,97	3,07	11,40	20,94	33,00	1,23	525
Kalimantan Selatan	24,84	2,28	9,16	20,38	29,30	1,70	752
Kalimantan Timur	19,34	1,88	9,74	15,64	23,03	1,49	698
Kalimantan Utara	18,45	2,74	14,85	13,08	23,83	0,56	230
Sulawesi Utara	25,21	1,63	6,46	22,02	28,40	0,83	1 275
Sulawesi Tengah	27,79	3,44	12,36	21,06	34,52	1,61	359
Sulawesi Selatan	23,98	1,65	6,88	20,75	27,21	2,12	1 595
Sulawesi Tenggara	32,75	4,15	12,68	24,61	40,89	2,15	452
Gorontalo	31,17	3,63	11,64	24,06	38,28	1,00	297
Sulawesi Barat	26,46	6,25	23,61	14,21	38,70	1,98	186
Maluku	11,63	2,21	19,01	7,29	15,96	1,16	553
Maluku Utara	30,63	3,66	11,94	23,46	37,79	0,60	254
Papua Barat	25,10	4,16	16,59	16,94	33,26	0,70	306
Papua	22,93	2,96	12,90	17,13	28,73	1,01	361
Indonesia	24,74	0,35	1,43	24,05	25,43	3,39	42 273

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel E.2 Sampling error Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel	Perdesaan
				Batas Atas	Batas Bawah			
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
Aceh	37,81	1,55	4,11	34,77	40,86	0,92	2 390	
Sumatera Utara	28,25	1,24	4,40	25,82	30,68	1,42	3 255	
Sumatera Barat	26,11	1,20	4,58	23,77	28,46	0,81	2 522	
Riau	30,00	2,04	6,79	26,01	33,99	1,51	1 128	
Jambi	26,85	1,67	6,21	23,58	30,12	0,85	1 331	
Sumatera Selatan	26,34	1,30	4,95	23,78	28,89	1,25	2 096	
Bengkulu	26,48	1,70	6,40	23,16	29,80	0,51	1 096	
Lampung	30,30	1,48	4,87	27,40	33,19	1,91	2 319	
Kep Bangka Belitung	27,84	2,68	9,63	22,58	33,09	0,61	473	
Kepulauan Riau	28,38	5,88	20,72	16,85	39,91	1,33	252	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	32,00	1,25	3,90	29,55	34,45	3,60	3 083	
Jawa Tengah	25,95	0,78	3,01	24,42	27,48	2,59	6 401	
DI Yogyakarta	27,54	3,08	11,20	21,49	33,58	3,45	748	
Jawa Timur	26,29	0,77	2,94	24,77	27,80	2,80	7 168	
Banten	33,75	2,52	7,45	28,82	38,68	2,63	649	
Bali	33,59	2,18	6,48	29,32	37,85	1,54	1 306	
Nusa Tenggara Barat	31,94	2,47	7,72	27,11	36,78	2,27	1 023	
Nusa Tenggara Timur	33,31	1,21	3,65	30,92	35,69	0,80	3 899	
Kalimantan Barat	34,21	1,72	5,04	30,84	37,59	1,13	1 735	
Kalimantan Tengah	29,24	2,22	7,58	24,90	33,58	0,81	1 092	
Kalimantan Selatan	26,49	1,72	6,51	23,11	29,86	0,91	1 160	
Kalimantan Timur	23,98	2,99	12,47	18,12	29,84	1,28	487	
Kalimantan Utara	37,95	3,69	9,73	30,71	45,19	0,38	268	
Sulawesi Utara	29,49	1,67	5,68	26,21	32,77	0,68	2 003	
Sulawesi Tengah	37,70	1,90	5,04	33,98	41,43	0,96	1 500	
Sulawesi Selatan	27,07	1,03	3,82	25,05	29,10	1,03	4 021	
Sulawesi Tenggara	34,98	1,89	5,41	31,27	38,69	0,70	1 407	
Gorontalo	33,59	2,86	8,51	27,99	39,20	0,74	558	
Sulawesi Barat	26,32	2,16	8,19	22,10	30,55	0,58	721	
Maluku	26,20	2,49	9,52	21,31	31,09	0,85	1 210	
Maluku Utara	29,05	2,30	7,91	24,54	33,55	0,49	892	
Papua Barat	26,23	3,09	11,77	20,18	32,28	0,45	562	
Papua	25,80	2,60	10,07	20,71	30,89	0,78	854	
Indonesia	28,66	0,32	1,12	28,04	29,29	2,58	59 609	

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel E.3 Sampling error Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Laki-laki

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	35,56	1,70	4,77	32,24	38,89	0,86	1 479
Sumatera Utara	25,85	1,26	4,89	23,37	28,32	1,70	2 526
Sumatera Barat	26,38	1,37	5,18	23,70	29,05	0,93	1 744
Riau	26,91	1,98	7,36	23,03	30,80	1,51	887
Jambi	23,98	1,74	7,24	20,58	27,38	0,88	907
Sumatera Selatan	24,25	1,49	6,15	21,33	27,17	1,57	1 469
Bengkulu	26,11	1,88	7,19	22,43	29,79	0,53	735
Lampung	26,35	1,49	5,64	23,43	29,26	1,73	1 606
Kep Bangka Belitung	22,51	2,23	9,92	18,13	26,88	0,63	522
Kepulauan Riau	18,50	3,27	17,69	12,09	24,92	1,37	422
DKI Jakarta	18,61	1,80	9,68	15,08	22,14	3,28	802
Jawa Barat	30,22	0,96	3,17	28,35	32,10	3,77	3 947
Jawa Tengah	25,84	0,73	2,84	24,40	27,28	2,44	5 911
DI Yogyakarta	21,99	1,87	8,48	18,33	25,65	2,10	847
Jawa Timur	26,15	0,73	2,79	24,72	27,57	2,64	6 299
Banten	28,37	2,12	7,48	24,21	32,54	3,39	879
Bali	26,49	1,66	6,28	23,23	29,75	1,33	1 297
Nusa Tenggara Barat	31,95	2,31	7,24	27,42	36,48	2,01	874
Nusa Tenggara Timur	31,19	1,33	4,26	28,59	33,80	0,70	2 157
Kalimantan Barat	30,20	1,62	5,37	27,03	33,38	0,97	1 306
Kalimantan Tengah	30,07	2,25	7,47	25,67	34,48	0,78	817
Kalimantan Selatan	26,09	1,88	7,20	22,41	29,77	1,07	858
Kalimantan Timur	21,13	2,21	10,47	16,80	25,47	1,38	655
Kalimantan Utara	29,76	3,55	11,93	22,80	36,72	0,57	261
Sulawesi Utara	28,65	1,46	5,09	25,79	31,51	0,55	1 550
Sulawesi Tengah	35,64	2,11	5,93	31,50	39,78	0,96	948
Sulawesi Selatan	26,88	1,21	4,52	24,50	29,26	1,15	2 389
Sulawesi Tenggara	32,83	2,22	6,75	28,48	37,17	0,81	867
Gorontalo	32,54	3,08	9,46	26,50	38,57	0,76	395
Sulawesi Barat	29,10	2,71	9,30	23,79	34,41	0,62	431
Maluku	19,83	2,19	11,06	15,53	24,13	0,77	846
Maluku Utara	30,79	2,40	7,78	26,10	35,49	0,42	576
Papua Barat	24,14	3,05	12,63	18,16	30,11	0,48	447
Papua	25,22	2,35	9,32	20,61	29,82	0,74	718
Indonesia	27,03	0,31	1,14	26,43	27,64	2,34	48 374

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel E.4 Sampling error Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel	Perempuan
				Batas Atas	Batas Bawah			(8)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	36,41	1,63	4,47	33,22	39,59	0,91	1 852	
Sumatera Utara	24,87	1,05	4,20	22,82	26,92	1,42	3 376	
Sumatera Barat	24,50	1,23	5,03	22,08	26,92	0,96	2 271	
Riau	29,68	1,96	6,59	25,84	33,51	1,34	903	
Jambi	22,44	1,67	7,43	19,17	25,71	0,83	972	
Sumatera Selatan	25,51	1,45	5,70	22,66	28,36	1,51	1 598	
Bengkulu	29,27	2,10	7,17	25,15	33,38	0,61	760	
Lampung	30,16	1,55	5,14	27,12	33,19	1,67	1 543	
Kep Bangka Belitung	23,28	2,24	9,63	18,89	27,68	0,63	541	
Kepulauan Riau	22,54	3,66	16,25	15,36	29,72	1,46	424	
DKI Jakarta	22,77	1,93	8,46	18,99	26,54	3,42	816	
Jawa Barat	29,03	0,95	3,28	27,17	30,90	4,02	4 003	
Jawa Tengah	24,82	0,68	2,73	23,49	26,14	2,42	6 513	
DI Yogyakarta	23,25	1,73	7,44	19,86	26,64	2,06	997	
Jawa Timur	24,19	0,67	2,75	22,89	25,50	2,68	7 264	
Banten	29,49	2,07	7,03	25,43	33,55	3,19	879	
Bali	26,50	1,48	5,60	23,60	29,41	1,18	1 436	
Nusa Tenggara Barat	30,31	2,21	7,28	25,98	34,64	2,10	924	
Nusa Tenggara Timur	32,76	1,45	4,42	29,92	35,60	0,89	2 352	
Kalimantan Barat	32,11	1,82	5,66	28,55	35,67	1,17	1 264	
Kalimantan Tengah	26,71	2,28	8,53	22,25	31,18	0,79	800	
Kalimantan Selatan	25,54	1,71	6,68	22,20	28,88	1,00	1 054	
Kalimantan Timur	20,89	2,21	10,59	16,55	25,23	1,18	530	
Kalimantan Utara	24,44	3,15	12,88	18,27	30,61	0,42	237	
Sulawesi Utara	26,58	1,51	5,67	23,63	29,53	0,67	1 728	
Sulawesi Tengah	35,12	1,92	5,47	31,36	38,89	0,80	911	
Sulawesi Selatan	25,33	1,05	4,14	23,27	27,39	1,13	3 227	
Sulawesi Tenggara	35,65	2,51	7,05	30,73	40,58	1,10	992	
Gorontalo	32,87	2,84	8,66	27,29	38,44	0,74	460	
Sulawesi Barat	23,95	2,63	10,96	18,80	29,09	0,75	476	
Maluku	21,11	2,10	9,97	16,99	25,23	0,71	917	
Maluku Utara	28,09	2,43	8,65	23,33	32,86	0,44	570	
Papua Barat	27,82	3,56	12,80	20,84	34,79	0,50	421	
Papua	23,94	2,58	10,76	18,89	28,99	0,67	497	
Indonesia	26,43	0,29	1,11	25,85	27,01	2,38	53 508	

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel E.5 Sampling error Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Laki-laki + Perempuan di Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	36,02	1,31	3,64	33,45	38,58	1,10	3 331
Sumatera Utara	25,32	0,89	3,50	23,58	27,05	1,86	5 902
Sumatera Barat	25,35	1,00	3,94	23,39	27,31	1,13	4 015
Riau	28,28	1,54	5,46	25,25	31,30	1,75	1 790
Jambi	23,22	1,34	5,76	20,59	25,84	1,06	1 879
Sumatera Selatan	24,90	1,16	4,68	22,62	27,18	1,93	3 067
Bengkulu	27,68	1,53	5,53	24,68	30,68	0,67	1 495
Lampung	28,22	1,24	4,40	25,79	30,66	2,28	3 149
Kep Bangka Belitung	22,90	1,72	7,52	19,52	26,27	0,75	1 063
Kepulauan Riau	20,51	2,47	12,06	15,67	25,36	1,44	846
DKI Jakarta	20,76	1,49	7,20	17,83	23,68	4,29	1 618
Jawa Barat	29,61	0,75	2,54	28,14	31,08	4,83	7 950
Jawa Tengah	25,29	0,56	2,23	24,19	26,40	3,11	12 424
DI Yogyakarta	22,68	1,48	6,55	19,77	25,59	2,85	1 844
Jawa Timur	25,10	0,55	2,19	24,02	26,17	3,32	13 563
Banten	28,94	1,68	5,79	25,65	32,22	4,21	1 758
Bali	26,50	1,28	4,82	23,99	29,00	1,67	2 733
Nusa Tenggara Barat	31,08	1,80	5,78	27,56	34,61	2,61	1 798
Nusa Tenggara Timur	32,02	1,16	3,62	29,75	34,29	1,11	4 509
Kalimantan Barat	31,16	1,39	4,48	28,42	33,89	1,41	2 570
Kalimantan Tengah	28,46	1,80	6,32	24,93	31,98	0,99	1 617
Kalimantan Selatan	25,80	1,38	5,36	23,09	28,51	1,24	1 912
Kalimantan Timur	21,02	1,61	7,66	17,87	24,18	1,36	1 185
Kalimantan Utara	27,34	2,39	8,76	22,65	32,03	0,50	498
Sulawesi Utara	27,56	1,18	4,28	25,25	29,87	0,77	3 278
Sulawesi Tengah	35,38	1,67	4,73	32,10	38,66	1,21	1 859
Sulawesi Selatan	26,01	0,88	3,39	24,28	27,74	1,41	5 616
Sulawesi Tenggara	34,31	1,80	5,24	30,78	37,83	1,10	1 859
Gorontalo	32,71	2,25	6,87	28,31	37,12	0,87	855
Sulawesi Barat	26,35	2,18	8,26	22,09	30,62	0,92	907
Maluku	20,49	1,79	8,75	16,98	24,01	1,03	1 763
Maluku Utara	29,46	1,95	6,62	25,63	33,28	0,57	1 146
Papua Barat	25,82	2,48	9,61	20,95	30,68	0,56	868
Papua	24,68	1,96	7,95	20,83	28,53	0,91	1 215
Indonesia	26,72	0,24	0,89	26,25	27,18	2,96	101 882

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel F.1 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Provinsi, 2017

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel	Perkotaan
				Batas Atas	Batas Bawah			(5)
				(6)	(7)			(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Aceh	38,73	1,86	4,80	35,15	42,43	0,43	895	
Sumatera Utara	40,37	1,72	4,26	37,05	43,77	1,96	1 825	
Sumatera Barat	42,94	1,94	4,51	39,19	46,77	0,95	1 182	
Riau	30,39	2,72	8,95	25,34	35,97	1,42	576	
Jambi	33,34	2,66	7,97	28,35	38,73	0,73	514	
Sumatera Selatan	35,39	2,43	6,85	30,79	40,27	1,72	883	
Bengkulu	40,94	4,02	9,83	33,34	48,99	0,80	311	
Lampung	39,08	2,23	5,71	34,80	43,53	1,15	773	
Kep Bangka Belitung	33,71	2,50	7,43	28,99	38,78	0,49	439	
Kepulauan Riau	31,54	3,71	11,76	24,75	39,21	1,27	347	
DKI Jakarta	27,41	1,61	5,86	24,37	30,67	2,77	1 092	
Jawa Barat	39,84	1,17	2,94	37,57	42,15	4,69	3 250	
Jawa Tengah	44,39	1,14	2,57	42,17	46,63	3,12	4 213	
DI Yogyakarta	55,77	2,42	4,34	50,99	60,45	2,31	700	
Jawa Timur	46,45	0,98	2,11	44,53	48,37	2,61	4 645	
Banten	35,20	1,94	5,52	31,49	39,10	2,29	819	
Bali	50,90	1,85	3,63	47,28	54,52	1,08	971	
Nusa Tenggara Barat	45,29	2,94	6,48	39,62	51,08	1,86	532	
Nusa Tenggara Timur	31,80	2,72	8,56	26,72	37,36	0,81	617	
Kalimantan Barat	32,80	2,32	7,08	28,42	37,50	0,88	672	
Kalimantan Tengah	37,79	3,32	8,78	31,54	44,47	0,76	431	
Kalimantan Selatan	36,98	3,44	9,31	30,52	43,93	1,88	589	
Kalimantan Timur	32,84	2,82	8,60	27,56	38,59	1,46	498	
Kalimantan Utara	35,95	6,03	16,77	25,15	48,40	0,93	100	
Sulawesi Utara	38,97	1,80	4,63	35,50	42,56	0,50	890	
Sulawesi Tengah	44,79	3,44	7,69	38,17	51,60	0,86	358	
Sulawesi Selatan	31,80	1,68	5,29	28,60	35,18	1,11	1 412	
Sulawesi Tenggara	34,19	2,72	7,96	29,07	39,70	0,48	411	
Gorontalo	44,45	4,31	9,70	36,24	52,98	0,79	179	
Sulawesi Barat	39,74	4,09	10,29	32,06	47,96	0,37	149	
Maluku	31,22	3,52	11,28	24,76	38,50	0,79	427	
Maluku Utara	34,12	4,72	13,84	25,55	43,89	0,49	232	
Papua Barat	34,61	4,38	12,66	26,59	43,62	0,42	193	
Papua	31,68	3,54	11,19	25,17	38,99	0,79	319	
Indonesia	40,93	0,44	1,08	40,07	41,81	2,87	31 444	

Sumber: BPS, Sakernas 2017



Tabel F.2 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Provinsi, 2017

Perdesaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	43,40	1,69	3,89	40,12	46,73	0,82	1 474
Sumatera Utara	57,00	1,45	2,55	54,14	59,83	1,25	2 191
Sumatera Barat	51,40	1,63	3,16	48,21	54,57	0,87	1 628
Riau	50,39	2,21	4,38	46,07	54,71	1,21	720
Jambi	55,51	2,14	3,86	51,29	59,66	0,92	747
Sumatera Selatan	58,77	1,80	3,07	55,20	62,25	1,55	1 281
Bengkulu	61,17	2,49	4,07	56,19	65,92	0,70	687
Lampung	54,94	1,65	3,01	51,68	58,16	1,59	1 354
Kep Bangka Belitung	53,57	3,00	5,61	47,66	59,39	0,49	297
Kepulauan Riau	51,25	3,47	6,76	44,48	57,98	0,27	242
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	51,43	1,41	2,75	48,66	54,20	2,92	2 069
Jawa Tengah	56,87	0,99	1,75	54,92	58,81	2,58	3 941
DI Yogyakarta	69,45	2,16	3,11	65,06	73,52	1,29	652
Jawa Timur	60,00	0,88	1,47	58,27	61,71	2,33	4 558
Banten	40,15	2,74	6,82	34,92	45,62	2,39	468
Bali	62,45	2,15	3,44	58,15	66,56	1,05	931
Nusa Tenggara Barat	54,27	2,44	4,50	49,45	59,00	1,57	660
Nusa Tenggara Timur	58,82	1,32	2,25	56,20	61,39	0,70	2 271
Kalimantan Barat	51,10	2,12	4,15	46,94	55,24	1,23	1 021
Kalimantan Tengah	51,61	2,54	4,92	46,64	56,55	0,69	782
Kalimantan Selatan	58,45	2,45	4,19	53,59	63,16	1,09	703
Kalimantan Timur	52,08	3,56	6,83	45,11	58,97	1,06	375
Kalimantan Utara	50,88	4,29	8,44	42,52	59,20	0,32	178
Sulawesi Utara	45,87	1,54	3,37	42,87	48,91	0,36	1 254
Sulawesi Tengah	54,19	2,04	3,77	50,16	58,15	0,81	834
Sulawesi Selatan	45,07	1,19	2,65	42,74	47,42	0,83	2 432
Sulawesi Tenggara	53,98	2,28	4,22	49,49	58,40	0,71	741
Gorontalo	51,57	2,80	5,43	46,09	57,02	0,44	385
Sulawesi Barat	50,39	3,09	6,14	44,35	56,41	0,80	405
Maluku	49,43	2,58	5,21	44,40	54,47	0,53	715
Maluku Utara	50,43	2,67	5,29	45,22	55,63	0,44	508
Papua Barat	59,67	3,63	6,08	52,41	66,53	0,38	356
Papua	62,99	2,93	4,65	57,08	68,53	0,66	644
Indonesia	55,34	0,37	0,67	54,61	56,07	1,87	37 504

Sumber: BPS, Sakernas 2017



Tabel F.3 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Provinsi, 2017

Laki-laki

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	60,18	1,78	2,95	56,65	63,60	0,61	1 096
Sumatera Utara	60,82	1,62	2,66	57,60	63,94	1,56	1 707
Sumatera Barat	64,86	1,62	2,50	61,61	67,97	0,75	1 239
Riau	59,15	2,45	4,15	54,26	63,86	1,30	633
Jambi	63,81	2,21	3,47	59,37	68,02	0,76	618
Sumatera Selatan	65,89	1,99	3,02	61,89	69,68	1,55	1 080
Bengkulu	67,78	2,66	3,92	62,37	72,75	0,64	476
Lampung	67,93	1,66	2,45	64,59	71,10	1,27	1 083
Kep Bangka Belitung	57,57	2,52	4,38	52,56	62,42	0,43	386
Kepulauan Riau	51,74	4,86	9,39	42,27	61,09	1,28	302
DKI Jakarta	37,68	2,42	6,42	33,07	42,53	2,58	532
Jawa Barat	60,48	1,20	1,99	58,10	62,81	3,51	2 646
Jawa Tengah	65,56	0,85	1,30	63,88	67,21	1,86	3 985
DI Yogyakarta	72,22	2,14	2,96	67,84	76,21	1,62	630
Jawa Timur	69,34	0,84	1,21	67,67	70,96	2,17	4 364
Banten	53,54	2,28	4,25	49,07	57,97	2,26	669
Bali	65,25	1,81	2,77	61,62	68,71	0,89	860
Nusa Tenggara Barat	63,26	2,55	4,03	58,13	68,10	1,56	553
Nusa Tenggara Timur	65,94	1,49	2,26	62,97	68,80	0,57	1 415
Kalimantan Barat	61,36	1,93	3,14	57,52	65,06	0,83	856
Kalimantan Tengah	60,43	2,52	4,17	55,40	65,25	0,60	627
Kalimantan Selatan	66,03	2,34	3,54	61,31	70,46	0,93	593
Kalimantan Timur	53,38	3,01	5,64	47,46	59,21	1,21	486
Kalimantan Utara	59,40	6,00	10,11	47,32	70,44	0,87	158
Sulawesi Utara	62,39	1,69	2,71	59,03	65,64	0,42	1 008
Sulawesi Tengah	70,39	2,15	3,06	66,01	74,43	0,74	573
Sulawesi Selatan	60,37	1,45	2,41	57,49	63,18	0,89	1 673
Sulawesi Tenggara	61,74	2,54	4,12	56,65	66,59	0,64	544
Gorontalo	65,10	3,08	4,72	58,85	70,86	0,48	261
Sulawesi Barat	65,64	3,41	5,19	58,69	71,98	0,63	258
Maluku	53,98	2,78	5,15	48,50	59,36	0,52	578
Maluku Utara	61,47	3,20	5,21	55,03	67,53	0,46	381
Papua Barat	59,97	3,46	5,77	53,04	66,52	0,34	280
Papua	57,39	3,14	5,46	51,16	63,39	0,73	541
Indonesia	63,29	0,37	0,59	62,55	64,02	1,96	33 091

Sumber: BPS, Sakernas 2017



Tabel F.4 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Provinsi, 2017

Perempuan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	26,18	1,50	5,74	23,35	29,23	0,62	1 273
Sumatera Utara	37,36	1,42	3,80	34,62	40,18	1,40	2 309
Sumatera Barat	33,74	1,48	4,37	30,92	36,69	0,77	1 571
Riau	25,27	2,08	8,21	21,42	29,55	1,15	663
Jambi	33,61	2,11	6,27	29,61	37,85	0,73	643
Sumatera Selatan	35,64	1,96	5,51	31,89	39,58	1,59	1 084
Bengkulu	41,73	2,52	6,04	36,89	46,74	0,50	522
Lampung	33,03	1,80	5,45	29,60	36,64	1,45	1 044
Kep Bangka Belitung	25,25	2,56	10,14	20,57	30,59	0,51	350
Kepulauan Riau	18,07	3,08	17,04	12,80	24,90	0,77	287
DKI Jakarta	17,68	1,72	9,71	14,56	21,30	2,22	560
Jawa Barat	26,97	1,11	4,11	24,85	29,19	3,78	2 673
Jawa Tengah	37,71	1,13	3,00	35,52	39,95	3,55	4 169
DI Yogyakarta	51,47	2,27	4,41	47,02	55,90	1,75	722
Jawa Timur	39,43	0,83	2,11	37,81	41,07	2,16	4 839
Banten	20,00	1,84	9,19	16,63	23,84	2,24	618
Bali	47,20	1,74	3,69	43,80	50,62	0,87	1 042
Nusa Tenggara Barat	38,67	2,54	6,57	33,83	43,75	1,71	639
Nusa Tenggara Timur	42,13	1,60	3,79	39,03	45,29	0,66	1 473
Kalimantan Barat	27,79	1,91	6,86	24,21	31,68	0,94	837
Kalimantan Tengah	30,90	2,33	7,53	26,53	35,64	0,52	586
Kalimantan Selatan	33,30	2,92	8,77	27,84	39,25	1,65	699
Kalimantan Timur	22,85	2,60	11,37	18,15	28,33	1,08	387
Kalimantan Utara	19,83	3,74	18,84	13,50	28,16	0,39	120
Sulawesi Utara	25,00	1,38	5,53	22,39	27,81	0,41	1 136
Sulawesi Tengah	32,66	2,19	6,71	28,52	37,09	0,72	619
Sulawesi Selatan	24,36	1,17	4,79	22,15	26,72	0,95	2 171
Sulawesi Tenggara	35,46	2,44	6,88	30,84	40,38	0,66	608
Gorontalo	34,00	3,25	9,57	27,94	40,64	0,62	303
Sulawesi Barat	33,05	3,22	9,76	27,06	39,64	0,65	296
Maluku	30,11	2,69	8,92	25,12	35,63	0,58	564
Maluku Utara	30,03	2,80	9,32	24,84	35,78	0,36	359
Papua Barat	35,54	3,88	10,93	28,34	43,45	0,35	269
Papua	38,51	3,65	9,47	31,65	45,86	0,74	422
Indonesia	33,79	0,38	1,13	33,04	34,54	2,31	35 857

Sumber: BPS, Sakernas 2017



Tabel F.5 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Provinsi, 2017

Laki-laki + Perempuan di Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	42,03	1,31	3,12	39,48	44,62	0,71	2 369
Sumatera Utara	48,28	1,18	2,45	45,97	50,61	1,71	4 016
Sumatera Barat	47,78	1,26	2,64	45,31	50,26	0,92	2 810
Riau	42,46	1,80	4,25	38,97	46,03	1,37	1 296
Jambi	48,53	1,74	3,59	45,12	51,95	0,88	1 261
Sumatera Selatan	50,22	1,63	3,25	47,03	53,41	1,95	2 164
Bengkulu	54,93	2,21	4,02	50,58	59,20	0,77	998
Lampung	50,55	1,38	2,74	47,84	53,26	1,52	2 127
Kep Bangka Belitung	42,35	2,02	4,78	38,44	46,36	0,52	736
Kepulauan Riau	35,85	3,15	8,78	29,95	42,23	1,10	589
DKI Jakarta	27,41	1,61	5,86	24,37	30,67	2,77	1 092
Jawa Barat	43,41	0,92	2,13	41,61	45,23	4,12	5 319
Jawa Tengah	50,86	0,75	1,47	49,40	52,32	2,75	8 154
DI Yogyakarta	60,91	1,71	2,81	57,50	64,21	1,92	1 352
Jawa Timur	53,46	0,67	1,25	52,14	54,77	2,52	9 203
Banten	36,96	1,60	4,34	33,88	40,16	2,37	1 287
Bali	55,55	1,41	2,54	52,76	58,30	1,07	1 902
Nusa Tenggara Barat	50,23	1,89	3,76	46,53	53,92	1,69	1 192
Nusa Tenggara Timur	53,50	1,22	2,28	51,11	55,88	0,72	2 888
Kalimantan Barat	44,75	1,63	3,64	41,59	47,96	1,12	1 693
Kalimantan Tengah	46,40	2,07	4,46	42,37	50,47	0,74	1 213
Kalimantan Selatan	48,69	2,36	4,85	44,08	53,32	1,81	1 292
Kalimantan Timur	39,38	2,31	5,88	34,95	44,00	1,38	873
Kalimantan Utara	42,32	4,20	9,91	34,37	50,68	0,74	278
Sulawesi Utara	42,47	1,19	2,80	40,16	44,81	0,43	2 144
Sulawesi Tengah	51,64	1,76	3,42	48,18	55,09	0,82	1 192
Sulawesi Selatan	40,14	1,01	2,51	38,18	42,13	0,97	3 844
Sulawesi Tenggara	48,01	1,87	3,90	44,36	51,68	0,68	1 152
Gorontalo	48,54	2,47	5,09	43,72	53,38	0,60	564
Sulawesi Barat	48,25	2,61	5,42	43,16	53,37	0,71	554
Maluku	42,01	2,17	5,17	37,83	46,32	0,65	1 142
Maluku Utara	46,45	2,41	5,18	41,78	51,19	0,47	740
Papua Barat	49,24	2,85	5,79	43,68	54,81	0,39	549
Papua	49,42	2,50	5,05	44,55	54,30	0,78	963
Indonesia	47,92	0,29	0,62	47,34	48,50	2,38	68 948

Sumber: BPS, Sakernas 2017



Tabel G.1 Sampling error Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal di Rumah Tangga Ekonomi Bawah menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Perkotaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	33,03	2,94	8,90	27,27	38,80	1,89	941
Sumatera Utara	36,33	1,94	5,33	32,53	40,12	4,28	2 647
Sumatera Barat	28,37	2,28	8,05	23,89	32,84	2,49	1 493
Riau	29,17	2,95	10,10	23,40	34,94	2,85	662
Jambi	39,21	3,36	8,57	32,62	45,80	1,86	548
Sumatera Selatan	39,29	2,80	7,11	33,81	44,76	3,68	971
Bengkulu	42,72	3,83	8,95	35,23	50,22	1,11	399
Lampung	45,28	3,25	7,18	38,90	51,65	3,82	830
Kep Bangka Belitung	10,72	1,93	18,05	6,92	14,51	1,12	590
Kepulauan Riau	22,88	3,87	16,93	15,29	30,47	2,92	594
DKI Jakarta	11,63	1,29	11,07	9,10	14,15	6,05	1 618
Jawa Barat	45,67	1,30	2,85	43,12	48,21	9,52	4 867
Jawa Tengah	57,87	1,01	1,74	55,89	59,85	4,30	6 023
DI Yogyakarta	53,34	2,44	4,57	48,56	58,11	3,95	1 096
Jawa Timur	53,18	1,19	2,24	50,85	55,51	6,60	6 395
Banten	31,54	2,75	8,72	26,15	36,94	8,15	1 109
Bali	36,69	2,45	6,68	31,89	41,49	3,41	1 427
Nusa Tenggara Barat	55,94	3,24	5,80	49,58	62,30	3,81	775
Nusa Tenggara Timur	44,14	3,85	8,72	36,59	51,68	2,42	610
Kalimantan Barat	34,39	2,93	8,51	28,65	40,13	2,33	835
Kalimantan Tengah	28,66	3,30	11,52	22,19	35,13	1,36	525
Kalimantan Selatan	25,85	2,48	9,59	20,99	30,70	1,97	752
Kalimantan Timur	12,98	1,93	14,86	9,20	16,76	2,16	698
Kalimantan Utara	10,59	2,55	24,11	5,58	15,59	0,77	230
Sulawesi Utara	33,85	2,74	8,10	28,48	39,22	1,98	1 275
Sulawesi Tengah	29,46	3,98	13,51	21,66	37,27	2,09	359
Sulawesi Selatan	39,33	2,39	6,07	34,65	44,01	3,39	1 595
Sulawesi Tenggara	46,83	7,69	16,42	31,75	61,90	6,52	452
Gorontalo	35,52	4,54	12,77	26,63	44,41	1,46	297
Sulawesi Barat	62,16	6,32	10,16	49,77	74,54	1,68	186
Maluku	32,42	3,01	9,29	26,52	38,32	1,01	553
Maluku Utara	28,69	4,69	16,35	19,49	37,88	1,02	254
Papua Barat	16,66	3,33	19,98	10,14	23,19	0,60	306
Papua	15,21	2,98	19,62	9,36	21,06	1,41	361
Indonesia	43,88	0,49	1,12	42,92	44,84	4,96	42 273

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel G.2 Sampling error Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal di Rumah Tangga Ekonomi Bawah menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel	Perdesaan
				Batas Atas	Batas Bawah			(5)
				(2)	(3)			(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Aceh	32,31	1,63	5,05	29,11	35,51	1,09	2 390	
Sumatera Utara	24,72	1,27	5,15	22,23	27,22	1,63	3 255	
Sumatera Barat	21,84	1,28	5,85	19,34	24,35	1,05	2 522	
Riau	17,10	1,74	10,16	13,70	20,51	1,63	1 128	
Jambi	31,96	2,09	6,55	27,86	36,06	1,21	1 331	
Sumatera Selatan	40,34	1,70	4,22	37,01	43,68	1,71	2 096	
Bengkulu	28,81	2,13	7,38	24,65	32,98	0,77	1 096	
Lampung	42,32	1,61	3,80	39,17	45,47	1,96	2 319	
Kep Bangka Belitung	3,46	1,20	34,66	1,11	5,81	0,73	473	
Kepulauan Riau	14,77	5,21	35,26	4,56	24,98	1,69	252	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	44,14	1,57	3,56	41,06	47,22	5,05	3 083	
Jawa Tengah	52,92	1,01	1,92	50,93	54,90	3,37	6 401	
DI Yogyakarta	55,01	3,29	5,98	48,56	61,46	3,16	748	
Jawa Timur	54,28	1,03	1,91	52,25	56,30	3,92	7 168	
Banten	33,77	3,05	9,02	27,80	39,74	3,86	649	
Bali	30,58	2,38	7,79	25,91	35,25	1,94	1 306	
Nusa Tenggara Barat	49,65	2,56	5,15	44,64	54,66	2,12	1 023	
Nusa Tenggara Timur	59,35	1,31	2,21	56,78	61,91	0,86	3 899	
Kalimantan Barat	36,76	1,91	5,19	33,02	40,50	1,34	1 735	
Kalimantan Tengah	20,00	2,28	11,42	15,52	24,47	1,11	1 092	
Kalimantan Selatan	27,99	2,02	7,21	24,03	31,94	1,21	1 160	
Kalimantan Timur	16,31	3,41	20,90	9,62	22,99	2,23	487	
Kalimantan Utara	11,92	2,94	24,62	6,17	17,68	0,54	268	
Sulawesi Utara	30,48	1,82	5,98	26,91	34,05	0,79	2 003	
Sulawesi Tengah	32,56	1,98	6,09	28,67	36,45	1,12	1 500	
Sulawesi Selatan	48,77	1,34	2,76	46,13	51,40	1,37	4 021	
Sulawesi Tenggara	43,12	2,17	5,04	38,87	47,38	0,85	1 407	
Gorontalo	44,82	3,81	8,50	37,35	52,29	1,18	558	
Sulawesi Barat	50,64	3,15	6,22	44,47	56,81	0,96	721	
Maluku	32,84	2,27	6,92	28,38	37,30	0,62	1 210	
Maluku Utara	29,26	2,65	9,06	24,07	34,46	0,65	892	
Papua Barat	33,69	4,31	12,79	25,25	42,14	0,76	562	
Papua	39,78	3,65	9,18	32,62	46,94	1,24	854	
Indonesia	44,30	0,41	0,92	43,50	45,10	3,44	59 609	

Keterangan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel G.3 Sampling error Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal di Rumah Tangga Ekonomi Bawah menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Laki-laki

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	35,73	1,87	5,23	32,07	39,39	1,04	1 479
Sumatera Utara	27,97	1,36	4,87	25,30	30,64	1,89	2 526
Sumatera Barat	23,62	1,40	5,93	20,87	26,36	1,05	1 744
Riau	19,01	1,80	9,45	15,48	22,53	1,59	887
Jambi	32,27	1,92	5,94	28,51	36,02	0,90	907
Sumatera Selatan	38,36	1,72	4,49	34,98	41,74	1,63	1 469
Bengkulu	31,66	2,18	6,88	27,39	35,92	0,63	735
Lampung	44,13	1,59	3,61	41,00	47,25	1,56	1 606
Kep Bangka Belitung	4,08	1,06	26,05	1,99	6,16	0,64	522
Kepulauan Riau	16,45	2,80	17,05	10,95	21,95	1,11	422
DKI Jakarta	5,85	1,11	19,03	3,67	8,04	3,45	802
Jawa Barat	39,42	1,10	2,80	37,25	41,58	4,44	3 947
Jawa Tengah	53,88	0,83	1,55	52,25	55,52	2,43	5 911
DI Yogyakarta	49,34	2,41	4,89	44,60	54,07	2,41	847
Jawa Timur	51,71	0,87	1,69	50,00	53,43	2,94	6 299
Banten	29,62	2,34	7,90	25,04	34,21	4,01	879
Bali	29,86	1,80	6,03	26,33	33,38	1,45	1 297
Nusa Tenggara Barat	52,08	2,51	4,82	47,16	57,01	2,06	874
Nusa Tenggara Timur	57,62	1,55	2,68	54,59	60,64	0,83	2 157
Kalimantan Barat	37,92	1,82	4,79	34,36	41,48	1,09	1 306
Kalimantan Tengah	22,49	2,24	9,96	18,10	26,88	0,93	817
Kalimantan Selatan	26,65	1,97	7,38	22,80	30,51	1,15	858
Kalimantan Timur	10,16	1,78	17,49	6,68	13,64	1,62	655
Kalimantan Utara	11,04	2,14	19,36	6,85	15,23	0,44	261
Sulawesi Utara	29,90	1,67	5,60	26,62	33,19	0,70	1 550
Sulawesi Tengah	37,78	2,18	5,78	33,50	42,06	1,00	948
Sulawesi Selatan	46,51	1,51	3,25	43,55	49,47	1,40	2 389
Sulawesi Tenggara	47,49	2,96	6,23	41,69	53,28	1,28	867
Gorontalo	39,29	3,19	8,11	33,04	45,53	0,75	395
Sulawesi Barat	55,60	3,03	5,46	49,66	61,55	0,65	431
Maluku	30,45	2,14	7,02	26,26	34,64	0,54	846
Maluku Utara	37,10	2,80	7,54	31,61	42,58	0,52	576
Papua Barat	25,42	3,44	13,54	18,67	32,16	0,59	447
Papua	32,17	2,64	8,20	26,99	37,34	0,81	718
Indonesia	41,68	0,36	0,86	40,97	42,38	2,55	48 374

Keterangan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel G.4 Sampling error Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal di Rumah Tangga Ekonomi Bawah menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel	Perempuan
				Batas Atas	Batas Bawah			(5)
				(1)	(2)			(6)
Aceh	37,37	1,56	4,17	34,32	40,43	0,82	1 852	
Sumatera Utara	30,89	1,25	4,06	28,43	33,35	1,79	3 376	
Sumatera Barat	26,23	1,33	5,08	23,62	28,84	1,07	2 271	
Riau	21,42	1,92	8,99	17,65	25,19	1,61	903	
Jambi	37,95	1,96	5,15	34,12	41,79	0,85	972	
Sumatera Selatan	43,30	1,70	3,92	39,98	46,63	1,59	1 598	
Bengkulu	40,02	2,16	5,40	35,79	44,26	0,55	760	
Lampung	47,35	1,75	3,70	43,92	50,78	1,80	1 543	
Kep Bangka Belitung	7,09	2,08	29,38	3,01	11,18	1,47	541	
Kepulauan Riau	18,27	3,10	16,95	12,20	24,34	1,22	424	
DKI Jakarta	4,32	0,96	22,19	2,44	6,20	3,61	816	
Jawa Barat	43,69	1,14	2,61	41,46	45,92	4,81	4 003	
Jawa Tengah	55,67	0,80	1,43	54,10	57,23	2,54	6 513	
DI Yogyakarta	53,95	2,11	3,90	49,82	58,08	2,19	997	
Jawa Timur	53,68	0,86	1,61	51,99	55,37	3,33	7 264	
Banten	32,62	2,30	7,04	28,12	37,12	3,71	879	
Bali	31,77	1,82	5,74	28,20	35,34	1,61	1 436	
Nusa Tenggara Barat	49,82	2,38	4,78	45,15	54,48	2,06	924	
Nusa Tenggara Timur	60,92	1,41	2,32	58,16	63,69	0,79	2 352	
Kalimantan Barat	40,57	1,79	4,42	37,06	44,09	1,03	1 264	
Kalimantan Tengah	26,71	2,47	9,26	21,86	31,56	0,94	800	
Kalimantan Selatan	31,43	1,83	5,81	27,85	35,01	1,01	1 054	
Kalimantan Timur	11,35	1,98	17,41	7,48	15,23	1,55	530	
Kalimantan Utara	11,51	2,06	17,89	7,47	15,55	0,33	237	
Sulawesi Utara	31,27	1,65	5,29	28,03	34,52	0,74	1 728	
Sulawesi Tengah	33,76	1,99	5,89	29,87	37,66	0,87	911	
Sulawesi Selatan	47,89	1,33	2,78	45,28	50,50	1,38	3 227	
Sulawesi Tenggara	46,94	2,91	6,21	41,23	52,65	1,36	992	
Gorontalo	39,71	3,19	8,03	33,45	45,96	0,86	460	
Sulawesi Barat	57,19	3,40	5,94	50,53	63,85	0,94	476	
Maluku	33,69	2,16	6,42	29,45	37,93	0,56	917	
Maluku Utara	32,98	2,62	7,94	27,85	38,12	0,47	570	
Papua Barat	26,43	3,72	14,07	19,14	33,72	0,56	421	
Papua	32,98	3,15	9,56	26,80	39,16	0,83	497	
Indonesia	44,54	0,35	0,79	43,85	45,23	2,70	53 508	

Keterangan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel G.5 Sampling error Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal di Rumah Tangga Ekonomi Bawah menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Laki-laki + Perempuan di Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	36,61	1,43	3,91	33,81	39,42	1,31	3 331
Sumatera Utara	29,56	1,13	3,84	27,34	31,78	2,77	5 902
Sumatera Barat	25,05	1,17	4,68	22,75	27,35	1,57	4 015
Riau	20,20	1,55	7,69	17,15	23,24	2,24	1 790
Jambi	35,09	1,71	4,88	31,73	38,44	1,36	1 879
Sumatera Selatan	40,90	1,54	3,76	37,88	43,91	2,60	3 067
Bengkulu	35,82	1,91	5,32	32,08	39,56	0,91	1 495
Lampung	45,72	1,46	3,20	42,85	48,59	2,58	3 149
Kep Bangka Belitung	5,60	1,27	22,61	3,12	8,08	1,35	1 063
Kepulauan Riau	17,35	2,62	15,11	12,21	22,50	1,85	846
DKI Jakarta	5,06	0,87	17,28	3,35	6,78	5,03	1 618
Jawa Barat	41,61	0,99	2,39	39,67	43,56	7,27	7 950
Jawa Tengah	54,83	0,72	1,31	53,42	56,24	3,87	12 424
DI Yogyakarta	51,85	1,98	3,82	47,96	55,73	3,57	1 844
Jawa Timur	52,77	0,77	1,46	51,26	54,29	4,96	13 563
Banten	31,14	2,00	6,41	27,22	35,05	5,73	1 758
Bali	30,87	1,68	5,44	27,58	34,16	2,62	2 733
Nusa Tenggara Barat	50,89	2,12	4,18	46,72	55,05	3,13	1 798
Nusa Tenggara Timur	59,35	1,28	2,15	56,85	61,86	1,21	4 509
Kalimantan Barat	39,25	1,60	4,08	36,11	42,38	1,67	2 570
Kalimantan Tengah	24,52	2,04	8,31	20,53	28,52	1,40	1 617
Kalimantan Selatan	29,18	1,58	5,41	26,09	32,28	1,49	1 912
Kalimantan Timur	10,71	1,55	14,51	7,66	13,75	2,20	1 185
Kalimantan Utara	11,26	1,81	16,06	7,71	14,80	0,57	498
Sulawesi Utara	30,62	1,43	4,68	27,81	33,43	1,07	3 278
Sulawesi Tengah	35,77	1,82	5,09	32,20	39,33	1,42	1 859
Sulawesi Selatan	47,29	1,24	2,62	44,86	49,71	2,14	5 616
Sulawesi Tenggara	47,20	2,75	5,82	41,82	52,58	2,32	1 859
Gorontalo	39,51	2,86	7,24	33,90	45,12	1,30	855
Sulawesi Barat	56,45	2,77	4,90	51,02	61,87	1,17	907
Maluku	32,13	1,88	5,85	28,44	35,81	0,85	1 763
Maluku Utara	35,06	2,46	7,01	30,24	39,88	0,82	1 146
Papua Barat	25,88	3,07	11,88	19,85	31,91	0,85	868
Papua	32,51	2,52	7,75	27,57	37,45	1,27	1 215
Indonesia	43,18	0,31	0,73	42,57	43,80	4,09	101 882

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel H.1 Sampling error Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Beras Sejahtera (Rastra) menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017

Perkotaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	42,28	3,48	8,22	35,47	49,09	2,00	779
Sumatera Utara	26,85	1,78	6,63	23,36	30,34	3,34	2 094
Sumatera Barat	14,99	1,57	10,44	11,92	18,06	1,42	1 145
Riau	17,22	2,50	14,55	12,31	22,12	2,48	537
Jambi	19,07	2,61	13,67	13,96	24,19	1,38	433
Sumatera Selatan	31,54	2,74	8,69	26,17	36,91	2,99	752
Bengkulu	28,05	3,64	12,99	20,90	35,19	0,99	317
Lampung	36,37	3,13	8,60	30,24	42,50	2,85	634
Kep Bangka Belitung	18,56	2,55	13,73	13,56	23,55	0,98	466
Kepulauan Riau	13,89	2,58	18,60	8,83	18,95	1,56	463
DKI Jakarta	11,90	1,23	10,32	9,49	14,31	4,31	1 247
Jawa Barat	42,27	1,30	3,08	39,71	44,82	7,75	3 877
Jawa Tengah	41,47	1,24	3,00	39,03	43,90	5,08	4 671
DI Yogyakarta	33,17	2,46	7,43	28,34	38,00	3,41	823
Jawa Timur	31,02	1,19	3,84	28,69	33,36	6,08	5 069
Banten	29,26	3,06	10,46	23,26	35,26	8,71	896
Bali	10,92	1,50	13,78	7,97	13,87	2,15	1 000
Nusa Tenggara Barat	56,45	3,86	6,83	48,90	64,01	4,46	630
Nusa Tenggara Timur	17,94	3,34	18,62	11,39	24,49	2,33	468
Kalimantan Barat	13,69	1,88	13,74	10,00	17,38	1,43	637
Kalimantan Tengah	8,00	1,80	22,49	4,47	11,53	0,88	413
Kalimantan Selatan	15,28	2,00	13,09	11,36	19,21	1,57	621
Kalimantan Timur	10,79	1,62	14,99	7,62	13,96	1,46	568
Kalimantan Utara	14,22	3,83	26,96	6,70	21,73	1,13	188
Sulawesi Utara	25,19	2,13	8,44	21,02	29,36	1,09	959
Sulawesi Tengah	20,31	3,07	15,13	14,28	26,33	1,28	282
Sulawesi Selatan	14,02	1,34	9,56	11,40	16,65	1,64	1 258
Sulawesi Tenggara	20,05	3,77	18,81	12,65	27,44	1,78	351
Gorontalo	25,61	3,90	15,22	17,97	33,24	1,00	232
Sulawesi Barat	36,81	6,05	16,44	24,95	48,67	1,23	145
Maluku	12,24	2,40	19,59	7,54	16,94	1,04	432
Maluku Utara	15,10	3,26	21,57	8,72	21,49	0,66	207
Papua Barat	24,97	4,67	18,69	15,82	34,12	0,71	245
Papua	27,42	3,64	13,27	20,29	34,55	1,09	291
Indonesia	32,09	0,50	1,57	31,10	33,07	4,60	33 130

Keterangan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel H.2 Sampling error Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Beras Sejahtera (Rastra) menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017

Perdesaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	64,10	1,97	3,07	60,25	67,95	1,25	1 980
Sumatera Utara	48,14	1,64	3,40	44,93	51,35	1,58	2 616
Sumatera Barat	35,29	1,68	4,75	32,00	38,58	1,05	1 973
Riau	38,87	2,66	6,84	33,66	44,08	1,85	920
Jambi	29,08	2,17	7,48	24,81	33,34	1,04	1 025
Sumatera Selatan	40,66	1,82	4,48	37,09	44,23	1,47	1 605
Bengkulu	46,07	2,63	5,71	40,92	51,23	0,73	819
Lampung	56,78	1,92	3,39	53,01	60,55	2,17	1 807
Kep Bangka Belitung	33,29	3,36	10,11	26,69	39,88	0,65	361
Kepulauan Riau	39,78	6,05	15,21	27,92	51,64	1,00	209
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	65,46	1,51	2,31	62,50	68,43	3,94	2 403
Jawa Tengah	61,14	1,22	1,99	58,76	63,52	3,83	4 839
DI Yogyakarta	68,38	3,74	5,46	61,05	75,70	3,36	541
Jawa Timur	55,63	1,28	2,30	53,13	58,14	4,67	5 535
Banten	73,89	3,18	4,30	67,67	80,12	3,91	532
Bali	18,01	1,88	10,42	14,33	21,69	1,23	920
Nusa Tenggara Barat	57,24	3,51	6,14	50,36	64,13	3,14	799
Nusa Tenggara Timur	38,39	1,73	4,51	35,00	41,79	1,18	2 954
Kalimantan Barat	38,12	2,38	6,25	33,46	42,79	1,61	1 381
Kalimantan Tengah	33,06	3,22	9,74	26,75	39,37	1,29	886
Kalimantan Selatan	31,71	2,12	6,69	27,55	35,87	1,02	968
Kalimantan Timur	26,74	3,88	14,49	19,14	34,33	1,63	385
Kalimantan Utara	10,29	3,71	36,09	3,01	17,56	0,77	214
Sulawesi Utara	51,28	2,02	3,94	47,32	55,24	0,61	1 466
Sulawesi Tengah	52,19	2,26	4,33	47,76	56,61	0,98	1 172
Sulawesi Selatan	36,90	1,39	3,77	34,17	39,62	1,21	3 110
Sulawesi Tenggara	41,52	2,67	6,44	36,28	46,76	1,01	1 099
Gorontalo	59,69	3,47	5,81	52,89	66,49	0,73	428
Sulawesi Barat	51,19	3,37	6,58	44,59	57,80	0,87	568
Maluku	59,59	3,08	5,17	53,55	65,63	0,78	923
Maluku Utara	38,21	3,14	8,22	32,05	44,37	0,60	687
Papua Barat	53,04	4,64	8,75	43,95	62,14	0,61	436
Papua	56,06	4,02	7,17	48,18	63,93	1,17	690
Indonesia	53,11	0,47	0,88	52,20	54,03	3,48	46 251

Keterangan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel H.3 Sampling error Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Beras Sejahtera (Rastra) menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	58,15	1,73	2,97	54,76	61,53	1,52	2 759
Sumatera Utara	37,64	1,27	3,38	35,15	40,14	2,43	4 710
Sumatera Barat	27,66	1,25	4,52	25,21	30,10	1,29	3 118
Riau	30,52	1,94	6,34	26,73	34,32	2,17	1 457
Jambi	25,85	1,70	6,56	22,53	29,18	1,22	1 458
Sumatera Selatan	37,41	1,53	4,10	34,40	40,41	2,03	2 357
Bengkulu	40,97	2,15	5,26	36,75	45,19	0,86	1 136
Lampung	51,77	1,65	3,19	48,53	55,01	2,52	2 441
Kep Bangka Belitung	25,16	2,07	8,23	21,10	29,21	0,79	827
Kepulauan Riau	20,45	2,59	12,66	15,37	25,53	1,29	672
DKI Jakarta	11,90	1,23	10,32	9,49	14,31	3,61	1 247
Jawa Barat	50,04	1,01	2,01	48,06	52,01	5,72	6 280
Jawa Tengah	51,86	0,87	1,68	50,15	53,56	4,31	9 510
DI Yogyakarta	46,42	2,15	4,62	42,21	50,63	3,10	1 364
Jawa Timur	44,00	0,88	2,01	42,27	45,74	5,15	10 604
Banten	45,32	2,21	4,87	41,00	49,64	4,95	1 428
Bali	14,08	1,19	8,43	11,75	16,41	1,63	1 920
Nusa Tenggara Barat	56,89	2,60	4,56	51,80	61,98	3,77	1 429
Nusa Tenggara Timur	34,59	1,55	4,47	31,56	37,62	1,46	3 422
Kalimantan Barat	30,06	1,75	5,83	26,63	33,50	1,77	2 018
Kalimantan Tengah	24,70	2,34	9,49	20,11	29,30	1,49	1 299
Kalimantan Selatan	24,84	1,50	6,05	21,89	27,79	1,23	1 589
Kalimantan Timur	16,59	1,68	10,14	13,29	19,88	1,45	953
Kalimantan Utara	12,47	2,69	21,55	7,20	17,73	0,93	402
Sulawesi Utara	39,42	1,56	3,95	36,37	42,47	0,85	2 425
Sulawesi Tengah	44,55	1,90	4,25	40,84	48,27	1,11	1 454
Sulawesi Selatan	29,03	1,06	3,64	26,96	31,10	1,46	4 368
Sulawesi Tenggara	35,35	2,37	6,71	30,70	40,00	1,44	1 450
Gorontalo	46,97	2,70	5,74	41,68	52,25	0,82	660
Sulawesi Barat	48,04	2,98	6,21	42,19	53,88	1,06	713
Maluku	40,52	2,46	6,07	35,70	45,34	1,01	1 355
Maluku Utara	31,75	2,49	7,83	26,88	36,63	0,69	894
Papua Barat	42,51	3,38	7,96	35,88	49,14	0,64	681
Papua	44,93	2,78	6,18	39,49	50,37	1,10	981
Indonesia	42,63	0,34	0,81	41,96	43,31	3,85	79 381

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel I.1 Sampling error Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017

Perkotaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	25,85	2,35	9,10	21,24	30,45	1,16	779
Sumatera Utara	20,15	1,46	7,27	17,28	23,02	2,76	2 094
Sumatera Barat	24,09	1,87	7,78	20,41	27,76	1,42	1 145
Riau	18,63	2,21	11,85	14,30	22,96	1,81	537
Jambi	19,97	2,52	12,61	15,03	24,90	1,24	433
Sumatera Selatan	24,16	2,40	9,93	19,45	28,86	2,70	752
Bengkulu	22,12	2,93	13,25	16,37	27,86	0,75	317
Lampung	14,71	2,16	14,71	10,47	18,95	2,52	634
Kep Bangka Belitung	15,96	2,19	13,75	11,66	20,26	0,82	466
Kepulauan Riau	26,58	3,65	13,73	19,43	33,73	1,90	463
DKI Jakarta	22,77	1,95	8,55	18,96	26,59	6,45	1 247
Jawa Barat	18,25	0,85	4,64	16,59	19,91	5,37	3 877
Jawa Tengah	16,15	0,73	4,50	14,73	17,58	3,11	4 671
DI Yogyakarta	26,25	2,01	7,65	22,31	30,19	2,60	823
Jawa Timur	14,70	0,74	5,01	13,26	16,15	3,96	5 069
Banten	14,66	1,66	11,29	11,41	17,90	4,22	896
Bali	18,19	1,70	9,37	14,85	21,53	1,80	1 000
Nusa Tenggara Barat	17,40	2,26	13,01	12,96	21,84	2,63	630
Nusa Tenggara Timur	35,68	3,74	10,48	28,35	43,01	1,87	468
Kalimantan Barat	17,06	2,18	12,76	12,79	21,33	1,60	637
Kalimantan Tengah	30,36	3,17	10,44	24,15	36,57	0,95	413
Kalimantan Selatan	24,87	2,51	10,10	19,95	29,79	1,71	621
Kalimantan Timur	16,54	1,90	11,49	12,81	20,26	1,41	568
Kalimantan Utara	18,23	3,54	19,44	11,28	25,17	0,79	188
Sulawesi Utara	24,15	2,14	8,85	19,96	28,33	1,13	959
Sulawesi Tengah	38,29	4,32	11,29	29,82	46,76	1,73	282
Sulawesi Selatan	33,99	2,09	6,14	29,90	38,08	2,14	1 258
Sulawesi Tenggara	29,07	4,95	17,04	19,36	38,77	2,39	351
Gorontalo	27,70	3,86	13,94	20,13	35,27	0,94	232
Sulawesi Barat	26,82	5,21	19,44	16,60	37,04	1,08	145
Maluku	27,51	3,07	11,17	21,48	33,53	0,92	432
Maluku Utara	30,39	4,62	15,19	21,34	39,44	0,81	207
Papua Barat	29,33	4,97	16,93	19,60	39,06	0,73	245
Papua	29,08	3,50	12,03	22,22	35,94	0,97	291
Indonesia	18,83	0,34	1,83	18,15	19,50	3,08	33 130

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel I.2 Sampling error Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel	Perdesaan
				Batas Atas	Batas Bawah			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	9,14	0,86	9,41	7,45	10,82	0,66	1 980	
Sumatera Utara	9,73	0,87	8,92	8,03	11,43	1,26	2 616	
Sumatera Barat	6,63	0,67	10,16	5,31	7,95	0,62	1 973	
Riau	6,19	0,99	15,97	4,25	8,12	1,05	920	
Jambi	8,84	1,13	12,78	6,63	11,05	0,72	1 025	
Sumatera Selatan	4,68	0,65	13,83	3,41	5,95	1,00	1 605	
Bengkulu	5,54	0,89	16,00	3,80	7,28	0,40	819	
Lampung	4,80	0,70	14,59	3,43	6,17	1,54	1 807	
Kep Bangka Belitung	7,07	2,42	34,27	2,32	11,82	1,14	361	
Kepulauan Riau	12,72	3,62	28,49	5,62	19,83	0,77	209	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	6,67	0,68	10,23	5,33	8,01	2,91	2 403	
Jawa Tengah	6,51	0,45	6,92	5,63	7,39	2,05	4 839	
DI Yogyakarta	8,45	1,96	23,18	4,61	12,29	2,58	541	
Jawa Timur	4,51	0,37	8,21	3,78	5,24	2,25	5 535	
Banten	6,93	1,40	20,21	4,19	9,68	2,27	532	
Bali	9,90	1,57	15,91	6,81	12,98	1,43	920	
Nusa Tenggara Barat	2,94	0,61	20,61	1,75	4,13	0,80	799	
Nusa Tenggara Timur	6,63	0,57	8,58	5,51	7,74	0,49	2 954	
Kalimantan Barat	5,09	0,70	13,73	3,72	6,46	0,68	1 381	
Kalimantan Tengah	10,58	1,53	14,51	7,57	13,58	0,69	886	
Kalimantan Selatan	7,94	1,08	13,54	5,83	10,05	0,77	968	
Kalimantan Timur	7,09	1,99	28,10	3,19	11,00	1,28	385	
Kalimantan Utara	7,89	3,38	42,90	1,26	14,52	0,82	214	
Sulawesi Utara	10,53	1,01	9,57	8,55	12,50	0,40	1 466	
Sulawesi Tengah	7,03	0,88	12,51	5,31	8,75	0,57	1 172	
Sulawesi Selatan	9,18	0,73	7,91	7,76	10,60	0,92	3 110	
Sulawesi Tenggara	7,80	1,10	14,05	5,65	9,95	0,57	1 099	
Gorontalo	6,09	1,41	23,21	3,32	8,86	0,51	428	
Sulawesi Barat	6,40	1,23	19,19	3,99	8,80	0,48	568	
Maluku	8,17	1,31	16,01	5,60	10,73	0,45	923	
Maluku Utara	6,79	1,18	17,43	4,47	9,10	0,32	687	
Papua Barat	13,16	3,65	27,75	6,00	20,33	0,82	436	
Papua	5,89	1,09	18,58	3,74	8,03	0,38	690	
Indonesia	6,47	0,17	2,68	6,13	6,81	1,98	46 251	

Keterangan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel I.3 Sampling error Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2017

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	13,70	0,91	6,67	11,91	15,49	0,87	2 759
Sumatera Utara	14,87	0,85	5,75	13,19	16,54	2,03	4 710
Sumatera Barat	13,20	0,82	6,23	11,59	14,81	0,97	3 118
Riau	10,98	1,06	9,68	8,90	13,07	1,42	1 457
Jambi	12,43	1,11	8,93	10,25	14,60	0,92	1 458
Sumatera Selatan	11,63	0,98	8,39	9,72	13,54	1,87	2 357
Bengkulu	10,23	1,06	10,37	8,15	12,31	0,55	1 136
Lampung	7,23	0,76	10,47	5,75	8,71	1,97	2 441
Kep Bangka Belitung	11,98	1,63	13,58	8,79	15,16	0,87	827
Kepulauan Riau	23,07	2,91	12,61	17,37	28,77	1,49	672
DKI Jakarta	22,77	1,95	8,55	18,96	26,59	5,40	1 247
Jawa Barat	14,37	0,61	4,23	13,18	15,56	4,22	6 280
Jawa Tengah	11,06	0,42	3,79	10,24	11,88	2,53	9 510
DI Yogyakarta	19,55	1,46	7,45	16,70	22,41	2,26	1 364
Jawa Timur	9,33	0,40	4,33	8,53	10,12	3,14	10 604
Banten	11,88	1,16	9,76	9,61	14,15	3,23	1 428
Bali	14,49	1,17	8,06	12,20	16,78	1,54	1 920
Nusa Tenggara Barat	9,45	1,12	11,88	7,25	11,65	2,02	1 429
Nusa Tenggara Timur	12,03	0,91	7,53	10,25	13,80	1,07	3 422
Kalimantan Barat	9,04	0,88	9,75	7,31	10,77	1,15	2 018
Kalimantan Tengah	17,17	1,50	8,75	14,23	20,12	0,80	1 299
Kalimantan Selatan	15,02	1,23	8,17	12,61	17,42	1,20	1 589
Kalimantan Timur	13,10	1,42	10,87	10,31	15,90	1,26	953
Kalimantan Utara	13,62	2,48	18,18	8,77	18,48	0,74	402
Sulawesi Utara	16,72	1,13	6,78	14,50	18,94	0,77	2 425
Sulawesi Tengah	14,52	1,31	9,00	11,95	17,08	1,06	1 454
Sulawesi Selatan	17,71	0,94	5,29	15,88	19,55	1,62	4 368
Sulawesi Tenggara	13,91	1,50	10,77	10,97	16,85	1,10	1 450
Gorontalo	14,16	1,75	12,39	10,72	17,60	0,71	660
Sulawesi Barat	10,88	1,47	13,53	8,00	13,77	0,67	713
Maluku	15,96	1,48	9,30	13,05	18,87	0,66	1 355
Maluku Utara	13,38	1,58	11,78	10,29	16,47	0,51	894
Papua Barat	19,23	2,93	15,23	13,49	24,97	0,76	681
Papua	14,90	1,62	10,84	11,73	18,07	0,73	981
Indonesia	12,63	0,19	1,53	12,25	13,01	2,70	79 381

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel J.1 Sampling error Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
(1)							
Aceh	94,82	1,13	1,19	92,61	97,03	1,25	941
Sumatera Utara	64,93	1,76	2,71	61,48	68,39	3,60	2 647
Sumatera Barat	72,64	2,22	3,06	68,28	77,00	2,42	1 493
Riau	61,17	2,84	4,65	55,59	66,74	2,31	662
Jambi	60,73	3,92	6,45	53,06	68,41	2,53	548
Sumatera Selatan	92,85	1,99	2,15	88,94	96,76	6,72	971
Bengkulu	66,31	3,38	5,10	59,68	72,94	0,95	399
Lampung	66,40	3,51	5,29	59,52	73,29	4,95	830
Kep Bangka Belitung	73,47	2,69	3,65	68,20	78,73	1,06	590
Kepulauan Riau	59,43	3,66	6,16	52,26	66,60	1,91	594
DKI Jakarta	87,20	1,24	1,42	84,77	89,63	5,16	1 618
Jawa Barat	63,62	1,17	1,84	61,33	65,91	8,26	4 867
Jawa Tengah	70,07	0,96	1,37	68,19	71,94	4,51	6 023
DI Yogyakarta	80,15	2,12	2,65	75,99	84,32	4,70	1 096
Jawa Timur	60,74	1,12	1,85	58,53	62,94	6,15	6 395
Banten	57,44	2,56	4,46	52,42	62,46	6,24	1 109
Bali	56,96	2,37	4,16	52,32	61,61	3,02	1 427
Nusa Tenggara Barat	69,26	2,54	3,67	64,28	74,24	2,70	775
Nusa Tenggara Timur	60,37	4,17	6,91	52,20	68,54	2,93	610
Kalimantan Barat	47,48	3,03	6,39	41,54	53,43	2,26	835
Kalimantan Tengah	62,81	3,68	5,86	55,60	70,02	1,48	525
Kalimantan Selatan	73,04	2,49	3,40	68,17	77,92	1,93	752
Kalimantan Timur	70,63	2,55	3,61	65,63	75,63	2,06	698
Kalimantan Utara	80,38	3,72	4,62	73,09	87,66	0,98	230
Sulawesi Utara	70,54	2,04	2,89	66,54	74,55	1,18	1 275
Sulawesi Tengah	71,22	3,63	5,09	64,11	78,33	1,76	359
Sulawesi Selatan	81,81	1,45	1,77	78,97	84,65	2,01	1 595
Sulawesi Tenggara	57,84	4,67	8,07	48,69	66,98	2,45	452
Gorontalo	88,38	2,38	2,70	83,71	93,05	0,90	297
Sulawesi Barat	95,70	1,94	2,03	91,90	99,50	0,90	186
Maluku	57,43	3,46	6,03	50,64	64,22	1,19	553
Maluku Utara	61,48	4,30	6,99	53,06	69,91	0,74	254
Papua Barat	85,81	2,47	2,88	80,97	90,65	0,38	306
Papua	82,01	2,87	3,50	76,38	87,63	1,14	361
Indonesia	67,53	0,45	0,66	66,65	68,41	4,61	42 273

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel J.2 Sampling error Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Perdesaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	92,88	0,87	0,93	91,19	94,58	1,01	2 390
Sumatera Utara	45,54	1,49	3,26	42,63	48,46	1,67	3 255
Sumatera Barat	51,89	1,55	3,00	48,84	54,94	1,06	2 522
Riau	40,18	2,39	5,95	35,50	44,87	1,82	1 128
Jambi	40,96	2,05	5,00	36,95	44,98	1,04	1 331
Sumatera Selatan	98,84	0,30	0,30	98,25	99,43	1,12	2 096
Bengkulu	49,52	2,35	4,74	44,92	54,12	0,77	1 096
Lampung	47,10	1,66	3,52	43,85	50,35	2,04	2 319
Kep Bangka Belitung	60,85	3,70	6,08	53,60	68,10	0,98	473
Kepulauan Riau	58,31	5,69	9,75	47,16	69,45	1,04	252
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	51,16	1,47	2,88	48,27	54,05	4,38	3 083
Jawa Tengah	66,63	1,01	1,52	64,65	68,61	3,74	6 401
DI Yogyakarta	81,25	2,33	2,86	76,69	85,81	2,57	748
Jawa Timur	56,60	1,10	1,94	54,45	58,75	4,45	7 168
Banten	43,96	2,94	6,69	38,19	49,72	3,26	649
Bali	43,62	2,79	6,39	38,16	49,09	2,29	1 306
Nusa Tenggara Barat	48,98	2,36	4,82	44,36	53,61	1,81	1 023
Nusa Tenggara Timur	62,86	1,24	1,97	60,43	65,28	0,79	3 899
Kalimantan Barat	35,28	1,83	5,18	31,70	38,86	1,26	1 735
Kalimantan Tengah	55,37	2,58	4,65	50,32	60,42	0,91	1 092
Kalimantan Selatan	57,59	2,44	4,24	52,80	62,37	1,45	1 160
Kalimantan Timur	55,46	4,71	8,48	46,24	64,68	2,35	487
Kalimantan Utara	78,21	4,52	5,78	69,34	87,08	0,78	268
Sulawesi Utara	59,82	1,93	3,23	56,03	63,61	0,79	2 003
Sulawesi Tengah	59,43	2,08	3,49	55,36	63,51	1,12	1 500
Sulawesi Selatan	66,16	1,36	2,05	63,50	68,82	1,56	4 021
Sulawesi Tenggara	59,57	2,16	3,62	55,34	63,80	0,86	1 407
Gorontalo	77,71	2,64	3,40	72,53	82,89	0,81	558
Sulawesi Barat	81,05	2,12	2,62	76,90	85,21	0,71	721
Maluku	50,68	3,28	6,46	44,26	57,10	1,13	1 210
Maluku Utara	57,69	3,37	5,84	51,08	64,29	0,88	892
Papua Barat	84,15	2,99	3,55	78,29	90,00	0,61	562
Papua	90,39	2,15	2,38	86,18	94,60	1,18	854
Indonesia	59,01	0,41	0,69	58,21	59,81	3,51	59 609

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel J.3 Sampling error Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Laki-laki

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	94,71	0,76	0,81	93,22	96,20	0,80	1 479
Sumatera Utara	57,44	1,44	2,50	54,63	60,26	1,73	2 526
Sumatera Barat	59,63	1,59	2,66	56,52	62,75	1,02	1 744
Riau	50,73	2,24	4,42	46,33	55,12	1,53	887
Jambi	46,97	2,12	4,51	42,82	51,12	0,96	907
Sumatera Selatan	96,91	0,84	0,87	95,26	98,56	3,05	1 469
Bengkulu	54,03	2,31	4,27	49,51	58,55	0,62	735
Lampung	52,03	1,71	3,28	48,68	55,37	1,77	1 606
Kep Bangka Belitung	68,45	2,55	3,72	63,45	73,44	0,66	522
Kepulauan Riau	64,58	3,82	5,91	57,10	72,06	1,23	422
DKI Jakarta	87,06	1,49	1,72	84,13	89,99	3,03	802
Jawa Barat	59,15	1,07	1,80	57,06	61,25	4,10	3 947
Jawa Tengah	68,24	0,82	1,20	66,63	69,85	2,69	5 911
DI Yogyakarta	80,77	1,86	2,30	77,12	84,41	2,30	847
Jawa Timur	58,76	0,90	1,53	57,00	60,53	3,21	6 299
Banten	54,67	2,40	4,39	49,97	59,37	3,55	879
Bali	54,14	1,88	3,47	50,46	57,82	1,33	1 297
Nusa Tenggara Barat	60,37	2,15	3,56	56,16	64,59	1,58	874
Nusa Tenggara Timur	63,63	1,53	2,40	60,63	66,63	0,86	2 157
Kalimantan Barat	40,71	1,86	4,58	37,06	44,37	1,12	1 306
Kalimantan Tengah	59,09	2,48	4,20	54,23	63,96	0,83	817
Kalimantan Selatan	65,05	2,09	3,22	60,95	69,15	1,12	858
Kalimantan Timur	64,03	2,67	4,17	58,79	69,27	1,46	655
Kalimantan Utara	79,10	3,68	4,66	71,88	86,32	0,77	261
Sulawesi Utara	64,76	1,71	2,64	61,41	68,12	0,68	1 550
Sulawesi Tengah	62,93	2,13	3,38	58,76	67,10	0,96	948
Sulawesi Selatan	72,00	1,25	1,74	69,55	74,46	1,19	2 389
Sulawesi Tenggara	60,48	2,31	3,82	55,96	65,00	0,81	867
Gorontalo	81,57	2,25	2,76	77,16	85,98	0,59	395
Sulawesi Barat	85,96	1,79	2,08	82,46	89,46	0,46	431
Maluku	54,43	2,74	5,04	49,06	59,81	0,77	846
Maluku Utara	57,27	3,06	5,34	51,27	63,26	0,60	576
Papua Barat	87,63	2,51	2,86	82,71	92,55	0,55	447
Papua	86,66	1,88	2,17	82,98	90,35	0,78	718
Indonesia	63,63	0,35	0,55	62,94	64,31	2,57	48 374

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel J.4 Sampling error Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Perempuan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	92,30	0,89	0,96	90,56	94,04	0,88	1 852
Sumatera Utara	53,30	1,38	2,59	50,60	56,01	1,85	3 376
Sumatera Barat	59,99	1,47	2,44	57,11	62,86	1,04	2 271
Riau	45,67	2,25	4,93	41,25	50,08	1,50	903
Jambi	47,39	2,13	4,51	43,21	51,58	0,95	972
Sumatera Selatan	96,51	0,80	0,83	94,94	98,08	2,57	1 598
Bengkulu	54,11	2,33	4,31	49,54	58,68	0,62	760
Lampung	51,92	1,78	3,44	48,42	55,42	1,87	1 543
Kep Bangka Belitung	66,90	2,65	3,97	61,70	72,10	0,71	541
Kepulauan Riau	53,68	4,40	8,19	45,06	62,29	1,48	424
DKI Jakarta	87,34	1,44	1,65	84,51	90,16	3,05	816
Jawa Barat	59,61	1,08	1,81	57,50	61,72	4,41	4 003
Jawa Tengah	68,25	0,77	1,13	66,74	69,76	2,69	6 513
DI Yogyakarta	80,41	1,78	2,21	76,92	83,90	2,47	997
Jawa Timur	58,38	0,87	1,49	56,67	60,09	3,47	7 264
Banten	50,44	2,23	4,43	46,06	54,81	3,08	879
Bali	48,39	2,05	4,24	44,37	52,42	1,77	1 436
Nusa Tenggara Barat	55,51	2,10	3,78	51,40	59,62	1,62	924
Nusa Tenggara Timur	61,26	1,46	2,39	58,39	64,13	0,85	2 352
Kalimantan Barat	37,99	1,81	4,78	34,43	41,54	1,08	1 264
Kalimantan Tengah	56,69	2,60	4,58	51,60	61,78	0,82	800
Kalimantan Selatan	63,17	2,03	3,22	59,19	67,16	1,16	1 054
Kalimantan Timur	66,42	3,44	5,18	59,68	73,16	2,11	530
Kalimantan Utara	79,74	3,31	4,15	73,26	86,22	0,53	237
Sulawesi Utara	64,53	1,59	2,46	61,41	67,64	0,64	1 728
Sulawesi Tengah	61,46	2,11	3,43	57,32	65,59	0,93	911
Sulawesi Selatan	71,19	1,16	1,63	68,91	73,47	1,28	3 227
Sulawesi Tenggara	57,74	2,50	4,33	52,84	62,64	1,02	992
Gorontalo	81,59	2,14	2,62	77,40	85,78	0,61	460
Sulawesi Barat	82,86	2,17	2,62	78,60	87,11	0,66	476
Maluku	52,29	2,73	5,21	46,95	57,64	0,80	917
Maluku Utara	60,11	3,09	5,14	54,05	66,16	0,61	570
Papua Barat	81,33	3,13	3,85	75,19	87,48	0,51	421
Papua	87,73	2,20	2,51	83,41	92,05	0,83	497
Indonesia	62,89	0,34	0,55	62,22	63,56	2,71	53 508

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



Tabel J.5 Sampling error Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2017

Laki-laki + Perempuan di Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	93,41	0,70	0,75	92,04	94,79	1,19	3 331
Sumatera Utara	55,19	1,20	2,17	52,84	57,54	2,59	5 902
Sumatera Barat	59,83	1,31	2,18	57,27	62,39	1,52	4 015
Riau	48,23	1,89	3,92	44,53	51,93	2,13	1 790
Jambi	47,18	1,88	3,98	43,50	50,86	1,49	1 879
Sumatera Selatan	96,71	0,77	0,79	95,20	98,21	4,91	3 067
Bengkulu	54,07	1,95	3,61	50,24	57,90	0,89	1 495
Lampung	51,98	1,53	2,95	48,97	54,98	2,82	3 149
Kep Bangka Belitung	67,67	2,25	3,33	63,25	72,08	1,03	1 063
Kepulauan Riau	59,15	3,09	5,23	53,09	65,22	1,53	846
DKI Jakarta	87,20	1,24	1,42	84,77	89,63	4,35	1 618
Jawa Barat	59,39	0,92	1,55	57,59	61,19	6,25	7 950
Jawa Tengah	68,24	0,70	1,03	66,87	69,62	4,19	12 424
DI Yogyakarta	80,57	1,59	1,97	77,46	83,68	3,65	1 844
Jawa Timur	58,56	0,79	1,34	57,02	60,09	5,27	13 563
Banten	52,54	1,96	3,72	48,70	56,37	4,73	1 758
Bali	51,09	1,81	3,53	47,55	54,63	2,59	2 733
Nusa Tenggara Barat	57,80	1,79	3,10	54,28	61,32	2,28	1 798
Nusa Tenggara Timur	62,38	1,28	2,05	59,87	64,90	1,26	4 509
Kalimantan Barat	39,35	1,59	4,04	36,24	42,46	1,64	2 570
Kalimantan Tengah	57,93	2,11	3,65	53,79	62,08	1,15	1 617
Kalimantan Selatan	64,06	1,76	2,75	60,61	67,50	1,66	1 912
Kalimantan Timur	65,13	2,46	3,78	60,30	69,96	2,32	1 185
Kalimantan Utara	79,39	2,90	3,65	73,71	85,07	0,89	498
Sulawesi Utara	64,64	1,42	2,19	61,86	67,41	0,97	3 278
Sulawesi Tengah	62,19	1,84	2,96	58,58	65,80	1,42	1 859
Sulawesi Selatan	71,55	1,05	1,47	69,49	73,61	1,89	5 616
Sulawesi Tenggara	59,05	2,07	3,51	54,99	63,11	1,36	1 859
Gorontalo	81,58	1,86	2,28	77,93	85,23	0,87	855
Sulawesi Barat	84,30	1,68	1,99	81,02	87,59	0,80	907
Maluku	53,33	2,44	4,57	48,55	58,10	1,25	1 763
Maluku Utara	58,67	2,74	4,66	53,31	64,04	0,95	1 146
Papua Barat	84,76	2,11	2,49	80,62	88,89	0,60	868
Papua	87,11	1,73	1,99	83,72	90,51	1,18	1 215
Indonesia	63,24	0,30	0,48	62,65	63,83	3,99	101 882

Sumber: BPS, Susenas Kor 2017



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://www.bps.go.id



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710
Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046
Homepage: <http://www.bps.go.id>, E-mail: bpshq@bps.go.id

ISSN 2086-1036



9 772086 103005 >